



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perencanaan

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas serta kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

Pasal 2

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. visi, misi, dan Program Wali Kota;
- b. tujuan, sasaran, dan strategi;
- c. arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah;
- d. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah; dan
- e. kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB II

BAB II PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. Bab IX : Penutup.

Pasal 4

RPJMD disusun sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2021-2026; dan
- b. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2021-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Evaluasi

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:
(2-97/2021)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 6

 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 9

 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 15

 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 19

 2.1 SEJARAH KOTA BINJAI 19

 2.2 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI 21

 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT 49

 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 78

 2.5 ASPEK DAYA SAING 128

 2.6 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 143

 2.7 TARGET CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 152

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 155

 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 155

 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 182

 3.3 KERANGKA PENDANAAN 186

 3.4 KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH 196

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH..... 198

 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 198

 4.2 TELAAH TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT LAINNYA 211

 4.3 ISU – ISU STRATEGIS 236

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 276

 5.1 VISI 276

 5.2 MISI 277

 5.3 TUJUAN 280

 5.4 SASARAN 280

 5.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2026 280

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... 286

 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 286

 6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 303

 6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA BINJAI 305

 6.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BINJAI 306

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 315

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 359

 8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 360

 8.2 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 364

BAB IX PENUTUP 388

 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN388

 9.2 KAIDAH TRANSISI 389

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel	2.1	Luas Wilayah Kota Binjai	23
Tabel	2.2	Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan di Kota Binjai	25
Tabel	2.3	Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai	41
Tabel	2.4	Kualitas Air Permukaan Kota Binjai	42
Tabel	2.5	Data Kependudukan Kota Binjai 2020	45
Tabel	2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Binjai Tahun 2020.....	46
Tabel	2.7	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota BinjaiTahun 2016-2020	48
Tabel	2.8	Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu dan jenis kelamin Tahun 2020	49
Tabel	2.9	Produk Dosmestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)	51
Tabel	2.10	Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2016-2020	52
Tabel	2.11	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	54
Tabel	2.12	Laju Pertumbuhan Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen)	55
Tabel	2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, Kota Binjai dan Kawasan pantai Timur	56
Tabel	2.14	Pendapatan Perkapita Kota Binjai Tahun 2016-2020	58
Tabel	2.15	Perbandingan Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Tahun 2016-2020	59
Tabel	2.16	Perbandingan Pendapatan Perkapita Harga Konstan Tahun 2016-2020	60
Tabel	2.17	Perbandingan Gini Ratio Kota Binjai Tahun 2016-2020	62
Tabel	2.18	Jumlah Perusahaan dan Nilai Investasi PMDN/PMA Kota Binjai	63
Tabel	2.19	Rasio Bangunan Ber-IMB Persatuan Bangunan (%) Kota Binjai Tahun 2016-2020	64
Tabel	2.20	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai Tahun 2016-2020	65
Tabel	2.21	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Binjai Tahun 2016-2020	66
Tabel	2.22	Banyaknya Perkara Kriminal Yang Terjadi dan Dilaporkan Pada Polres di Kota Binjai Tahun 2016-2020	67
Tabel	2.23	IPM Kawasan Pantai Timur, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	68
Tabel	2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Melek Huruf Kota Binjai Tahun 2016-2020	70
Tabel	2.25	Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020	71
Tabel	2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (ASPM) Tahun 2016-2020	71
Tabel	2.27	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Binjai Tahun 2016-2020	72
Tabel	2.28	Angka Kematian Bayi di Kota Binjai Tahun 2016-2020	73
Tabel	2.29	Angka Kematian Ibu di Kota Binjai Tahun 2016-2020	73
Tabel	2.30	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita di Kota Binjai Tahun 2016-2020	74
Table	2.31	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016-2020	74
Tabel	2.32	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2016-2020	75
Tabel	2.33	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020	76
Tabel	2.34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Binjai Tahun 2016-2020	77
Tabel	2.35	Aplikasi e-Government Kota Binjai Tahun 2016-2020	80
Tabel	2.36	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020..	82

Tabel	2.37	Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020	83
Tabel	2.38	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2017-2020	84
Tabel	2.39	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Binjai Tahun 2016-2020	84
Tabel	2.40	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kota Binjai 2016-2020	85
Tabel	2.41	Jumlah Dokter di Kota Binjai Tahun 2016-2020	86
Tabel	2.42	Jumlah Tenaga Medis di Kota Binjai Tahun 2016-2020	86
Table	2.43	Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Binjai Tahun 2016-2020	87
Tabel	2.44	Indikator Infrastruktur Kota Binjai Tahun 2016-2020	88
Tabel	2.45	Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai Tahun 2020	88
Tabel	2.46	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kota Binjai Tahun 2016-2020	89
Tabel	2.47	Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat Kota Binjai Tahun 2016-2020	89
Tabel	2.48	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	90
Tabel	2.49	Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Keterban Umum dan Perlindungan Masyarakat	91
Tabel	2.50	Realisasi Kinerja Urusan Sosial	93
Tabel	2.51	Realisasi Indikator Pada Urusan Tenaga Kerja	93
Tabel	2.52	Rasio KDRT Tahun 2016-2020 Kota Binjai	94
Tabel	2.53	Jumlah Desa Rawan Pangan Kota Binjai Tahun 2016-2020	95
Tabel	2.54	Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging) Di Kota Binjai Tahun 2016-2020	96
Tabel	2.55	Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016- 2020	98
Tabel	2.56	Rata-rata Timbulan Sampah dan Sampah Terangkat Tahun 2016- 2020 Kota Binjai	99
Tabel	2.57	Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016- 2020	100
Tabel	2.58	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Tahun 2016- 2020	101
Tabel	2.59	Rasio Akseptor KB di Kota Binjai Tahun 2016-2020	102
Tabel	2.60	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Binjai Tahun 2016-2020	102
Tabel	2.61	Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020	103
tabel	2.62	Kondisi Lalu Lintas Tahun 2016-2020	104
Tabel	2.63	Jaringan Komunikasi Kota Binjai Tahun 2018-2020	105
Tabel	2.64	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kota Binjai Tahun 2018-2020	105
Tabel	2.65	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kota Binjai Tahun 2018-2020	106
Tabel	2.66	Rasio Wartel/Warnet Per 1000 Penduduk Kota Binjai Tahun 2018- 2020	106
Tabel	2.67	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2017-2020.	107
Tabel	2.68	Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Kota Binjai Tahun 2016- 2020	109
Table	2.69	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Binjai Tahun 2016-2020	110
Table	2.70	Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Binjai Tahun 2016-2020	110
Tabel	2.71	Perkembangan Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Kota Binjai Tahun 2016-2020	110
Tabel	2.72	Perkembangan Olahraga Kota Binjai Tahun 2016-2020	111
Tabel	2.73	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) dan Lapangan Olahraga Tahun 2016-2020 Kota Binjai	111
Tabel	2.74	Realisasi Kinerja Urusan Statistik	112
Tabel	2.75	Realisasi Kinerja Urusan Persandian	113
Tabel	2.76	Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	113
Tabel	2.77	Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2016-2020	114
Tabel	2.78	Jumlah Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2016-2020	115
Tabel	2.79	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2016-2020	115

Tabel	2.80	Perkembangan Pengelolaan Arsip Secara Buku Kota Binjai Tahun 2016-2020	116
Table	2.81	Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Binjaitahun 20216-2020	116
Tabel	2.82	Produksi Perikanan Budidaya tahun 2016-2020	117
Tabel	2.83	Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2015-2019	118
Tabel	2.84	Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2020	118
Tabel	2.85	Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020	119
Tabel	2.86	Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	119
Tabel	2.87	Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	120
Tabel	2.88	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	121
Tabel	2.89	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan	122
Tabel	2.90	Realisasi Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	123
Tabel	2.91	Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan	124
Tabel	2.92	Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung	125
Tabel	2.93	Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum	127
Tabel	2.94	Indeks Perkembangan PDRB Kota Binjai ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	128
Tabel	2.95	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)	130
Tabel	2.96	Penegluran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	131
Tabel	2.97	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016-2020 Kota Binjai.....	131
Tabel	2.98	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016-2020 Kota Binjai	132
Tabel	2.99	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (melalui terminal) Tahun 20216-2020 Kota Binjai	132
Tabel	2.100	Jenis dan Jumlah Bank di Kota Binjai Tahun 2016-2020	134
Tabel	2.101	Jumlah Sumber Air Minum di Kota Binjai Tahun 2016-2020	135
Tabel	2.102	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telpon Kota Binjai	136
Tabel	2.103	Jumlah Warung Telekomunikasi/Warung Internet Kota Binjai	137
Tabel	2.104	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Tahun 2018 dan 2020 Kota Binjai ...	137
Tabel	2.105	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2019 dan 2020 Kota Binjai	139
Tabel	2.106	Jumlah Perda Yang Mendukung Ilkim Usaha	141
Tabel	2.107	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Pendidikan	144
Tabel	2.108	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Kesehatan	145
Tabel	2.109	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman	148
Tabel	2.110	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	149
Tabel	2.111	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah	149
Tabel	2.112	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	151
Tabel	2.113	Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Sosial	151
Tabel	2.114	Capaian TPB Kota Binjai	154
BAB III			
Tabel	3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	157
Tabel	3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	160
Tabel	3.3	Kontribusi Komponen PAD Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Persen)	161
Tabel	3.4	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	162

Tabel	3.5	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	163
Tabel	3.6	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	164
Tabel	3.7	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	165
Tabel	3.8	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	166
Tabel	3.9	Realisasi Proporsi Pendapatan Transfer Kota Binjai	166
Tabel	3.10	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	167
Tabel	3.11	Realisasi Proporsi Dana Perimbangan Kota Binjai	167
Tabel	3.12	Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	168
Tabel	3.13	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Kota Binjai Tahun 2016-220 (Rp. Milyar)	168
Tabel	3.14	Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	169
Tabel	3.15	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	170
Tabel	3.16	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yan Sah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	171
Tabel	3.17	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	172
Tabel	3.18	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	174
Tabel	3.19	Proporsi Jenisl Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Persen)	175
Tabel	3.20	Realisasi Jenis Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	175
Tabel	3.21	Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Operasi Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	176
Tabel	3.22	Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis Belanja Modal Kota Binjai tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	177
Tabel	3.23	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	178
Tabel	3.24	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	179
Tabel	3.25	Target dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	180
Tabel	3.26	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	181
Tabel	3.27	Target dan Realisasi Penyertaan Moda Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)	182
Tabel	3.28	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2022-2026 (Rp. Milyar)	186
Tabel	3.29	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2022-2026 (Rp. Milyar)	192
Tabel	3.30	Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Binjai Tahun 2022-2026 (Rp. Milyar)	194
Tabel	3.31	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Binjai Tahun 2022-2026 (Rp. Milyar)	196
Tabel	3.32	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Binjai Berdasarkan Prioritas Anggaran Tahun 2022-2026 (Rp. Juta)	197
BAB IV			
Tabel	4.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Di Kota Binjai	199
Tabel	4.2	Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RTRW	228

Tabel	4.3	Capaian TPB Kota Binjai	231
Tabel	4.4	Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar	233
Tabel	4.5	Jumlah TPB Kota Binjai	243
Tabel	4.6	Jumlah Indikator TPB Kota Binjai Berdasarkan Pilar	244
Tabel	4.7	Persentase Indikator TPB	245
Tabel	4.8	Jumlah dan Kondisi Indikator TPB Kota Binjai	246
Tabel	4.9	Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Binjai	274
 BAB V			
Tabel	5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026	282
 BAB VI			
Tabel	6.1	Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama	293
Tabel	6.2	Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua	295
Tabel	6.3	Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga	300
Tabel	6.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disertai PAGU Indikatif	308
 BAB VII			
Tabel	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026....	316
Tabel	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Binjai Tahun 2021-2026	317
 BAB VIII			
Tabel	8.1	Indikator Makro Kota Binjai Tahun 2021-2026	361
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Binjai tahun 2021-2026	362
Tabel	8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2021-2026	365

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar	1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kota Binjai	5
Gambar	1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional	10
Gambar	1.3	Tahapan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan	11
Gambar	1.4	Kerterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	12
Gambar	1.5	Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	13

BAB II

Gambar	2.1	Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai	22
Gambar	2.2	Peta Curah Hujan Kota Binjai	26
Gambar	2.3	Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai	40
Gambar	2.4	Peta Geologi Kota Binjai	43
gambar	2.5	Piramida Penduduk Kota Binjai Tahun 2020	47
Gambar	2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2016-2020	57
Gambar	2.7	Inflasi Kota Binjai, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	61
Gambar	2.8	Perbandingan IPM Kota Binjai Tahun 2016-2020	69
Gambar	2.9	Lama Sekolah Kota Binjai, Kota Medan dan Sumatera Utara Tahun 2016-2020	70

BAB III

Gambar	3.1	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Persen)	158
Gambar	3.2	Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah Kota Binjai Tahun 2016-2020 (persen)	159

BAB IV

Gambar	4.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19	240
--------	-----	---	-----

BAB VI

Gambar	6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Binjai	303
--------	-----	--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	1.1	Keselaran antara Tujuan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan Tujuan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025	Lamp. 1
Tabel	1.2	Keselaran antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025	Lamp. 2
Tabel	1.3	Keselaran antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025	Lamp. 3
Tabel	1.4	Keselaran antara tujuan pembangunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan tujuan penataan ruang RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040	Lamp. 4
Tabel	1.5	Keselaran antara program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan indikasi program utama RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040.....	Lamp. 5
Tabel	1.6	Keselaran antara program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan indikasi program utama RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040.....	Lamp. 6
Tabel	1.7	Matrik Penelaahan Integrasi KLHS Dalam RPJMD	Lamp. 7
Tabel	7.3	Dukungan Anggaran Dalam Rangka Sinergitas Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Lamp. 8
Tabel	8.4	Penyelarasan Target Indikator Makro Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	Lamp. 9
Tabel	8.5	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai Terhadap Program Prioritas Nasional	Lamp. 10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara bertahap dan terencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka setiap daerah menyusun dokumen perencanaan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah, mengintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta disusun secara berjangka meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan pembangunan jangka pendek daerah tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 260 dan 261 menyatakan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan diikuti oleh tiga (3) pasangan calon yaitu pasangan nomor urut satu (1) Rahmad Sorialam Harahap, SH, MH dan DR. H. Usman Jakfar, Lc, MA , pasangan nomor urut dua (2) Hj. Lisa Andriani Lubis, S.Psi dan H. Sapta Bangun, SE serta pasangan nomor urut tiga (3) H. Juliadi S.Pd, MM dan Drs. H. Amir Hamzah, M.AP.

Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 menetapkan pasangan calon Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai nomor urut tiga (3) H. Juliadi,

S.Pd, MM dan Drs. H. Amir Hamzah, M.AP sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 66.731 (enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara. Hal ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/ 1275/ Kota/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.

Menjelang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Binjai terpilih, Bapak H. Juliadi, S.Pd, MM menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa, 9 Februari 2021, setelah sebelumnya dirawat di RS. Bunda Thamrin Medan karena terpapar Covid-19.

Menyusul meninggalnya Bapak H. Juliadi, S.Pd, MM maka oleh KPU Kota Binjai menyatakan bahwa Wakil Walikota terpilih Bapak Drs. H. Amir Hamzah, M.AP akan dilantik sebagai Walikota Binjai. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pasal 173 ayat (1) tercantum, "Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota".

Pada tanggal 26 Februari 2020, Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi melantik Drs. H. Amir Hamzah, M.AP sebagai Wakil Walikota Binjai sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12.354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Februari 2021.

Dua bulan kemudian, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP dilantik kembali oleh Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi, sebagai Walikota Binjai sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12.1074 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 April 2021.

Dengan demikian, maka Pemerintah Kota Binjai berkewajiban untuk membuat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD merupakan pengejawantahan dari janji-janji politik yang tertuang dalam visi misi Kepala Daerah terpilih, karena visi misi tersebut didasarkan penjangkauan secara intensif dari aspirasi masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan, sebagai wujud penggambaran keinginan dan harapan masyarakat, maka penyusunan pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kemudian hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis yang harus diakomodir dalam RPJMD.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan posisi RPJMD dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025. RPJMD ini merupakan RPJMD Tahap keempat dengan penekanan dan prioritas pembangunan yaitu perwujudan pusat pelayanan jasa, perdagangan dan industri dengan dukungan infrastruktur bertaraf global, dengan jaringan pemasaran global, dengan dukungan jaringan bisnis internasional yang berwawasan lingkungan. Selain itu, RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040, Kondisi Lingkungan Strategis Daerah, Potensi daerah, Isu-isu Strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD disusun berdasarkan (lima) 5 pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up). Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi misi dan program pembangunan serta dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota DPRD Kota Binjai. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dan diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menghimpun aspirasi masyarakat seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan. Pendekatan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan sesuai jenjang Pemerintahan di Kota Binjai.

Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1-1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Binjai



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 ini berdasarkan peraturan perundang– undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

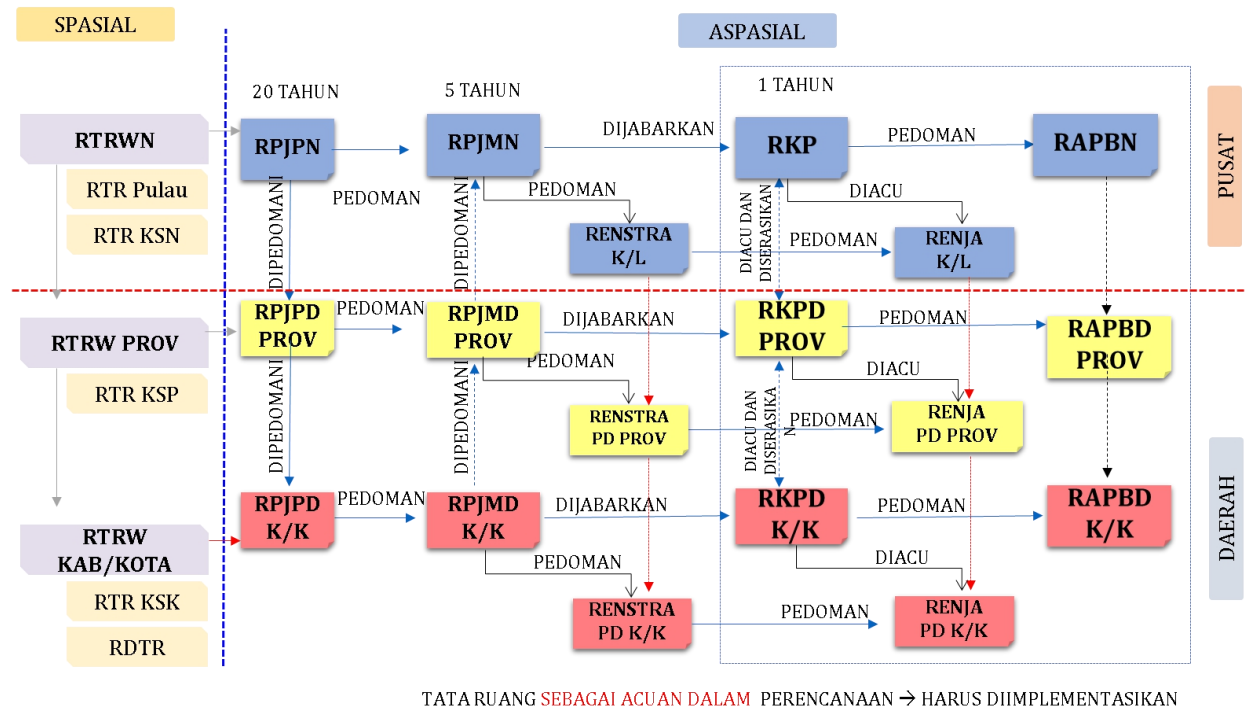
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan

nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2024, RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 agar RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1-2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RPJMN melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Selain itu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah Kota Binjai diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui prioritas pembangunan Kota Binjai.

2. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 telah mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui dukungan terhadap pembangunan SPAM mebidang yang merupakan salah satu kegiatan strategis (major project) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kota Binjai. Dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai ini, juga memperhatikan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.

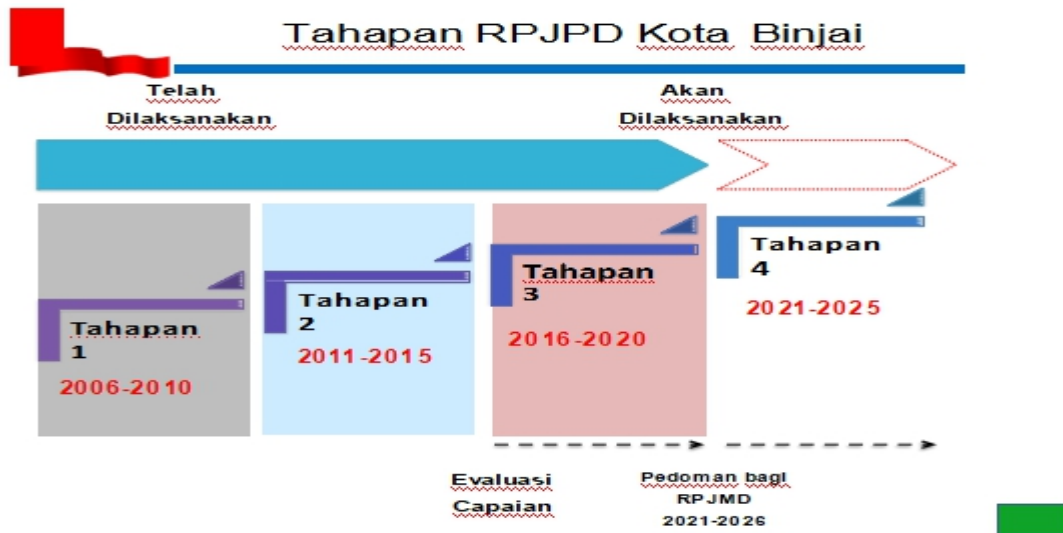
3. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan RPJPD Kota Binjai

RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai periode 2021- 2024.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah

harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1-3
Tahapan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan



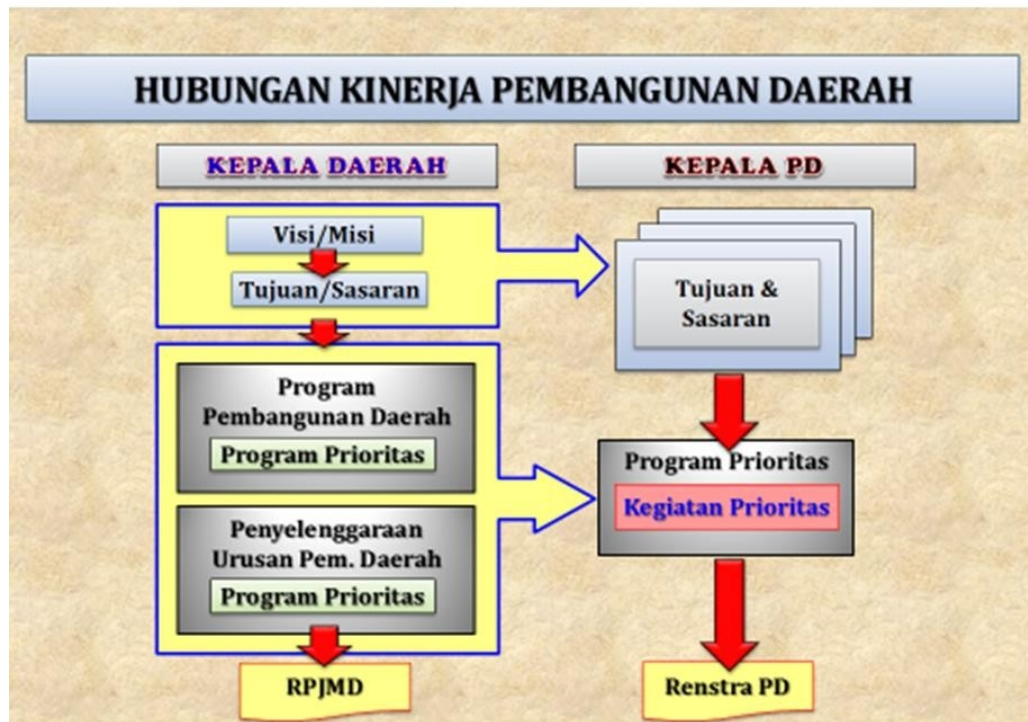
3. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai periode 2021- 2024.

Gambar 1-4

Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



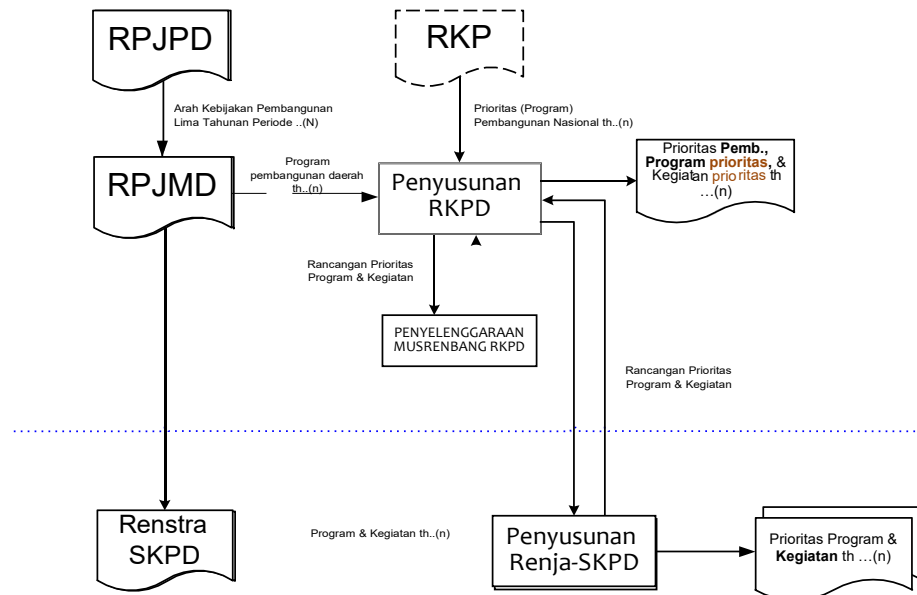
4. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Binjai yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Binjai yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Binjai, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional. RKPD harus berpedoman pada RPJMD, mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1-5

Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah



Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

5. Hubungan RPJMD Kota Binjai dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, yaitu:

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai;
- 4) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro);
- 5) Dokumen terkait lainnya (Dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Binjai berpedoman pada RTRW Kota Binjai yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020- 2040, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis dalam proses pembangunan Kota Binjai Lima Tahun Kedepan, yaitu bahwa :

- 1) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;

- 2) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- 3) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
- 4) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
- 5) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
- 6) RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi;

Untuk menjaga nilai-nilai strategis dan politis sebagaimana dimaksud diatas maka, Maksud dan Tujuan ditetapkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Binjai sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Binjai, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;

- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- 3) Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025;
- 4) Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.
- 5) Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Binjai periode 2021-2024.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD Kota Binjai 2021-2026 yang terdiri dari 9 (sembilan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Binjai.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Binjai secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah:

(1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Binjai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Binjai untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Binjai dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Sejarah Kota Binjai

Pada masa silam kota Binjai disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di sebelah timur dan Sungai Bingai di sebelah barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Berdasarkan penuturan para leluhur, baik yang dikisahkan atau yang diriwayatkan dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, kota Binjai itu berasal dari sebuah kampung yang kecil terletak di pinggir Sungai Bingai, kira-kira di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan Kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera caesia*) yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.

Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karo.

Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi, asal-muasal kata "Binjai" merupakan kata baku dari istilah "Binjéi" yang merupakan makna dari kata "ben" dan "i-jéi" yang dalam bahasa Karo artinya "bermalam di sini". Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo merupakan cikal-bakal kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah, bahwa pada masa dahulu kala, kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh "Perlanja Sira" yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari

dataran tinggi Karo dan menukarnya (barter) dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat.

Perjalanan yang ditempuh *Perlanja Sira* ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat dan tidak dapat ditempuh dalam waktu satu atau dua hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama, begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu pesisir Langkat, Para *perlanja sira* ini kembali bermalam di tempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan "Kuta Benjéi".

Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson ke pesisir Sumatra timur dan dalam catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama "*Ba Bingai*". Sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai (pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.

Selanjutnya pada tahun 1864, Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J. Nienkyis yang mendorong didirikannya Deli Maatschappij pada tahun 1866. Orang Belanda berusaha menguasai Tanah Deli menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini ditentang oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat, sementara Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) membuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.

Belanda merasa terhina atas tindakan ini dan memerintahkan kapten Koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda

dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana Binjai dijadikan *Gemeente* dengan luas 267 Ha.

Pada tahun 1942-1945 Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahan Kagujawa (dengan sebutan *Guserbu*) dan tahun 1944/1945 pemerintahan kota dipimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J. Runnanbi dengan anggota Dr. RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh.

Pada tahun 1945, (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bonger dan RM. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948-1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T. Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama SS Parumuhan.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di propinsi Sumatra Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km² dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.140-1395 /SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan.

2.2. Aspek Geografis dan Demografi

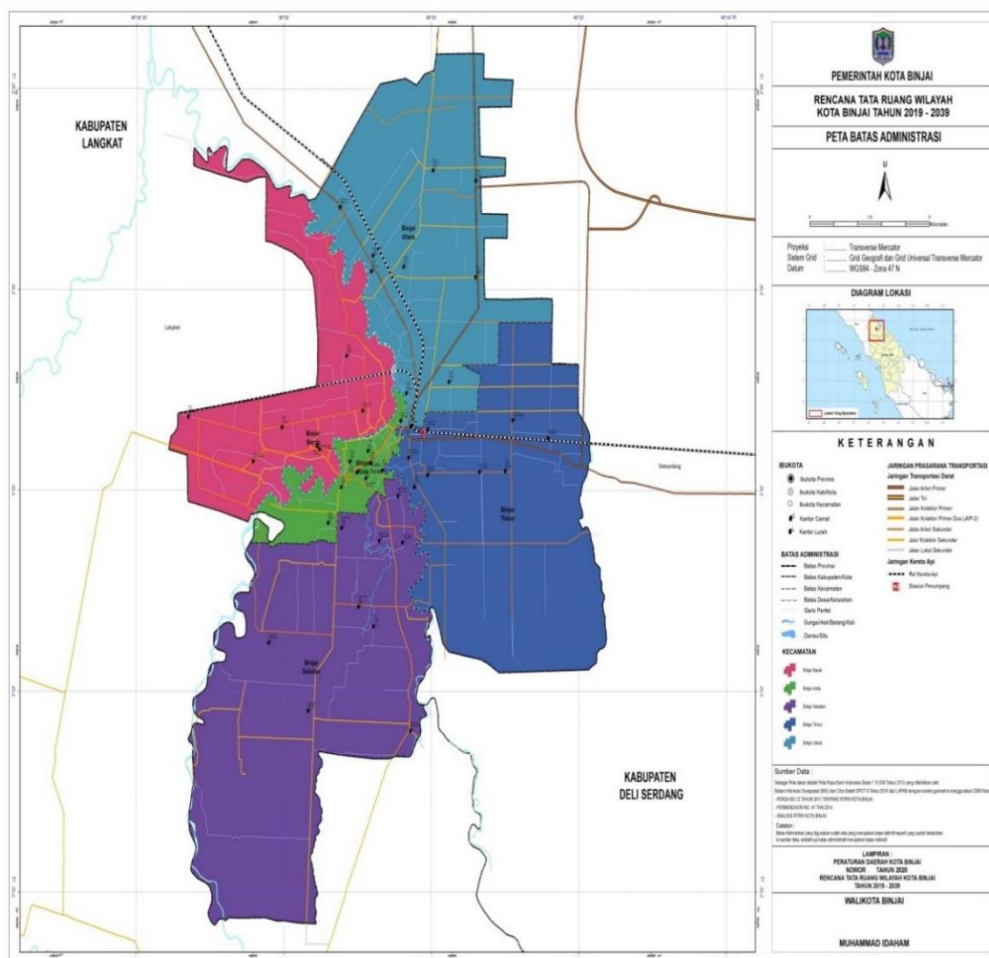
Kota Binjai dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Kecil di Lingkungan Pemerintah

Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Kota Binjai merupakan kota yang terdekat dengan ibukota provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan dan diapit oleh dua kabupaten besar yaitu Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.

2.2.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Binjai adalah salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 28 meter diatas permukaan laut, terletak sekitar 20 km dari ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,23 km².

Gambar 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kota Binjai



Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

Secara administratif, wilayah Kota Binjai memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

Kota Binjai terdiri dari 37 kelurahan dan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat . Secara administrasi termasuk ke dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berjarak sekitar 22 km dari Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Binjai Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Binjai dengan luas mencapai 29,96 km² atau sekitar 33,20 % dari total luas Kota Binjai sedangkan Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah terkecil di Kota Binjai dengan luas hanya sebesar 4,12 km² atau sekitar 4,57 % dari total luas Kota Binjai. Kecamatan Binjai Utara merupakan wilayah di Kota Binjai yang memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan wilayah lain di Kota Binjai yaitu sebanyak 9 kelurahan sedangkan Kecamatan Binjai Barat merupakan wilayah di Kota Binjai dengan jumlah kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 6 kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Binjai

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
Binjai Selatan	Binjai Estate	8	29,96	33,20
Binjai Kota	Kartini	7	4,12	4,57
Binjai Timur	Timbang Langkat	7	21,70	24,05
Binjai Utara	Kebun Lada	9	23,59	26,14
Binjai Barat	Limau Mungkur	6	10,86	12,04
Jumlah		37	90,23	100,00

Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021

Gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah Kota Binjai digambarkan dalam bentuk gambaran fisik wilayah, terutama yang terjadi secara ilmiah dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, seperti; letak geografis, batas administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, geologi, dan pola penggunaan tanah. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Binjai terletak diantara koordinat $3^{\circ} 21' 40'' - 3^{\circ} 40' 2''$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 27' 3'' - 98^{\circ} 32' 32''$ Bujur Timur.

b. Posisi Geostrategik

Kota Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidangro yang meliputi kawasan Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang serta Kabupaten Karo. Kota Binjai terletak 22 km di sebelah barat Kota Medan yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang terhubung oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Medan di provinsi Sumatera Utara dengan Kota Banda Aceh di provinsi Aceh. Oleh karena itu, Kota Binjai terletak di daerah strategis dimana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Binjai juga terhubung dengan jaringan jalan Tol Trans Sumatera yang akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan barang dan orang antar kota maupun provinsi di pulau Sumatera.

c. Kondisi Kawasan

Kondisi geografis wilayah Kota Binjai yang berada di kawasan dataran rendah merupakan potensi utama untuk bisa mengembangkan kondisi kawasan. Dimana Kecamatan Binjai Selatan dan Kecamatan Binjai Utara merupakan wilayah yang memiliki lahan di atas 2.000 Ha yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi wilayah Kota Binjai. Selain itu, Kota Binjai memiliki akses yang sangat luas baik terhubung melalui jaringan jalan raya lintas sumatera maupun jaringan jalan tol trans sumatera.

2.2.2 Topografi Wilayah

a. Kemiringan Lahan

Karakteristik fisik dasar Kota Binjai pada umumnya berada pada topografi yang datar yang memanjang dari bagian utara Kota Binjai sampai bagian wilayah selatan Kota Binjai dengan bentang alam yang tidak berbukit, hanya sebagian kecil saja daerah wilayah Kota Binjai yang memiliki bentang alam yang berbukit yaitu di wilayah bagian selatan. Sehingga secara umum kawasan Kota Binjai merupakan wilayah dengan kemiringan yang relatif landai dengan tingkat kelerengan 0,8% atau datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Secara keseluruhan lahan yang ada di wilayah perencanaan termasuk dalam kategori tingkat kemudahan pemanfaatan tinggi.

b. Ketinggian Lahan

Kota Binjai secara keseluruhan berada di ketinggian berkisar antara 3 sampai 76,5 mdpl. Sehingga secara umum daerah Kota Binjai adalah kawasan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 28 mdpl.

2.2.3 Klimatologi

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim.

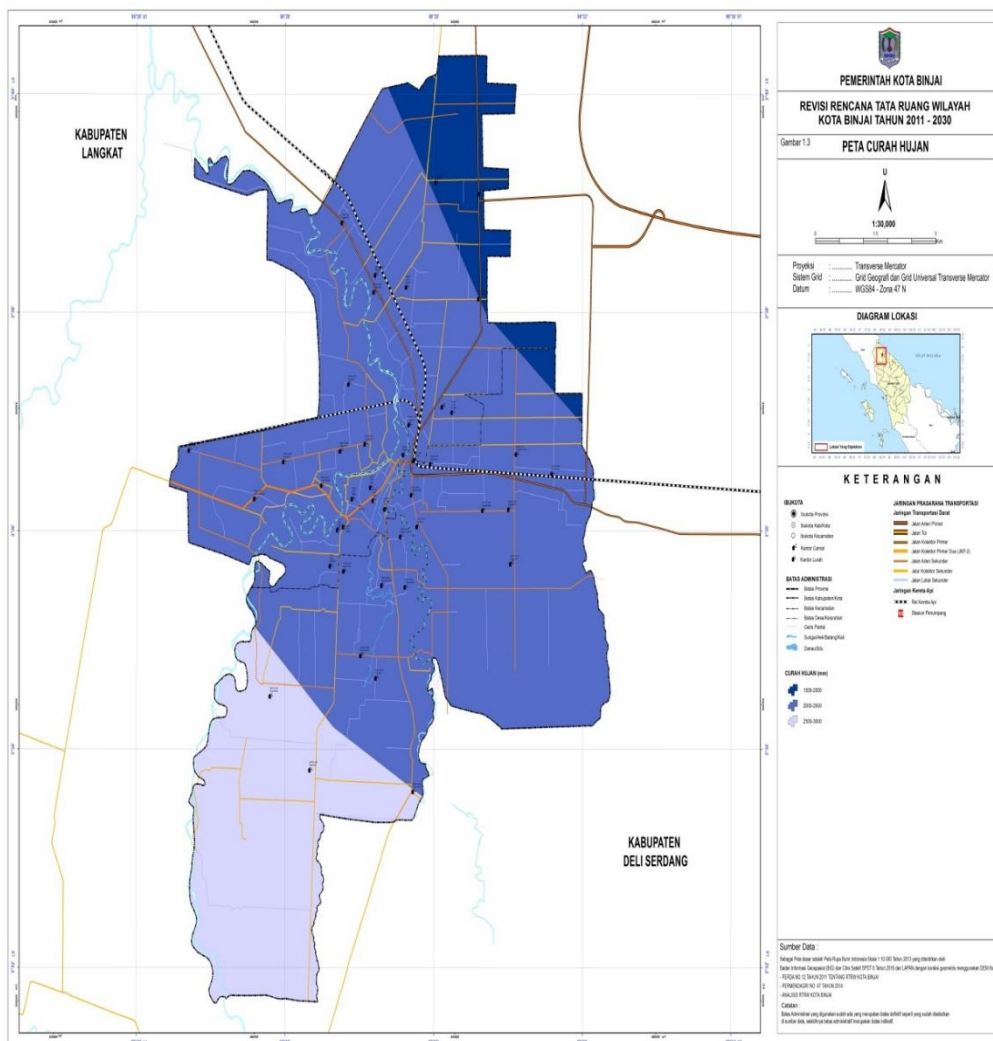
Tabel 2.2
Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Binjai

Kecamatan	Rata-rata Tahun 2020	
	Hari Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm3)
Binjai Selatan	14,00	297,75
Binjai Kota	8,75	191,42
Binjai Timur	12,42	201,00
Binjai Utara	11,67	208,33
Binjai Barat	11,50	219,08
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021		

Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 297,75 mm3 dengan rata-rata hari hujan selama 14 hari dan Kecamatan Binjai Barat sebesar 219,08 mm3 dengan rata-rata hari hujan selama 11,5 hari.

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, pada Tahun 2020 curah hujan terbesar terjadi pada bulan September yaitu sebesar 510,5 mm3 dan curah hujan terkecil pada bulan Januari sebesar 72 mm3. Kota Binjai memiliki hari hujan yang cukup merata setiap bulannya kecuali bulan Juni dan Nopember dengan hari hujan yang cukup tinggi yaitu 20 hari hujan, sedangkan puncak kemarau adalah pada bulan Januari dengan hanya memiliki 4 hari hujan.

Gambar 2.2
Peta Curah Hujan Kota Binjai



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

2.2.4 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Binjai walaupun sudah berupa wilayah perkotaan masih didominasi oleh guna lahan non terbangun sebesar 6.691,14 Ha atau 72,70% dari seluruh wilayah Kota Binjai dibandingkan lahan terbangun hanya sebesar 27,30% atau 2.513,07 Ha. Lahan non terbangun, terutama kebun/perkebunan seluas kurang lebih 4.487 Ha atau 48,75%, sawah 1.388,93 Ha atau 15,09% dan Ladang 609 atau 6,62%. Rencana pola ruang pada dasarnya merupakan penetapan lokasi serta besaran ruang untuk mewadahi berbagai jenis kegiatan fungsional perkotaan. Pola ruang wilayah Kota Binjai terdiri dari:

1) Kawasan Lindung

Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Binjai secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Rencana pola ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Binjai terdiri dari:

a) Kawasan Perlindungan Setempat

Bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman segar, indah dan bersih. Rencana kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Binjai meliputi **sempadan sungai** yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

b) Kawasan Cagar Budaya

Merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Binjai. Berdasarkan kriteria tersebut bangunan, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Binjai mencakup :

- Kawasan Pusat Kota Bersejarah;
- Stasiun Kereta Api Kota Binjai;
- Kantor Walikota Binjai;
- Gedung Kesenian Kota Binjai;
- Mesjid Raya Kota Binjai;
- Kelenteng Setia Budha, dan
- Kawasan rumah-rumah tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Kapten Muslim.

Rencana pengelolaan bangunan bersejarah direkomendasikan untuk tetap memfungsikan kondisi Akhir bangunan tersebut. Namun perlu ditetapkan peraturan bangunan untuk tidak merubah kondisi arsitektur bangunan dan untuk selalu melakukan pemeliharaan agar kondisi bangunan tidak rusak.

c) Ruang Terbuka Hijau

Adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Kawasan ruang terbuka hijau selain berfungsi sebagai paru-paru kota, berfungsi sebagai salah satu unsur pembentuk struktur tata ruang kota dan dalam pola ruang merupakan kawasan yang dapat berfungsi menunjang fungsi lindung. Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau yang diarahkan pengembangannya di Kota Binjai terdiri dari:

- RTH Hutan Kota;
- RTH Taman Kota;
- RTH Taman Lingkungan;
- RTH Sempadan Jalur Kerata Api;
- RTH Sempadan Jalur Saluran Energi Listrik;
- RTH Jalur Hijau Jalan;
- RTH Pemakaman.

2) Kawasan Peruntukan Budidaya

Pola ruang kawasan budidaya perkotaan penetapannya didasarkan pada kriteria yang meliputi aspek daya dukung atau kesesuaian lahan yang dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan fungsional perkotaan, serta aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan budidaya di Wilayah Kota Binjai pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan peruntukan budidaya yang akan dikembangkan di Kota Binjai meliputi:

a) Kawasan Pertanian

Pengembangan pertanian perkotaan Kota Binjai ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan pasar produk dan hasil produk pertanian kota, pengembangan kontribusi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, penyaring polusi air dan tanah, dan berkelanjutan iklim mikro Kota Binjai yang sejuk dan nyaman. Kawasan pertanian perkotaan di wilayah Kota Binjai ditetapkan pada lahan-lahan pertanian yang beririgasi, meliputi :

- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Selatan meliputi Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Pujidadi dan Kelurahan Bhakti Karya seluas kurang lebih 614 Ha;
- Daerah irigasi pada Kecamatan Binjai Timur meliputi Kelurahan Sumber Mulyo Rejo seluas kurang lebih 36 Ha.

b) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Pertambangan di wilayah Kota Binjai meliputi:

- Kawasan Depo LPG Pertamina Tandem di Kecamatan Binjai Utara, Kelurahan Jati Utomo;
- Kawasan Pengeboran Gas di Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Cengkeh Turi;
- Kawasan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Jati Karya.

Peningkatan Pengembangan kawasan minyak dan gas bumi, berupa:

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana terhadap bencana kecelakaan ledakan dan kebakaran di Depo LPG, Gardu Induk listrik dan Kawasan Pengeboran gas;
- Pengendalian kegiatan pada radius 50 meter dari batas Depo LPG, Gardu Induk Listrik maupun pengeboran gas sebagai batas daerah rawan kecelakaan ledakan dan kebakaran sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan Prasarana dan Ruang Terbuka Hijau pada Bagian Pinggir Kawasan.

c) Kawasan Peruntukan Industri

Merupakan Kawasan yang diperuntukkan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kawasan Peruntukan Industri memiliki fungsi antara lain:

- Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
- Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah yang bersangkutan;
- Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Rencana Kawasan Peruntukan industri yang akan dikembangkan di Kota Binjai diperuntukkan bagi:

- Industri besar dan menengah dikembangkan pada Kawasan Industri Binjai (KIB) yang berada di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tungkurono pada lahan seluas 132 hektar;
- Industri kecil dan rumah tangga berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat

berlokasi di Kawasan peruntukan industri ini, kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk klaster;

- Pergudangan regional baik kebutuhan distribusi dan koleksi bahan baku atau produksi industri maupun kebutuhan transportasi barang regional bagi Kota Binjai berada pada kawasan peruntukan industri.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Kota Binjai meliputi:

- Industri-industri besar dan menengah yang telah memiliki izin dan beroperasi di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai selatan, dan Kecamatan Binjai Barat tidak boleh melakukan pengembangan kapasitas produksi, penambahan volume produksi dan perluasan lahan, dan secara bertahap diarahkan pada kawasan industri di kecamatan Binjai Timur;
- Industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan relokasi ke Kawasan Industri Binjai dan berdekatan dengan Kawasan permukiman dan kawasan wisata di Kecamatan Binjai Selatan dengan mempertimbangkan pengurangan dampaknya terhadap lingkungan;
- Pengendalian pembangunan kegiatan industri pada kawasan industri di luar kawasan industri Binjai dengan Peraturan zonasi;
- Pengembangan ruang terbuka hijau di pinggiran kawasan industri Binjai sebagai kawasan penyangga;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Kawasan industri mendukung operasional pergerakan barang dan penumpang yang lancar serta mendukung meminimalisasi pencemaran lingkungan (suara, udara, air dan tanah).

d) Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi yang direncanakan mencakup obyek wisata dan rekreasi, serta sarana pariwisata dan rekreasi. Obyek wisata dan rekreasi yang dikembangkan meliputi wisata bangunan bersejarah, wisata belanja dan kuliner, dan wisata alam dan argowisata. Kawasan pariwisata di Kota Binjai berupa :

- Kawasan Pariwisata Alam ditetapkan pada :
 - ✓ Kawasan pariwisata Pantai SB seluas kurang lebih 10,18 Ha di Kecamatan Binjai Selatan Kelurahan Tanah Merah;
 - ✓ Kawasan wisata pertanian (Botanical Garden) seluas kurang lebih 86,21 Ha di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Tanah Merah berupa lahan pertanian dan kebun rambutan binjai yang dapat difungsikan sebagai RTH, wisata penelitian, pengembangan pertanian;
 - ✓ Sungai Bingai yang membelah Kota Binjai berpotensi dikembangkan menjadi wisata air dan *river front*.
- Kawasan Pariwisata Buatan meliputi :
 - ✓ Pengembangan dan penataan sky cross dan pasar kaget sebagai daerah tujuan wisata kuliner di Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Kawasan TOD;
 - ✓ Wisata Tirta Great Wall dan Tirta Rairim;
 - ✓ Wisata buatan taman kota lapangan merdeka;
 - ✓ Wisata kuliner malam di Jl. A. Yani Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Gedung Olahraga (GOR) di Kecamatan Binjai Selatan;
 - ✓ Taman Titi Kembar di Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Taman Balita di Kecamatan Binjai Kota.
- Kawasan Pariwisata Budaya mencakup :
 - ✓ Kompleks bersejarah Stasiun Kereta Api Binjai;
 - ✓ Masjid Raya Kota Binjai Jl. Wahid Hasyim, Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Kelenteng Setia Budha Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Kantor Walikota dan Gedung Dewan Kesenian Kota Binjai Kecamatan Binjai Kota;
 - ✓ Bangunan-Bangunan tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan Hos. Cokrominoto;
 - ✓ Bangunan sejarah Gedung Pengadilan Agama Kota Binjai di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kartini;

- ✓ Bangunan-Bangunan bersejarah sebagai hunian penduduk yang tersebar di berbagai lokasi Kota Binjai.
- e) Kawasan Permukiman dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial-budaya. Adapun perhitungan kebutuhan lahan perumahan untuk Kota Binjai adalah untuk jangka 20 tahun. Sebagai dasar perhitungan untuk perencanaan perumahan di Kota Binjai, luas kavling perumahan dibagi berdasarkan proporsi 1 : 2 : 3 dengan luas masing-masing 500 m² : 300 m² : 150 m² untuk kavling rumah besar, sedang dan kecil. Diasumsikan setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK. Berdasarkan hasil analisis dapat diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai 2038 untuk Kota Binjai adalah 2.008, 23 Ha yang terdiri dari 583 Ha Kavling rumah kecil (38.869 unit), 777 Ha Kavling rumah sedang (25.913 unit), serta 648 Ha kavling rumah besar (12.956 unit). Fasilitas perumahan tersebut menyebar diseluruh Kecamatan dan Kota dengan memanfaatkan kawasan budidaya permukiman yang ada.
- f) Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Didefinisikan sebagai ruang yang didominasi kawasan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Penetapan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Binjai didasarkan pada fungsi dan skala pelayanan sebagaimana Kota Binjai merupakan salah satu pusat pelayanan regional dan pelayanan kota pada kawasan metropolitan Mebidangro.
- Arahan pengembangan pola ruang untuk kegiatan perdagangan dan Jasa di Kota Binjai secara umum adalah sebagai berikut:
- Kawasan perdagangan dan jasa untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Binjai dialokasikan di SPK Pusat Kota dan Kawasan TOD, serta dikoridor jalan-jalan utama kota;
 - Kawasan pusat kondisi eksisting merupakan kawasan perdagangan dan Jasa Kota Binjai dan merupakan pusat perkembangan Kota Binjai selama ini dan

terintegrasi dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan TOD;

- Kawasan perdagangan dan jasa skala kota (sekunder) maupun skala kecamatan dikembangkan pada masing SPPK dan koridor jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional dikembangkan pada koridor jalan arteri primer dan kolektor primer Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ahmad Yani, Jl. Gatot Subroto, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jalan kolektor primer baru terusan Simpang Megawati ke arah selatan, serta SPPK Binjai Timur dan Binjai Utara;
- Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan menurut kebutuhan di pusat-pusat kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/perumahan yang terpadu dengan pengembangan pasar-pasar tradisional;
- Perdagangan informal dialokasikan di pusat-pusat perdagangan pada kawasan perdagangan skala kota dan SPK di pusat-pusat perdagangan kecamatan secara terencana dan terintegrasi dengan lokasi perdagangan sektor formal, yang ditata dengan mempertimbangkan aspek keteraturan, ketertiban, estetika lingkungan, kenyamanan, dan keamanan bagi pergerakan lalu lintas dengan mengedepankan norma-norma pemanfaatan ruang publik secara rasional dan adil.

g) Kawasan Perkantoran

Merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya untuk menyediakan lahan menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pemerintah dan/atau swasta. Perkantoran swasta diarahkan di pusat Kota,

Kecamatan Binjai Kota berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota, kawasan TOD, serta kawasan peruntukan industri berupa kegiatan perkantoran pendukung kegiatan industri.

h) Kawasan Pendidikan

Terdiri dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Untuk rencana peruntukan kawasan pendidikan SD, SMP dan SMA dialokasikan sesuai kebutuhan pada setiap SPK. Untuk kawasan pendidikan setingkat perguruan tinggi perlu dilakukan pengaturan terkait dengan cara sebagai berikut:

- Membatasi lokasi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal yang ada di wilayah pusat Kota Binjai;
- Membatasi pengembangan perguruan tinggi di wilayah pusat Kota Binjai pada lokasi-lokasi yang telah berkembang dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parker yang memadai;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Timur yang juga untuk menarik arah perkembangan kota ke luar dari pusat kota;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan tinggi dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.

i) Kawasan Kesehatan

Rencana fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan praktik dokter. Rencana fasilitas kesehatan untuk rumah sakit selain mempertahankan pada lokasi yang ada adalah perlu dikembangkannya rumah sakit di seluruh SPK (kecuali di pusat kota), Hal ini disebabkan karena sebarannya yang terkonsentrasi di wilayah Binjai Kota. Oleh sebab itu rencana pengembangan fasilitas kesehatan adalah:

- Mengarahkan pengembangan fasilitas kesehatan di Wilayah Binjai Timur, Binjai Utara, Binjai Barat dan Binjai Selatan;

- Mempertahankan dan meningkatkan prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan yang ada agar tingkat pelayanan setiap jenis fasilitas kesehatan dapat lebih optimal. Sarana dan Prasarana pendukung disini diantaranya adalah sekolah keperawatan yang lokasinya direncanakan berdekatan dengan rumah sakit dan prasarana pengolahan limbahnya perlu mendapat perhatian khusus karena sifat limbahnya yang sangat berbahaya bagi penduduk kota.
- Mewujudkan keseimbangan penyebaran prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan.

j) Kawasan RTNH Kota

Bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan, komersial, rekreasi dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Defini dari RTNH adalah “Ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori” (Permen PU No. 12/PRT/M/2009). Penyediaan RTNH di Kota Binjai diatur sebagai berikut:

- RTNH Pekarangan
Penyediaan RTNH pekarangan dilakukan pada masing-masing pekarangan (lahan di luar bangunan) baik untuk pekarangan permukiman ataupun non permukiman.
- RTNH Wilayah Kota, meliputi:
 - ✓ RTNH berupa alun-alun kawasan pemerintahan dan plaza Kawasan pusat pemerintahan baru;
 - ✓ RTNH plaza pada kawasan komersial TOD;
 - ✓ RTNH berupa plaza bangunan ibadah;
 - ✓ RTNH berupa plaza monumen;
 - ✓ RTNH lapangan GOR;

- ✓ RTNH ruang plasa tempat ibadah (masjid, gereja, klenteng, dan vihara),
dan
- ✓ RTNH tempat wisata.

k) Kawasan Evakuasi Bencana

Merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan evakuasi bencana agar memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan letusan gunung api. Kawasan ruang evakuasi bencana diarahkan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang memiliki kriteria:

- Ruangan-ruangan yang bersifat publik seperti lapangan-lapangan terbuka, kawasan parkir, tegalan ataupun area pertanian kering;
- Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus diselamatkan;
- Tidak terletak pada daerah permukiman padat ataupun kawasan terbangun yang padat;
- Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel/mudah dicapai dari semua arah dengan berlari/berjalan kaki;
- Tidak terletak pada daerah yang diperkirakan memiliki ketentuan terhadap bahaya lebih lanjut;
- Diperkirakan setiap orang akan membutuhkan ruang minimum 2 m², sehingga daya tampung ruang penyelamatan dapat dihitung; dan
- Lokasi untuk evakuasi bencana dapat dikembangkan sebagai multi layer space, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik (baik berupa ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau).

Kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Binjai meliputi:

- Lapangan Merdeka Kecamatan Binjai Kota;

- Stadion Olahraga Kota Binjai dan Lapangan-lapangan olahraga pada SPK dan PL;
- RTH Taman Kecamatan di setiap SPK;
- RTH Kawasan Wisata Botanical Garden di Kecamatan Binjai Selatan;
- Jalan-jalan utama pada jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Samanhudi dan Jalan Soekarno Hatta.

Kawasan Daerah Rawan Bencana Kota Binjai adalah sepanjang perlintasan sungai yang ada di Kota Binjai yakni Sungai Bingai, Mencirim dan Bangkatan.

l) Kawasan Sektor Informal

Rencana pengaturan pedagang sektor informal dilakukan melalui:

- Penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang publik;
- Mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal. Pola pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
 - ✓ Pengaturan kegiatan golongan usaha skala kecil/informal merupakan kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang berada pada peruntukan tanah bangunan umum dalam bentuk pusat perdagangan/pusat perbelanjaan, plaza yang luas lantai bangunannya lebih besar dari 5.000 meter persegi tidak termasuk lantai untuk parkir;
 - ✓ Kewajiban tersebut besarnya minimal 10% dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajibannya tersebut ini tidak dapat dialihkan atau diganti dalam bentuk apapun;
 - ✓ Penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola pihak swasta yang menyediakan ruang untuk kegiatan golongan usaha kecil/informal mendapat insentif dalam bentuk pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban.
 - ✓ Penataan kegiatan golongan usaha skala kecil direncanakan sebagai berikut:

- Besaran ruang untuk golongan usaha skala kecil/informal ditetapkan dalam izin pemanfaatan lahan;
- Penyediaan ruang tersebut ditetapkan dalam gambar arsitektur bangunan skala 1 : 200 yang merupakan lampiran perizinan.
- ✓ Persyaratan dan tata cara penempatan golongan usaha skala kecil/informal diatur sebagai berikut:
 - Usaha kecil/informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut;
 - Penempatan dan pengelolaan terhadap penempatan usaha bagi usaha kecil/informal diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Jenis barang dagangan harus saling melengkapi dengan jenis perdagangan utamanya;
 - Mengendalikan penempatan sektor informal di ruas jalan arteri primer dan arteri sekunder.
- Pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dengan komoditas yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat membentuk image ruang melalui pengembangan kegiatan yang spesifik, dengan demikian maka pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 fungsi yang berbeda dengan pengaturan waktu yang berbeda (*multi layer space*).
- Penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.

m) Kawasan Pertahanan dan keamanan

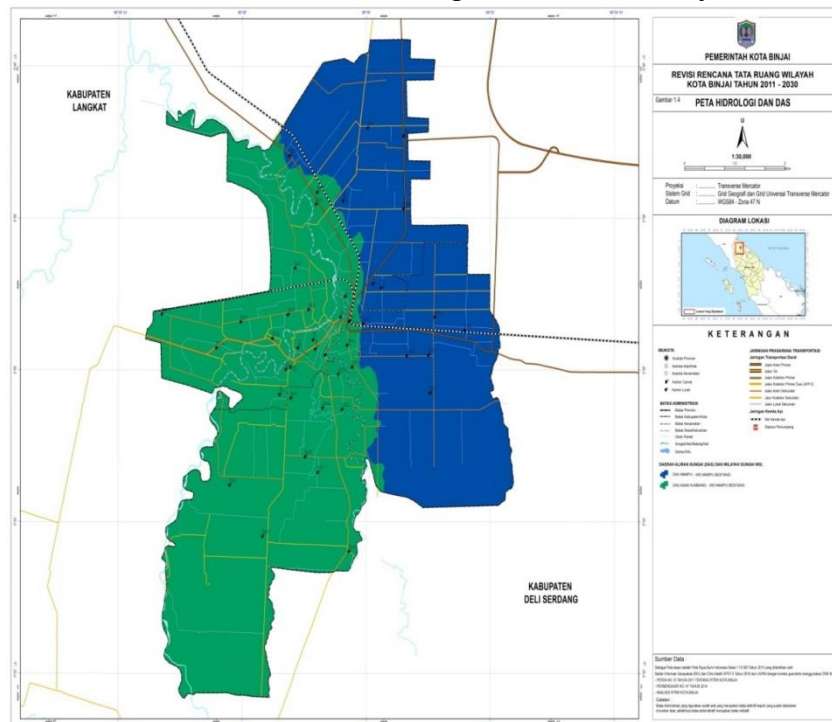
Rencana kawasan pertahanan perlu dipikirkan untuk direncanakan dengan:

- Mempertahankan Markas Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 11/Wira Bhuna Yudha di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tanah Tinggi;
- Mempertahankan kawasan pertahanan brimob di Binjai Timur dan menterpadukan pengembangan dengan rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Binjai Timur Kelurahan Tungkurono;
- Penyebaran lokasi Kantor Polisi Sektor (polsek) diarahkan pada setiap SPK dan pos-pos polisi ditempatkan di jalan-jalan utama kota;
- Merelokasi asset-asset militer yang ada di pusat kota seperti asrama polisi dekat kantor DPRD dan beberapa kantor militer ke pinggir Kota.

2.2.5 Hidrologi

Kota Binjai memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS wampu dan sebagian kecil wilayah daerah timur termasuk kedalam DAS belawan. Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan.

Gambar 2.3 Peta Hidrologi dan DAS Kota Binjai



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari Sungai Bingai yang keduanya bertemu di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Untuk Tahun 2021 Sungai Bingai telah dapat beroperasi sebagai sumber air minum dengan SPAM Regional Mebidang.

Total Luas Daerah Aliran Sungai yang berpengaruh terhadap Kota Binjai khususnya Binjai Kota dan Binjai Utara 422 km². Hal ini dapat dijadikan pertimbangan atas kejadian banjir yang sering terjadi di Kota Binjai.

Tabel 2.3
Kuantitas Air Permukaan Kota Binjai

Sungai	Panjang (km)	Luas (km ²)	Area	Debit Maks (di ambil pada musim penghujan)
S. Bingai	15	150	Binjai Utara	0,7 m ³ /det
S. Mencirim	15	150	Binjai Utara	0,3 - 0,5 m ³ /det
S. Bangkatan	9	45	Binjai Selatan	0,1 - 0,3 m ³ /det
Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030				

Dari hasil monitor Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yang dilakukan setiap setahun sekali kualitas air sungai dapat dilihat dari empat parameter penting berikut:

- DO : untuk sungai Bingai hulu dan sungai mencirim memiliki DO dibawah 3 sehingga peruntukannya masuk kedalam kelas IV. Kualitas DO yang masih memenuhi untuk kelas I adalah Sungai Mencirim;
- BOD untuk ketiga sungai sudah melebihi baku mutu karena diatas 12 mg/l yang merupakan standar untuk kelas IV;
- Kadar Phospat sangat tinggi untuk ketiga sungai karena diatas baku mutu 5 mg/l yang merupakan standart untuk kelas IV;
- Kadar Fe cukup tinggi untuk kelas I tetapi masih memenuhi untuk pengolahan air baku air minum secara konvensional dimana baku mutu berada di bawah 5 mg/l.

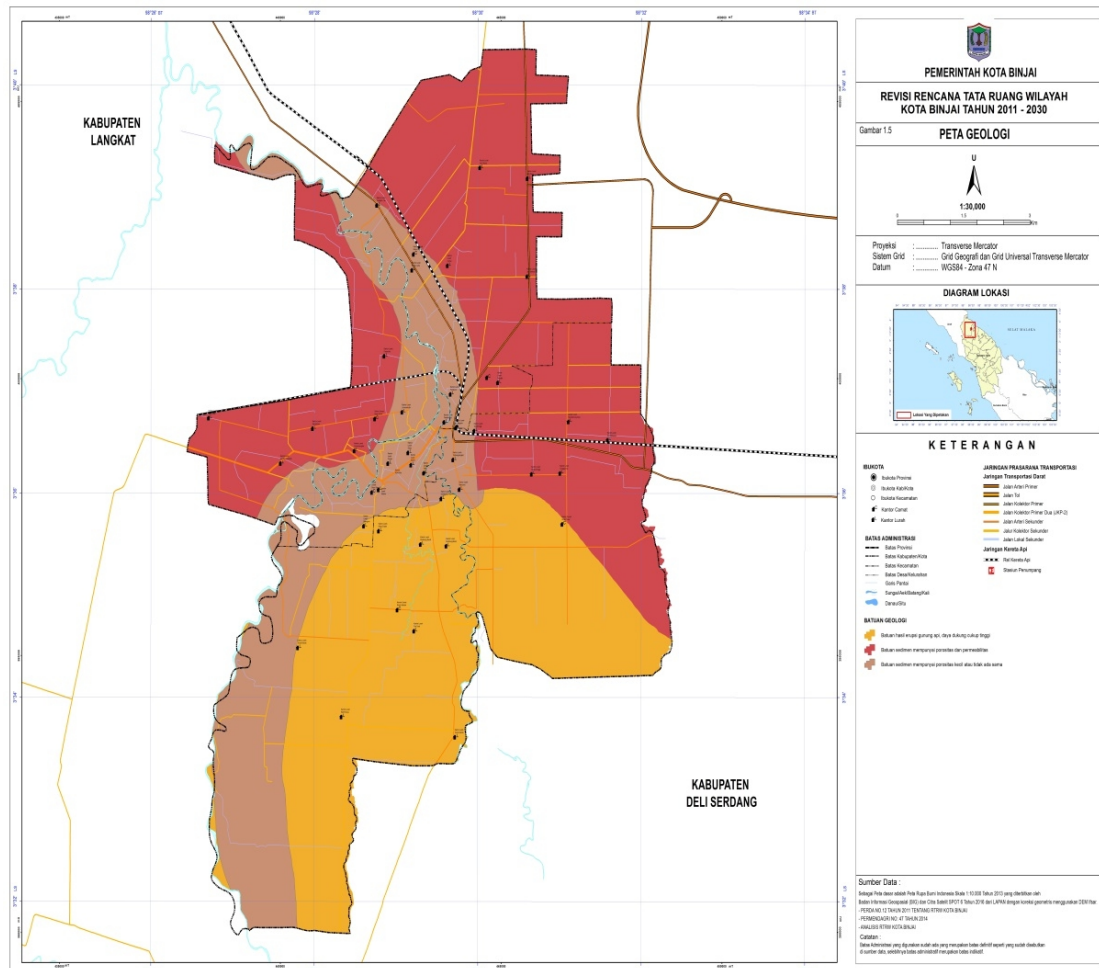
Tabel 2.4
Kualitas Air Permukaan Kota Binjai

Parameter	S. Bingai	S. Mencirim	S. Bangkatan
Warna	Jernih	Coklat	Jernih
Bau	Tak berbau	Tidak berbau	Tak berbau
Temperatur (°C)	26.4 – 28.3	28.9 – 29	28.6 – 30.4
Ph	7 – 7.54	7.24 – 7.3	6.96 – 7.11
DHL (Umhos/cm)	0.30 – 256	256	157 – 256
TDS (mg/l)	56 – 227	227	140 – 227
TSS (mg/l)	9 – 7.5	9	3 – 9
DO (mg/l)	2.1 – 4.5	2.1	7.4
BOD (mg/l)	16 – 17.0	17.5	7.5
COD (mg/l)	28	31	12
NO ₂ (mg/l)	0.06 – 0.08	0.013	0.05 – 0.15
NO ₃ (mg/l)	2.8 – 3.24	0.04 – 0.06	3.15 – 3.24
NH ₃ (mg/l)	0.17 – 10.2	0.17	0.03 – 0.15
PO ₄ (mg/l)	8.8 – 10.6	17 – 21.6	11.6 – 15.9
Minyak (ug/l)	0.1 - 0.6	0.5	0.2 – 0.5
Lemak (ug/l)	0.6 – 1.10	0.5	0.2 – 0.5
Fe (mg/l)	0.51 – 0.67	1 – 1.36	1.36
Mn (mg/l)	0.001 – 0.003	0.002 – 0.003	0.04
Klorin Bebas	0.09 – 0.12	n.a.	0.3 – 0.45
Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030			

2.2.6. Geologi

Secara geologis, Wilayah Kota Binjai memiliki struktur dan satuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik. Kondisi geologi di Kota Binjai terdiri dari batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi, batuan sedimen mempunyai porositas dan permeabilitas, dan batuan sedimen mempunyai porositas kecil atau tidak ada sama. Kondisi geologi di Kota Binjai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Binjai



Sumber: RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

Berdasarkan data yang diperoleh, maka secara garis besar jenis tanah dapat dibedakan ke dalam dua jenis tanah yaitu Andosol dan Aluvial. Kedua jenis tanah ini menyebar secara merata di wilayah Kota Binjai. Untuk tanah yang berjenis terdapat di Kecamatan Binjai Kota dengan luas 297 Ha, Binjai Selatan dengan luas 2949 Ha, Binjai Timur dengan luas 585 Ha dan Binjai Barat dengan proporsi luas 7 Ha. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak

(smeary), kadang-kadang berpadas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembaban tinggi, permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi.

Sedangkan untuk jenis tanah Aluvial terdapat di Kecamatan Binjai Selatan dengan proporsi luas sebesar 47 Ha, Kecamatan Binjai Kota dengan luas 438 Ha, Kecamatan Binjai Timur dengan luas 1.798 Ha, Kecamatan Binjai Barat seluas 1.407 Ha, dan Kecamatan Binjai Utara sebesar 2.234 Ha. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk Aluvium, tekstur beranekaragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, PH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi), sehingga baik untuk pengembangan pertanian karena tersedia cukup mineral yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan jika digunakan untuk bangunan tanah jenis ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus.

Struktur Geologi wilayah Kota Binjai terbagi kedalam 3 jenis batuan, jenis bantuan tersebut adalah Alluvium, Konglomerat dan Extrusive Intermediate Pyroclastic yang menyebar di seluruh wilayah Kota Binjai. Bentang alam Kota Binjai sendiri lebih berada pada bentang alam yang datar meskipun ada beberapa bagian Kota Binjai yang berada pada bentang perbukitan sehingga di dalam melakukan pembangunan tidak begitu terdapat kendala. Berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana alam geologi berupa gempa bumi maka wilayah Kota Binjai termasuk ke dalam skala daerah yang mempunyai tingkat kebesaran gempa berkisar antara IV hingga V (skala MMI), yaitu skala IV – V yang tersebar dibagian selatan Galang dan Medan, daerah Binjai hingga Pulau Tiga bagian barat laut Pulau Sumatera, dengan bahaya guncangan termasuk ke dalam zona D : 0,25–0,30 g yang tersebar pada bagian utara Danau Toba, Kabanjahe, Gunung Sinabung menerus kearah barat–barat laut Laubaleng, Mardinding, DK. Tusamserang, Selatan Bohorok, Buluh, Kutacane hingga Gunung Bandhara (MEBIDANG-Ro).

2.2.7 Kondisi Demografi

Gambaran mengenai kondisi demografi di Kota Binjai dapat dilihat dari ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

2.2.7.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2020 berjumlah 279.302 jiwa. Kecamatan Binjai Utara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Kota Binjai dengan jumlah penduduk berjumlah 80.486 jiwa (28,82 %), sedangkan Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil dibandingkan wilayah lainnya di Kota Binjai dengan jumlah penduduk berjumlah 27.645 jiwa (9,9 %).

Tabel 2.5
Data Kependudukan Kota Binjai 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Binjai Selatan	57.882	20,72	1.932	97,53
Binjai Kota	27.645	9,90	6.710	95,52
Binjai Timur	61.942	22,18	2.854	98,52
Binjai Utara	80.486	28,82	3.412	100,52
Binjai Barat	51.347	18,38	4.728	103,48
Kota Binjai	279.302	100,00	3.095	99,48

Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021

Kota Binjai memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 3.085 jiwa/km², dimana Kecamatan Binjai Kota merupakan wilayah terpadat dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6.710 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Binjai Selatan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 1.932 jiwa/km². Dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,48 maka ini menunjukkan di Kota Binjai terdapat

lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki, dimana dari 100 populasi penduduk berjenis kelamin perempuan hanya terdapat 99,48 penduduk berjenis kelamin laki-laki.

2.2.7.2. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

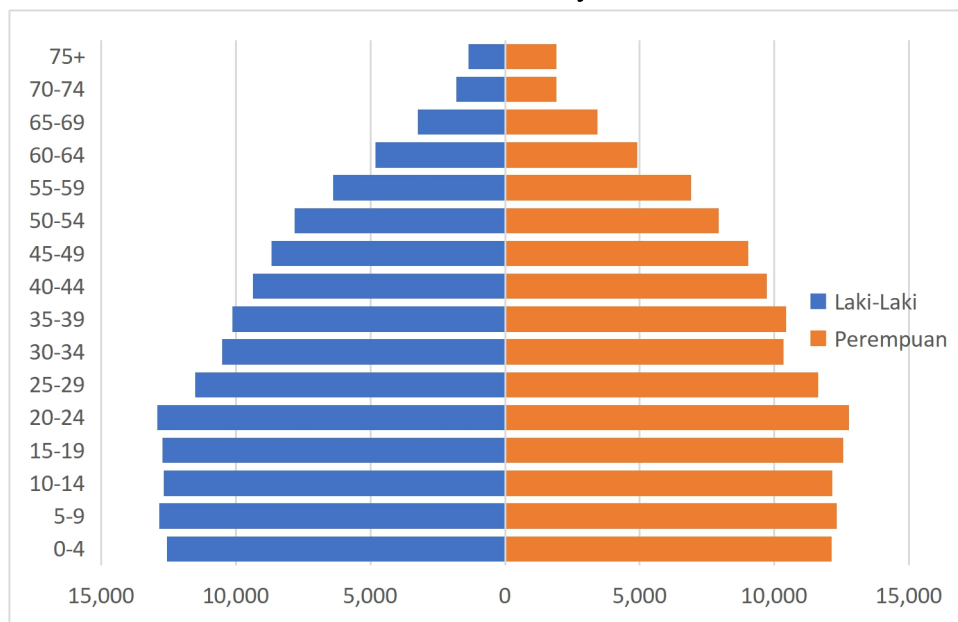
Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 279.302 jiwa, yang terdiri dari 139.284 Jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 140.018 jiwa penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan angka rasio jenis kelamin penduduk Kota Binjai pada tahun 2020 sebesar 99,48 maka dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Binjai Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-4	12.561	12.122	24.683
5-9	12.848	12.310	25.158
10-14	12.671	12.142	24.813
15-19	12.732	12.550	25.282
20-24	12.919	12.775	25.694
25-29	11.496	11.629	23.125
30-34	10.494	10.338	20.832
35-39	10.115	10.439	20.554
40-44	9.373	9.713	19.086
45-49	8.660	9.017	17.677
50-54	7.826	7.928	15.754
55-59	6.376	6.904	13.280
60-64	4.813	4.904	9.717
65-69	3.250	3.440	6.690
70-74	1.802	1.903	3.705
75+	1.348	1.904	3.252
Jumlah	139.284	140.018	279.302
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021			

Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15 tahun – 64 tahun) sebanyak 68,38%. Capaian ini belum melewati standar nasional, jika Kota Binjai ingin mendapatkan periode Bonus Demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana tingkat ketergantungan penduduk sangat rendah, masyarakat yang berada di tingkat usia produktif sangat tinggi yakni mencapai 70,0%. Pada situasi ini, suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Untuk itu, perlu disiapkan sarana dan prasarana produksi yang lebih baik agar generasi emas pada saat itu menjadi sangat produktif dan pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai menjadi sangat tinggi dan dapat memberikan kesejahteraan bagi wilayah Kota Binjai.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kota Binjai Tahun 2020



Sumber: Binjai Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Bila dilihat dari bentuknya, piramida penduduk Kota Binjai termasuk dalam kategori piramida penduduk ekspansif. Hal ini terlihat dari komposisi jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari kelompok usia tua.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kota Binjai
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
2016	267.901	61.518	4,35
2017	270.926	62.213	4,35
2018	273.892	62.894	4,35
2019	276.597	63.644	4,35
2020	279.302	64.677	4,35
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata anggota rumah tangga pada setiap tahunnya berkisar 4,35 anggota per rumah tangga, yang apabila dikaitkan dengan angkatan kerja atau yang bekerja pada setiap rumah tangga/anggota rumah tangga menanggung 3 anggota rumah tangga.

2.2.7.3 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2020 yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja adalah sebesar 139.445 jiwa yang terdiri dari 127.353 jiwa penduduk yang bekerja dan 12.092 jiwa penduduk yang merupakan pengangguran. Pada tahun 2020 di Kota Binjai terdapat 74.635 jiwa penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, dimana 19.039 jiwa diantaranya sedang sekolah kemudian 46.031 jiwa memilih untuk mengurus rumah tangga dan sisanya sebesar 9.565 jiwa penduduk melakukan kegiatan lain-lain yang tidak dikategorikan sebagai pekerjaan tetap.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai pada Tahun 2020 adalah 8,67% dengan rincian untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat pengangguran sebesar 8,84% dan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 8,38%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai adalah sebesar 65,14% dimana tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kota Binjai yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 82,26% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 48,25%.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu dan jenis kelamin Tahun 2020

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	87.430	52.015	139.445
Bekerja	79.698	47.655	127.353
Pengangguran	7.732	4.360	12.092
Bukan Angkatan Kerja	18.854	55.781	74.635
Sekolah	9.159	9.880	19.039
Mengurus Rumah Tangga	3.647	42.384	46.031
Lain-lain	6.048	3.517	9.565
Jumlah Usia Kerja	106.284	107.796	214.080
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82,26	48,25	65,14
Tingkat Pengangguran	8,84	8,38	8,67
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021			

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut

2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi daerah adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi daerah mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan daerah di bidang lainnya. Oleh karena itu, aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu ukuran penting untuk menilai kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya. PDRB Kota Binjai adalah PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kota Binjai dalam periode waktu tertentu. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts* 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standard neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	245,53	247,66	250,28	251,84	252,81
B. Pertambangan dan Penggalian	216,94	224,74	232,27	241,35	238,27
C. Industri Pengolahan	775,33	805,75	840,75	876,57	848,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,50	12,28	12,87	13,12	13,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,52	8,98	9,22	9,61	9,84
F. Konstruksi	813,79	862,13	913,34	970,81	927,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.010,08	2.157,13	2.303,60	2.451,87	2.426,81
H. Transportasi dan Pergudangan	568,62	611,94	644,59	682,40	639,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415,61	433,11	459,49	490,55	451,90
J. Informasi dan Komunikasi	204,98	219,71	235,75	256,86	275,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	246,58	248,64	252,29	255,69	259,98
L. Real Estate	479,25	505,33	540,60	574,70	583,72
M,N. Jasa Perusahaan	54,47	56,98	59,02	61,02	58,14
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	448,46	458,68	476,11	498,16	494,86
P. Jasa Pendidikan	329,83	345,74	362,42	378,16	383,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,68	72,54	76,12	79,64	78,68
R, S, T, U. Jasa lainnya	37,38	38,77	39,86	41,18	40,64
PDRB Harga Berlaku	6.935,55	7.309,57	7.708,59	8.133,54	7.984,46
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

Dari data Tabel di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai atas dasar harga konstan pada tahun 2016 - 2020 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,01 % per tahun. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2016-2020, aktivitas perekonomian Kota Binjai menunjukkan peningkatan dan menjadi motor penggerak pembangunan kota. Sejalan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga menunjukkan pertumbuhan selama tahun 2016-2020 secara rata-rata sebesar 7,07 %.

Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2016-2020 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2016 – 2020 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh perdagangan besar, eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	314,48	321,05	334,27	344,89	356,01
B. Pertambangan dan Penggalan	303,58	308,15	319,37	333,85	332,47
C. Industri Pengolahan	1.032,00	1.134,21	1.220,52	1.296,32	1.308,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,75	11,11	12,19	12,98	12,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,43	12,67	13,07	13,64	14,02
F. Konstruksi	1.123,25	1.223,63	1.350,94	1.479,82	1.459,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.447,70	2.774,70	3.075,40	3.407,06	3.433,33
H. Transportasi dan Pergudangan	746,04	810,48	861,27	932,50	894,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	512,68	549,10	589,08	638,29	591,13
J. Informasi dan Komunikasi	212,40	235,83	256,63	288,34	310,67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	345,09	359,93	374,38	383,67	388,30
L. Real Estate	676,95	740,22	822,25	913,23	952,91
M,N. Jasa Perusahaan	79,96	87,37	91,81	101,46	101,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	710,24	746,73	778,24	828,38	857,57
P. Jasa Pendidikan	435,66	458,27	492,73	534,80	558,55
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,49	105,39	114,43	127,80	132,10
R, S, T, U. Jasa lainnya	52,74	55,97	58,70	63,06	64,07
PDRB Harga Berlaku	9.112,47	9.904,81	10.765,29	11.700,10	11.769,07
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

Pada sektor sekunder, kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap didominasi oleh sub konstruksi, kemudian disusul oleh sub sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan kebutuhan akan pabrik, perumahan dan perkantoran meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk kota sampai tahun 2020. Jika dilihat *trend* periode tahun 2016-2020 terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan cenderung mengalami *trend* peningkatan. Peningkatan *trend* kontribusi ini dikarenakan faktor internal dan eksternal industri pengolahan itu sendiri. Secara umum, salah satu faktor eksternal itu adalah akibat semakin terbukanya pasar global sehingga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal, khususnya yang berorientasi ekspor. Selain itu, beberapa sektor-sektor lain di luar sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi yakni seperti: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor industri pengolahan dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada sektor primer berasal dari sektor pertanian yakni di wilayah pinggiran Kota Binjai.

Pada sektor tersier, kontribusi masing-masing sub sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap didominasi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti oleh sub sektor konstruksi dan industri pengolahan, berikutnya sub sektor transportasi dan pergudangan dan sub sektor real estate. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan transportasi angkutan jalan raya, sektor jasa penunjang angkutan serta meningkatnya jumlah penumpang dan beragamnya moda angkutan di jalan raya yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya peranan konstruksi dan real estate sebagai tempat tinggal/perumahan.

2.3.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Binjai bertumpu pada sektor lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Binjai di atas 25% setiap tahun. Dimana pada tahun 2016 sektor lapangan usaha tersebut memberikan

kontribusi sebesar 26,86% dan terus meningkat kontribusinya hingga mencapai 29,17% pada tahun 2020.

Sementara itu terdapat 2 sektor lapangan usaha yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kota Binjai, yaitu lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan. Dimana sektor lapangan usaha konstruksi mampu memberikan kontribusi sebesar 12,33% pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 12,40% pada tahun 2020. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan yang mampu memberikan kontribusi sebesar 11,33% pada tahun 2016 dan sedikit menurun menjadi 11,12% pada tahun 2020.

Tabel 2.11.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	3,24	3,11	2,95	3,02
B. Pertambangan dan Penggalian	3,33	3,11	2,97	2,85	2,82
C, Industri Pengolahan	11,33	11,45	11,34	11,85	11,12
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
F, Konstruksi	12,33	12,35	12,55	12,65	12,40
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,86	27,71	28,57	29,12	29,17
H, Transportasi dan Pergudangan	8,19	8,18	8,00	7,97	7,60
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,63	5,54	5,47	5,46	5,02
J, Informasi dan Komunikasi	2,33	2,38	2,38	2,46	2,64
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	3,79	3,63	3,48	3,28	3,30
L, Real Estate	7,43	7,47	7,64	7,81	8,10
M,N, Jasa Perusahaan	0,88	0,88	0,85	0,87	0,87
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,79	7,54	7,23	7,08	7,29
P, Jasa Pendidikan	4,78	4,63	4,58	4,57	4,75
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,06	1,06	1,09	1,12
R, S, T, U, Jasa lainnya	0,58	0,57	0,55	0,54	0,54
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

2.3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Laju pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Binjai selama periode tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.12.
Laju Pertumbuhan Sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.51	0.87	1.06	0.62	0,38
B. Pertambangan dan Penggalian	6.16	3.60	3.35	3.91	-1,28
C, Industri Pengolahan	3.84	3.85	4.41	4.26	-3,18
D, Pengadaan Listrik dan Gas	8.00	6.71	4.87	1.87	5,67
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.98	5.50	2.67	4.18	2,37
F, Konstruksi	6.05	5.94	5.94	6.29	-4,46
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.26	7.32	6.79	6.44	-1,02
H, Transportasi dan Pergudangan	7.59	7.62	5.33	5.87	-6,35
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.46	4.21	6.09	6.76	-7,88
J, Informasi dan Komunikasi	9.22	7.18	7.30	8.95	7,34
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	2.60	0.83	1.47	1.35	1,68
L, Real Estate	6.49	5.44	6.98	6.31	1,57
M,N, Jasa Perusahaan	4.59	4.61	3.58	3.37	-4,71
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.22	2.28	3.80	4.63	-0,66
P, Jasa Pendidikan	4.70	4.82	4.82	4.34	1,52
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.75	5.63	4.94	4.62	-1,20
R, S, T, U, Jasa lainnya	3.56	3.72	2.80	3.32	-1,31
Pertumbuhan PDRB ADHK	5,54	5,39	5,46	5,51	-1,83

Sumber : BPS Kota Binjai, 2021

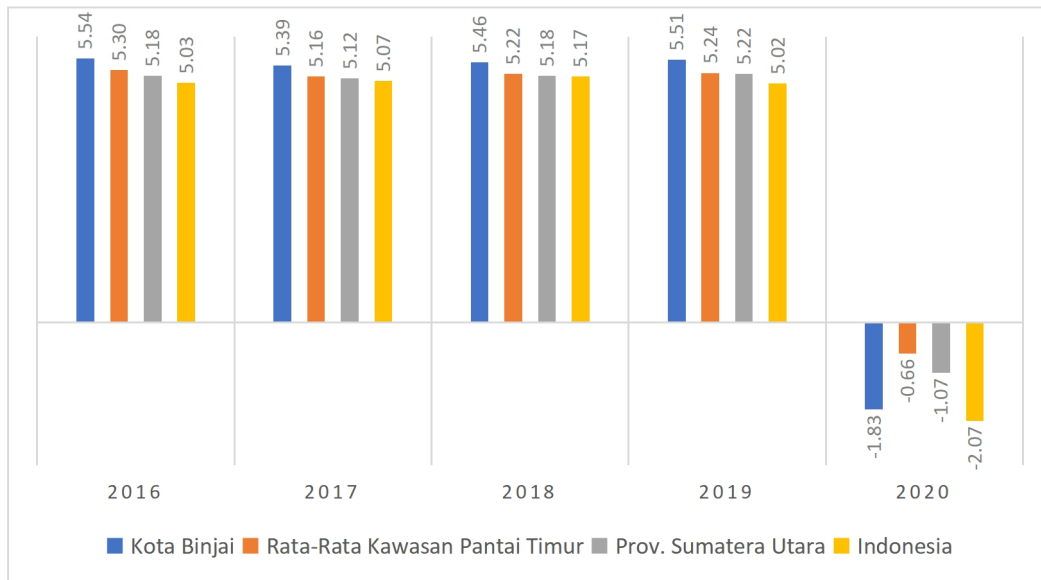
Tabel 2.13.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi, Kota Binjai dan Kawasan Pantai Timur

Pertumbuhan Ekonomi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07	-0,86
Kab. Deli Serdang	5,32	5,10	5,15	5,18	-1,78
Kab. Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28	-0,44
Kab. Batubara	4,44	4,11	4,38	4,35	-0,31
Kab. Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64	0,21
Kab. Labuhanbatu	5,06	5,00	5,06	5,07	0,09
Kab. Labuhanbatu Utara	5,21	5,11	5,20	5,15	0,27
Kab. Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35	0,80
Kota Tanjung Balai	5,76	5,51	5,25	5,20	-1,36
Kota Tebing tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15	-0,70
Kota Medan	6,27	5,81	5,92	5,93	-1,98
Kota Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51	-1,83
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	5,30	5,16	5,22	5,24	-0,66
Prov. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
Indonesia	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021					

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Binjai pada tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu lebih tinggi dibandingkan secara nasional maupun Provinsi Sumatera Utara, tetapi akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Binjai pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan provinsi Sumatera Utara walaupun masih lebih baik jika dibandingkan secara Nasional.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di kawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara, laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 secara rata-rata masih lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya, walaupun jika dibandingkan secara individu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai relatif masih di bawah Kota Medan. Sedangkan pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai sangat berdampak akibat pandemi Covid 19 jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di kawasan pantai timur Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Binjai juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik. Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Binjai diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

2.3.1.4 Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat yang walaupun parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan selama tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.14.
Pendapatan Perkapita Kota Binjai Tahun 2016–2020

Tahun	Pendapatan Perkapita (Ribu Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	PDRB ADHB	PDRB ADHK	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2016	34.014,33	25.888,50	7,41	4,28
2017	36.559,10	26.979,96	7,48	4,22
2018	39.304,88	28.144,64	7,51	4,32
2019	42.300,16	29.405,73	7,62	4,48
2020	42.137,42	28.587,19	-0,38	-2,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Binjai

PDRB perkapita Kota Binjai atas dasar harga berlaku pada Tahun 2016 sebesar 34,01 juta rupiah dan meningkat sampai dengan 42,13 juta rupiah di Tahun 2020. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan untuk periode 2016 sampai 2019, dimana akibat pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan produksi dan perlambatan perekonomian sehingga menurunkan PDRB baik secara harga berlaku maupun harga konstan sehingga PDRB per kapita juga turut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sementara itu, jika dilihat dari harga penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil, dimana pada tahun 2020 PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Binjai mengalami penurunan sebesar - 2,78 %.

Tabel 2.16.
Perbandingan Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Tahun 2016–2020

PDRB Perkapita ADHB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	33.244.425	36.012.766	38.504.178	40.810.325	41.225.072
Kab. Deli Serdang	41.086.202	44.071.079	46.882.094	49.794.458	49.296.987
Kab. Serdang Bedagai	36.198.406	39.310.886	42.294.269	45.359.548	46.299.373
Kab. Batubara	68.086.625	72.738.987	77.415.555	81.748.911	73.283.485
Kab. Asahan	40.981.266	44.551.813	47.854.663	51.302.635	52.640.072
Kab. Labuhanbatu	56.332.871	60.662.338	64.345.055	68.012.800	69.085.836
Kab. Labuhanbatu Utara	54.654.596	59.161.909	63.032.129	67.007.345	68.715.325
Kab. Labuhanbatu Selatan	65.559.964	70.974.722	75.465.242	80.040.545	81.779.044
Kota Tanjung Balai	39.758.871	43.373.414	47.175.954	51.086.050	51.865.982
Kota Tebing tinggi	29.750.906	31.882.154	33.906.282	36.034.837	36.418.803
Kota Medan	83.452.215	90.341.498	98.263.688	105.918.236	105.532.865
Kota Binjai	33.883.689	36.559.095	39.304.878	42.300.163	42.137.418
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	48.582.503	52.470.055	56.203.666	59.951.321	59.856.689
Prov. Sumatera Utara	44.392.762	48.003.601	51.427.494	54.908.585	55.176.052
Indonesia	47.937.700	51.891.200	55.992.100	59.060.100	56.938.700

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Binjai jika dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota lainnya di kawasan pantai timur Sumatera Utara hanya lebih baik dari Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi. Sementara itu pendapatan perkapita Kota Binjai masih jauh dibawah rata-rata pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku untuk seluruh Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kondisi yang sama juga terjadi jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, dimana pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Binjai juga masih berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Kondisi yang sama juga terjadi untuk perbandingan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan Kota Binjai jika dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota lainnya di kawasan pantai timur Sumatera Utara hanya lebih baik dari Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi. Sementara itu pendapatan perkapita Kota Binjai masih jauh dibawah rata-rata pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan untuk seluruh

Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kondisi yang sama juga terjadi jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, dimana pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku Kota Binjai juga masih berada di bawah Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.16.
Perbandingan Pendapatan Perkapita Harga Konstan Tahun 2016–2020

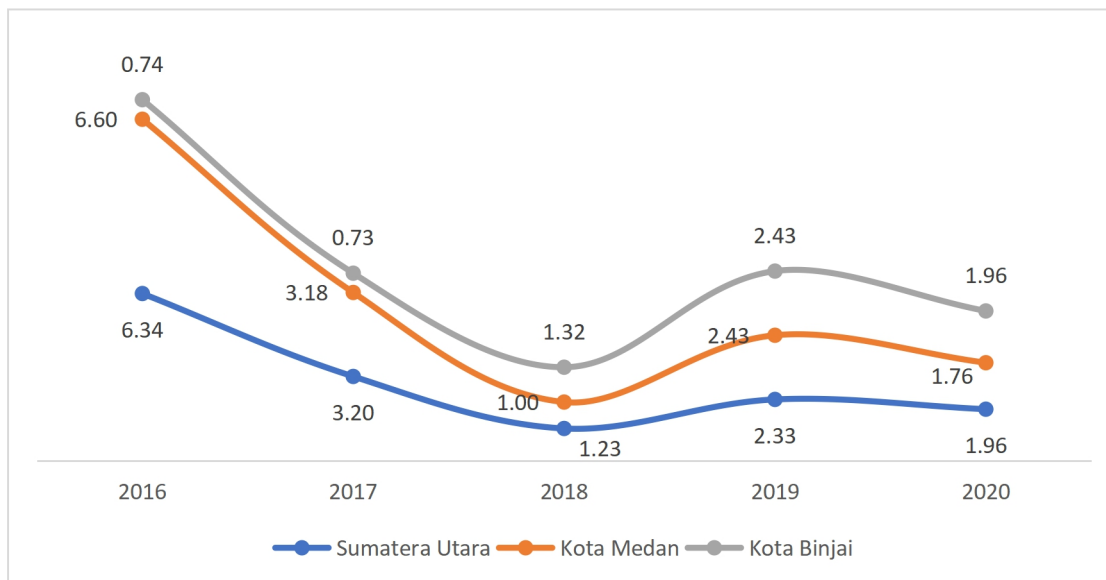
PDRB Perkapita ADHK	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	25.003.534	26.084.182	27.206.663	28.410.907	27.996.619
Kab. Deli Serdang	29.837.900	30.734.437	31.703.566	32.735.982	31.596.560
Kab. Serdang Bedagai	27.264.694	28.578.473	29.972.081	31.463.549	31.255.000
Kab. Batubara	52.272.754	53.861.509	55.687.755	57.620.640	56.947.093
Kab. Asahan	31.293.960	32.732.373	34.298.167	35.962.477	35.780.457
Kab. Labuhanbatu	42.604.783	43.979.259	45.453.757	47.012.934	46.357.519
Kab. Labuhanbatu Utara	41.874.816	43.618.783	45.475.598	47.439.334	47.207.991
Kab. Labuhanbatu Selatan	50.216.524	51.732.841	53.459.816	55.313.132	54.809.358
Kota Tanjung Balai	29.006.558	30.229.196	31.584.351	33.045.713	32.559.561
Kota Tebing tinggi	21.401.550	22.251.504	23.130.037	24.050.958	23.638.732
Kota Medan	59.236.740	62.177.532	65.369.991	68.766.610	66.958.442
Kota Binjai	25.888.496	26.979.956	28.144.644	29.405.726	28.587.180
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	36.325.192	37.746.670	39.290.536	40.935.664	40.307.876
Prov. Sumatera Utara	32.885.087	34.183.579	35.570.497	37.048.036	36.300.554
Indonesia	36.468.600	37.851.400	39.340.600	40.843.200	39.556.600

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

2.3.1.5 Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam indikator makro ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Binjai adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi, Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Gambar 2.7
Inflasi Kota Binjai, Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda Kota Binjai, 2021

Kondisi inflasi Kota Binjai secara umum tidak berbeda jauh dengan kondisi inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Dimana tingkat Inflasi Kota Binjai cenderung menunjukkan kondisi yang terus meningkat dari 0,74% pada tahun 2016 meningkat menjadi 2,43% pada tahun 2019. Walaupun pada tahun 2020 inflasi kota Binjai sedikit menurun menjadi 1,96%, yang sangat disebabkan karena terjadinya perlambatan perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh sendi kehidupan masyarakat baik secara nasional maupun global.

2.3.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Gini ratio adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, Koefisien gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kondisi gini ratio Kota Binjai Tahun 2019 sebesar 0,3161 yang meningkat dari 0,2517 pada tahun 2015. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara nilai Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,3360 pada tahun 2015 menjadi 0,3170 pada tahun 2019.

Tabel 2.17
Perbandingan Gini Ratio Kota Binjai Tahun 2016-2020

Gini Ratio	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	0,283	0,249	0,253	0,266	0,238
Kab. Deli Serdang	0,282	0,281	0,293	0,273	0,312
Kab. Serdang Bedagai	0,255	0,275	0,283	0,257	0,262
Kab. Batubara	0,268	0,234	0,249	0,277	0,259
Kab. Asahan	0,283	0,267	0,291	0,279	0,260
Kab. Labuhanbatu	0,308	0,279	0,294	0,277	0,271
Kab. Labuhanbatu Utara	0,255	0,267	0,282	0,267	0,262
Kab. Labuhanbatu Selatan	0,244	0,220	0,243	0,250	0,193
Kota Tanjung Balai	0,373	0,278	0,332	0,268	0,272
Kota Tebing tinggi	0,358	0,304	0,340	0,324	0,334
Kota Medan	0,333	0,352	0,314	0,352	0,320
Kota Binjai	0,316	0,316	0,308	0,351	0,324
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	0,296	0,277	0,290	0,287	0,276
Prov. Sumatera Utara	0,319	0,315	0,318	0,317	0,316
Indonesia	0,394	0,391	0,389	0,380	0,385
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021					

Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat Kota Binjai. Walaupun jika dibandingkan dengan nilai Gini Ratio provinsi Sumatera Utara, ketimpangan pendapatan Kota Binjai masih sedikit lebih baik, tetapi trend pergerakan Gini Ratio Kota Binjai menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan sedangkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan.

2.3.1.7 Investasi

Secara umum investasi adalah sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan kota, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau

penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun pananaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal, Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Tabel 2.18
Jumlah Perusahaan dan Nilai Investasi PMDN/PMA Kota Binjai

Tahun	PMDN	PMA	Nilai Investasi
2016	512	2	86.245.550.492
2017	395	3	80.991.500.000
2018	434	6	814.301.910.159
2019	780	2	512.708.185.974
2020	990		916.408.795.440
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai			

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai investasi PMDN/PMA di Kota Binjai menunjukkan trend peningkatan dari Rp. 86.245.550.492 pada tahun 2016 menjadi Rp. 916.408.795.440 di tahun 2020, walaupun pada tahun 2019 nilai investasi di Kota Binjai mengalami penurunan menjadi Rp. 512.708.185.974 dibandingkan nilai investasi pada tahun 2018 yang mencapai Rp. 814.301.910.159. Sementara untuk jumlah perusahaan yang termasuk kategori PMDN menunjukkan perkembangan yang dinamis, dimana pada tahun 2016 terdapat 512 perusahaan PMDN di Kota Binjai kemudian menurun menjadi 395 perusahaan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 434 perusahaan dan pada tahun 2018 jumlah perusahaan PMDN di Kota Binjai kembali meningkat menjadi 780 perusahaan. Sementara untuk perusahaan yang termasuk kategori PMA pada tahun 2017 perusahaan PMA di Kota Binjai sebanyak 3 perusahaan dan meningkat menjadi 6 perusahaan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 perusahaan PMA di Kota Binjai menurun menjadi hanya 2 perusahaan. Pada tahun 2020 jumlah total perusahaan PMDN dan PMA di Kota Binjai mencapai 990 unit perusahaan.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan karena memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko usaha. Dalam kasus negara berkembang dan negara miskin, ketiga bagian ini sering didengungkan, akan tetapi dalam kenyataannya sering tidak sesuai. Sejumlah faktor lain yang juga berpengaruh pada iklim berinvestasi adalah kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.

Tabel 2.19
Rasio Bangunan Ber-IMB Persatuan Bangunan (%) Kota Binjai Tahun 2019-2020

Nama Data	Rasio 2019	Rasio 2020
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	44,7%	NA
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, 2021		

Dalam hal ini Kota Binjai didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, seperti: dibangunnya jalan tol ke Bandara Kuala Namu Deliserdang yang semakin dekat jarak tempuhnya dengan Kota Binjai, Selain hal tersebut, pemerintah kota juga telah melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan nilai investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Program-program tersebut diantaranya: program peningkatan promosi dan kerjasama

investasi, program peningkatan iklim investasi, maupun program peningkatan pelayanan.

2.3.1.8 Kemiskinan

Dari hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2020, garis kemiskinan di Kota Binjai yaitu Rp. 433.746 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15.910 orang. Sedangkan di tahun 2016, garis kemiskinan Kota Binjai sebesar Rp. 343.078 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 17.800 orang. Dimana persentase penduduk miskin Kota Binjai terus menurun dari 6,67% pada tahun 2016 menjadi 5,66% pada tahun 2019 walaupun di tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 5,71% akibat adanya pandemi Covid-19. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Binjai tahun 2019 sebesar 0,27 menurun dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 1,33. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,02 menurun dibandingkan pada tahun 2016 yaitu 0,45. Sedangkan di tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kedalam kemiskinan menjadi 0,59 dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,11 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Indikasi peningkatan kesejahteraan yang telah ditunjukkan dari menurunnya angka kemiskinan Kota Binjai selama periode 2016 hingga 2019 menjadi tidak berarti akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan perekonomian dan terganggunya proses produksi untuk setiap daerah maupun sendi perekonomian.

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	17.800	18.230	16.070	15.610	15.910
Garis Kemiskinan	343.078	371.387	380.792	403.980	433.746
Persentase Penduduk Miskin	6,67	6,75	5,88	5,66	5,71
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,33	1,11	0,72	0,27	0,59
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,45	0,34	0,18	0,02	0,11
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021					

Dari 12 kabupaten/kota yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara, Kota Binjai memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan 10 kabupaten/kota lainnya, kecuali Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah di kawasan pantai timur Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemiskinan terendah. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara rata-rata untuk kawasan pantai timur kemudian provinsi Sumatera Utara dan Nasional, maka tingkat kemiskinan Kota Binjai masih jauh di bawah dari ketiga pembandingan tersebut. Dimana rata-rata tingkat kemiskinan Kota Binjai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berada di kisaran 6-5%, sedangkan ketiga indikator tersebut berada pada kisaran 10-8%.

Tabel 2.21
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Tingkat Kemiskinan (%)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	11,36	11,15	10,20	9,91	9,73
Kab. Deli Serdang	4,86	4,62	4,13	3,89	3,88
Kab. Serdang Bedagai	9,53	9,30	8,22	7,90	7,97
Kab. Batubara	12,24	12,48	12,57	12,14	11,88
Kab. Asahan	11,86	11,67	10,25	9,68	9,04
Kab. Labuhanbatu	8,95	8,89	8,61	8,44	8,44
Kab. Labuhanbatu Utara	10,97	11,28	10,12	9,57	9,53
Kab. Labuhanbatu Selatan	11,49	11,63	10,00	8,94	8,34
Kota Tanjung Balai	14,49	14,46	14,64	14,04	13,33
Kota Tebing tinggi	11,70	11,90	10,27	9,94	9,85
Kota Medan	9,30	9,11	8,25	8,08	8,01
Kota Binjai	6,67	6,75	5,88	5,66	5,71
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	10,29	10,27	9,43	9,02	8,81
Prov. Sumatera Utara	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75
Indonesia	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021					

2.3.1.9 Angka Kriminal

Dinamika perkembangan Kota Binjai yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan

berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Tabel 2.22
Banyaknya Perkara Kriminal Yang Terjadi dan Dilaporkan Pada Polres di Kota Binjai
Tahun 2016-2020

Jenis Kejadian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembakaran	1	6	4	3	2
Kebakaran	6	7	1	2	8
Narkotika	174	180	220	188	207
Kesopanan	50	41	43	29	44
Perkosaan	1	1	5	-	-
Perjudian	98	23	10	4	14
Pembunuhan	1	3	6	5	4
Penganiayaan Berat	155	126	122	146	136
Penganiayaan Ringan	55	55	27	27	39
Pencurian dengan pemberatan	178	241	147	196	257
Pencurian Biasa	35	41	25	35	53
Pencurian Dengan Kekerasan	35	28	34	39	40
Pencurian Ranmor	142	132	104	100	150
Pemerasan	9	6	6	30	1
Penggelapan	115	126	116	122	145
Penipuan	101	124	106	112	130
Perusakan	26	30	17	18	16
Penadahan	1	-	-	4	-
Perzinahan	4	5	4	3	5
Pemalsuan Surat	8	4	5	3	4
Penculikan	2	-	2	5	1
Kejahatan lainnya	205	186	153	67	202
Jumlah	1.402	1.365	1.157	1.139	1.504
Sumber : Kepolisian Resort Kota Binjai					

Selama tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana di Kota Binjai yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Binjai adalah sejumlah 1.504 kejadian dan meningkat bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.139 kejadian. Perkara Pencurian dengan

pemberatan merupakan jenis perkara yang paling banyak terjadi dan dilaporkan di Kota Binjai pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1257 perkara yang disusul oleh jenis perkara kriminal untuk jenis pelaporan Narkotika yaitu sebanyak 207 perkara. Dimana Hal ini menunjukkan kesiapan dan kesiagaan pelayanan keamanan oleh Polres Kota Binjai dan Seluruh aparat pengamanan lainnya.

2.3.2 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

2.3.2.1 Indeks pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Masyarakat/Penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

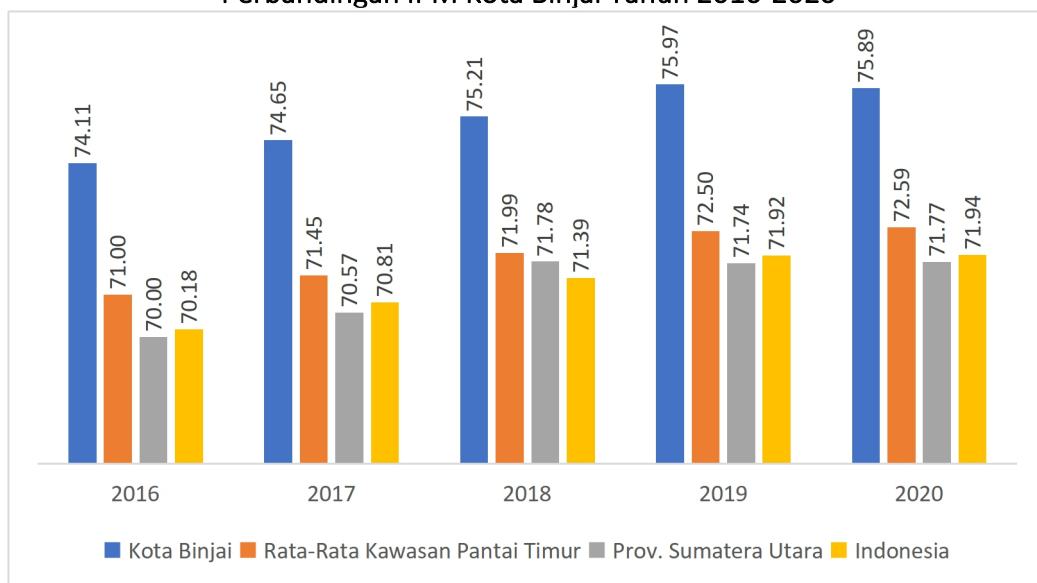
Tabel 2.23
IPM Kawasan Pantai Timur, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	69,13	69,82	70,27	70,76	71,00
Kab. Deli Serdang	73,51	73,94	74,92	75,43	75,44
Kab. Serdang Bedagai	68,77	69,16	9,69	70,21	70,24
Kab. Batubara	66,69	67,20	67,67	68,35	68,36
Kab. Asahan	68,71	69,10	69,49	69,92	70,29
Kab. Labuhanbatu	70,50	71,00	1,39	71,94	2,01
Kab. Labuhanbatu Utara	70,26	70,80	71,08	71,43	71,61
Kab. Labuhanbatu Selatan	70,28	70,48	70,98	71,39	71,40
Kota Tanjung Balai	67,09	67,41	68,00	68,51	68,65
Kota Tebing tinggi	73,58	73,90	74,50	75,08	75,17
Kota Medan	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98
Kota Binjai	74,11	74,65	75,21	75,89	75,89
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	71,00	71,45	71,99	72,50	72,59
Prov. Sumatera Utara	70,00	70,57	71,78	71,74	71,77
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Berdasarkan Tabel di atas IPM Kota Binjai dari tahun 2016 hingga ke tahun 2019 mengalami kenaikan dari 74,11 menjadi 75,89, dimana pada tahun 2020 IPM Kota Binjai tidak mengalami perubahan yaitu tetap 75,89. IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Gambar 2.8
Perbandingan IPM Kota Binjai Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dibandingkan dengan IPM Kota Medan, menunjukkan bahwa IPM Kota Binjai masih berada di bawah yang menunjukkan pembangunan manusia di Kota Medan lebih baik dibandingkan di Kota Binjai. Tetapi jika dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara yang menunjukkan IPM Kota Binjai masih lebih baik yang mana pembangunan manusia di Kota Binjai masih lebih baik dibandingkan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

2.3.2.2 Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan

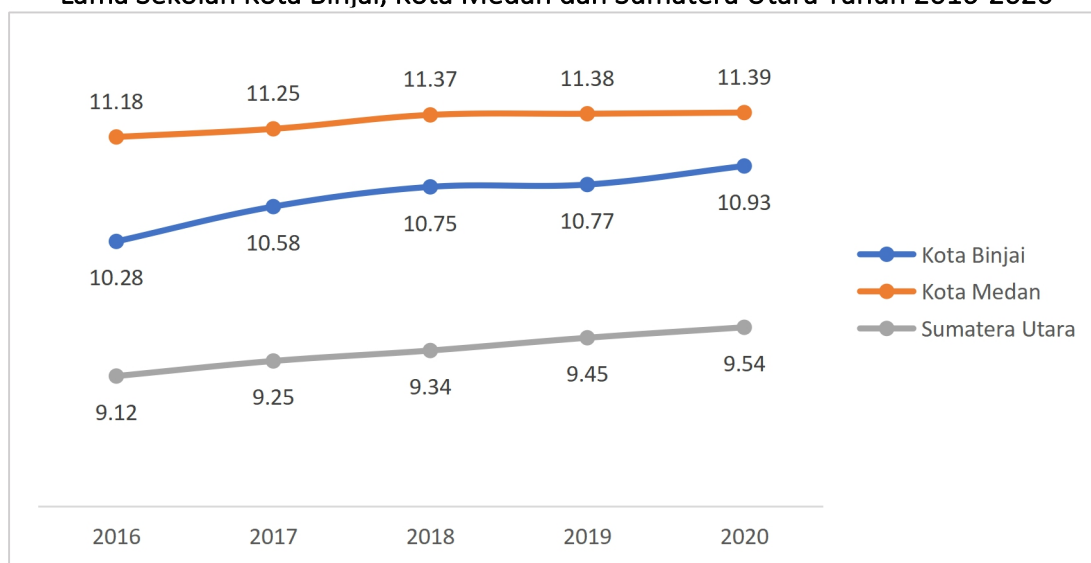
melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Binjai Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia diatas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	112.661	191.288	199.654	201.880	203.178
Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas	112.661	191.288	199.654	201.880	203.178
Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai, 2020					

Dari data di atas perkembangan Angka Melek Huruf Kota Binjai usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya sangat baik.

Gambar 2.9
Lama Sekolah Kota Binjai, Kota Medan dan Sumatera Utara Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021

Dari data di atas Capaian Angka rata-rata lama sekolah di Kota Binjai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dari 10,28 tahun menjadi 10,93 tahun. Pencapaian rata-rata lama sekolah Kota Binjai lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Sumatera Utara, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kota Medan maka pencapaian Kota Binjai masih belum bisa mencapai dan melampauinya.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	115,69	113,07	110,51	106,79	105,93
SMP/MTs	81,99	77,64	83,42	86,72	88,07
SMA/SMK/MA	93,51	87,63	88,12	92,73	88,61
Perguruan Tinggi	29,28	27,73	27,62	30,59	32,00
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021					

APK SD/MI Kota Binjai Tahun 2016 sampai Tahun 2020 menunjukkan penurunan dari 115,69 menjadi 105,93. Sedangkan APK SMP/MTs Kota Binjai pada Tahun 2016 sebesar 81,99 yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 88,07 pada tahun 2020. APK SMA/SMK/MA Kota Binjai tahun 2020 mencapai 88,61 dimana bila dibandingkan dengan APK SMA/SMK/MA Kota Binjai tahun 2016 yang sebesar 93,51 menunjukkan trend penurunan. Kondisi yang berkebalikan terjadi untuk APK Perguruan tinggi yang meningkat dari 29,28 pada tahun 2016 menjadi 32,00 pada tahun 2020.

Tabel 2.26.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	99,46	99,65	100,00	99,26	99,11
SMP/MTs	79,37	77,64	81,86	83,43	84,57
SMA/SMK/MA	74,60	70,88	70,80	72,62	72,50
Perguruan Tinggi	27,04	26,98	22,82	20,40	25,70
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021					

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. APM SD/MI Kota Binjai

Tahun 2016 sampai Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Bila pada Tahun 2016 APM SD/MI sebesar 99,46 maka pada tahun 2020 nilainya menurun tipis menjadi 99,11. Dimana pada Tahun 2018 adalah titik tertinggi yaitu 100,00. Sedangkan APM SMP/MTs Kota Binjai pada Tahun 2016 sebesar 79,37 mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 84,57. APM SMA/SMK/MA Kota Binjai tahun 2020 mencapai 72,50 dimana bila dibandingkan dengan APM SMA/SMK/MA Kota Binjai tahun 2016 yang sebesar 74,60 menunjukkan trend penurunan. Kondisi yang sama juga terjadi untuk APM Perguruan tinggi yang menurun dari 27,04 pada tahun 2016 menjadi 25,70 pada tahun 2020.

2.3.2.3 Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat, peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diinventarisasi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang di derita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih Akhir dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit.

Tabel.2.27
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Hasil Sensus Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	71,67	71,75	71,95	72,25	72,38

Sumber: Binjai Dalam Angka, 2021

Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka usia Harapan hidup di Kota Binjai dari Tahun ke Tahun semakin meningkat disebabkan Kota Binjai mengikuti program pembangunan kesehatan, dan Program sosial lainnya.

Tabel.2.28
Angka Kematian Bayi di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	3/1000 KH	4/1000 KH	9/1000 KH	12/1000 KH	1/1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Binjai

Angka kematian Bayi merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi disuatu wilayah menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi diantaranya tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi orangtua bayi.

Tabel.2.29
Angka Kematian Ibu di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Kematian Ibu/100.000 Kelahiran Hidup				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	76	75	77	76	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Binjai

Angka kematian Ibu menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Tingginya Angka Kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric yang rendah pula.

Tabel.2.30
Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Balita Kekurangan Gizi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	30	32	30	17	28
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Binjai					

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita di Kota Binjai pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 28 Kasus/Jiwa yang disebabkan adanya penurunan kualitas kehidupan keluarga akibat adanya pandemi Covid-19 yang mendorong penurunan konsumsi dan gizi makanan terutama pemenuhan terhadap balita di kota Binjai. Walaupun pada tahun 2019, Kota Binjai sangat berhasil dalam menurunkan kasus gizi buruk dari 30 kasus pada tahun 2018 menjadi hanya 17 kasus di tahun 2019.

Tabel.2.31
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016-2020

Uraian	Indeks Pembangunan Gender				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	-	90,76	90,57	90,60	90,57
Kota Medan	-	93,34	93,98	94,02	94,00
Prov. Sumatera Utara	90,82	90,65	90,66	90,71	90,67
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Dimana IPM Kota Binjai berada pada kisaran angka 70, bila dibandingkan dengan IPG Kota Binjai yang berada pada kisaran angka 90, maka kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembangunan di Kota Binjai

masih belum terdapat kesetaraan gender antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2016-2020

Uraian	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	-	69,77	69,86	70,26	69,85
Kota Medan	-	61,23	63,36	63,93	63,89
Prov. Sumatera Utara	69,07	69,29	71,29	67,76	67,52
Sumber : BPS Kota Binjai 2021					

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari data di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan gender terutama penduduk berjenis kelamin perempuan dalam proses pembangunan ekonomi maupun politik di Kota Binjai lebih baik dibandingkan dengan kondisi di Kota Medan maupun Sumatera Utara.

2.3.2.3 Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Binjai TPT tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan dari 5,95% pada tahun 2017 menjadi 8,67% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Kota Medan, tingkat pengangguran terbuka Kota Binjai masih lebih baik tetapi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara bisa dikatakan lebih buruk tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai.

Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka kawasan pantai timur Sumatera Utara, maka tingkat pengangguran terbuka Kota Binjai pada tahun 2017 dan 2019 lebih baik sedangkan untuk tahun 2018 dan 2020 jauh lebih buruk kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka untuk kawasan pantai timur Sumatera Utara. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai lebih buruk dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

Tabel 2.33
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Langkat	n.a.	3,57	4,67	5,30	7,02
Kab. Deli Serdang	n.a.	6,16	7,06	5,74	9,50
Kab. Serdang Bedagai	n.a.	5,98	5,10	4,37	5,54
Kab. Batubara	n.a.	5,00	5,39	6,69	6,48
Kab. Asahan	n.a.	5,95	5,26	6,86	7,24
Kab. Labuhanbatu	n.a.	7,09	6,98	5,70	6,05
Kab. Labuhanbatu Utara	n.a.	6,35	5,67	5,84	6,82
Kab. Labuhanbatu Selatan	n.a.	5,68	4,79	4,80	4,90
Kota Tanjung Balai	n.a.	5,50	5,58	6,82	6,97

Kota Tebing tinggi	n.a.	9,73	7,23	8,60	9,98
Kota Medan	n.a.	9,46	8,25	8,53	10,74
Kota Binjai	n.a.	5,95	7,4	6,14	8,67
Rata-Rata Kawasan Pantai Timur	n.a.	6,37	6,12	6,28	7,49
Prov. Sumatera Utara	5,84	5,60	5,56	5,41	6,91
Indonesia	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2021					

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Binjai, TPAK mengalami peningkatan dari 62,03 pada tahun 2017 menjadi 65,14 pada tahun 2020. Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

Tabel 2.34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Binjai	n.a.	62,03	66,78	66,89	65,14
Kota Medan	n.a.	64,35	65,99	64,89	63,62
Prov. Sumatera Utara	65,99	68,88	71,82	70,19	68,67
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021					

2.3.3. Kesejahteraan Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2019,

tercatat 8 unit seni/ budaya tradisi yang dilestarikan di Kota Binjai. Sedangkan dari bidang keolahragaan terdapat 27 Organisasi olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2015-2019 telah diupayakan secara bertahap, baik sarana dan prasarana olahraga yang berada di kecamatan ataupun sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Binjai, antara lain Rehabilitasi Stadion dan Gelanggang Olahraga.

Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara *Car Free Day* (CFD) yang rutin tiap akhir pekan, juga acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam rangka memberikan pelayanan umum telah membangun dan mengembangkan Konsep Smart City sebagai sebuah Kota yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan Informasi Kota atau "Information City" ini di desain dengan mengimplementasikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh dan digunakan untuk berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh sistim Kota melalui Pemerintahannya, Dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga mendorong transportasi publik pada sistem tata kelola pemerintahan dan perencanaan yang melibatkan warga kota sebagai salah satu stakeholder.

Konsep Smart City dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dibangun dan dikembangkan dalam enam dimensi yang meliputi; Dimensi Ekonomi (Smart Economy), Dimensi Manusia (Smart People), Dimensi Tata Kelola Pemerintahan (Smart Governance), Dimensi Pergerakan Masyarakat/Mobilitas (Smart Mobility), Dimensi Lingkungan (Smart Environment), dan Dimensi Kehidupan (Smart Living).

Perwujudan E-government di Kota Binjai guna mewujudkan Kota Binjai sebagai Smart City (Kota Pintar) sampai pada Tahun 2018 telah mengaplikasikan berbagai sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang urusan pelayanan seperti :

1. **eMusrenbang** yang merupakan aplikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari kepling hingga Pemerintah Kota. Aplikasi ini juga sebagai website musyawarah dan perencanaan yang berfungsi menampung usulan – usulan masyarakat Kota Binjai;
2. **eRA** yang merupakan aplikasi penyusunan perencanaan dan anggaran dimana memuat semua informasi program, kegiatan, indikator kerja dan sasaran kegiatan;
3. **eDokter** yang merupakan aplikasi system pendaftaran pasien pada RSUD yang juga berfungsi sebagai pembuat janji rawat jalan pada rumah sakit di Binjai;
4. **ePerizinan** yang merupakan aplikasi pengajuan perizinan berbasis online masyarakat;
5. **PPDB** (Penerimaan Peserta Didik Baru) merupakan aplikasi seleksi penerimaan siswa SMP berbasis online;
6. **JDIH** (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) merupakan website untuk mendokumentasikan laporan hukum pada Bagian Hukum di Kota Binjai;
7. **eMasyarakat** yang merupakan aplikasi mobile dimana warga Binjai dapat melaporkan semua permasalahan secara online;
8. **eTKD** merupakan aplikasi yang berisi laporan Kinerja ASN;
9. **eSDM** merupakan aplikasi yang berisi laporan system informasi kepegawaian;
10. **eAbsensi** merupakan aplikasi absensi pegawai;
11. **eTourism** merupakan aplikasi yang berisi data wisata Kota Binjai;
12. **eUMKM** merupakan aplikasi yang berisi laporan rekapitulasi UMKM dan Produk UMKM Kota Binjai;
13. **ePMKS** merupakan aplikasi yang berisi laporan rekapitulasi masyarakat kurang sejahtera di Kota Binjai;
14. **eKPU** merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memvalidasi data DPT Kota Binjai;

15. **eTransBinjai** merupakan aplikasi yang berfungsi memberikan informasi halte dan trayek bus TransBinjai;
16. **eKliping** merupakan aplikasi yang menyajikan berita terbaru, tercepat, dan terpercaya seputar Kota Binjai;
17. **eSSH** merupakan aplikasi penyusunan Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan, dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan di Kota Binjai;
18. **ePajak** merupakan aplikasi hasil kerjasama Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bekerjasama dengan PT Bank BNI yang berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat layanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga dapat meminimalisir wajib pajak untuk datang ke kantor pajak sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya para wajib pajak, dalam membayar pajak;
19. **ePBB** merupakan aplikasi hasil kerjasama Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bekerjasama dengan Bank SUMUT yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk mendapatkan informasi seputar PBB. Dengan adanya ePBB wajib pajak bisa melihat tagihan dan status pembayaran pajak bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara langsung dan online melalui smart Phone.

Aplikasi E-government Kota Binjai Tahun 2016 s.d 2020 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Aplikasi e-Government Kota Binjai Tahun 2016-2020

No	Nama Aplikasi	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		W	M	W	M	W	M	W	M	W	M
1	eMusrenbang	√		√		√		√		√	
2	ePerencanaan	√		√		√		√		√	
3	eBudgeting	√		√		√		√		√	
4	eTataKelolaKeuangan					√		√		√	
5	eAccounting					√		√		√	

6	ePerizinan	√		√		√		√		√	
7	eDokter	√		√		√		√		√	
8	eMasyarakat	√		√		√		√		√	
9	PPDB online	√		√		√		√		√	
10	eSDM					√		√		√	
11	eTKD					√		√		√	
12	eWarung	√		√		√		√		√	
13	ePajak	√		√		√		√		√	
14	WP online	√		√		√		√		√	
15	eKliping	√		√		√		√		√	
16	eSSH	√		√		√		√		√	
17	ePBB	√		√		√		√		√	
18	JDIH	√		√		√		√		√	
19	eOffice					√	√	√	√	√	√
20	eUMKM					√		√		√	
21	eKoperasi					√		√		√	
22	ePMKS					√	√	√	√	√	√
Jumlah		14	-	14	-	22	2	22	2	22	2

W : Aplikasi Web Based

M : Mobile Applications

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa keseriusan Pemerintah Kota Binjai dalam aplikasi untuk eGovernment Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang positif, mulai Tahun 2016 ada 14 aplikasi berbasis web dan pada mulai tahun 2018 bertambah menjadi 22 aplikasi yang berbasis web. Untuk aplikasi berbasis mobile dan pada Tahun 2018 menjadi 22 (dua puluh dua) aplikasi dan untuk Tahun 2019 masih tetap dan belum ada permasalahan. Pembangunan aplikasi dimaksud sesuai urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan yakni urusan wajib dan urusan pilihan.

2.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Binjai. Kinerja daerah urusan pendidikan sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	2.040	1.895	1.904	1.932	1.964
	Jumlah Murid	32.706	32.567	32.241	34.344	30.518
	Rasio	16	17	17	18	16
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	1.098	1.016	1.092	1.045	1.029
	Jumlah Murid	15.243	14.683	14.462	18.797	15.170
	Rasio	14	14	13	18	15
3	SMA/SMK/MA					
	Jumlah Guru	1.345	1.393	1.378	1.795	1.277
	Jumlah Murid	20.556	21.513	21.443	21.332	19.065
	Rasio	15	15	16	12	15
Sumber : Data Pokok Pendidikan, 2021						

Rasio murid-guru merupakan indikator yang menggambarkan beban kerja guru dan mutu pengajaran. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Untuk jenjang pendidikan SD/MI, walaupun masih memenuhi standar nasional yaitu 1 orang guru untuk 32 peserta didik, tetapi terjadi kecenderungan peningkatan rasio murid/guru untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Binjai dari 1:16 pada tahun 2016 menjadi 1:16 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah peserta didik untuk jenjang pendidikan SD/MI tidak sebanding atau tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah guru.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga menunjukkan kondisi yang sama, dimana pada tahun 2016 rasio murid-guru sebesar 1:14 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1:15. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh penurunan jumlah guru untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari 1.098 orang guru pada tahun 2016 menjadi 1.029 orang guru pada tahun 2020. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menunjukkan kondisi yang tidak mengalami perubahan, dimana pada tahun 2016 rasio murid-guru adalah 1:15 dan tidak berubah dimana pada tahun 2020 tetap menjadi 1:15.

Tabel 2.37
Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	0,1070	0,006	0,16	0,005	0,008
SMP/MTs	0,00169	0,0045	0,0065	0,004	0,0045
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai, 2021					

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan sebelum peserta didik menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Semakin kecil angka putus sekolah menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pendidikan pada suatu tingkat pendidikan di suatu daerah. Di Kota Binjai untuk jenjang pendidikan SD/MI memiliki tingkat angka putus sekolah yang relatif rendah, dimana pada tahun 2016 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI berada di kisaran 0,107 dan menurun menjadi 0,006 pada tahun 2017, walaupun pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,16 tetapi pada tahun 2019 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Binjai kembali menurun menjadi hanya 0,005. Pada tahun 2020, angka putus sekolah mengalami peningkatan tipis menjadi 0,008 yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas masyarakat sehingga berdampak kepada kemampuan masyarakat untuk memenuhi dan menyelesaikan pendidikan.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs juga menunjukkan angka putus sekolah yang cukup rendah, dimana pada tahun 2015 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTS di Kota Binjai sebesar 0,0007 dan meningkat menjadi 0,0016 pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP/MTS di Kota Binjai kembali bertambah menjadi 0,0045 dan di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,0065, dimana pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 0,004. Pada tahun 2020, angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs di Kota Binjai sedikit meningkat menjadi 0,0045 yang merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan menjadi sedikit teralihkan kepada kebutuhan penting lainnya yaitu untuk konsumsi sehari-hari.

Tabel 2.38
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) Tahun 2017-2020

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2019	2020
SD/MI	5.620	5.498	5.485	5.485	5,592
SMP/MTs	4.989	4.907	4.788	4.788	4.801

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai, 2021

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) menunjukkan jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan atau menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan ditandai adanya ijazah. Untuk APT dengan jenjang pendidikan SD/MI di Kota Binjai terus menunjukkan peningkatan dari 5.092 pada tahun 2015 menjadi 5.485 pada tahun 2019. Kondisi yang sama juga bisa dilihat pada jenjang pendidikan SMP/MTs yang meningkat dari 3.798 pada tahun 2015 menjadi 4.788 pada tahun 2019. Di tahun 2020, APT jenjang pendidikan SD/MI Kota Binjai meningkat menjadi 5,592 dan APT jenjang pendidikan SMP/MTs juga meningkat menjadi 4.801. ini merupakan keberhasilan Kota Binjai yang patut diapresiasi untuk bisa terus meningkatkan kualitas masyarakat melalui pemenuhan pendidikan kepada masyarakat untuk digunakan sebagai dasar peningkatan produktivitas ke depannya.

2.4.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan daerah. Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Tabel 2.39
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	8	8	8	8	8
Jumlah Poliklinik	34	34	43	43	44
Jumlah Pustu	18	18	18	18	18
Jumlah Penduduk	267.901	270.926	275.068	276.597	279.756

Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	0,029	0,029	0,029	0,029	0,030
Rasio Poliklinik Persatuan Penduduk	0,15	0,13	0,16	0,15	0,16
Rasio Pustu Persatuan Penduduk	0,067	0,066	0,065	0,065	0,064
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021					

Untuk fasilitas Puskesmas di Kota Binjai dari tahun 2016 sampai 2020 belum mengalami perubahan yaitu tetap berjumlah 8 unit, dimana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka ketersediaan 8 unit Puskemas tersebut masih bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di Kota Binjai. Kemudian untuk fasilitas Poliklinik terdapat peningkatan jumlah fasilitas yaitu dari 34 unit pada tahun 2016 menjadi 44 unit pada tahun 2020, dimana rasio jumlah poliklinik terhadap penduduk menunjukkan peningkatan dari 0,15 pada tahun 2016 menjadi 0,16 pada tahun 2020. Sementara untuk fasilitas Pustu di Kota Binjai dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan tidak ada perubahan yaitu tetap berjumlah 18 unit, dimana terdapat penurunan rasio jumlah pustu terhadap penduduk di Kota Binjai dari 0,067 pada tahun 2016 menjadi 0,064 pada tahun 2020.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan indikator utama peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia. Selain itu, kualitas dan kuantitas tenaga medis baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya juga harus memenuhi kriteria standar minimal sehingga pencapaian kehidupan yang layak bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Tabel 2.40
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus lainnya milik Pemerintah	-	-	-	-	-
Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1

Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
Total Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Penduduk	267.901	270.926	275.068	276.597	279.756
Rasio	0,015	0,018	0,0072	0,0073	0,0075
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2021					

Fasilitas rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Binjai sampai tahun 2019 hanya berjumlah 2 unit yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Daerah yaitu RSUD Dr. RM Djoelham dan 1 unit lagi merupakan Rumah Sakit TNI. Jika dilihat dari rasio jumlah rumah sakit yang dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terjadi penurunan nilai rasio dari 0,015 pada tahun 2016 menjadi 0,0075 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya kebutuhan terhadap ketersediaan fasilitas rumah sakit milik pemerintah di Kota Binjai.

Tabel 2.41
Jumlah Dokter di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter	330	208	313	331	362
Jumlah Penduduk	267.901	270.926	275.068	276.597	279.302
Rasio	1:811	1:1302	1:878	1:835	1:771
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2021					

Untuk ketersediaan dokter yang bertugas pada rumah sakit pemerintah di Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang dinamis, dimana pada tahun 2016 terdapat 330 dokter dan berkurang menjadi 208 dokter pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah dokter di Kota Binjai meningkat menjadi 313 dokter dan pada tahun 2019 kembali bertambah menjadi 331 dokter. Pada tahun 2020 jumlah dokter yang ada di Kota Binjai kembali meningkat menjadi 362 dokter. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Binjai, maka akan diperoleh nilai rasio yang menunjukkan pergerakan penurunan dari 1:811 pada tahun 2016 menjadi 1:771 pada tahun 2020.

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Medis di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Medis	435	208	365	508	498
Jumlah Penduduk	267.901	270.926	275.068	276.597	279.302
Rasio	1:616	1:1.302	1:754	1:544	1:561
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2021					

Untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Binjai diperlukan ketersediaan tenaga medis. Dimana jumlah tenaga medis yang bertugas fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Binjai menunjukkan trend peningkatan dari 435 orang tenaga medis pada tahun 2016 menjadi 498 orang tenaga medis pada tahun 2020. Dimana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Binjai, maka terdapat pergerakan nilai rasio yang cenderung menurun dari 1:616 pada tahun 2016 menjadi 1:561 pada tahun 2020.

Tabel 2.43
Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Posyandu	238	239	240	240	240
Jumlah Balita	25.638	25.928	23.299	24.961	26.325
Rasio	1:108	1:108	1:97	1:104	1:110
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2021					

Untuk fasilitas Posyandu yang berkaitan dengan kesehatan Balita di Kota Binjai menunjukkan trend pergerakan yang cukup baik, dimana jumlah fasilitas Posyandu mengalami peningkatan dari 238 unit pada tahun 2016 menjadi 240 unit pada tahun 2020. Dimana jika dibandingkan dengan jumlah Balita yang terdata di Kota Binjai, maka diperoleh nilai rasio yang terus meningkat dari 1:108 pada tahun 2016 menjadi 1:110 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dan penambahan jumlah fasilitas posyandu untuk bisa mengakomodir pelayanan dengan peningkatan jumlah balita yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2016 ditetapkan Keputusan Walikota Binjai tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Binjai.

Tabel 2.44
Indikator Infrastruktur Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik (%)	87	81	95	92	90
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	316.752	331.272	362.891	334.075	326.057
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	90	92	92	92	95
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	85,5	95	95	95	95
Sumber : Dinas PUPR Kota Binjai, 2021					

Infrastruktur jalan dalam kondisi baik (bisa dipacu >40 Km/Jam) di Kota Binjai terus meningkat dari 316,752 Km pada tahun 2016 menjadi 326,057 Km pada tahun 2020, dimana proporsi panjang jalan dalam kondisi baik juga meningkat dari 87% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020. Kemudian untuk sistem drainase jalan dalam kondisi baik atau tidak tersumbat juga mengalami peningkatan dari 90% pada tahun 2016 menjadi 95% pada tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh peningkatan rumah tangga yang memiliki sistem sanitasi yaitu dari 85,5% pada tahun 2016 menjadi 95% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur utama di Kota Binjai telah terpenuhi dan mampu dirawat dengan baik oleh Pemerintah Kota Binjai untuk tetap bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kualitas kehidupan bagi masyarakat.

Tabel 2.45
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai Tahun 2020

Uraian	Kondisi Jalan					Total Panjang Jalan
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Tidak Dirinci	
Jalan Kota	326.057	22.924	9.200	4.650	-	362.831
Sumber : Binjai Dalam Angka, 2021						

Dari 362,831 Km jalan Kota yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Binjai, terdapat sepanjang 326,057 Km dengan kondisi jalan yang baik, kemudian terdapat sepanjang 22,924 Km dengan kondisi jalan yang sedang. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak ringan di Kota Binjai terdapat sepanjang 9,200 Km dan dengan kondisi yang rusak berat hanya terdapat sepanjang 4,650 Km.

Tabel 2.46
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kota Binjai Tahun 2016-2020

Jenis	Sumber Air Minum Penduduk Kota Binjai		
	2018	2019	2020
Air Kemasan Bermerek	4,46	3,84	6,27
Air Isi Ulang	58,18	49,23	59,65
Leding	4,73	7,85	3,81
Sumur Bor/ Pompa	9,23	5,01	18,69
Sumur Terlindung	22,37	33,30	11,36
Sumur Tak Terlindung	1,02	0,45	0
Lainnya (mata air, air permukaan, air hujan, lainnya)	0	0,33	0,22

Sumber : Dinas PUPR Kota Binjai, 2021

Dilihat dari sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat Kota Binjai didominasi penggunaan air isi ulang dan sumur bor/ pompa. Dimana masyarakat Kota Binjai mayoritas masih menggunakan air isi ulang sebagai sumber utama air minum mereka. Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Binjai, menggunakan air isi ulang dari 58,18% di tahun 2018 meningkat menjadi 59,65% di tahun 2020. Sumur bor/ pompa/ pumped water dari 9,23% di tahun 2018 meningkat menjadi 18,69% di tahun 2020, dan air kemasan dari 4,46 % di tahun 2018 meningkat menjadi 6,27 % di tahun 2020. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan leding/ plumber water terus menurun dari 4,73% di tahun 2018 menjadi 3,81% di tahun 2020.

Tabel 2.47
Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sanitasi Dasar Sehat Kota Binjai Tahun 2016-2020

Jenis	Tempat Pembuangan Tinja Penduduk Kota Binjai				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tangki Septik	73.332	17.888	17.888	17.888	17.888
Lainnya	-	65	65	65	65

Sumber : Dinas PUPR Kota Binjai, 2021

Infrastruktur sanitasi dasar yang sehat di Kota Binjai jika dilihat dari tempat pembuangan tinja penduduk Kota Binjai hanya terdapat 2 jenis yaitu tanki septik dan lainnya. Dimana untuk penggunaan dan kepemilikan tanki septik pada rumah tangga di Kota Binjai menunjukkan trend penurunan dari 73.332 pada tahun 2016 menjadi 17.888 pada tahun 2020. Kemudian untuk penggunaan jenis lainnya dalam pemanfaatan tempat pembuangan tinja penduduk Kota Binjai menunjukkan trend peningkatan dari yang tidak ada pada tahun 2016 menjadi 65 pada tahun 2020. Kondisi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius, sehingga penggunaan sanitasi dasar yang sehat di Kota Binjai semakin membaik dengan adanya peningkatan penggunaan tangki septik.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Luas lingkungan permukiman kumuh di Kota Binjai menunjukkan penurunan dari 2017 dengan luas daerah kumuh sebesar 604,89 Ha menjadi 386,55 Ha pada tahun 2019. Seiring dengan menurunkan daerah permukiman kumuh di Kota Binjai, terjadi peningkatan persentase rumah layak huni dari 80,89 % pada tahun 2016 menjadi 90,07 % pada tahun 2019. Peningkatan persentase rumah layak huni dan penurunan daerah permukiman kumuh tidak terlepas dari kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni yang dilakukan kepada 191 unit pada tahun 2017 dan 190 unit pada tahun 2018. Permukiman layak huni yang ada di Kota Binjai terus menunjukkan peningkatan persentase dari 90,45 % pada tahun 2016 menjadi 97,09 % pada tahun 2019.

Tabel 2.48

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	-	604,89 Ha	501,13 Ha	386,55 Ha	-
Persentase Rumah layak Huni (%)	80,89	80,89	86,10	90,07	-
Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (unit)	-	191	190	-	-
Persentase Permukiman Layak Huni	90,45	97,09	97,09	97,09	-
Jumlah titik LPJU baru yang terpasang	485	558	558	558	1.234
Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan	11.387	12.387	12.387	12.387	13,621
Persentase Lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	80	80	80	80	75

Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum di wilayah kota Binjai	75	80	80	80	80
Sumber : Dinas PKP Kota Binjai, 2021					

Jumlah titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) baru yang terpasang di Kota Binjai terus ditingkatkan dari 485 titik LPJU baru yang terpasang pada tahun 2016 menjadi 1.234 titik LPJU baru yang terpasang pada tahun 2020. Dengan adanya penambahan titik LPJU baru yang terpasang, maka terjadi peningkatan jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara dengan baik yaitu dari 11.387 unit LPJU pada tahun 2016 menjadi 13.621 unit LPJU pada tahun 2020. Sementara itu untuk jumlah persentase LPJU yang memiliki kondisi baik mengalami penurunan dari 80 % pada tahun 2016 menjadi 75 % pada tahun 2020. Seiring dengan penambahan pemasangan titik LPJU baru dan perawatan rutin terhadap seluruh titik LPJU yang ada di Kota Binjai, berdampak terhadap peningkatan persentase luas area jalan Kota yang memiliki LPJU dari 75 % pada tahun 2016 menjadi 80 % pada tahun 2020.

2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami trend penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 terdapat 2,57 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, menurun menjadi 2,11 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2020.

Tabel 2.49
Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,57	2,57	2,57	3,65	2,11
Cakupan patroli petugas Satpol PP	76	76	76	76	76
Rasio penegakan Perda	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Rasio Pos siskamling per jumlah kelurahan	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0,0026	0,017	0,017	0,10	-

Tingkat waktu tanggap (response time rate/15 menit setelah pengaduan) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	36,58	36,58	36,58	36,00	36,00
Sumber : Satpol PP dan BPBD Kota Binjai, 2021					

Sedangkan untuk cakupan patroli petugas Satpol PP selama tahun 2016 hingga tahun 2020 telah melebihi SPM (3x dalam 24 jam) yaitu 76 kali patroli dalam 24 jam. Untuk cakupan penegakan perda di Kota Binjai selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang relatif tetap, yakni mencapai 3,87 %. Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan di Kota Binjai selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah yang konstan, yaitu sebesar 7,67 % yang menunjukkan bahwa dalam satu kelurahan di Kota Binjai terdapat rata-rata 7,67 unit pos siskamling. Sementara itu cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan trend peningkatan dari 0,0026 % pada tahun 2015 menjadi 0,10 % pada tahun 2019, tetapi untuk tingkat waktu tanggap di Kota Binjai belum menunjukkan hasil kinerja yang positif sesuai SPM dalam Permendagri No. 69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap sebesar 75 %, sementara itu waktu tanggap di Kota Binjai belum mencapai standar tersebut dan menunjukkan trend penurunan dari 36,58 % pada tahun 2015 menjadi 36.00 % pada tahun 2020

2.4.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang/ keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Hambatan. Kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pada urusan sosial terdapat empat indikator yang menjadi ukuran kinerjanya, yaitu: jumlah PMKS, penanganan PMKS, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan

jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi. Dari empat indikator RPJMD 2016-2021, semuanya berkinerja relatif tinggi, hal ini ditandai dengan jumlah PMKS yang menurun dari tahun 2017 sampai dengan 2019, dan makin tingginya PMKS yang tertangani.

Tabel.2.50
Realisasi Kinerja Urusan Sosial

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	18.957	19.490	19.032	n.a.
Penanganan PMKS (%)	61,45	65,39	64,55	n.a.
Cakupan PMKS yang dilayani (%)	61,45	65,39	64,55	n.a.
PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	11.649	12.745	12.285	n.a.
Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai, 2021				

Secara umum jumlah PMKS di Kota Binjai terus meningkat dari 18.957 kasus pada tahun 2017 menjadi 19.032 kasus pada tahun 2019, dimana PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Binjai juga meningkat dari 11.649 kasus pada tahun 2017 menjadi 12.285 kasus pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan dan penanganan PMKS di Kota Binjai terus meningkat dari 61,45 % pada tahun 2017 menjadi 64,55 % pada tahun 2019.

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Pada Tahun 2020, sasaran pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan hasil seperti tersaji dalam tabel 2.417.

Tabel 2.51
Realisasi Indikator Pada Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,00	5,95	7,40	6,14	8,67
Jumlah angkatan kerja					
Jumlah bekerja	112.661	114.955	9.373	127.047	127.353
Jumlah mencari kerja	12.511	7.279	936	8.305	n.a
Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindag Kota Binjai tahun 2021					

Dari data ketenagakerjaan di atas, menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 10 % pada tahun 2016 menjadi 8,67 % pada tahun 2020. Jika dibandingkan tahun 2019, maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Binjai mengalami peningkatan yang signifikan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Walaupun jumlah angkatan kerja yang bekerja meningkat dari 112,661 jiwa pada tahun 2016 menjadi 127.353 jiwa pada tahun 2020, tetapi jumlah pengangguran meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan sisi produktivitas menurun sehingga banyak perusahaan yang merumahkan dan bahkan melakukan PHK terhadap karyawannya sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Binjai sangat peduli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani serta menurunnya jumlah rasio KDRT yang cukup signifikan di tahun 2020 ini dibandingkan tahun lalu.

Tabel. 2.52
Rasio KDRT Tahun 2016-2020 Kota Binjai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KDRT	36	3	0	2	6
Jumlah Rumah Tangga	61.518	62.213	62.894	84.382	64,677
Rasio KDRT	0,06	0,005	0,000	0,002	0,006
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
Organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan	3	3	3	3	3
Sumber : Dinas P3AM Kota Binjai, 2021					

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Binjai terus menurun dari 36 kasus pada tahun 2016 menjadi hanya 6 kasus pada tahun 2020. Dimana pada 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah KDRT dari nihil kasus pada tahun 2018 menjadi 6 kasus pada tahun 2020. Untuk penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berhasil di selesaikan 100 % dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Kemudian dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 3 organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang menunjukkan adanya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan di Kota Binjai.

2.4.2.3 Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator skor pola pangan harapan, dan jumlah kelurahan rawan pangan yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53
Jumlah Desa Rawan Pangan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelurahan	37	37	37	37	37
Jumlah Daerah Rawan pangan	5	4	4	4	4
Persentase Daerah Rawan Pangan	13,51	10,81	10,18	10,81	10,81
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95	95	81,2	89,7	85,8
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2021					

Daerah rawan pangan di Kota Binjai terus mengalami penurunan dari 5 daerah pada tahun 2016 menjadi 4 daerah pada tahun 2020. Dimana jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan di Kota Binjai yang berjumlah 37 kelurahan, maka persentase daerah rawan pangan juga menunjukkan penurunan dari 13,51 % pada tahun 2016 menjadi 10,81 % pada tahun 2020. Tetapi untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Binjai menunjukkan kondisi yang menurun, yaitu pada tahun 2016 bernilai 95 menjadi 85,8 pada tahun 2020.

Ketersediaan pangan utama di Kota Binjai hanya untuk jagung saja yang terpenuhi, sementara untuk bahan pangan beras dan kedelai belum bisa dipenuhi oleh ketersediaan produksi kedua bahan pangan tersebut. Sementara untuk ketersediaan daging sudah bisa terpenuhi pada tahun 2019, walaupun sebelumnya dan sesudahnya belum terpenuhi. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kota Binjai untuk bisa menyediakan ketersediaan pangan utama seperti beras dan daging sehingga ketersediaan dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan juga untuk menjaga stabilitas harga barang pokok maupun barang dan jasa lainnya yang terkait sehingga kondisi perekonomian secara umum di Kota Binjai bisa lebih dikendalikan.

Tabel 2.54
Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung, Kedele, Daging)
Di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beras					
Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	88.987	92.491	80.848	100,33	94,5
Kebutuhan Konsumsi perkapita (ton)	23.839	25.058	22.143	27.753	26.464
Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*) (Ton)	11.102	10.407	9.763	8.327	9.268
Jagung					
Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	0,365	0,255	0,657	1,022	0,0365
Kebutuhan (Konsumsi + Industri) Per Tahun (Ton)	97,7	69,222	180,71	282,682	10,19
Produksi Jagung (Ton)	9.426	10.250	9.569	8.379	8.260
Kedele					
Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	4,344	3,468	3,030	3,942	1,825
Kebutuhan (Konsumsi + Industri) Per Tahun (Ton)	1.163,7	939.436	3.030	-	509,726
Produksi Kedele (Ton)	10	-	140	-	75
Daging Sapi					
Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	1,569	0,876	3,577	1,934	3,394
Kebutuhan Konsumsi per Tahun (ton)	267,9	237,331	357,7	535,08	948,09

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Daging Yang diharapkan (Ton)	220,9	231,6	435,9	336	222
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2021					

2.4.2.4 Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 Tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah Negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Dalam bidang

pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

2.4.2.5 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Kinerja pencemaran status mutu sungai Kota Binjai masih termasuk dalam kondisi cemar ringan. Untuk penanganan sampah di Kota Binjai menunjukkan kondisi yang konstan jika dilihat dari rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 323, sehingga timbunan sampah yang terlayani mengalami peningkatan dari 2.904 m³ pada tahun 2016 menjadi 280.192,37 m³ pada tahun 2020. Kemudian rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah kota Binjai juga menunjukkan peningkatan dari hanya 3 % pada tahun 2016 meningkat menjadi 8 % pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 rasio ruang terbuka hijau mengalami peningkatan sehingga menjadi 10 %. Kondisi ini tetap harus bisa menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Binjai untuk bisa memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga pemenuhan fasilitas umum bagi masyarakat juga bisa terpenuhi.

Sementara itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka indikator yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan data yang tersedia, besarnya nilai indikator IKLH Kota Binjai pada tahun 2020 sebesar 47,1. Besarnya nilai IKLH menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup di Kota Binjai masuk dalam kategori sangat kurang baik.

Tabel 2.55

Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tempat pembuangan sampah	323	323	323	323	323

(TPS) per 1.000 Penduduk					
Timbunan Sampah (m ³)/ Ton	2.904	27.578,03	100.346	137.845	NA
Timbunan sampah terlayani (m ³)	2.904	27.578,03	100.346	280.192,37	NA
Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Kota Binjai (%)	3	8	8	8	10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	NA	NA	NA	47,1
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, 2021					

Rata-rata timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Binjai menunjukkan pergerakan yang dinamis, sementara untuk sampah yang terangkut menunjukkan trend peningkatan dari 84 m³ pada tahun 2016 menjadi 88,7 m³ pada tahun 2017, dimana pada tahun 2018 menurun menjadi 83 m³ tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 29.752 m³. Pada tahun 2020 seiring peningkatan timbulan sampah masyarakat yang mencapai 5.808.537 m³ maka sampah yang terangkut juga meningkat signifikan menjadi 10.163,55 m³.

Tabel 2.56
Rata-rata Timbulan Sampah dan Sampah Terangkut Tahun 2016-2020 Kota Binjai

Tahun	Timbulan Sampah (m ³)	Sampah Terangkut (m ³)	Keterangan
2016	130.745	84	Rata-rata perhari-Timbulan = 130.745 M=84 M
2017	134.000	88,7	Rata-rata perhari-Timbulan = 134M=88,7 M
2018	130.367	83	Rata-rata perhari-Timbulan = 130.367 M=83 M
2019	137.845	29.752	Rata-rata perhari-Timbulan = 137.845 M=29.752 M
2020	5.808.537	10.163,55	Rata-rata perhari-Timbulan = 5.808.537M=10.163,55M
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, 2021			

2.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.57
Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat validasi database kependudukan (%)	100	100	100	100	100
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	79,74	87,82	92,77	97,28	97,97
Rasio keluarga ber KK (%)	99	99	98,31	99	97,67
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	72,55	61,85	89,04	89,62	95,43
Rasio pasangan berakte nikah (%)	100	100	67	68	70
Rasio penduduk ber NIK (%)	100	100	100	100	100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, 2021					

Secara umum capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Binjai selama kurun waktu 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Dimana selama kurun waktu tersebut untuk tingkat validasi database kependudukan dan rasio penduduk ber NIK telah mencapai 100 %. Kemudian untuk rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk juga meningkat dari 79,74 % pada tahun 2016 menjadi 97,97 % pada tahun 2020.

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh bayi berakte lahir yang rasionya meningkat dari 72,55 % pada tahun 2016 menjadi 95,43 % pada tahun 2020. Untuk keluarga ber KK menunjukkan penurunan dari 99 % selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, walaupun pada tahun 2018 rasio keluarga ber KK sedikit menurun menjadi 98,31 % kemudian di tahun 2020 kembali turun menjadi 97,67 %. Sedangkan untuk rasio pasangan berakte nikah cenderung menurun dari 100 % pada tahun 2016

menjadi 70 % pada tahun 2020 dimana pada 3 tahun terakhir sudah menunjukkan peningkatan dari 67 % pada tahun 2018.

2.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2020 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK mencapai 43 buah.

Tabel 2.58
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LPM	42	42	42	42	42
PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
Jumlah Kelompok binaan PKK	43	43	43	43	43
Persentase posyandu aktif	100	100	100	100	100
Sumber : Dinas P3AM Kota Binjai, 2021					

2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Tabel 2.59
Rasio Akseptor KB di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Akseptor KB	29.790	29.985	31.479	31.555	31.809
Jumlah Pasangan Usia Subur	40.343	40.780	43.119	43.292	43.852
Rasio Akseptor KB	74,29	75,35	73,00	72,89	72,53
Cakupan PUS unmet need (%)	11,18	15,31	13,39	13,45	-
Cakupan PUS yang istrinya <20 th (%)	1,58	0,89	0,89	0,88	-
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai					

Tren perkembangan rasio akseptor KB per 1.000 pasangan usia subur (PUS) menunjukkan peningkatan dari kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017, yaitu dari 74,29 % meningkat menjadi 75,35 %. Tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2019, rasio akseptor KB mengalami penurunan yaitu sebesar 73 % dan 72,89 % kemudian kembali menurun menjadi 72,53 % pada tahun 2020.

Untuk pasangan usia subur unmet need yang merupakan pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi menunjukkan tren peningkatan dari 11,18 % pada tahun 2016 menjadi 13,45 % pada tahun 2019. Kondisi ini perlu disiasati dan menjadi perhatian untuk bisa dikendalikan untuk bisa menjaga laju pertumbuhan penduduk. Sementara untuk pasangan usia subur yang mana istrinya <20 tahun menunjukkan tren penurunan dari 1,58 % pada tahun 2016 menjadi 0,88 % pada tahun 2019.

Tabel 2.60
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	264.687	267.901	270.926	273.892	279.302
Jumlah Rumah Tangga	61.518	62.213	62.894	63.546	64.677
Rata-rata anggota rumah tangga	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21

Rasio Ketergantungan penduduk	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai, 2021					

Rata-rata anggota rumah tangga menunjukkan perkembangan yang stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu tetap pada angka 4,35 anggota per rumah tangga. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh rata-rata jumlah anak per keluarga yang juga tidak berubah dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu sebesar 2,21 anak per keluarga. Perkembangan data tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Binjai untuk mempertahankan dan menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga rasio ketergantungan penduduk di Kota Binjai bisa diturunkan dari 0,46 % pada tahun 2016 menjadi 0,45 % pada tahun 2020.

2.4.2.9 Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Tabel 2.61
Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan angkutan umum massal	Koridor	-	19	19	19	19
Ketersediaan terminal						
- Jumlah Terminal	Unit	-	2	2	2	2
Persentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk						
- Jumlah penumpang moda transportasi massal	Orang	-	482.625	482.905	482.755	482,755
Jumlah Titik atau ruas rawan macet	Titik/ruas rawan macet	-	5	5	5	5

Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	-	1.006	599	449	449
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021						

Terdapat 19 koridor angkutan umum yang beroperasi di Kota Binjai dengan jumlah terminal sebanyak 2 unit untuk melayani penumpang moda transportasi massal yang menunjukkan trend peningkatan dari 482,625 penumpang pada tahun 2017 menjadi 482.755 penumpang pada tahun 2020. Kemudian terdapat 5 titik rawan kemacetan di Kota Binjai yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Binjai untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jalan sehingga perjalanannya menjadi lebih lancar. Sementara itu, untuk KIR angkutan umum menunjukkan penurunan dari 1.006 unit pada tahun 2017 menjadi hanya 449 unit pada tahun 2020 yang telah melakukan uji KIR untuk armada angkutan umumnya. Kondisi ini harus juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Binjai untuk bisa lebih tegas sehingga para pengelola angkutan umum akan melakukan uji KIR untuk seluruh armadanya sehingga akan membantu kinerja Pemerintah Kota Binjai untuk sektor lainnya yang terkait.

Tabel 2.62
Kondisi Lalu Lintas Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rambu lalu lintas terpasang	Unit	480	242	242	242	242
Panjang marka jalan	m ²	5.089	121.236,16	121.236,16	121.236,16	121.236,16
ATCS	Simpang	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021

Terjadi penurunan jumlah rambu lalu lintas yang terpasang, yaitu dari 480 unit pada tahun 2015 menjadi 242 unit pada tahun 2020. Dimana untuk panjang marka jalan terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu dari 5.089 m² pada tahun 2016 menjadi 121.236,16 m² pada tahun 2020. Namun, sampai saat ini di Kota Binjai masih belum

terdapat Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang dan beroperasi di persimpangan yang ada di Kota Binjai.

2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Jaringan Komunikasi Kota Binjai Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah jaringan Telepon Genggam	-	-	-
Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	4.410	4.410	4.410
Total Jaringan Komunikasi (1+2)	4.410	4.410	4.410
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, 2021			

Dalam konteks perkembangan moda komunikasi dasar berbasis Public Switched Telephone Network (PSTN) di Kota Binjai, ditunjukkan dengan indikator jumlah jaringan telepon stasioner yang dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 yaitu sebanyak 4.410 jaringan dan di tahun 2020 tetap berjumlah 4.410 jaringan. Sementara untuk jumlah jaringan telepon genggam sampai saat ini belum bisa didata.

Tabel 2.64
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kota Binjai Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	1	1	1
Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	57	57	57
Total Jenis Surat Kabar (1+2)	58	58	58
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, 2021			

Secara umum media massa cetak di Kota Binjai berjumlah 58 untuk kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 yang tidak mengalami perubahan. Adapun jenis media massa cetak berskala nasional yang ada di Kota Binjai sebanyak 1, sedangkan sisanya sebanyak 57 merupakan media massa cetak skala lokal.

Tabel 2.65
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kota Binjai Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah penyiaran radio lokal	3	3	3
Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1
Jumlah penyiaran TV lokal	-	-	-
Jumlah penyiaran TV nasional	1	1	1
Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, 2021

Untuk jumlah penyar radio maupun TV yang ada di Kota Binjai juga tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 5 orang dengan rincian 3 orang merupakan penyar radio lokal, kemudian terdapat 1 orang penyar radio nasional dan 1 orang lainnya merupakan penyar TV nasional. Sementara itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang cepat (real time). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah warung telekomunikasi dan warung internet serta rasionya terhadap jumlah penduduk di Kota Binjai untuk tahun 2018 dan tahun 2020 tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Kota Binjai Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	273.892	276.597	279.302
Jumlah Wartel	0	0	0
Jumlah Warnet	112	126	126
Rasio Wartel	0	0	0
Rasio Warnet	0,0004	0,0004	0,0004

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

Jumlah warung internet yang terdata di Kota Binjai mengalami peningkatan dari 112 unit di tahun 2018 menjadi 126 unit di tahun 2020, dimana rasio warnet terhadap jumlah penduduk relatif konstan yaitu sebesar 0,0004. Kondisi ini tercipta karena peningkatan jumlah warnet yang terdata cukup seimbang dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Binjai.

2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum persentase koperasi aktif di Kota Binjai dalam kurun waktu 2017 hingga 2020 menunjukkan tren penurunan dari 59,73 % pada tahun 2017 menjadi 39,81 % pada tahun 2020. Omset total seluruh koperasi di Kota Binjai pada tahun 2017 yang mencapai Rp 80,9 milyar dan menurun menjadi Rp 69,5 milyar pada tahun 2020, kondisi yang sama juga terjadi untuk indikator total aset koperasi yang menurun dari Rp. 92,3 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 72,5 milyar pada tahun 2020. Hal ini sedikit banyaknya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat yang menjadi anggota koperasi mengurangi konsumsi untuk kebutuhan lainnya di luar kebutuhan pokok sehingga kegiatan utama koperasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Data berikut merupakan kinerja urusan koperasi, usaha kecil & menengah pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2017-2020

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
Data Jumlah UMKM					
Jumlah UMKM	Unit	-		-	-
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	8.550	6.863	9.971	18.181

Data Kelembagaan UMKM		-			
Jumlah tenaga kerja	Orang	28,643	20,051	-	-
Jumlah Omset	Rupiah	285.450.000.000	-	-	-
Fasilitasi permodalan KUMKM	Rupiah	18.924.500.000	-	-	-
Data kelembagaan koperasi					
Jumlah koperasi aktif	Unit	132	132	88	88
Jumlah seluruh koperasi	Unit	221	221	221	221
Persentase koperasi aktif	Persen	59,73	59%	39%	39,81%
Jumlah omset koperasi	Rupiah (juta)	80.936.761.491.-	90.881.440.390.-	92.780.340.400.-	69.755.406.000
Jumlah asset koperasi	Rupiah (juta)	92.334.266.235.-	120.500.150.200.-	138.696.154.234.-	72.549.224.652
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai					

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja yang relatif cukup banyak serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Dimana jumlah UMKM di Kota Binjai selama kurun waktu 2017 hingga 2020 menunjukkan perkembangan yang dinamis, di tahun 2017 jumlah UMKM mencapai 8.550 unit kemudian menurun menjadi 6.863 unit UMKM pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 9.971 unit UMK pada tahun 2019 kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 18.181 unit UMKM. Untuk penyerapan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan jumlah UMK itu sendiri, dimana pada saat jumlah UMK turun pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMK juga menurun dari 28.643 orang pekerja pada tahun 2017 menjadi 20.051 orang pekerja pada tahun 2018. Sementara omset yang berhasil dihimpun oleh UMK di Kota Binjai pada tahun 2017 mencapai Rp. 285,4 milyar dengan fasilitas permodalan untuk KUMKM di tahun 2017 sebesar Rp. 18,9 milyar.

2.4.2.12 Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.68
Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Kota Binjai Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor	512	2	514
2017	Jumlah Investor	395	3	398
2018	Jumlah Investor	434	6	440
2019	Jumlah Investor	780	2	782
2020	Jumlah Investor	-	-	990

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Binjai

Jumlah perusahaan PMDN maupun PMA di Kota Binjai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan pergerakan yang dinamis. Dimana pada tahun 2015 jumlah perusahaan PMDN sebanyak 1.466 unit kemudian menurun menjadi 512 unit pada tahun 2016 dan kembali turun menjadi 395 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah perusahaan PMDN kembali meningkat menjadi 434 unit dan terus bertambah pada tahun 2019 menjadi 780 unit. Sementara untuk perusahaan PMA di Kota Binjai pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 2 unit. Kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 3 unit dan terus bertambah menjadi 6 unit pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, perusahaan PMA di Kota Binjai kembali menurun menjadi hanya 2 unit.

Untuk total nilai investasi di Kota Binjai cenderung meningkat selama kurun waktu 2016 sampai 2020, dimana pada tahun 2016 terdapat total investasi sebesar Rp. 86,2 + U\$ 7.000.000. Kemudian pada tahun 2017 sedikit menurun menjadi Rp. 80,8 milyar dan meningkat signifikan menjadi Rp. 814,3 milyar di tahun 2018 sebelum kembali menurun menjadi Rp. 512,7 milyar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dengan

jumlah proyek mencapai 990 terjadi peningkatan nilai investasi yang signifikan menjadi Rp. 916,4 milyar.

Tabel 2.69
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Binjai Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	514	Rp. 86.245.550.492 + U\$ 7.000.000
2017	398	80.811.500.000
2018	440	814.301.910.159
2019	782	512.708.185.974
2020	990	916.408.795.440

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Binjai

2.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga antara lain jumlah organisasi dan sarpras kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.70
Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Binjai Tahun 2016-2020

Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	55	55	61	22	22
Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	7	9	10

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Jumlah organisasi olahraga di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari 55 organisasi pada tahun 2016 menjadi 22 organisasi pada tahun 2020. Dimana banyaknya jumlah kegiatan olahraga di Kota Binjai relatif stabil setiap tahunnya, yaitu sebanyak 9 kegiatan, kecuali pada tahun 2018 yang sedikit berkurang menjadi 7 kegiatan saja dan pada tahun 2020 yang bertambah menjadi 10 kegiatan.

Tabel 2.71
Perkembangan Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Kepemudaan	55	55	61	22	22
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	8	11	7

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai

Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari 55 organisasi pada tahun 2016 menjadi 22 organisasi pada tahun 2020. Dimana banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Binjai cenderung bertambah setiap tahunnya, yaitu dari 5 kegiatan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 8 kegiatan pada tahun 2018 dan bertambah menjadi 11 kegiatan pada tahun 2019 walau di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7 kegiatan.

Tabel 2.72
Perkembangan Olahraga Kota Binjai Tahun 2016-2020

Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah klub olahraga per 10.000 Penduduk	42	42	42	166	112
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	2	2	2	3	3
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai					

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk di Kota Binjai cenderung meningkat dari 42 klub per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 166 klub per 10.000 penduduk pada tahun 2019 walau di tahun 2020 menurun menjadi 112 klub per 10.000 penduduk. Dimana jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk di Kota Binjai cenderung tetap dari tahun 2016 hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 2 gedung per 10.000 penduduk. Pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 3 gedung per 10.000 penduduk.

Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota Binjai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Binjai sampai saat ini belum tersedia. Sedangkan jumlah lapangan olahraga di Kota Binjai cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu dari 16 lapangan pada tahun 2016 menjadi 28 lapangan di tahun 2020.

Tabel 2.73
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) dan Lapangan Olahraga Tahun 2016-2020 Kota Binjai

Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik Swasta)	-	-	-	-	-

Lapangan Olahraga	16	16	16	28	28
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai					

2.4.2.14 Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2020, pelaksanaan urusan statistik melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 13 jenis data. Untuk memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan, secara khusus data terkait dengan PDRB Tahun 2020 Kota Binjai telah menggunakan/menyajikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tahun dasar 2010 atau telah menerapkan konsep SNA 2008 (System of National Accounts) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan metode baru yang merupakan rekomendasi dari United Nations Statistic Division (UNSD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, indikator keberhasilan pada urusan statistik diantaranya adalah ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2016 s.d 2020 telah terpenuhi, bahkan tidak pada kedua jenis produk tersebut saja, rata-rata tersusun 12 s.d 13 jenis buku produk buku statistik daerah pada setiap tahunnya. Selain dari jenis buku, aksesibilitas data-data tersebut semakin mudah. Realisasi kinerja Urusan Statistik pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.74
Realisasi Kinerja Urusan Statistik

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Buku “Kota/Kabupaten Dalam Angka”	1	1	1	1	1
Buku “PDRB Kab/Kota”	1	1	1	1	1
Banyaknya publikasi data (jenis)	18	18	18	18	18
Sumber : Bappeda Kota Binjai, 2021					

2.4.2.15 Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

Tabel 2.75
Realisasi Kinerja Urusan Persandian

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi didalam komunikasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai, 2021

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi di dalam komunikasi perangkat daerah telah mencapai kondisi optimum, yaitu sebesar 100 % selama kurun waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

2.4.2.16 Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Binjai, untuk itu diperlukan fasilitas yang representative sesuai dengan standar pagelaran. Selengkapnya dapat terlihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.76
Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	34	34	34	38	38
Jumlah gedung kesenian per 10.000	0	0	1	1	1

Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	4	4	4	4	0
Bangunan Cagar Budaya	1	1	1	1	2
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai					

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk di Kota Binjai meningkat dari 34 grup pada tahun 2016 menjadi 38 grup pada tahun 2020. Kemudian jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk yang tadinya pada tahun 2016 dan 2017 belum tersedia, maka mulai tahun 2018 hingga 2020 telah tersedia sebanyak 1 gedung per 10.000 penduduk di Kota Binjai. Sementara itu penyelenggaraan festival seni dan budaya yang cenderung tetap dari tahun 2016 hingga tahun 2019, yaitu berjumlah 4 kegiatan per tahunnya. Sedangkan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak diselenggarakan. Bangunan cagar budaya di kota Binjai dari tahun 2016 hingga tahun 2019 masih tetap sebanyak 1 unit bangunan dan bertambah menjadi 2 unit bangunan di tahun 2020.

2.4.2.17 Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Kota Binjai. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Sampai dengan tahun 2020, Kota Binjai memiliki 321 perpustakaan dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 13.350 judul buku dengan jumlah buku sebanyak 26.098 buku.

Tabel 2.77
Jumlah Buku Perpustakaan Tahun 2016-2020 Kota Binjai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Judul Koleksi Buku Perpustakaan	9.138	9.411	11.246	11.919	13.350
Jumlah Buku Perpustakaan	18.694	19.494	19.494	24.174	26.098
Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai, 2021					

Jumlah buku yang dimiliki oleh seluruh perpustakaan yang ada di Kota Binjai terus meningkat dari 18.694 buku pada tahun 2016 menjadi 26.098 buku pada tahun 2020. Peningkatan jumlah buku ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah judul buku dari 9.138 judul pada tahun 2016 menjadi 13.350 judul pada tahun 2020.

Tabel 2.78
Jumlah Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	218	218	218	218	218
Perpustakaan Milik Non Pemda	103	103	103	103	103
Total Perpustakaan (1+ 2)	321	321	321	321	321

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai

Dari 321 perpustakaan yang ada di Kota Binjai terdiri dari 218 perpustakaan milik pemerintah dan 103 perpustakaan lainnya merupakan milik swasta. Jumlah perpustakaan milik pemerintah dan swasta ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Binjai cenderung menurun dari 9.323 kunjungan pada tahun 2016 kemudian menurun menjadi 8.051 kunjungan pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 6.368 kunjungan pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 10.088 kunjungan di tahun 2019 sebelum kembali menurun menjadi 2.685 kunjungan di tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi jumlah orang yang bisa berkunjung untuk menghindari kerumunan dan penyebaran pandemi Covid-19.

Tabel 2.79
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	9.323	8.051	6.368	10.088	2.685
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Non Pemda	-	-	-	-	-
Total pengunjung Perpustakaan (1+ 2)	9.323	8.051	6.368	10.088	2.85

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai

2.4.2.18 Kearsipan

Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami penurunan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.80
Perkembangan Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Binjai Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan Arsip secara Baku	1	1	1	1	40
Jumlah Personil Pelatihan Pengelolaan Arsip	2	1	1	40	80
Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai					

Terjadi peningkatan pengelolaan arsip secara baku dari 1 pengelolaan pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 menjadi 40 pengelolaan pada tahun 2020. Kondisi ini didukung dengan peningkatan jumlah personil pelatihan pengelolaan arsip yang meningkat dari 2 personil pada tahun 2016 menjadi 80 personil pada tahun 2020.

2.4.3 Urusan Pilihan

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kota Binjai terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha Mikro kecil dan menengah Kota Binjai. Kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81
Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2016-2020

Jenis Usaha	Tahun	Jumlah Pelaku	Omset/Tahun	Jlh Tenaga Kerja	Ket
Lele Asap	2016	2 klmpk	5,460,000,000	18 org	
	2017	2 klmpk	5,460,000,000	18 org	
	2018	4 klmpk	14,820,000,000	38 org	
	2019	4 klmpk	15,960,000,000	38 org	
	2020	4 klmpk	15,960,000,000	38 org	

Pindang/ Kembung Rebus	2016	7 klmpk	14,400,000,000	79 org	
	2017	7 klmpk	14,400,000,000	79 org	
	2018	7 klmpk	18,240,000,000	79 org	
	2019	8 klmpk	21,600,000,000	79 org	
	2020	8 klmpk	21,600,000,000	79 org	
Ayam Petelur	2016	23 klmpk	5,069,100,801	92 org	aktif
	2017	24 klmpk	5,173,039,296	96 org	aktif
	2018	26 klmpk	5,714,874,204	104 org	aktif
	2019	27 klmpk	5,989,212,657	108 org	aktif
	2020	Na	Na	Na	
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai					

Pelaku usaha Lele Asap di Kota Binjai meningkat dari 2 kelompok pada tahun 2016 menjadi 4 kelompok pada tahun 2019, dimana mampu menambah penyerapan tenaga kerja dari 18 orang pada tahun 2016 menjadi 38 orang pada tahun 2019 dengan omset yang meningkat dari Rp. 5,4 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 15,9 milyar pada tahun 2020. Untuk pelaku usaha Pindang/Kembung Rebus juga meningkat dari 7 kelompok pada tahun 2016 menjadi 8 kelompok pada tahun 2020. Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari 79 orang pada tahun 2016 menjadi 89 orang pada tahun 2020. Omset pelaku usaha pindang/ kembung rebus juga meningkat dari 14,4 milyar menjadi 21,6 milyar. Sedangkan untuk pelaku usaha ayam petelur menunjukkan trend peningkatan dari 23 kelompok dengan jumlah pekerja sebanyak 92 orang dengan omset sebesar Rp. 5 milyar pada tahun 2016 menjadi 27 kelompok dengan banyaknya pekerja sebanyak 108 orang dengan omset sebesar Rp. 5,9 milyar pada tahun 2019.

Tabel 2.82
Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 s.d 2020

Rincian	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Budidaya	3.464,81	3.750,46	4.137,6	4.547,7	4.573,27
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai					

Adapun hasil produksi perikanan budidaya di Kota Binjai yang menunjukkan tren peningkatan dari 3.464 ton pada tahun 2016 menjadi 4.573 ton pada tahun 2020.

Dimana konsumsi ikan/kapita penduduk Kota Binjai juga meningkat dari 43,3 kg per kapita pada tahun 2016 menjadi 87,41 kg per kapita pada tahun 2019, walaupun menurun kembali menjadi 53,36 kg/ kapita pada tahun 2020.

Tabel 2.83
Konsumsi Ikan/Kapita Tahun 2015 s.d 2019

TAHUN	KONSUMSI IKAN/KAPITA (KG)
2016	43,33
2017	26,1
2018	36,57
2019	87,41
2020	53,36
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai	

2.4.3.2 Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dari Tahun 2017 yaitu sebanyak 109.720 kunjungan meningkat pada Tahun 2020 sebesar 125.850 kunjungan wisata. Pada tahun 2019 kunjungan wisata kembali mengalami peningkatan menjadi 125.850 kunjungan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 50.340 kunjungan wisata. Hal ini perlu ditingkatkan lagi melalui upaya promosi dan pengembangan seperti wisata budaya dan wisata kuliner yang ada di Kota Binjai.

Tabel 2.84
Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017 s.d 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Kunjungan Wisata	109.720	119.860	125.850	50.340
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai, 2021				

2.4.3.3 Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani (NTP petani). Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan nisbah antara harga yang diterima petani dari hasil

penjualan komoditas pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsinya. Kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.85
Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani (NTP)	98,61	97,41	99,78	98,79	109,83
Jumlah Kelurahan Rawan Pangan	5	4	4	4	4
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	3,33	3,11	2,97	2,85	3,02
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2021					

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Binjai menunjukkan tren peningkatan dari 98,61 pada tahun 2016 menjadi 109,83 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani tidak sebanding atau lebih sedikit dibandingkan dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Kondisi ini juga menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Binjai yang terus menurun dari 3,33 % pada tahun 2016 menjadi 2,85 % pada tahun 2019, walaupun kembali meningkat menjadi 3,02 pada tahun 2020. Namun, jumlah kelurahan rawan pangan berhasil berkurang dari 5 kelurahan pada tahun 2016 menjadi 4 kelurahan pada tahun 2020.

2.4.3.4 Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.86
Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	26,61	26,61	27,48	27,48	27,48
Jumlah Pasar	18	18	13	13	13
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindag Kota Binjai, 2021					

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Binjai terus meningkat dari 26,61 % pada tahun 2016 menjadi 27,48 % pada tahun 2020. Walaupun jumlah pasar yang ada di Kota Binjai cenderung menurun dari 18 unit pada tahun 2016 menjadi 13 unit pada tahun 2020. Potensi pengembangan sektor perdagangan harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Binjai yang bisa melalui peningkatan pelayanan maupun kualitas sarana prasarana pendukung sehingga akan bisa meningkatkan produktivitas pelaku dunia perdagangan yang akan memberikan sumbangan tambahan terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Binjai.

2.4.3.5 Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variable yaitu kontribusi sector industri terhadap PDRB.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Binjai menunjukkan tren penurunan dari 11,63 % pada tahun 2016 menjadi 11,51 % pada tahun 2018. Dimana pameran industri, perdagangan usaha kecil dan menengah juga berkurang dari 5 kegiatan pada tahun 2016 menjadi 3 kegiatan pada tahun 2019. Cakupan binaan industri makanan ringan di Kota Binjai terus meningkat dari 98 binaan pada tahun 2016 menjadi 110 binaan pada tahun 2019. Kondisi yang sama juga terjadi pada cakupan binaan pengrajin kayu di Kota Binjai, yaitu dari 30 binaan pada tahun 2016 menjadi 40 orang binaan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdata sebanyak 713 usaha industri kecil dan menengah pada dinas tenaga kerja dan perindag Kota Binjai.

Tabel 2.87
Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,63	11,58	11,51	Na	Na

Pameran industri, perdagangan para pengusaha kecil dan menengah	5	5	5	3	Na
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	713	Na
Cakupan binaan industri makanan-ringan (orang)	98	98	100	110	Na
Cakupan binaan pengrajin kayu	30	30	35	40	Na
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindag Kota Binjai, 2021					

2.4.4 Fungsi Penunjang

2.4.4.1 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama Tahun 2016-2020 pelaksanaan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan menghasilkan kinerja seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwal tepat waktu	1	1	1	1	1
Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	85	90	100	100	100
Sumber : Bappeda Kota Binjai, 2021					

Pemerintah Kota Binjai selalu berhasil menyediakan dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan walikota tepat waktu setiap tahunnya. Dimana tingkat kesesuaian program RPJMD dengan Program RKPD terus meningkat dari 85 % pada tahun 2016 menjadi 100 % pada tahun 2018 hingga tahun 2020.

2.4.4.2 Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah terutama dari pajak daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan Perda Pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan online, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun.

Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan aset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran aset menggunakan GIS. Dari permasalahan tersebut diatas menyebabkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Tingkat kemandirian keuangan daerah yang diperoleh dari persentase realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan dari 10,09 % pada tahun 2016 menjadi 12,84 % pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Binjai menurun menjadi 12,38 % dan kembali meningkat menjadi 12,44 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Binjai kembali meningkat menjadi 13,17 %.

Tabel 2.89
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah)	10,09%	12,84%	12.38%	12.44%	13,17%
Sumber : BPKPAD Kota Binjai, 2021					

Momentum peningkatan kemandirian keuangan daerah Kota Binjai ini harus bisa dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Binjai untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan-pendapatan asli daerah yang sangat potensial di Kota Binjai baik itu melalui pembaharuan tarif dasar Pajak Bumi dan Bangunan, penerapan retribusi parkir elektronik maupun pajak-pajak lainnya di sektor perdagangan yang sebelumnya harus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan sarana serta prasarana pendukung.

2.4.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis.

Tabel 2.90
Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya (orang)	527	442	321	313	398
Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional (orang)	360	446	566	271	0
Persentase Pelanggaran Disiplin PNS	0,22	0,22	0,11	0,22	0,18
Sumber : BKD Kota Binjai, 2021					

Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya cenderung berkurang dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2016 terdapat 527 orang pejabat yang mengikuti diklat kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi hanya 313 orang pejabat yang mengikuti diklat. Kondisi yang sama juga terjadi untuk pegawai teknis dan fungsional, dimana pada tahun 2016 terdapat 360 orang pegawai yang mengikuti diklat dan menurun menjadi 271 orang pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2019. Sementara itu untuk tingkat pelanggaran disiplin

yang dilakukan oleh PNS dilingkungan Pemerintahan Kota Binjai berada pada kisaran 0,22 % dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

2.4.4.4 Pengawasan

Capaian dalam urusan fungsi penunjang pengawasan cukup memuaskan. Kota Binjai mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2020. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.91
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase Tindak Lanjut temuan	61,42	72,97	74,03	75.12	82,95
Persentase Pelanggaran Pegawai	0,22	0,22	0,11	0,22	Na
Temuan BPK	49	27	53	-	Dalam proses pemeriksaan

Sumber : Inspektorat Kota Binjai, 2021

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, pemerintah Kota Binjai berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan daerah. Dimana persentase tindak lanjut temuan juga cenderung meningkat dari 61,42 % pada tahun 2016 menjadi 82,95 % pada tahun 2020. Sementara itu temuan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Binjai cenderung meningkat dari 49 temuan pada tahun 2016 menjadi 53 temuan pada tahun 2018. Dimana pada tahun 2019 tidak ditemukan adanya temuan BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Binjai, sedangkan untuk tahun 2020 masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK.

2.4.4.4 Unsur Pendukung

Fungsi Unsur Pendukung ditangani oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Masalah yang dihadapi antara lain belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah.

Terdapat 7 Rancangan Perda yang disetujui oleh DPRD Kota Binjai untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4 ranperda, dimana cakupan peningkatan kapasitas lembaga DPRD pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 90 %. Predikat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (evaluasi SAKIP) memiliki nilai predikat C untuk tahun 2018 dan predikat CC tahun 2019 dan 2020. Adapun jumlah produk hukum yang dihasilkan untuk peraturan daerah cenderung berkurang dari 7 Perda pada tahun 2018 menjadi 2 Perda pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 8 Perda untuk tahun 2020, kemudian peraturan walikota juga menurun dari 48 Perwal pada tahun 2018 menjadi 38 Perwal pada tahun 2019 dan 2020 sementara untuk keputusan walikota cenderung meningkat dari 697 SK pada tahun 2018 menjadi 795 SK pada tahun 2019 dan menjadi 1.069 SK pada tahun 2020.

Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 masing-masing terfasilitasinya dan terselesaikannya 2 kasus pemerintahan. Kemudian untuk kurun waktu yang sama, terdapat 1 kerjasama antar pemerintahan daerah lainnya setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2019 sedangkan di tahun 2020 terdapat 2 kegiatan kerjasama. Adapun tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yang terselesaikan mencapai 85 % untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan tingkat kepuasan masyarakat untuk tahun 2018 sebesar 82,9 % kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 90 % dan menurun menjadi 78 % pada tahun 2020.

Tabel 2.92
Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Jumlah Ranperda yang disetujui oleh DPRD	Ranperda	7	7	4

Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	90	90	Na
Predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	C	CC	CC
Jumlah Produk Hukum:				
a. Peraturan Daerah	Perda	7	2	8
b. Peraturan Walikota	Perwal	48	38	38
c. Keputusan Walikota	SK Walikota	697	795	1069
Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	2	2	2
Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemkot Binjai dengan pemerintah daerah lainnya	Kegiatan	1	1	2
Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan	%	85	85	Na
Survey kepuasan masyarakat	Nilai	82,90	90	78
Sumber : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Binjai, 2021				

2.4.4.5 Kewilayahan

Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 5 Kecamatan di Kota Binjai. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

2.4.5 Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta

belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat.

Tabel 2.93
Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara	31 Ormas, 18 LSM dan 5 OKP	31 Ormas, 18 LSM dan 5 OKP	41 Ormas, 22 LSM dan 9 OKP	46 Ormas, 25 LSM dan 11 Okp
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	100%	100%	100%	100%
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam bidang politik	74%	74%	74%	74%
Sumber : Bakesbang Pol Kota Binjai, 2021				

Jumlah organisasi masyarakat di Kota Binjai meningkat dari 31 ormas pada tahun 2017 menjadi 41 ormas pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 46 ormas pada tahun 2020. Jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Binjai juga bertambah dari 18 LSM pada tahun 2017 menjadi 22 LSM pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 25 LSM pada tahun 2020. Sementara untuk organisasi kepemudaan (OKP) juga meningkat dari 5 OKP pada tahun 2017 menjadi 9 OKP pada tahun 2019 dan menjadi 11 OKP pada tahun 2020. Dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah mencapai titik optimal selama tahun 2017 sampai tahun 2020, yaitu sebesar 100%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik selama tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah sebesar 74 %.

2.5. Aspek Daya Saing

2.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah yang menunjukkan kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya saing bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB.

Tabel 2.94
Indeks Perkembangan PDRB Kota Binjai ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018r	2019*	2020**
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,51	100,87	101,05	100,62	100,38
B	Pertambangan dan Penggalian	106,16	103,60	103,35	103,91	98,72
C	Industri Pengolahan	103,84	103,85	104,41	104,26	96,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	108,00	106,71	104,87	101,87	105,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,98	105,50	102,87	104,18	102,37
F	Konstruksi	106,05	105,94	105,94	106,29	95,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	107,26	107,32	106,79	106,44	98,98
H	Transportasi dan Pergudangan	107,59	107,62	105,33	105,87	93,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,46	104,21	106,09	106,76	92,12
J	Informasi dan Komunikasi	109,22	107,18	107,30	108,95	107,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	102,60	100,83	101,47	101,35	101,66
L	Real Estate	106,49	105,44	106,98	106,31	101,57
M,N	Jasa Perusahaan	104,59	104,61	103,58	103,37	95,29

No	Sektor/Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018r	2019*	2020**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	102,22	102,28	103,80	104,63	99,34
P	Jasa Pendidikan	104,70	104,82	104,82	105,34	101,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,75	105,63	104,94	104,62	98,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,56	103,72	102,80	103,32	98,69
Produk Domestik Regional Bruto		105,54	105,39	105,46	105,51	98,17
Sumber : BPS Kota Binjai						

r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara rata-rata konsumsi perkapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada Tahun 2016 berdasarkan harga berlaku, konsumsi perkapita di Kota Binjai menghabiskan sekitar 20.26 juta rupiah, Tahun 2017 meningkat sebesar 21.96 juta rupiah, Tahun 2018 meningkat sebesar 23.29 juta rupiah dan Pada Tahun 2019 sebesar 25.08 juta rupiah serta menjadi 24.54 juta rupiah di tahun 2020. Kondisi yang sama juga terjadi pada komponen rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita menurut harga konstan yang juga menunjukkan perkembangan yang meningkat dari 14.68 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 15.94 juta rupiah pada tahun 2020.

Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk miskin mementingkan kebutuhan pokok. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Binjai
Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Perkapita	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
ADHB	20.261,03	21.964,40	23.219,95	24.802,68	24.541,39
ADHK 2010	14.682,52	15.331,29	15.797,90	16.308,88	15.937,34
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021					

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.5.1.2 Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT

Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi asset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total konsumsi LNPRT Kota Binjai atas dasar harga berlaku terus meningkat dari Rp. 132,64 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 171,80 milyar pada tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh peningkatan total konsumsi LNPRT Kota Binjai atas dasar harga konstan tahun 2010, yaitu dari Rp. 116,77 milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 139,35 milyar pada tahun 2020.

Tabel 2.96
Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Binjai Tahun 2016-2020 (Miliar rupiah)

Total Konsumsi LNPRT	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
ADHB	132.64	144.39	159.69	176.26	171.80
ADHK 2010	116.77	123.15	134.56	145.47	139.35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

2.5.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Binjai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telpon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Binjai dalam meningkatkan daya saing daerah.

2.5.2.1 Aksesibilitas Daerah

a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berdasarkan data Tahun 2016-2020 dapat diketahui rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, sebagai berikut:

Tabel 2.97
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Binjai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Jumlah Kendaraan	99.464	99.464	99.464	99.464	99.464
Rasio	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021

Panjang jalan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Binjai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sepanjang 2.385 km dengan jumlah kendaraan yang melintasi sebanyak 99.464 unit sehingga setiap kilometer panjang jalan di Kota Binjai dilalui oleh 2-3 unit kendaraan.

b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Berdasarkan data Tahun 2016-2019 dapat diketahui jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Binjai, sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Binjai

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang	Orang	1.414.682	1.414.682	5.451.875	5.451.875	5.451.875
Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021						

Dari data Dinas Perhubungan Kota Binjai terlihat terjadi peningkatan jumlah penumpang yang terangkut oleh angkutan umum di Kota Binjai dari 1.414.682 penumpang pada tahun 2016 menjadi 5.451.875 penumpang pada tahun 2020.

c. Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

Berdasarkan data Tahun 2016-2020 dapat diketahui jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Binjai (melalui terminal), sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum (melalui terminal) Tahun 2016 s.d 2020 Kota Binjai

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
Terminal	1.414.682	-	1.414.682	-	5.451.875	-	5.451.875	-	5.451.875	-
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2021										

2.5.2.2 Penataan Wilayah

a. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rasio ketaatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase realisasi RTRW dibagikan dengan Rencana Peruntukan.

b. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasionya dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase jumlah luas wilayah produktif dibagi dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya.

c. Luas wilayah industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasionya dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase jumlah luas wilayah industri dibagi dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya.

d. Luas wilayah banjir

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasionya dapat dihitung dengan rumus persentase jumlah luas wilayah banjir dibagi dengan jumlah luas wilayah budidaya.

e. Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Rasionya dapat dihitung dengan rumus persentase jumlah luas wilayah kekeringan dibagi dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya.

f. Luas wilayah perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Rasionya dapat dihitung dengan rumus persentase jumlah luas wilayah perkotaan dibagi dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya.

2.5.2.3 Fasilitas Keuangan (Bank dan Non Bank)

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Berdasarkan data Tahun 2016-2020 dapat diketahui jenis dan jumlah Bank dan Cabangnya yang ada Kota Binjai, sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Jenis dan Jumlah Bank di Kota Binjai Tahun 2016 s.d 2020

Sektor	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum					
Konvensional	12	12	12	12	12
Syariah	3	3	3	3	3
BPR					
Konvensional	-	-	-	-	-
Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah	15	15	15	15	15
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di Kota Binjai terdapat 12 unit bank dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rincian untuk bank umum konvensional sebanyak 12 unit dan bank umum syariah sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk BPR baik yang konvensional dan Syariah di Kota Binjai sampai saat ini tidak terdata.

2.5.2.4 Ketersediaan Air Bersih

Air menjadi salah satu kebutuhan paling utama, sehingga saat ini banyak perusahaan yang memproduksi yang siap minum. PDAM merupakan industri air yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. PDAM Kota Binjai memiliki pelanggan dengan 5 kategori yaitu sosial, rumah tempat tinggal, instansi pemerintah, niaga dan industri.

Tabel 2.101
Jumlah Sumber Air Minum di Kota Binjai Tahun 2016-2020

Jenis	Sumber Air Minum Penduduk Kota Binjai				
	2016	2017	2018	2019	2020
Air Kemasan	-	-	4,46	3,84	6,27
Ledeng	12465	14168	14392	14392	Na
Pompa	-	-	-	-	-
Sumur	65769	44609	45998	45998	Na
Mata Air	-	-	-	-	-
Lainnya (sungai, hujan, dll)	-	-	-	-	-
Sumber : BPS Kota Binjai, 2021					

2.5.2.5 Ketersediaan Energi Listrik

Salah satu indikator dari kinerja PLN adalah dari banyaknya laporan penggunaan listrik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Selama tahun 2018 jumlah tenaga listrik yang disalurkan sebesar 225.102.841 KWh dan susut sebesar 8,18 persen dengan jumlah pelanggan sebanyak 89.601 dengan daya tersambung 104.258.064 KVA.

2.5.2.6 Komunikasi dan Informatika

a. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan HP/Telepon di Kota Binjai dari Tahun 2016-2020 terdapat dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.102
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kota Binjai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang memiliki HP	-	-	-	-	-
Penduduk yang memiliki telepon PSTN	4410	4410	4410	4410	4410
Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	4410	4410	4410	4410	4410
Jumlah penduduk	261790	270.926	273.892	273.892	297.300
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	0,016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0004
Sumber : Dinas Kominfo Kota Binjai, 2021					

Jumlah sambungan telepon PSTN di Kota Binjai relatif tetap dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu sebanyak 4.410 unit sambungan, dimana persentase penduduk yang menggunakan PSTN cenderung menurun dari 0,016 pada tahun 2016 menjadi 0,0004 pada tahun 2020 yang disebabkan peningkatan jumlah penduduk di Kota Binjai untuk setiap tahunnya.

b. Jumlah Warung Telekomunikasi/Warung Internet

Data jumlah Warung Telekomunikasi/Warung Internet yang ada di Kota Binjai dari Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.103
Jumlah Warung Telekomunikasi/Warung Internet Kota Binjai

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah warung telekomunikasi/warung internet	210	210	210	126	117
Jumlah penduduk	261790	270.926	273.892	273.892	279.302
Persentase penduduk yang menggunakan Warnet (1)/(2)	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0004
Sumber : Dinas Kominfo Kota Binjai					

2.5.2.7 Ketersediaan Rumah Makan/ Restoran dan Penginapan

a. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran yang ada di Kota Binjai Tahun 2018-2020 terdapat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.104
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Tahun 2018 dan 2020 Kota Binjai

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
Jenis Usaha Rumah Makan	76	152	76	152	76	152
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai						

b. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

➤ Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

➤ Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas

lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Berdasarkan kriteria diatas diketahui bahwa di Kota Binjai hanya ada Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan Penginapan Lainnya) yang berjumlah 6 hotel. Data jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel yang ada di Kota Binjai Tahun 2019 sampai 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Tahun 2019 dan 2020 Kota Binjai

Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-	-
Hotel Bintang 4	-	-	-	-	-	-
Hotel Bintang 3	-	-	-	-	-	-
Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-	-
Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-	-
Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	6	264	398	6	264	398
Total Jumlah penginapan/Hotel	6	264	398	6	264	398
Sumber : Dinas Pariwisata Kota Binjai						

2.5.3 Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menamakan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

2.5.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Binjai relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2019 jumlah Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kota Binjai sebanyak 41 organisasi. Sedangkan untuk stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat.

2.5.3.2 Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

2.5.3.3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

2.5.3.4 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Data Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha di Kota Binjai Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.106
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perda terkait perijinan	0	0	1	1	1
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	0	0	0	0	0
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	0	0	0
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai, 2021					

2.5.3.5 Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Pembangunan kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi kelurahan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan kelurahan dan

pembangunan sektor yang lain di setiap kelurahan akan mempercepat pertumbuhan kelurahan menjadi kelurahan swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa/kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa/kelurahan maupun peluang yang ada untuk berkembang. Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa/kelurahan swadaya (tradisional); desa/kelurahan swakarya (transisional); dan desa/kelurahan swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa/kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa/kelurahan Terbelakang atau Desa/kelurahan Swadaya

Desa/kelurahan terbelakang adalah desa/kelurahan yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa/kelurahannya. Biasanya desa/kelurahan terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa/kelurahan Sedang Berkembang atau Desa/kelurahan Swakarsa

Desa/kelurahan sedang berkembang adalah desa/kelurahan yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa/kelurahan swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa/kelurahan yang biasanya terletak di daerah peralihan desa/kelurahan terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan/kelurahan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong-royong.

3. Desa/kelurahan Maju atau Desa/kelurahan Swasembada

Desa/kelurahan maju adalah desa/kelurahan yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa/kelurahan swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beranekaragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan/kelurahan maju.

2.5.4 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.6. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yg berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diarahkan untuk pelayanan dasar yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yg digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yg hendak dipenuhi dalam

pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan Dasar.

2.6.1 Bidang Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kota Binjai yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan

Tabel 2.107. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah	37.372	38.252	37.580	37.741	43.490
2	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,00 %	99,90%	99,03%	99,05%	100%
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah	591	1052	1105	1.115	1.250
4	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	70,45%	47,4%	44,75%	44,25%	37,5%

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah	2.150	2.627	2.987	3.17	3.41
6	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	89%	92%	95%	99%	90%

1.2 Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Tabel 2.108. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	5559	5337	5785	5606	5272

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	90.2 %	86.6 %	94.4 %	88.6 %	83.4 %
3	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	4582	4259	5243	5224	5019
4	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	77.9 %	72.4 %	88.8 %	86.1 %	82.7 %
5	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah	5213	4576	5223	5224	5016
6	Perentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	87.9 %	87.8 %	100%	100%	100%
7	Jumlah Balita yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	14,533	13,700	17,976	21,475	17,676
8	Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	Persen	70.6 %	66.6 %	76.34 %	91.0 %	66.8 %
9	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	14,428	7691	0	6708	0
10	Persentase Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Persen	73.8 %	99.2 %	0	83.9 %	0
11	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	NA	NA	0	49,240	4465
12	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Persen	NA	NA	0	26.6 %	2.3 %
13	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	9428	10,394	7761	5384	0
14	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Persen	52.7 %	55.85 %	100%	24.2 %	0
15	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang	Jumlah	1536	1536	9611	8014	11,168

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	mendapat layanan kesehatan						
16	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%	100%	100%	12.9 %	18%
17	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	NA	NA	6601	2300	3245
18	Persentase Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapat layanan kesehatan	Persen	NA	NA	100%	55.1 %	100%
19	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa yang berat yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	NA	NA	263	140	151
20	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa yang berat yang mendapat layanan kesehatan	Persen	NA	NA	100%	36.0 %	38.8 %
21	Jumlah Warga Negara terduga tubercolosis yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	252	252	479	0	1036
22	Persentase Warga Negara terduga tubercolosis yang mendapat layanan kesehatan	Persen	94.06 %	94.06 %	48.4 %	0	100%
23	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan	Jumlah	22	31	18	29	31
24	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

2.6.3 Bidang Perumahan dan Pemukiman

Pencapaian standar minimal bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 2.109. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kota Binjai yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kota Binjai yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	NA	NA	NA	NA	NA

2.6.4 Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pencapaian standar minimal bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 2.110. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah RT	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	NA	NA	NA	NA	NA
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah RT	NA	NA	NA	NA	NA
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	NA	NA	NA	NA	NA

2.6.5 Bidang Bencana Daerah

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 2.111. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Khusus Kebencanaan							
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	57.330	57.165	57.243	57.255	57.165
2	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	21,40	21,10	20,90	20,70	21,10

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Khusus Kebencanaan							
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	80	108	109	110	108
4	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	4.581	2.280	2.730	1.200	10.982
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	%	1,70	0,84	1,01	0,43	4,05
Khusus Kebakaran							
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jiwa	185	135	125	125	125
8	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	%	100	100	100	100	100

2.6.6 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar di Kabupaten/Kota, Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut :

- Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/Kota;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- Tingkat waktu tanggap (*response time rate*);
- Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; dan

- g. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Tabel 2.112. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Jiwa	0	0	0	0	0
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	0	0	0	0	0

2.6.7 Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.113. Pencapaian Standar Minimal Bidang Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Jiwa	732	732	261	51	62

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	%	0	3	8	0	32
3	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Jiwa	1.761	1.761	254	265	265
4	Persentase Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	%	0	0	8	0	0
5	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Jiwa	0	0	0	0	0
6	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	Jiwa	0	0	0	0	0
7	Jumlah Warga Negara tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti	Jiwa	0	0	25	4	32
8	Persentase Warga Negara tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti	%	0	0	0	100	100
9	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA
10	Persentase warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	NA	NA	NA	NA

2.7 Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Binjai baru mencapai 78 dari 205 indikator atau sekitar 38,0%. Dari 17 tujuan yang tercantum dalam TPB, capaian tujuan No. 2 yaitu Menghilangkan Kelaparan telah melewati target sebanyak 8 dari 11 indikator atau sekitar 72,7% telah mencapai target. Tujuan TPB lain yang juga terbanyak dalam melewati target yang telah ditetapkan adalah Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan

Tujuan 9 dengan baik sehingga 7 dari 10 target indikator (sekitar 70,0%) telah terlampaui. Mengingat target waktu untuk TPB berlangsung hingga tahun 2030, kedua tujuan pembangunan ini akan dapat mencapai targetnya lebih awal.

Percepatan pencapaian target TPB perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB lainnya. Bahkan beberapa capaian pada TPB masih belum memiliki indikator yang melewati target yaitu Tujuan No. 7, Akses Energi Terjangkau, Tujuan No. 14, Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, Tujuan No. 13, Perubahan Iklim dan Dampaknya, dan Tujuan No. 15, Melindungi, Merestorasi, dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan. Percepatan pencapaian target TPB juga perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB yang masih dalam level rendah atau di bawah rata-rata capaian TPB Kota Binjai seperti Tujuan No. 3, Menjamin Kehidupan yang Sehat (capaian 35,3%), Tujuan No. 4, Menjamin Pendidikan yang Berkualitas (capaian 23,1%), Tujuan No. 10, Mengurangi Kesenjangan (capaian 33,3%), dan Tujuan No. 11, Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman dan Tangguh (capaian 30,8%).

Pencapaian target indikator TPB di Kota Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya.

Target pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's (SDG's) Kota Binjai dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.114.
Capaian TPB Kota Binjai

No	TPB	Jumlah Indikator TPB	Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target (SS)	Persentase Target yang Sudah Mencapai Target
1	Mengentaskan Kemiskinan	25	8	32,0
2	Menghilangkan Kelaparan	11	8	72,7
3	Menjamin Kehidupan yang sehat	34	12	35,3
4	Menjamin Pendidikan yang berkualitas	13	3	23,1
5	Mencapai Kesetaraan Gender	14	6	42,9
6	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi	15	5	33,3
7	Akses energi terjangkau	1	0	0,0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	19	7	36,8
9	Membangun infrastruktur yang tangguh	10	7	70,0
10	Mengurangi Kesenjangan	6	2	33,3
11	Kota dan Pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh	13	4	30,8
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	0	0,0
13	Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0,0
15	Melindungi, merestorasi dan memanfaatkan ekosistem daratan	2	0	0,0
16	Masyarakat yang inklusif, damai dan berkeadilan	21	8	38,1
17	Kemitraan Global	15	8	53,3
Total		205	78	38,0

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati gambaran umum keuangan daerah melalui kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan kondisi kinerja keuangan tersebut akan dapat diproyeksikan besarnya pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sehingga dapat menjadi kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada periode yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu tersebut akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan proyeksi

keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu merupakan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas target dan realisasi pendapatan daerah, target dan realisasi belanja daerah serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berikut ini adalah gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kota Binjai sehingga dapat dijadikan landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta yang akan tertuang dalam RPJMD Kota Binjai untuk periode 5 tahun kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun. Tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan.

Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan APBD, di bawah ini diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Binjai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pendapatan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	1.048,465	-	915,399	-	87,31
2017	964,903	-7,97	849,443	-7,21	88,03
2018	986,585	2,25	830,840	-2,19	84,21
2019	1.023,408	3,73	882,047	6,16	86,19
2020	984,656	-3,79	851,116	-3,51	86,44
Rata-Rata		-1,45	-	-1,69	86,44
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, secara umum kinerja pendapatan Kota Binjai dilihat dari realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, realisasi pendapatan Kota Binjai sebesar Rp. 915,399 miliar dan meningkat menjadi Rp. 851,116 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya negatif sebesar -1,69%. Namun realisasi pendapatan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya, dimana tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 dibandingkan dengan target secara rata-rata hanya mencapai 86,44%.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan Kota Binjai selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh sumber dana pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 87,48%. Sedangkan sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dengan proporsi rata-rata hanya sebesar 10,65% dan proporsi sumber penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,12%. Kondisi yang ada ini menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian keuangan Kota Binjai dalam pembiayaan

kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi secara perlahan akan menurun.

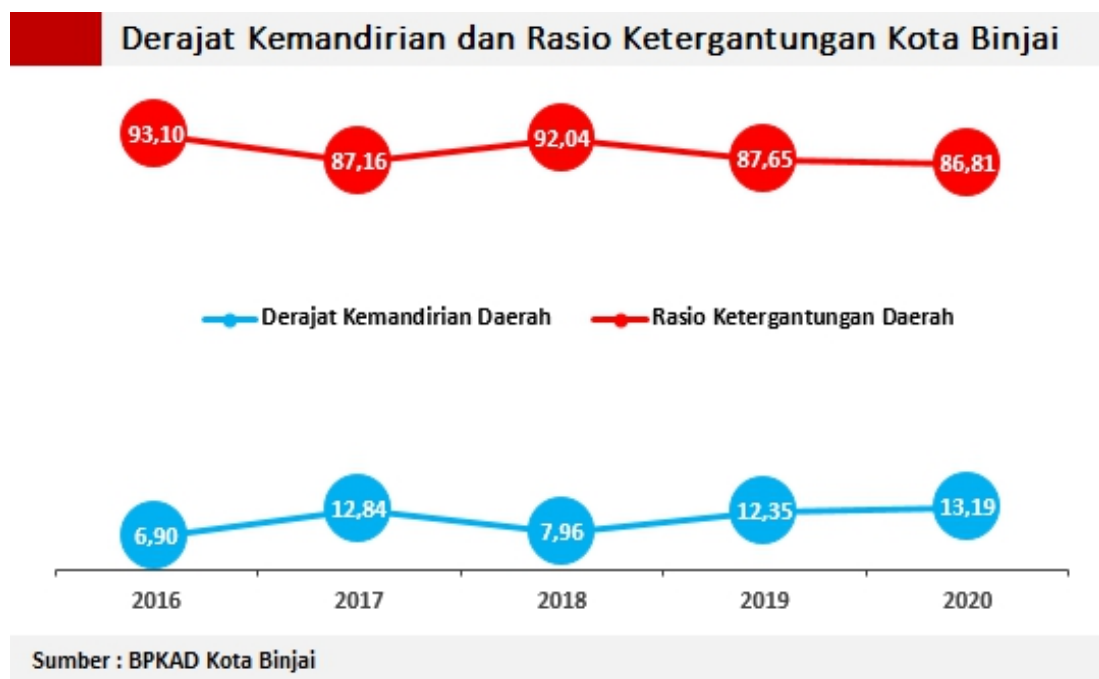


Gambar 3.1. Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Sementara itu, untuk melihat suatu daerah mampu berotonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan maka perlu dilakukan analisis derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah. Analisis derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Untuk derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan

daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah rendah.



Gambar 3.2. Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa derajat kemandirian Kota Binjai mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu 2016-2020 dengan rata-rata derajat kemandirian sebesar 10,65%. Untuk tahun 2016, besarnya derajat kemandirian Kota Binjai sebesar 6,90% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 12,84%. Namun derajat kemandirian Kota Binjai mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,96%. Akan tetapi, derajat kemandirian Kota Binjai kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 12,35% dan sebesar 13,19% pada tahun 2020.

Sejalan dengan besarnya derajat kemandirian Kota Binjai maka besarnya rasio ketergantungan Kota Binjai mengalami perkembangan yang relatif menurun selama kurun waktu 2016-2020 dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 89,35%. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan Kota Binjai sebesar 93,10% dan relatif sedikit menurun menjadi 86,81%

pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Binjai dalam berotonomi selama kurun waktu 2016-2020 masuk dalam kategori kurang (10,1 – 20,0%). Hal ini dikarenakan besarnya derajat kemandirian Kota Binjai secara rata-rata hanya sebesar 10,65% selama kurun waktu 2016–2020. Sedangkan dilihat dari rasio ketergantungan Kota Binjai terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi cenderung relatif masih sangat tinggi dengan rata-rata mencapai 89,35% selama kurun waktu 2016-2020.

A.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini gambaran capaian kinerja PAD Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target PAD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi PAD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	98,605	-	63,137	-	64,03
2017	170,357	72,77	109,109	72,81	64,05
2018	174,438	2,40	66,165	-39,36	37,93
2019	181,288	3,93	108,965	64,69	60,11
2020	184,836	1,96	112,274	3,04	60,74
Rata-Rata		20,27	-	25,30	57,37
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Selama kurun waktu 2016-2020, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp. 63,137 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 112,274 miliar pada tahun 2020 atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,30% dengan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 72,81%. Sedangkan tingkat capaian kinerja PAD selama tahun 2016-2020

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut secara rata-rata mencapai 57,37% dengan tingkat capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 64,05%.

Jika dilihat dari realisasi pertumbuhan PAD sebesar 25,30% dan lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan daerah yang negatif sebesar -1,69% menjadikan sumber pendapatan PAD ini memiliki posisi yang signifikan bagi struktur pendapatan daerah di Kota Binjai. Tingginya laju pertumbuhan PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah mengindikasikan bahwa untuk tahun-tahun mendatang, peranan PAD dalam membentuk struktur pendapatan daerah di Kota Binjai akan menjadi semakin signifikan. Hal ini merupakan sebuah awal yang baik mengingat kuatnya komposisi PAD menandakan bahwa sebuah daerah telah semakin mandiri secara keuangan atau pun tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat semakin kecil.

Terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 yang bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai berdasarkan persentase kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kontribusi Komponen PAD Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Komponen PAD	Kontribusi (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata
Pajak Daerah	54,99	42,58	72,49	48,98	58,54	55,52
Retribusi Daerah	6,95	4,50	6,71	4,31	3,28	5,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	5,12	3,10	8,60	3,12	3,13	4,61
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,94	49,82	12,21	43,59	35,05	34,72
Pendapatan Asli daerah (PAD)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sumber : BPKAD Kota Binjai						

Berdasarkan besarnya kontribusi dari masing-masing komponen PAD menunjukkan bahwa kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Binjai adalah Pajak Daerah yang berkontribusi secara rata-rata sebesar 55,52% selama kurun waktu 2016-2020. Selain Pajak Daerah, komponen lain yang berkontribusi terhadap PAD Kota Binjai adalah Lain-Lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,72% dan diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar 5,15% serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,61% selama kurun waktu 2016-2020.

Secara umum, kontribusi untuk komponen PAD mengalami perkembangan yang baik dengan disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi kontribusi, dimana tren kontribusi menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2016-2020. Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Binjai, diharapkan kontribusi komponen PAD terus meningkat secara signifikan, sehingga struktur PAD pada pendapatan daerah Kota Binjai dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah, sebagai komponen PAD yang memiliki kontribusi paling dominan di Kota Binjai. Berikut ini penjabaran masing-masing komponen PAD Kota Binjai terkait perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pajak Daerah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pajak Daerah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	33,565	-	34,720	-	103,44
2017	45,156	34,53	46,460	33,81	102,89
2018	55,094	22,01	47,960	3,23	87,05
2019	55,094	0	53,367	11,27	96,87
2020	82,481	49,71	65,727	23,16	79,69
Rata-Rata		26,56	-	17,87	93,99
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Untuk penerimaan pajak daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020, realisasi penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari Rp. 34,720 miliar tahun 2016 menjadi Rp. 65,727 miliar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 17,87%. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja penerimaan pajak daerah Kota Binjai

menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 93,99% dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 103,44% dari target yang telah ditetapkan.

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Binjai yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Binjai adalah retribusi daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi daerah Kota Binjai selama kurun waktu tahun 2016-2020.

**Tabel 3.5. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Retribusi Daerah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Retribusi Daerah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	7,399	-	4,385	-	59,26
2017	7,264	-1,82	4,907	11,90	67,55
2018	8,045	10,75	4,438	-9,56	55,16
2019	8,012	-0,41	4,694	5,77	58,59
2020	4,809	-39,98	3,686	-21,47	76,65
Rata-Rata		-7,87	-	-3,34	63,44
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan data di atas memperlihatkan retribusi daerah memiliki kontribusi terbesar ketiga pada PAD Kota Binjai dengan rata-rata sebesar 5,15% selama kurun waktu 2016-2020. Tetapi perkembangan retribusi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,34% dengan pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai -21,47%. Sementara itu, dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk retribusi daerah Kota Binjai cenderung meningkat dari 59,26% pada tahun 2016 menjadi 76,65% pada tahun 2020 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 63,44% dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya adalah sumber PAD Kota Binjai yang cukup penting dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Binjai adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rincian perkembangan target dan realisasi selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)

Tahun	Target HPKD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi HPKD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	3,100	-	3,234	-	104,32
2017	4,213	35,90	3,386	4,70	80,37
2018	7,195	70,78	5,688	67,99	79,05
2019	4,213	-41,45	3,401	-40,21	80,73
2020	3,400	19,30	3,509	3,18	103,21
Rata-Rata		21,13	-	8,92	89,54
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Binjai. Oleh karena laba perusahaan bersifat terbatas dan tidak sedinamis pajak dan retribusi daerah, maka wajar apabila perkembangan sumber pendapatan ini relatif lambat jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki persentase kontribusi paling rendah dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, yakni dengan rata-rata sebesar 4,61% selama kurun waktu 2016-2020.

Namun demikian, realisasi pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,92% selama kurun waktu 2016-2020 dengan realisasi pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 67,99%. Begitupun dilihat dari rata-rata capaian kinerja untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 89,54% selama kurun waktu 2016-2020 dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 104,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja untuk sumber pendapatan ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk sumber PAD terakhir yang peranannya cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Binjai adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian target dan realisasi selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.7. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Lain-Lain PAD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Lain-Lain PAD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	54,541	-	20,797	-	38,13
2017	113,724	108,51	54,356	161,36	47,80
2018	104,103	-8,46	8,079	-85,14	7,76
2019	113,969	9,48	47,502	487,97	41,68
2020	94,143	-17,40	39,351	-17,16	41,80
Rata-Rata		23,03	-	136,76	35,43
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Untuk sumber penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Daerah, yaitu dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,72% selama kurun waktu 2016-2020. Sementara itu, sumber penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah juga memiliki realisasi rata-rata pertumbuhan sebesar 136,76% selama kurun waktu 2016-2020 dengan pertumbuhan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 hingga mencapai 487,97%. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan rata-rata capaian sebesar 35,43% selama kurun waktu 2016-2020. Untuk capaian kinerja tertinggi pada sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 47,80% dan capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 7,76% dari target yang ditetapkan.

A.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Berikut ini adalah target dan realisasi pendapatan transfer Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.8. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pend. Transfer	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pend. Transfer	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	900,621	-	818,059	-	90,83
2017	787,546	-12,56	733,334	-10,36	93,12
2018	812,147	3,12	764,674	4,27	94,15
2019	811,613	-0,07	773,082	1,10	95,25
2020	713,639	-12,07	697,970	-9,71	97,80
Rata-Rata		-5,40	-	-3,68	94,23
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan realisasi pendapatan transfer Kota Binjai cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata yang negatif sebesar -3,68% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,27% dan pertumbuhan terendah sebesar -10,36% pada tahun 2017. Untuk realisasi capaian kinerja menunjukkan rata-rata pendapatan transfer Kota Binjai mencapai 94,23% dengan tingkat capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 97,80%.

Tabel 3.9. Realisasi Proporsi Pendapatan Transfer Kota Binjai

Tahun	Realisasi			Proporsi	
	Pendapatan Transfer	Transfer Pusat	Transfer Daerah	Pusat	Daerah
2016	818,059	747,927	70,132	91,43	8,57
2017	733,334	689,451	43,883	94,02	5,98
2018	764,674	731,874	32,800	95,71	4,29
2019	773,083	705,408	67,675	91,25	8,75
2020	697,970	665,811	32,158	95,39	4,61
Rerata				93,56	6,44
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Dilihat dari struktur pendapatan transfer Kota Binjai, secara rata-rata pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat masih cukup dominan dengan proporsi sebesar 93,56%. Sedangkan rata-rata proporsi pendapatan transfer dari pemerintah daerah yang lebih tinggi (provinsi) hanya sekitar 6,44% per tahun selama kurun waktu 2016-2020. Adapun pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Perimbangan (DP), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi dari komponen transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3.10. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Dana Perimbangan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Realisasi Dana Perimbangan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	800,915	-	747,927	-	93,38
2017	718,315	-10,31	689,451	-7,82	95,98
2018	725,647	1,02	714,374	3,61	98,45
2019	727,507	0,26	705,408	-1,26	96,96
2020	677,019	-6,93	665,811	-5,61	98,34
Rata-Rata		-3,99	-	-2,77	96,62
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang memegang peranan penting dalam struktur pendapatan daerah di Kota Binjai. Dari data di atas, realisasi dana perimbangan Kota Binjai cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar -2,77%. Untuk tahun 2017, realisasi dana perimbangan tumbuh negatif sebesar -7,82% dan pada tahun 2020 juga mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -5,61%. Sementara itu, realisasi capaian kinerja untuk dana perimbangan Kota Binjai secara rata-rata sebesar 96,62% dengan tingkat capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 98,45%.

Tabel 3.11. Realisasi Proporsi Dana Perimbangan Kota Binjai

Tahun	Realisasi				Proporsi		
	Dana Perimbangan	DAU	DBH	DAK	DAU	DBH	DAK
2016	747,927	574,469	31,968	141,491	76,81	4,27	18,92

2017	689,451	564,378	24,320	100,754	81,86	3,53	14,61
2018	714,374	564,378	20,060	129,936	79,00	2,81	18,19
2019	705,408	564,378	24,198	116,832	80,01	3,43	16,56
2020	665,811	535,779	21,120	108,912	80,47	3,17	16,36
Rerata					79,63	3,44	16,93
Sumber : BPKAD Kota Binjai							

Berdasarkan struktur dana perimbangan, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki rata-rata proporsi yang cukup besar hingga mencapai 79,63% dengan realisasi DAU pada tahun 2016 sebesar Rp. 574,469 miliar dan meningkat menjadi Rp. 535,779 miliar pada tahun 2020. Untuk proporsi realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik di kota Binjai secara rata-rata sebesar 16,93% dan realisasi proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya sekitar 3,44% selama kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 3.12. Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target DID	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi DID	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	17,500	-	17,500		100,00
2019	-	-	-	-	-
2020	40,871	-	40,871	-	100,00
Rata-Rata		-	-	-	-
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Untuk komponen lain dari transfer pemerintah pusat yang memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan Kota Binjai adalah dana insentif daerah (DID). Untuk dana insentif daerah (DID), Pemerintah Kota Binjai hanya memperoleh DID pada tahun 2018 sebesar Rp. 17,50 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp. 40,871 miliar atau terealisasi 100% sesuai dengan target yang direncanakan.

**Tabel 3.13. Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Dana Peny. Otsus	Pertumbuhan Realisasi (%)	Realisasi Dana Peny. Otsus	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-

2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
Rata-Rata	-	-	-	-	-
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Selanjutnya, sebagai sumber pendapatan lainnya yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kota Binjai adalah dana penyesuaian otonomi khusus. Tetapi selama periode 2016-2020, Pemerintah Kota Binjai tidak mendapatkan dana penyesuaian otonomi khusus dari Pemerintah Pusat.

Selain pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kota Binjai juga memperoleh pendapatan transfer antar daerah (provinsi) berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Adapun besarnya perkembangan target dan realisasi pendapatan bagi hasil yang diterima Pemerintah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.14. Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pend. Bagi Hasil	Pertumbuhan Realisasi (%)	Realisasi Pend. Bagi Hasil	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	56,017	-	61,313	-	109,45
2017	69,231	23,59	43,883	-28,43	63,39
2018	69,000	-0,33	32,800	-25,26	47,54
2019	84,106	21,89	67,675	106,33	80,46
2020	32,620	-61,22	32,158	-52,48	98,58
Rata-Rata		-4,02	-	0,04	79,88
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pendapatan bagi hasil yang diterima Pemerintah Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang positif dengan realisasi rata-rata tumbuh sebesar 0,04% selama kurun waktu 2016-2020.

Tingginya pertumbuhan pendapatan bagi hasil yang diterima Pemerintah Kota Binjai terjadi pada tahun 2019 hingga mencapai 106,33% atau meningkat dari Rp. 32,800 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 67,675 miliar pada tahun 2019. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerjanya rata-rata sebesar 79,88% selama kurun waktu 2016-2020 dengan tingkat capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 109,45% dan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 47,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk pendapatan bagi hasil yang berasal dari pemerintah provinsi belum mencapai target yang diharapkan.

Untuk bantuan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan tersebut dapat berasal dari Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Adapun perkembangan target dan realisasi bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kota Binjai seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.15. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Bantuan Keuangan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Bantuan Keuangan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	43,690	-	8,819	-	20,19
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
Rata-Rata		-	-	-	20,19

Sumber : BPKAD Kota Binjai

Dari data di atas, besarnya target bantuan keuangan yang diproyeksikan Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2016 sebesar Rp. 43,690 miliar. Akan tetapi, untuk realisasi capaian kinerjanya hanya sekitar 20,19% dari target yang direncanakan pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain (provinsi) masih sangat terbatas dan belum optimal sehingga harus menjadi perhatian para pengambil kebijakan. Hal ini penting karena bantuan keuangan dapat menjadi salah satu sumber alternatif pendapatan Kota Binjai dimasa mendatang.

A.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai undang-undang. Untuk Pemerintah Kota Binjai, perkembangan target dan realisasi sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.16. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Lain-Lain PD	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Lain-Lain PD	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	49,238	-	34,203	-	69,46
2017	7,000	-85,78	7,000	-79,53	100,00
2018	-	-	-	-	-
2019	30,506	-	-	-	-
2020	86,179	182,50	40,871	-	47,43
Rata-Rata		48,36	-	-79,53	72,30
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Binjai sebesar Rp. 34,203 miliar pada tahun 2016 dan sebesar Rp. 7,00 miliar pada tahun 2017 atau terjadi pertumbuhan yang menurun sebesar -79,53%. Sedangkan tahun 2020, realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Binjai sebesar Rp. 40,871 miliar atau tingkat capaian kinerjanya sebesar 47,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 86,179 miliar. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Binjai belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 69,46% dan sebesar 100% capaian kinerjanya pada tahun 2017. Akan tetapi, secara rata-rata capaian kinerja penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 72,30% atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Salah satu sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.17. Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pend. Hibah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pend. Hibah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	49,238	-	-	-	-
2017	7,000	-85,78	7,000	-	100,00
2018	-	-	-	-	-
2019	30,506	-	-	-	-
2020	45,308	48,52	-	-	-
Rata-Rata		-9,32	-	-	-
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Dari data di atas, realisasi pendapatan hibah yang diterima Pemerintah Kota Binjai hanya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 7,00 miliar atau terealisasi 100% dari target yang direncanakan. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020, Pemerintah Kota Binjai menargetkan pendapatan hibah sebesar Rp. 30,506 miliar dan Rp. 45,308 miliar, namun pendapatan hibah tersebut belum dapat terealisasi pada tahun 2019 dan 2020.

Selain pendapatan hibah, untuk komponen lain yang masih menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah dana darurat. Dana Darurat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selama kurun waktu 2016-2020, Pemerintah Kota Binjai tidak mengalokasikan dana darurat tersebut.

Selain hibah dan dana darurat, maka komponen lain untuk sumber pendapatan daerah Kota Binjai yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk komponen

pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan, Pemerintah Kota Binjai tidak menganggarkannya selama kurun waktu 2016-2020, tetapi pada tahun 2016 ada realisasi anggaran sebesar Rp. 34,203 miliar.

B. Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan kota untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026. Kebijakan pengelolaan belanja daerah secara bertahap didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Sementara itu, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan

kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi untuk belanja daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3.18. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2020
(Rp. Miliar)**

Tahun	Target Belanja Daerah	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Belanja Daerah	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	1.047,667	-	945,079	-	90,21
2017	979,176	-6,54	819,486	-13,29	83,69
2018	1.046,852	6,91	863,559	5,38	82,49
2019	1.065,015	1,74	875,991	1,44	82,25
2020	850,213	-20,17	847,590	-3,24	99,69
Rata-Rata		-18,06	-	-2,43	87,67
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan data realisasi selama kurun waktu 2016-2020, rata-rata capaian kinerja belanja Pemerintah Kota Binjai sebesar 87,67%. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja. Besarnya deviasi capaian realisasi belanja perlu diperhatikan untuk setiap tahun anggaran. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan antara lain : 1). Dalam hal penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2). Dalam hal optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada disekitar 100 persen yang mengindikasikan capaian kinerja yang optimal.

Untuk capaian kinerja tertinggi belanja daerah Kota Binjai selama periode 2016-2020, yaitu sebesar 99,69% dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp. 847,590 miliar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan yang negatif sebesar -3,24% dari tahun sebelumnya. Meskipun dengan persentase capaian kinerja bervariasi setiap tahunnya, namun realisasi belanja daerah secara rata-rata mengalami penurunan sebesar -2,43% selama kurun waktu 2016-2020.

Sementara itu, ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 masih didominasi untuk

pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata sebesar 81,86%. Sedangkan realisasi belanja modal memiliki proporsi rata-rata sebesar 17,43% dan belanja tidak terduga sebesar 0,85% serta untuk belanja transfer hanya sebesar 0,07% dari realisasi total belanja daerah.

Tabel 3.19. Proporsi Jenis Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Persen)

No	Jenis Belanja Daerah	Tahun					Rerata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Operasi	78,46	82,21	76,23	86,44	85,98	81,86
2	Belanja Modal	21,47	17,62	23,62	13,56	10,89	17,43
3	Belanja Tidak Terduga	0,06	0,10	0,09	-	3,13	0,85
4	Belanja Transfer	-	0,07	0,07	-	-	0,07
Belanja Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sumber : BPKAD Kota Binjai							

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah di Kota Binjai sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur, khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN serta belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal yang memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah hanya memiliki proporsi rata-rata sebesar 17,43%. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya rasio belanja modal terhadap total belanja daerah dapat menjadi indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, dilihat dari realisasi belanja operasi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata yang negatif sebesar -0,04%. Sedangkan belanja tidak terduga menunjukkan perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,81%. Akan tetapi untuk belanja modal menunjukkan perkembangan yang negatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -12,92% selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 3.20. Realisasi Jenis Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Daerah	Tahun					Rerata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Operasi	741,551	673,737	658,278	757,163	728,739	-0,04
2	Belanja Modal	202,943	144,353	203,937	118,827	92,279	-12,92
3	Belanja Tidak Terduga	0,585	0,807	0,756	-	26,571	15,81

4	Belanja Transfer	-	0,589	0,589	-	-	-
Belanja Total		945,079	819,486	863,559	875,991	847,590	-2,43
Sumber : BPKAD Kota Binjai							

Terkait dengan realisasi belanja operasi, selama kurun waktu 2016-2020 dominasi belanja pegawai masih cukup besar dengan proporsi rata-rata sebesar 64,83% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa dengan proporsi rata-rata sebesar 33,42%. Sementara itu, besarnya proporsi belanja hibah rata-rata sebesar 1,66% dan proporsi belanja sosial serta belanja subsidi hanya sebesar 0,14% dan 0,04%.

Tabel 3.21. Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Operasi Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Operasi	Tahun					Rerata Pertumbuhan	Rerata Proporsi (%)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Pegawai	487,274	470,423	419,727	492,967	435,409	-2,12	64,83
2	Barang dan Jasa	242,493	197,872	229,168	258,106	263,260	3,01	33,42
3	Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Subsidi	0,264	0,264	0,264	0,264	0,264	-	0,04
5	Hibah	10,292	5,179	8,385	5,827	29,806	98,31	1,66
6	Bantuan Sosial	1,228	-	0,735	-	-	-	0,14
Belanja Operasi		741,551	673,738	658,278	757,163	728,739	-0,04	100,00
Sumber : BPKAD Kota Binjai								

Selanjutnya, dilihat dari komponen pertumbuhan belanja operasi, realisasi belanja hibah mengalami peningkatan yang relatif tinggi selama kurun waktu 2016-2020 dengan rata-rata sebesar 98,31%. Untuk realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami peningkatan tetapi rata-rata pertumbuhannya relatif kecil, yakni sebesar 3,01%. Sedangkan realisasi belanja pegawai mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -2,12%. Sementara itu, untuk realisasi belanja subsidi relatif sama besarnya setiap tahun selama kurun waktu 2016-2021, yakni sebesar Rp. 0,264 miliar.

Untuk belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Adapun komponen belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan

jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Berikut ini adalah pertumbuhan dan proporsi jenis belanja modal Pemerintah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020.

Tabel 3.22. Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Jenis Belanja Modal Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)

No	Jenis Belanja Modal	Tahun					Rerata Pertumbuhan	Rerata Proporsi (%)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Belanja Modal Tanah	-	0,144	14,158	-	1,398	9.731,94	2,85
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38,968	42,086	54,785	-	38,824	19,09	29,32
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,585	14,738	47,243	118,827	18,251	63,93	32,76
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138,586	80,523	72,904	-	19,284	-25,68	45,18
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,804	6,861	14,846	-	14,520	98,37	3,93
Belanja Modal		202,943	144,353	203,937	118,827	92,279	-12,92	100,00

Sumber : BPKAD Kota Binjai

Untuk realisasi jenis belanja modal, proporsi terbesar masih diperuntukan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rata-rata sebesar 45,18% dan proporsi belanja modal gedung dan bangunan dengan rata-rata sebesar 32,76%. Sedangkan untuk belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan dengan proporsi rata-rata sebesar 29,32% dan proporsi belanja modal aset tetap lainnya sekitar 3,93% serta belanja modal tanah hanya sebesar 2,85% selama kurun waktu 2016-2020.

Sementara itu, jenis belanja modal untuk tanah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 0,144 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 14,158 miliar pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2020, alokasi belanja modal untuk pengadaan tanah mengalami penurunan menjadi Rp. 1,398 miliar. Namun dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, alokasi belanja modal untuk pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 9.731,94% selama kurun waktu 2016-2020.

Begitupun untuk jenis belanja modal untuk aset tetap lainnya mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 98,37% dan diikuti oleh jenis belanja modal gedung dan bangunan dengan rata-rata sebesar 63,93% serta belanja modal peralatan dan mesin dengan rata-rata

sebesar 19,09% selama kurun waktu 2016-2020. Sedangkan untuk realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata sebesar -25,68%. Namun secara umum, pertumbuhan untuk belanja modal di Pemerintahan Kota Binjai mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -12,92% selama kurun waktu 2016-2020.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Selanjutnya, untuk melihat perkembangan besarnya target dan realisasi pembiayaan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.23. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pembiayaan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pembiayaan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	-0,908	-	48,581	-	5.350,33
2017	14,273	-1.671,92	13,372	-72,47	93,69
2018	30,731	115,31	32,821	145,45	106,80
2019	42,227	37,41	2,935	-91,06	6,95
2020	6,860	-83,75	5,797	97,51	84,50
Rata-Rata		-400,74		19,86	1.128,46

Sumber : BPKAD Kota Binjai

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pembiayaan daerah Kota Binjai cenderung menurun setiap tahunnya dari Rp. 48,581 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 5,797 miliar pada tahun 2020. Namun dilihat dari pertumbuhannya, realisasi pembiayaan daerah Kota Binjai mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 19,86%. Adapun realisasi pembiayaan daerah Kota Binjai yang mengalami penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang mencapai -91,06% dan sebesar -72,47% pada tahun 2017. Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah Kota Binjai menunjukkan kinerja yang cukup baik selama kurun waktu 2016-2020 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 1.128,46%.

Terkait dengan pembiayaan daerah, berikut ini adalah rincian dari setiap komponen pembiayaan daerah Kota Binjai untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 2016-2020.

C.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.24. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Penerimaan Pembiayaan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	51,993	-	52,244	-	100,48
2017	18,163	-65,07	16,351	-68,70	90,02
2018	38,803	113,64	38,803	137,31	100,00
2019	46,680	20,30	6,188	-84,05	13,26
2020	8,660	-81,45	7,536	21,78	87,02

Rata-Rata	-3,14	-	1,59	78,16
Sumber : BPKAD Kota Binjai				

Berdasarkan realisasi capaian kinerja, selama kurun waktu 2016-2020 penerimaan daerah Kota Binjai belum memiliki kinerja yang optimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja untuk penerimaan daerah hanya mencapai 78,16% dari target yang direncanakan. Adapun realisasi capaian kinerja secara optimal terjadi pada tahun 2016 dan 2018 dengan tingkat capaian diatas 100%. Sedangkan tahun 2019 menjadi capaian kinerja terendah dengan tingkat capaian hanya sebesar 13,26% dari target yang direncanakan.

Selanjutnya, sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 3.25. Target dan Realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Kota Binjai Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target SiLPA	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi SiLPA	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	51,993	-	52,244	-	100,48
2017	18,163	-65,07	16,351	-68,70	90,02
2018	38,803	113,64	38,803	137,31	100,00
2019	6,188	-84,05	6,188	-84,05	100,00
2020	8,660	39,95	7,536	21,78	87,02
Rata-Rata		1,12	-	1,59	95,51
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Untuk sumber utama penerimaan pembiayaan daerah Kota Binjai masih berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Selama kurun waktu 2016-2020, realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) secara rata-rata tumbuh positif sebesar 1,59%. Kondisi tersebut disebabkan diantaranya berasal dari penghematan belanja dan sisa dana kegiatan akibat tidak tercapainya capaian target kinerja.

Sedangkan dilihat dari realisasi capaian kinerja, tingkat capaian SiLPA menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 95,51%. Untuk SiLPA yang terlalu besar menunjukkan kurangnya kecermatan perhitungan dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Diharapkan pada masa yang akan datang, SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja daerah.

C.2. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 3.26. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Pengeluaran Pembiayaan	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	52,901	-	3,663	-	6,92
2017	3,890	-92,65	2,979	-18,67	76,58
2018	8,072	107,51	5,982	100,81	74,11
2019	4,453	-44,83	3,253	-45,62	73,05
2020	1,800	-59,58	1,738	-46,57	96,56
Rata-Rata		-22,39	-	-2,51	65,44
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja pengeluaran pembiayaan Kota Binjai masih jauh dari target yang direncanakan dengan tingkat capaian kinerja secara rata-rata sebesar 65,44% dengan capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 6,92%. Namun untuk pertumbuhan pengeluaran pembiayaan, secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -2,51% selama kurun waktu 2016-2020. Untuk tahun 2018, realisasi pertumbuhan pengeluaran pembiayaan Kota Binjai yang hanya tumbuh positif, yakni

sebesar 100,81%. Sedangkan pada tahun 2017, 2019 dan 2020, realisasi pengeluaran pembiayaan Kota Binjai mengalami pertumbuhan yang negatif.

Berkaitan dengan alokasi anggaran, besarnya pengeluaran pembiayaan Kota Binjai digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Binjai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemberian pinjaman daerah. Untuk besarnya target dan realisasi penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Binjai pada BUMD selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.27. Target dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Kota Binjai
Tahun 2016 – 2020 (Rp. Miliar)**

Tahun	Target Penyertaan Modal	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi Penyertaan Modal	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2016	51,870	-	2,632	-	5,07
2017	3,890	-92,50	2,979	13,18	76,58
2018	8,072	107,51	5,982	100,81	74,11
2019	4,453	-44,83	3,253	-45,62	73,05
2020	1,800	-59,58	1,738	-46,57	96,56
Rata-Rata		-22,35	-	5.45	65,07
Sumber : BPKAD Kota Binjai					

Berdasarkan data di atas, pengeluaran pembiayaan Kota Binjai dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pemerintahan Binjai. Besarnya realisasi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp.2,632 miliar pada tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,738 miliar atau mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 5,45%. Namun dilihat dari tingkat capaian kinerja, realisasi penyertaan modal (investasi) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Pemerintah Kota Binjai hanya mencapai 65,07% dari target yang direncanakan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas

belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2016-2021, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Binjai yang antara lain :

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui :
 - a. Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - b. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif dan perijinan;
 - c. Mengembangkan aplikasi E-PBB untuk memberikan kemudahan bagi objek pajak dalam membayar pajak;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Mengembangkan Alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kota (infrastruktur), termasuk

infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan kota.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Kebijakan belanja langsung selama tahun 2016-2021 diarahkan pada pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, cepat, bermutu, dan terjangkau;
 - d. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, drainase, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya;
 - e. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, belanja perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa;
 - f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah lingkaran luar;
 - h. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBD Kota Binjai dengan APBD Provinsi Sumatera Utara, dan antara APBD Kota Binjai dan APBN;
 - i. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2016-2021 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
 - b. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
 - c. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar SKPD.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Binjai adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data realisasi pendapatan daerah sebelumnya dan mengkaitkan dengan data indikator makro sebagai informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kota Binjai tahun anggaran 2022-2026, antara lain:

- Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- Asumsi indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan lain-lain;
- Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kota Binjai untuk tahun anggaran 2022-2026 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3.28. Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Binjai
Tahun 2022 – 2026 (Rp. Miliar)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Daerah	892,375	936,844	983,536	1.032,563	1.074,041
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	123,502	167,971	214,663	263,690	305,168
Pajak Daerah	72,300	98,209	118,119	124,025	135,726
Retribusi Daerah	4,055	4,758	4,996	5,246	7,508
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,861	4,554	4,782	5,021	6,772
Lain-Lain PAD yang Sah	43,286	60,450	86,767	129,399	155,162

Pendapatan Transfer	721,198	721,198	721,198	721,198	721,198
Transfer Pemerintah Pusat	690,288	690,288	690,288	690,288	690,288
Dana Perimbangan	690,288	690,288	690,288	690,288	690,288
Dana Transfer Umum	550,838	550,838	550,838	550,838	550,838
DBH	18,211	18,211	18,211	18,211	18,211
DAU	532,627	532,627	532,627	532,627	532,627
Dana Transfer Khusus	139,450	139,450	139,450	139,450	139,450
DAK	139,450	139,450	139,450	139,450	139,450
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
Transfer Antar Daerah	30,909	30,909	30,909	30,909	30,909
Pendapatan Bagi Hasil	30,909	30,909	30,909	30,909	30,909
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	47,675	47,675	47,675	47,675	47,675
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	47,675	47,675	47,675	47,675	47,675

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kota Binjai tahun 2022-2026 direncanakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah pendapatan daerah Kota Binjai sebesar Rp. 892,375 miliar dan pada tahun berikutnya diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 4-5% dengan memperhatikan potensi penerimaan pendapatan daerah. Pada tahun 2026 ditargetkan pendapatan daerah Kota Binjai sebesar Rp. 1.074,041 miliar atau naik sebesar 20,36% dari tahun 2022.

Dilihat dari besarnya proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Binjai, kontribusi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih mendominasi selama kurun waktu 2022-2026 dengan rata-rata sebesar 73,62%. Selanjutnya diikuti oleh pendapatan asli daerah (PAD) dengan kontribusi rata-rata sebesar 21,51% dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dengan besarnya kontribusi rata-rata hanya sekitar 4,87%.

Berikut ini adalah analisis proyeksi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai selama kurun waktu tahun 2022-2026.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai pada tahun 2022-2026 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai pada tahun 2022-2026 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase berfluktuatif dengan memperhatikan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Binjai.

Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai diproyeksikan mencapai sebesar Rp. 123,502 miliar dan tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 305,168 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 147,10% dari tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan PAD setiap tahunnya sebesar 25,59%. Untuk Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 21,51%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Sementara itu, ditinjau dari proporsi sumber PAD, Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah masih menjadi andalan utama Pemerintah Kota Binjai dalam penerimaan PAD tahun 2022-2026. Proporsi Pajak Daerah terhadap total PAD rata-rata per tahun sebesar 52,71%, disusul oleh Lain-Lain PAD yang Sah dengan rata-rata sebesar 42,27%, Retribusi daerah yang berkontribusi secara rata-rata sebesar 2,58%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata sebesar 2,44%. Masih rendahnya sumber PAD dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan karena investasi Pemerintah Kota Binjai masih terbatas pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Binjai. Oleh karena itu, diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kota Binjai yang mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Binjai.

B. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana

keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Berdasarkan tabel 3.28 di atas menunjukkan pendapatan transfer Kota Binjai selama kurun waktu tahun 2022-2026 diproyeksikan besarnya sama, yakni sebesar Rp. 721,198 miliar. Pendapatan transfer tersebut berasal dari transfer pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp. 690,288 miliar dan transfer antar daerah sebesar Rp. 30,909 miliar selama kurun waktu tahun 2022-2026. Untuk proyeksi penerimaan transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan dan dana insentif daerah, dimana dana insentif daerah selama kurun waktu tahun 2022-2026 diproyeksikan tidak ada penerimaan. Sedangkan proyeksi dana perimbangan selama kurun waktu tahun 2022-2026 yang berasal dari dana transfer umum mencapai Rp. 550,838 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 18,211 miliar dan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 532,627 miliar. Sementara itu, untuk besarnya transfer antar daerah yang akan diterima Pemerintah Kota Binjai yang berasal dari pendapatan bagi hasil diproyeksikan sebesar Rp. 30,909 miliar.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk proyeksi penerimaan Kota Binjai yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan sebesar Rp. 47,675 miliar dan penerimaan ini diperkirakan berasal dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penerimaan yang berasal dari hibah dan dana darurat, Pemerintah Kota Binjai tidak memproyeksikannya sebagai penerimaan selama kurun waktu tahun 2022-2026.

D. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya melalui :

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- c) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah;
- e) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- f) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- g) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
- h) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
- i) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD penghasil;
- j) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- k) Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah;

- l) Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum;
- m) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak;
- b) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- c) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- d) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi;
- e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program

dan kegiatan. Dalam memproyeksikan belanja daerah harus memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kebijakan Pemerintah Kota Binjai terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Adapun analisis proyeksi belanja daerah Kota Binjai disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.29. Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Binjai
Tahun 2022 – 2026 (Rp. Miliar)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Daerah	889,375	933,844	980,536	1.029,563	1.071,041
Belanja Operasi	776,086	815,141	856,418	899,489	934,714
Belanja Pegawai	554,033	567,781	579,137	590,719	602,533
Belanja Barang dan Jasa	200,353	224,588	253,386	283,693	305,864
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
Belanja Hibah	21,425	22,496	23,621	24,802	26,042
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Belanja Modal	108,289	113,703	119,118	125,074	131,327
Belanja Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Belanja Transfer	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.29 di atas, belanja daerah diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan ekonomi, inflasi dan kebutuhan pembangunan Pemerintah Kota Binjai. Pada tahun 2022, belanja daerah Kota Binjai diproyeksikan sebesar Rp. 889,375 miliar dan diperkirakan meningkat menjadi Rp. 1.071,041 miliar pada tahun 2026 atau mengalami kenaikan secara rata-rata sebesar 4,76%. Jika ditinjau dari proporsi belanja daerah, secara rata-rata belanja operasi memiliki proporsi yang cukup besar terhadap total belanja daerah, yakni sebesar 87,31% selama kurun waktu tahun 2022-2026. Sedangkan untuk proporsi belanja modal, secara rata-rata berkontribusi sebesar 12,16% dan proporsi belanja tidak terduga hanya memiliki proporsi terkecil, yakni sebesar 0,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Binjai masih mengalokasikan belanja operasi lebih besar dari belanja modal selama kurun waktu tahun 2022-2026.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja operasi, diproyeksikan meningkat dari Rp. 776,086 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 934,714 miliar pada tahun 2026 atau mengalami kenaikan secara rata-rata sebesar 4,76%.

Untuk proyeksi belanja operasi, pengeluaran terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai yang diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dari Rp. 554,033 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp. 602,533 miliar pada tahun 2026 atau meningkat secara rata-rata sebesar 2,12%. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp. 200,353 miliar menjadi Rp. 305,864 miliar pada tahun 2026 atau rata-rata meningkat sebesar 11,17%. Sementara itu, untuk belanja hibah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya sebesar 5,0% dari tahun 2022 sebesar Rp. 21,425 miliar menjadi Rp. 26,042 miliar pada tahun 2026.

Sedangkan untuk belanja modal, diproyeksikan meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp. 108,289 miliar menjadi sebesar Rp. 131,327 miliar pada tahun 2026 atau meningkat dengan rata-rata sebesar 4,94%. Sementara itu, untuk belanja tidak terduga diproyeksikan besarnya sama selama kurun waktu tahun 2022-2026, yakni sebesar Rp. 5,00 miliar dan untuk belanja transfer tidak diproyeksikan ada selama kurun waktu tersebut.

Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SiLPA). Proyeksi pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Binjai selama kurun waktu tahun 2022-2026.

**Tabel 3.30. Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Binjai
Tahun 2022 – 2026 (Rp. Miliar)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pembiayaan Daerah	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
Penerimaan Pembiayaan	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Pengeluaran Pembiayaan	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel 3.30 di atas memperlihatkan selama kurun waktu tahun 2022-2026, anggaran diproyeksikan mengalami defisit yakni pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Pembiayaan daerah yang defisit tersebut diproyeksikan besarnya sama selama kurun waktu tahun 2022-2026, yakni sebesar Rp. 3,00 miliar. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui proyeksi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, yakni sebesar Rp. 200,00 juta. Selain itu dalam pembiayaan daerah juga dilakukan penyertaan modal untuk

perusahaan daerah ataupun rencana investasi penyertaan modal lainnya, yakni sebesar Rp. 3,200 miliar.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya;
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD;
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah;
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD;
- 2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

3.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Berikut ini besarnya kapasitas riil keuangan daerah Kota Binjai selama kurun waktu tahun 2022-2026.

**Tabel 3.31. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Binjai
Tahun 2022 – 2026 (Rp. Miliar)**

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	892,375	936,844	983,536	1.032,563	1.074,041
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
SiLPA	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Total Penerimaan	892,575	937,044	983,736	1.032,763	1.074,241
Dikurangi					
Belanja Operasi	776,086	815,141	856,418	899,489	934,714
Pengeluaran Pembiayaan	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Total Pengurangan	779,286	818,341	859,618	902,689	937,914
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	113,289	118,703	124,118	130,074	136,327

Berdasarkan perhitungan atas belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dari hasil perhitungan kapasitas riil selanjutnya dilakukan pengalokasian belanja dengan memperhatikan kebijakan prioritas belanja.

Berdasarkan kapasitas riil yang tersedia maka belanja daerah selama 5 (lima) tahun kedepan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.32. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Binjai Berdasarkan Prioritas Anggaran Tahun 2022 – 2026 (Rp juta)

No	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
1	Prioritas I	149.519	155.500	161.720	168.189	174.916
2	Prioritas II	520.539	550.254	581.603	614.672	639.555
3	Prioritas III	219.317	228.090	237.213	246.702	256.570
	Total	889.375	933.844	980.536	1.029.563	1.071.041

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis pembangunan Kota Binjai untuk periode 2021-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kota Binjai. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Binjai ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kota Binjai 2005-2025; telaah terhadap dokumen RPJMN 2019 - 2024; telaah terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 -2023; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap isu nasional dan regional; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada bab ini diuraikan isu-isu strategis Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam proses pembangunan. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perbedaan tersebut diperoleh berdasarkan perbandingan capaian setiap indikator kinerja pembangunan dengan standar (SPM/SDG's/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren), sebagaimana telah dibahas pada bagian

Analisis Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bab II. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

4.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada kondisi capaian pembangunan dan hasil analisis data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan Kota Binjai yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Permasalahan Pokok Pembangunan di Kota Binjai

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi	a. Minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM. b. Jumlah penyandang masalah sosial (PMKS) masih cukup tinggi c. Kegiatan pemberdayaan fakir miskin belum berjalan secara optimal. d. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan dan Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. e. Pelayanan dasar bagi masyarakat miskin seperti penyediaan air minum, dan sanitasi layak masih rendah	a. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengurangan dan pemberhentian tenaga kerja b. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap fakir miskin. c. Rendahnya keterampilan dan inovasi tenaga kerja. d. Terbatasnya akses permodalan. e. Masih tingginya kerentanan penyandang masalah sosial.
2.	Pengangguran yang masih cukup tinggi	a. Masih tingginya penurunan pengangguran b. Pekerja sektor informal yang	a. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak pekerja yang dikurangi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		tinggi c. Pertumbuhan kesempatan kerja yang terbatas	jam kerjanya dan diberhentikan. b. Keterampilan dan keahlian yang masih terbatas c. Investasi PMA dan PMDN yang belum optimal d. Iklim investasi yang belum mendukung
3.	Masih belum optimalnya daya saing pendidikan	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi b. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan c. Belum optimalnya pemerataan guru d. Sarana dan prasarana Pendidikan belum merata. e. Belum optimalnya akses dan kualitas penyelenggaraan PAUD f. Degradasi kultural di kalangan generasi muda	a. Terbatasnya pendapatan masyarakat untuk masuk ke jenjang Pendidikan tinggi. b. Belum tersedianya pemetaan dan pemerataan guru c. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelajar kurang mampu dan berprestasi d. Ketersediaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar kebutuhan e. Masih belum optimalnya dukungan pemerintah terhadap PAUD f. Berkurangnya minat generasi muda dalam mempelajari nilai-nilai agama dan budaya
4.	Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat	a. Rendahnya penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat b. Kesadaran pengelolaan Kesehatan lingkungan yang masih belum optimal c. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan	a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat b. Belum optimalnya pengelolaan sanitasi yang baik

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		d. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan dan gizi bagi penduduk miskin	c. Belum optimalnya sistem rujukan puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) d. Belum optimalnya cakupan imunisasi, dan intervensi gizi masyarakat miskin
5.	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur	a. Belum optimalnya sistem drainase b. Kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan pengguna jalan c. Masih kurangnya fasilitas taman kota dan ruang terbuka hijau d. Terbatasnya sambungan air minum ke rumah tangga	a. Belum optimalnya pembangunan sistem drainase perkotaan b. Belum optimalnya dukungan pendanaan rambu keselamatan c. Terbatasnya kendaraan pengangkut sampah d. Mahalnya biaya untuk penyediaan ruang terbuka hijau baru. e. Terbatasnya pengolahan sumber air baku menjadi air minum.
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	a. Belum maksimalnya pelaksanaan SAKIP b. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik c. Belum optimalnya merit system d. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah	a. Belum optimalnya pelaksanaan penerapan Standard Pelayanan Publik yang telah ditetapkan b. Belum optimalnya penegakkan disiplin ASN c. Budaya kerja OPD yang belum berorientasi outcome d. Belum optimalnya sistem perekrutan dan penempatan ASN e. Belum optimalnya kapasitas dan kuantitas auditor f. Belum optimalnya kesadaran ASN dalam memberikan layanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			publik
7.	Belum optimalnya kualitas lingkungan	a. Penanganan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. b. Menurunnya kualitas air dan udara	a. Belum tersedianya tempat pengolahan dan pemrosesan akhir akhir sampah (TPPAS) b. Berkurangnya tutupan lahan c. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang terbatas d. Pencemaran air yang meningkat

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-2021; (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Berdasarkan identifikasi, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

4.1.2.1. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang terjadi pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- Belum dilakukannya pemetaan dan pemerataan guru;
- Belum meratanya pendidikan dan pelatihan guru;
- Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;
- Masih perlunya peningkatan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan perlu peningkatan kapasitas sesuai dengan standar.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam urusan Kesehatan diantaranya adalah:

- a. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal;
- b. Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal;
- c. Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
- d. Belum optimalnya cakupan imunisasi bayi yang disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi;
- e. Belum optimalnya sistem rujukan pasien dari Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang muncul dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kota dalam kondisi baik;
- b. Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu;
- c. Kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan pengguna jalan;
- d. Masih tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang;
- e. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah;
- f. Masih kurangnya fasilitas taman kota dan ruang terbuka hijau.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang muncul dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup;
- b. Masih lemahnya pemahaman ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan pengelolaan/pembangunan;
- c. Minimnya ketersediaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat;
- d. Masih terdapat kawasan-kawasan kumuh yang belum tertangani dengan baik;
- e. Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman Daerah Aliran Sungai.

5. Urusan Sosial

Permasalahan yang muncul dalam urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakakuratan pemetaan dan pendataan terhadap populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS;
- c. Kurangnya keterampilan yang dimiliki angkatan kerja;
- d. Potensi sumber kesejahteraan sosial belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang muncul dalam urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya penegakan perda;
- b. Masih belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Masih kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan peraturan daerah dengan benar.

4.1.2.2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pangan

Permasalahan yang muncul dalam urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
- b. Belum terjaminnya ketersediaan dan diversifikasi pangan;
- c. Belum optimalnya subsidi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian;
- d. Rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk hasil-hasil pertanian.

2. Urusan Penanaman Modal dan Perizinan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal dan Perizinan diantaranya adalah:

- a. Kurangnya kompetensi aparatur dalam penggunaan aplikasi investasi;
- b. Realisasi investasi masih terbatas;

- c. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi;
- d. Kurangnya informasi terkait potensi investasi;
- e. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

3. Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan UMKM diantaranya adalah:

- a. Kurangnya keterampilan dan kemampuan manajerial pengelola koperasi;
- b. Cukup banyaknya koperasi yang tidak aktif;
- c. Masih terbatasnya jiwa kewirausahaan masyarakat;
- d. Masih sulit untuk mendapatkan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha;
- e. Belum optimalnya fasilitasi UMKM dalam mendapatkan kemudahan legalitas usaha, permodalan, kemitraan serta pendampingan dalam mengembangkan usaha.

4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah:

- a. Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan pemerintahan;
- b. Masih tingginya kesenjangan dalam kesetaraan gender dalam pekerjaan;
- c. Belum optimalnya penanganan komprehensif terhadap Tindakan kekerasan perempuan dan anak;
- d. Kurang optimalnya pengembangan Kota layak anak.

5. Urusan Ketenagakerjaan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Ketenagakerjaan adalah:

- a. Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja;
- b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- c. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru;
- d. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha.;
- e. Belum optimalnya jaminan keselamatan kerja.

6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga adalah:

- a. Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda;
- b. Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Belum berkembangnya kelompok/klub olahraga di Kecamatan;
- d. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. Masih lemahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.

7. Urusan Kebudayaan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kebudayaan adalah:

- a. Pelestarian adat budaya daerah yang semakin kurang dipelihara;
- b. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Binjai diantaranya mencakup kualitas lingkungan hidup dan pelayanan pengelolaan sampah.

- a. Kualitas lingkungan hidup di Kota Binjai diukur berdasarkan penilaian terhadap kualitas air dan udara. Penilaian terhadap kualitas air dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terjadi di Kota Binjai. Untuk menentukan tingkat kualitas udara perkotaan, dilakukan dengan cara mengukur kualitas udara pada beberapa titik pantau, yaitu pada daerah yang diperkirakan menerima dampak polusi udara paling buruk seperti wilayah yang terpapar polusi transportasi dan aktivitas ekonomi;
- b. Pelayanan pengelolaan sampah yang masih terkendala di Kota Binjai disebabkan tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara.

9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Binjai, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan baik secara teknis maupun non teknis;

- b. Belum optimalnya database kependudukan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan data kependudukan.

10. Urusan Perhubungan

Permasalahan transportasi di Kota Binjai berkaitan dengan:

- a. masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (pasar, pedagang kaki lima, pusat perbelanjaan, dan lain-lain), ruas jalan yang sempit, dan persimpangan khususnya pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari;
- b. mengenai kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, baik bagi penumpang yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Permasalahan juga disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas sarana transportasi umum yang masih belum memenuhi standar.

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi dengan server dari Diskominfo, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada;
- b. Basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda-beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.

12. Urusan Statistik

Permasalahan pada urusan statistik di Kota Binjai, diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi, dan validitas data. Masih terbatas perangkat daerah yang mempunyai sistem informasi terstruktur yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sinkronisasi data antar perangkat daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jenis data yang dibutuhkan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan seringkali tidak dimiliki oleh perangkat daerah.

13. Urusan Persandian

Permasalahan pada urusan persandian di Kota Binjai, diantaranya adalah:

- a. Belum terdapat sandiman yang berkualitas;
- b. Belum optimalnya keamanan sistem informasi.

14. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan di Kota Binjai, diantaranya adalah:

- a. Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah;
- b. Masih terbatasnya tenaga pustakawan di Kota Binjai;
- c. Pengelola perpustakaan, baik umum, kelurahan, kecamatan, dan sekolah serta taman bacaan masyarakat masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.

15. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan di Kota Binjai, diantaranya adalah:

- a. Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Binjai melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar;
- b. Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan;
- c. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kota;
- d. Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai.

4.1.2.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang terjadi pada urusan pariwisata adalah:

- a. Kurangnya pembenahan dan pembangunan fasilitas daerah tujuan wisata;
- b. Masih kurangnya kalender even pariwisata;
- c. Belum tersedianya data dan informasi tentang pariwisata secara valid dan lengkap;
- d. Rendahnya kemitraan dalam pengelolaan pariwisata.

2. Urusan Pertanian

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pertanian adalah:

- a. Berkurangnya luas lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan;
- b. Masih rendahnya penggunaan teknologi modern dalam pertanian;
- c. Kurangnya intervensi pemerintah dalam penetapan harga pasar;
- d. Kurangnya sarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

3. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perdagangan adalah:

- a. Hambatan dalam pemasaran produk-produk lokal;
- b. Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9 (sembilan) bahan pokok serta barang beredar;
- c. Belum optimalnya penataan PKL dan perparkiran dengan baik;
- d. Belum optimalnya upaya revitalisasi pasar tradisional.

4. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perindustrian adalah:

- a. Rendahnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal potensi komoditi andalan;
- c. Belum optimalnya pengembangan industri rumah tangga;
- d. Belum optimalnya perlindungan terhadap produk lokal;
- e. Masih minimnya jumlah industri berskala sedang dan besar.

4.1.2.4. Urusan Penunjang

1. Urusan Pemerintahan Umum

Permasalahan yang muncul pada urusan kesekretariatan daerah antara lain adalah:

- a. Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya kapasitas sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tata Kelola pemerintah yang baik;
- c. Belum pernah dilakukannya penelitian independent terkait reformasi birokrasi;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang terjadi pada urusan perencanaan pembangunan daerah adalah:

- a. Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan;
- b. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

- c. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan;
- d. Kurangnya data, informasi terhadap perencanaan dan pelaksana pembangunan;
- e. Masih kurangnya pemahaman dari perencana di tingkat OPD dalam menentukan indikator kinerja kunci (IKK) OPD.

3. Urusan Aparatur dan Kepegawaian

Permasalahan yang terjadi pada urusan aparatur dan kepegawaian adalah:

- a. Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan baik;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- c. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- b. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah.

5. Pengawasan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain:

- a. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap dilakukan dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

4.2. Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait Lainnya

4.2.1. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJPN Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan undang-undang tersebut, visi RPJPN adalah mewujudkan **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.”** Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian yang dimaksud bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, melainkan kemandirian yang dibangun dengan kesadaran akan hubungan saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa, sebagaimana tantangan yang dihadapi di era globalisasi saat ini. Dengan visi kemandirian ini maka diharapkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pembangunan ekonomi bangsa yang maju, dan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta sikap dan kepribadian bangsa yang berkarakter.

Di antara berbagai indikator kemajuan suatu bangsa, SDM yang memiliki kepribadian

bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki kualitas pendidikan yang tinggi merupakan indikator paling fundamental, di samping berbagai indikator kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain lain.

Dalam konteks visi adil dan makmur merupakan manifestasi cita- cita bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang tercermin pada semua aspek kehidupan bangsa, seperti: kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Keadilan juga diindikasikan oleh kehidupan bangsa yang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Sementara bangsa yang makmur adalah bangsa yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Upaya mewujudkan visi pembangunan nasional jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, yang ditempuh dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing, yang ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, dengan cara memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan cara membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan nasional.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yang ditempuh dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari, melalui perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional yang ditempuh dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional, yang diwujudkan dengan cara memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, pembangunan dilaksanakan dengan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada tiap tahapannya, dan bersifat berkesinambungan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. RPJMN Tahap I Tahun 2005-2009, yang diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat;
2. RPJMN Tahap II Tahun 2010-2014, yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian;
3. RPJMN Tahap III Tahun 2015-2019, yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan

sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;

4. RPJMN Tahap IV Tahun 2020-2024, yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

4.2.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup, antara lain:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Disamping itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya, keberadaan RPJM Nasional sangat penting karena memiliki fungsi, antara lain: a). Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga; b). Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; c). Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP); d). Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Selain memiliki fungsi tersebut, RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan menjadi bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional. RPJM Nasional tersebut ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha).

4.2.3. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019-2023 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu *tahap* pementapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu: ***“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”***. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera;

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian;

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

- Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Sementara itu, prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang harus diimplementasikan, yaitu:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, yang akan diimplementasikan dengan :
 - a. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja berskala nasional dan internasional;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelatihan tenaga kerja;
 - c. Mendorong munculnya wirausahawan baru dan pengembangan industri kreatif;
 - d. Mendorong pertumbuhan investasi dan kemudahan perizinan berusaha.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan, yang akan diimplementasikan dengan :
 - a. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan sarana prasarana SMA/ SMK di setiap kecamatan;
 - b. Membangun SMK sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas pendidikan khusus.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang akan diimplementasikan dengan :
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur yang ada serta mendorong dan membangun infrastruktur untuk mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN Mebidangro, KSPN Danau Toba, KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Parawisata Kepulauan Nias) dan Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi seperti Kawasan Simalungun-Batubara-

Asahan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Labuhanbatu dan sekitarnya, Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Kawasan Pengembangan Ekonomi Pantai Barat dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Ekonomi Kepulauan Nias, Kawasan Ekosistem Bahorok, Kawasan Budaya Bawomataluo, Kawasan Bersejarah Barus dan Situs Sejarah Medan-Deli Serdang;

- c. Pembangunan Sport Center Berstandart Internasional dan melahirkan atlet berprestasi terbaik, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kualitas pelatih dan pembinaan atlet dalam rangka peningkatan prestasi Sumatera Utara di bidang olahraga.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, yang akan diimplementasikan dengan cara kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan mendorong pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit menuju type/ kelas yang lebih baik. (khususnya di daerah Kawasan Strategis di Pantai Barat dan Kepulauan Nias).
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, yang akan diimplementasikan dengan :
 - a. Pengembangan produk unggulan daerah yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan kelapa, dan mendorong pengembangan sentra produk lokal seperti gula aren, nilam, akar wangi, dan hasil-hasil perikanan (*one region one product*) serta pencapaian swasembada pangan;
 - b. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan, Pengembangan Kawasan Peternakan, *Agro Techno Park* di Kawasan Mebidangro, dan pengembangan kawasan agrowisata yang berstandar internasional dengan potensi alam dan budidaya pertanian.

4.2.4. Penelaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 yang memiliki visi pembangunan jangka panjang Kota Binjai yaitu “Kota Binjai Sebagai Pusat Permukiman, Pelayanan Jasa, Perdagangan, Dan Industri Yang Berwawasan Lingkungan”. Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Binjai dengan tetap mengacu

pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Binjai.

Sedangkan yang dimaksud dengan **“Pusat Permukiman, Pelayanan Jasa, Perdagangan, dan Industri”**, ialah Kota Binjai sebagai sektor pemukiman, jasa dan perdagangan harus dibangun lebih maju dibanding Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kabupaten di Sumatera Utara setelah Kota Medan. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dan perdagangan dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mengembangkan industri menengah dan besar yang mempunyai sinergi dengan industri kecil dan menengah (UKM). **Pembangunan Berwawasan Lingkungan** dimaksudkan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Binjai tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing Kota Binjai dalam pelayanan pemukiman, jasa, perdagangan, dan industri untuk mencapai masyarakat Kota Binjai yang lebih makmur dan sejahtera melalui pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat (UKM), kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Kota Binjai sebagai Kota Pendidikan yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Binjai mempunyai standar kualitas; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang berkualitas; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Mewujudkan Kota Binjai yang memiliki *good governance*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Kota Binjai yang aman, tertib, bersatu dan damai melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota;
5. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum yang berkualitas dan berkeadilan melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan asset-aset daerah yang berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan sarana dan prasarana yang tersebar di kawasan pinggiran kota.
6. Mewujudkan Kota Binjai yang aman, nyaman dan ramah lingkungan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung diharapkan dapat memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan
7. Mewujudkan masyarakat Kota Binjai yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan taat aturan hukum, memelihara kerukunan masyarakat dan antar umat beragama, mengembangkan semangat kekeluargaan, menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma agama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan, menerapkan nilai-nilai luhur Kota Binjai dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat

Kota Binjai dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan kota.

8. Mewujudkan Kota Binjai Sehat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang mantap, penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Untuk menselaraskan pembangunan jangka panjang, dilakukan pentahapan pembangunan untuk setiap periode pembangunan jangka menengah (lima tahun). RPJP Kota Binjai telah melakukan pentahapan tersebut dengan penekanan prioritas pembangunan untuk setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai sebagai berikut:

- Tahun 2006–2010 Kota Binjai sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri dengan dukungan sistem pelayanan perizinan satu atap dan SDM yang terampil serta adanya peran serta masyarakat, yang berwawasan lingkungan.
- Tahun 2011–2015 Kota Binjai sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik, pengembangan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan.
- Tahun 2016–2020 Kota Binjai sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri berbasis online dengan dukungan infrastruktur yang memiliki daya saing, yang berwawasan lingkungan.
- Tahun 2021–2025 Kota Binjai sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri dengan dukungan infrastruktur bertaraf global, dengan jaringan pemasaran global, dengan dukungan jaringan bisnis Internasional, yang berwawasan lingkungan.

Pada saat ini Kota Binjai sudah memasuki tahap ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025, dengan fokus utama pada Kota Binjai sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan industri dengan dukungan infrastruktur bertaraf global, dengan jaringan pemasaran global, dengan dukungan jaringan bisnis Internasional, yang berwawasan lingkungan.

4.2.5. Penelaahan Terhadap RTRW Kota Binjai

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis Industri, perdagangan dan jasa. RTRW berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Adapun substansi dari RTRW Kota Binjai , meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kota;
- c. rencana pola ruang wilayah Kota;
- d. penetapan kawasan strategis Kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Binjai sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri yang berkelanjutan. Sedangkan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Binjai, meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung Kota Binjai sebagai bagian dari KSN perkotaan Mebidangro;
- b. pengembangan kualitas prasarana transportasi yang terintegrasi;

- c. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah Kota yang berkelanjutan;
- d. pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau serta kawasan lindung lainnya; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan Kota Binjai sebagai bagian dari KSN perkotaan Mebidangro meliputi:

- a. mengembangkan pusat kegiatan industri berskala regional;
- b. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional di kawasan pusat perekonomian Kota; dan
- c. mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang.

Strategi perwujudan pengembangan kualitas prasarana transportasi yang terintegrasi, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas pelayanan lalu lintas jalan;
- b. mengembangkan jalan lingkar luar dan jalan lingkar dalam Kota;
- c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan system transportasi umum;
- d. mengembangkan pusat transit intermoda, antar moda, dan antar wilayah yang terpadu; dan
- e. mengembangkan transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana Kota yang berkelanjutan, meliputi:

- a. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi;
- b. menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan skala lokal dan regional;
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum;
- d. meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan air limbah;

- e. meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Strategi perwujudan pengembangan kawasan budidaya dan kawasan strategis yang berkelanjutan, meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana industri pendukung;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada kawasan permukiman; dan
- c. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, dengan dilengkapi infrastruktur pendukung.

Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya, meliputi:

- a. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- b. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di Kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur Kota; dan
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi:

- a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
- c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

Penyusunan RPJMD Kota Binjai 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat a yang menyatakan bahwa RTRW Kota Binjai berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun keselarasan dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 dengan RTRW Kota Binjai Tahun 2020 – 2040 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RTRW

No	Misi RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026	RTRW Kota Binjai Tahun 2020 – 2040
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Misi 1 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkungannya tidak berkenaan dengan kewilayahan.
2	Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Dalam pasal 8, Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur Kota Binjai yang berkelanjutan, dilakukan melalui a. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi; b. menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan skala lokal dan regional; c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum; d. meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan air limbah; e. meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir; dan f. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Binjai, pada Pasal 17 Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan dikembangkan melalui penyediaan: (1) sistem penyediaan air minum (SPAM); (2) sistem pengelolaan air limbah (SPAL); (3) sistem jaringan persampahan Kota; (4) sistem jaringan evakuasi bencana; (5) sistem drainase; dan (6) sistem jaringan pejalan kaki.

No	Misi RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026	RTRW Kota Binjai Tahun 2020 – 2040
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Kebijakan penataan ruang wilayah Kota dalam pengembangan Sumber Daya Manusia diatur pada Pasal 7 Perda RTRW Kota Binjai. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu pelayanan perkotaan dalam mendukung pengembangan Kota Binjai. Dalam Pasal 8 ayat (1) Perda RTRW Kota Binjai dinyatakan strategi perwujudan kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan Kota Binjai sebagai bagian dari KSN perkotaan Mebidangro, meliputi: - mengembangkan pusat kegiatan industri berskala regional; - mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional di kawasan pusat perekonomian Kota; dan - mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang. Untuk itu, dalam Pasal 10 Perda RTRW Kota Binjai telah ditetapkan Pusat Kegiatan Wilayah Kota untuk pengembangan sumber daya manusia yang terkoordinasi pada Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL) untuk pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 telah menjadi pijakan dalam perumusan RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026.

4.2.6. Penelaahan KLHS RPJMD Kota Binjai

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan

daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah 222 indikator. Namun karena kondisi geografis Kota Binjai tidak memiliki laut, maka dilakukan pengurangan indikator pada TPB Nomor 14 (Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim) sehingga total indikator TPB yang dievaluasi pada dokumen KLHS RPJMD Kota Binjai adalah 205 indikator.

Secara umum, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Binjai baru mencapai 78 dari 205 indikator atau sekitar 38,0%. Dari 17 tujuan yang tercantum dalam TPB, capaian tujuan No. 2 yaitu Menghilangkan Kelaparan telah melewati target sebanyak 8 dari 11 indikator atau sekitar 72,7% telah mencapai target. Tujuan TPB lain yang juga terbanyak dalam melewati target yang telah ditetapkan adalah Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan Tujuan 9 dengan baik sehingga 7 dari 10 target indikator (sekitar 70,0%) telah terlampaui. Mengingat target waktu untuk TPB berlangsung hingga tahun 2030, kedua tujuan pembangunan ini akan dapat mencapai targetnya lebih awal.

Tabel 4.3. Capaian TPB Kota Binjai

No	TPB	Jumlah Indikator TPB	Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target (SS)	Persentase Target yang Sudah Mencapai Target
1	Mengentaskan Kemiskinan	25	8	32,0
2	Menghilangkan Kelaparan	11	8	72,7
3	Menjamin Kehidupan yang sehat	34	12	35,3
4	Menjamin Pendidikan yang berkualitas	13	3	23,1
5	Mencapai Kesenjangan Gender	14	6	42,9
6	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi	15	5	33,3
7	Akses energi terjangkau	1	0	0,0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	19	7	36,8
9	Membangun infrastruktur yang tangguh	10	7	70,0
10	Mengurangi Kesenjangan	6	2	33,3
11	Kota dan Pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh	13	4	30,8

12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	0	0,0
13	Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0,0
15	Melindungi, merestorasi dan memanfaatkan ekosistem daratan	2	0	0,0
16	Masyarakat yang inklusif, damai dan berkeadilan	21	8	38,1
17	Kemitraan Global	15	8	53,3
	Total	205	78	38,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Binjai

Percepatan pencapaian target TPB perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB lainnya. Bahkan beberapa capaian pada TPB masih belum memiliki indikator yang melewati target yaitu Tujuan No. 7, Akses Energi Terjangkau, Tujuan No. 12, Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, Tujuan No. 13, Perubahan Iklim dan Dampaknya, dan Tujuan No. 15, Melindungi, Merestorasi, dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan. Percepatan pencapaian target TPB juga perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB yang masih dalam level rendah atau di bawah rata-rata capaian TPB Kota Binjai seperti Tujuan No. 3, Menjamin Kehidupan yang Sehat (capaian 35,3%), Tujuan No. 4, Menjamin Pendidikan yang Berkualitas (capaian 23,1%), Tujuan No. 10, Mengurangi Kesenjangan (capaian 33,3%), dan Tujuan No. 11, Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman dan Tangguh (capaian 30,8%).

Pencapaian target indikator TPB di Kota Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya kesehatan dan Keluarga Berencana;
2. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Binjai berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha, kesempatan lapangan kerja, kerjasama dengan mitra kerja, dan pariwisata dari segi budaya;

4. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan penyediaan sanitasi dan air minum layak, pengolahan limbah domestik, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi;
5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana;
6. Peningkatan mutu pendidikan;
7. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas;
8. Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemiskinan dan penyandang disabilitas, serta penyalahgunaan miras dan narkoba.

4.2.7. Telaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai dan Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.4. Identifikasi RPJMD Daerah Sekitar

No	Kabupaten Sekitar	Kebijakan Terkait	Uraian
1	Deli Serdang	SPAM Mebidang	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sudah menjadi target kerja Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, dalam tahun 2021-2020, yaitu melaksanakan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Medan, Binjai, Deli Serdang (MEBIDANG). Pembangunan SPAM Regional Mebidang tahap I dengan kapasitas

No	Kabupaten Sekitar	Kebijakan Terkait	Uraian
			produksi 1100 L/detik untuk tahun pekerjaan waktu konstruksi 2021-2022. Lingkup kegiatan Pembangunan SPAM Regional Mebidang tahap I tahun 2021-2022 meliputi pembangunan Intake (2400 L/detik), IPA (1100 L/detik), jaringan distribusi utama (JDU), Reservoir Oftaker Kota Binjai (2500 m3), Kabupaten Deliserdang (3000 m3), dan Kota Medan (6000 m3). Kondisi ini akan membawa konsekwensi kesiapan Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam hal menindaklanjuti hasil pembangunan SPAM Regional Mebidang untuk diintegrasikan dengan pembangunan SPAM Kota Binjai.
2	Langkat	Pengendalian Banjir	Daerah Aliran Sungai Bangkatan merupakan salah satu Sub DAS Sungai Bingei yang mencakup dan melintasi pusat Kota Binjai, Sumatera Utara. Bagian hulu DAS Sungai Bangkatan berada di Kecamatan Sei Binge Kabupaten Langkat dan bermuara di Sungai Binge Kecamatan Binjai Timur. Musim hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan limpasan aliran permukaan mengalir dengan cepat menuju ke badan sungai. Dampak aliran permukaan tanah yang cepat mengakibatkan erosi yang sangat tinggi sehingga dasar penampang sungai mengalami sedimentasi. Perubahan

No	Kabupaten Sekitar	Kebijakan Terkait	Uraian
			penampang sungai akibat sedimentasi menyebabkan debit kapasitas penampang sungai tidak mampu menampung debit maksimum dan mengakibatkan daerah genangan banjir. Potensi banjir di Kota Binjai kerap terjadi pada saat musim hujan dengan kenaikan tinggi muka air banjir mencapai 0,5 m hingga 1,5 m di atas permukaan tanah. Tinggi muka air banjir menimbulkan daerah genangan banjir yang menggenangi 3 daerah kecamatan dan memberikan dampak kerugian kepada masyarakat sekitar dengan total mencapai 546 KK (BPBD Kota Binjai, 2017). Upaya atau solusi yang telah dilakukan pada saat ini kurang efektif dengan melakukan normalisasi sungai tanpa adanya pembangunan bangunan pengendalian banjir yang efektif dan efisien. Salah satu rencana pengendalian banjir Kota Binjai untuk mengantisipasi luapan Sungai Bangkatan yaitu dengan pembangunan tanggul banjir. Konstruksi tanggul banjir sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena kondisi penampang sungai yang sangat sempit dan berada di daerah pemukiman penduduk yang padat.

4.3. Isu-isu Strategis

4.3.1. Isu Strategis Internasional

4.3.1.1. Isu Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global mengalami berbagai ketidakpastian yang ditunjukkan dari berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi di sepanjang tahun 2019, seperti krisis utang Yunani, Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses penyesuaian (*rebalancing*) ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok menjadi pemicu dinamika perekonomian global. Selain itu, risiko geopolitik semakin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), kerusuhan yang berkepanjangan di Hongkong, Iran dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi dunia. Kondisi global yang kurang kondusif tersebut menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2019, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%.

Pembaikan ekonomi global kemudian mulai muncul di akhir tahun 2019 dan diproyeksikan semakin membaik di tahun 2020. Diperkirakan kondisi perekonomian global dapat tumbuh sekitar 3,3%. Harapan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang lebih tinggi mulai terlihat pertengahan Desember 2019, ketika dilaporkan AS-China telah setuju untuk fase pertama damai dagang. Kondisi ini membuat IMF sedikit lebih optimis untuk 2020 dengan pertumbuhan 3,4 persen melebihi pertumbuhan ekonomi global 3,0 persen seperti di tahun 2019. Seluruh lembaga internasional melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan lebih baik yang kemudian ditandai dengan meningkatkan harga minyak dunia, batubara dan komoditas. Indonesia sebagai negara eksportir komoditas yang dibutuhkan negara-negara di dunia ikut memproyeksikan pertumbuhan yang cukup tinggi menjadi 5,3% tahun 2020.

Sinyal awal pemulihan ekonomi global pada akhir 2019 tertahan akibat wabah Coronavirus (Covid-19). Wabah Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan (Tiongkok) dan telah menginfeksi lebih dari 200.000 orang di 176 negara (19 Maret'20). Sekitar 86.000 orang (43%) telah pulih, namun 9.000 orang lainnya (4,5%) meninggal. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan restriksi yang ketat untuk memutus

rantai penyebaran virus. Sejumlah provinsi diisolasi (*lockdown*) dan pasien yang terinfeksi dipantau secara ketat. Langkah Tiongkok membuahkan hasil. Kurang dari tiga bulan, wabah Covid-19 dapat diatasi. Namun, penyebaran Covid-19 justru meluas ke berbagai negara. Jumlah orang yang terinfeksi di luar Tiongkok mencapai sekitar 140.000 (63%). Italia, Iran, Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat adalah negara dengan kenaikan kasus tertinggi. Banyak negara di dunia pun meniru langkah-langkah yang dilakukan Tiongkok yaitu menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus.

Penyebaran Covid-19 dan kebijakan restriksi ketat telah memukul kinerja ekonomi Tiongkok. Kebijakan restriksi ini menyebabkan aktivitas masyarakat turun tajam, dan aktivitas produksi perusahaan terhenti sementara. Dampak Covid-19 terhadap ekonomi Tiongkok telah terlihat pada awal 2020. Sejumlah indikator turun tajam pada Januari dan Februari 2020. Penjualan ritel, produksi perusahaan, dan kegiatan investasi menurun signifikan. Kondisi ini akan menyebabkan ekonomi Tiongkok turun tajam pada TW1-20. Merespons hal itu, sejumlah langkah kebijakan ditempuh pemerintah dan bank sentral Tiongkok seperti menurunkan suku bunga kebijakan dan menerapkan berbagai stimulus lainnya untuk menjaga confident, kecukupan likuiditas, dan stabilitas keuangan. Kebijakan juga ditempuh pemerintah Tiongkok untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata, UMKM, dan perdagangan. Sejalan dengan itu, ekonomi Tiongkok diperkirakan pulih secara gradual.

Covid-19 akan memengaruhi per-ekonomian global melalui beberapa jalur, yaitu pariwisata, perdagangan dan supply chain, serta pasar keuangan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terpukul oleh wabah Covid-19, baik dari sisi supply maupun demand. Kebijakan travel restrictions dan pembatalan serta pengurangan frekuensi penerbangan telah menurunkan supply jasa pariwisata (domestik maupun internasional). Sementara demand pariwisata terus menurun, terutama dari wisatawan Tiongkok—menempati posisi teratas dari aspek pengeluaran (*outbound spending*).

Wilayah Asia Pasifik diperkirakan paling terdampak atas penurunan pariwisata akibat Covid-19. UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional ke Asia Pasifik akan turun 9% hingga 12% yoy pada 2020—terutama karena Tiongkok telah menghentikan semua tur kelompok domestik dan internasional untuk

menahan penyebaran Covid-19. Industri di sektor pariwisata (transportasi dan perhotelan) mengalami penurunan kinerja, sementara penjualan ritel dan pengeluaran bisnis juga telah terdampak. Sektor pariwisata Hong Kong dan Thailand diperkirakan terdampak paling signifikan, diikuti Vietnam, Singapura dan Malaysia. Potensi dampak terhadap Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain.

Di jalur perdagangan, penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan di Tiongkok telah mengganggu perdagangan global. Kuatnya peranan Tiongkok dalam perdagangan dunia mengakibatkan beberapa negara utama memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor dan impor dari Tiongkok. Beberapa negara itu diantaranya AS, Hong Kong, dan Jepang. AS merupakan tujuan ekspor terbesar Tiongkok (16,8% pada 2019), diikuti Hong Kong (11,2%) dan Jepang (5,7%). Sementara itu, negara pengimpor terbesar Tiongkok adalah Korsel (8,4%), diikuti Jepang dan Taiwan (8,3%). Beberapa negara lainnya memiliki keterkaitan perdagangan yang relatif tidak terlalu besar dengan Tiongkok.

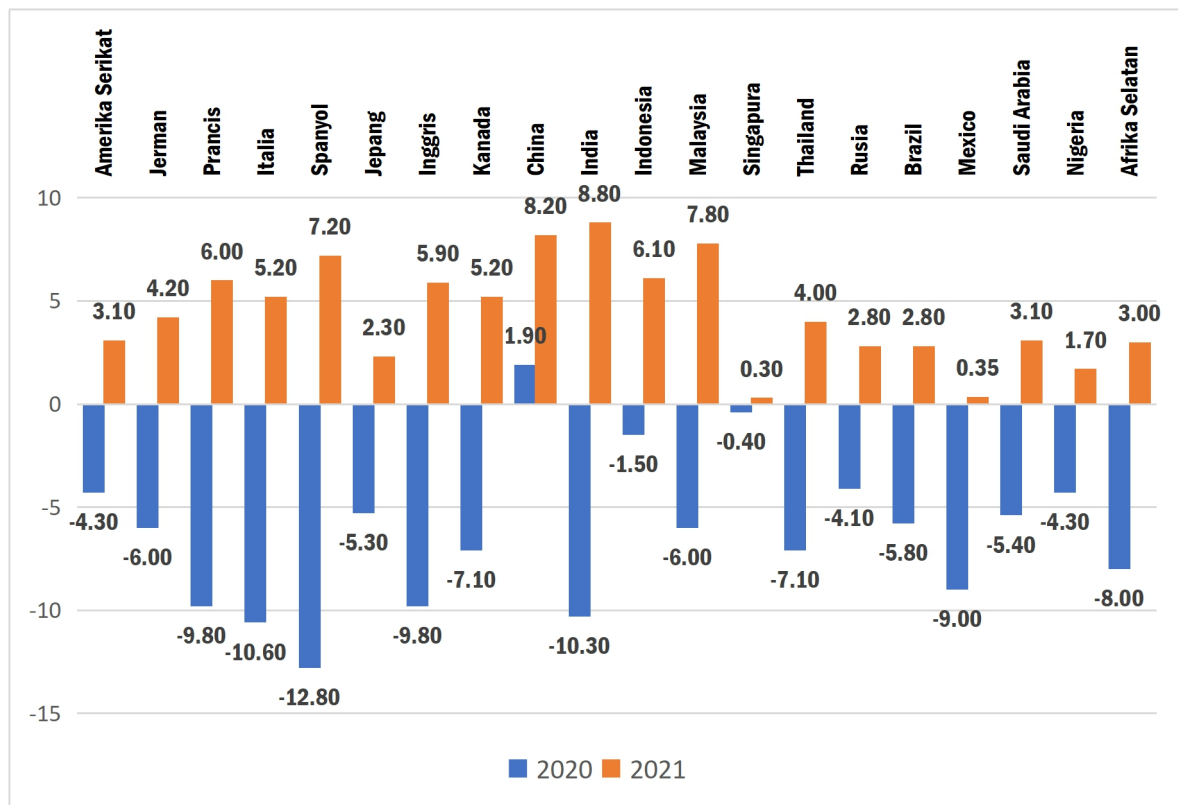
Dari jalur keuangan, Covid-19 telah memicu ketidakpastian yang sangat tinggi sehingga menekan kinerja pasar keuangan global. Pasar global telah memasuki periode uncertainty yang meningkat tajam sehingga mengakibatkan penurunan signifikan pada pasar saham, komoditas, dan mendorong peningkatan aliran modal keluar dari EMs. Kinerja saham diberbagai negara utama turun signifikan, antara lain di Italia, Denmark, Jepang, dan AS. Kekhawatiran investor juga memicu aliran modal keluar dari negara emerging.

Dampak Virus Covid-19 (Corona) terhadap perekonomian dunia semakin mengkhawatirkan. Banyak negara yang sudah mengambil kebijakan menutup diri (lockdown) sehingga menghentikan sejumlah aktivitas ekonomi. Berhentinya aktivitas ekonomi ini sebagai antisipasi merebaknya virus Corona yang semakin cepat terutama di Eropa dan Amerika. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi global juga dijangka akan mengalami perlambatan yang cukup tinggi. Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan global dapat berkontraksi hingga 0,9% tahun ini atau terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008-2009. Lembaga internasional lainnya Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 sebesar -1,1%, dan The Economic Intelligent Units memproyeksikan resesi

ekonomi dunia mencapai -2,2%. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian global. Seluruh negara di dunia telah masuk ke dalam krisis. Tahun 2020, IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami resesi hingga -3,0%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 sebesar 2,9%. Sejalan dengan proyeksi tersebut, Asian Development Bank (ADB) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 2,5% pada 2020 di tengah Pandemi Virus Corona. Meski Indonesia memiliki landasan makro ekonomi yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian Indonesia, dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri.

Untuk pertama kalinya sejak great depression atau depresi besar (1929 – 1932), ekonomi serta negara-negara maju dan negara berkembang, juga negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi (*emerging market*), berada dalam situasi yang sama, yakni menghadapi resesi atau kelesuan ekonomi. Proyeksi ini dipengaruhi kondisi dunia yang dikepung pandemi Covid-19. Krisis yang terjadi saat ini menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Banyak negara mengalami multikrisis, antara lain kesehatan, keuangan, dan harga komoditas yang anjlok. Kondisi ini kemudian menimbulkan situasi yang kompleks. Tak satu negara pun bisa terhindar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Negara-negara yang mengandalkan pariwisata, perjalanan, dan hiburan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi akan menghadapi disrupsi besar.

Gambar 4. 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19



Sumber: IMF, World Economics Outlook

Prospek perekonomian global untuk tahun 2020 masih tergantung dari penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan telah tuntas. Jika wabah Covid-19 dapat dituntaskan pada kuartal II 2020, maka perekonomian dunia akan membaik dan gelombang krisis dapat dihindari, namun jika berlanjut hingga semester II, maka tidak ada satupun negara di dunia yang terhindar dari krisis ekonomi. Meski demikian, jika pandemi bisa diatasi pada semester II-2020 dan kebijakan yang dilakukan di seluruh dunia efektif mencegah kebangkrutan usaha, menjaga kehilangan pekerjaan, dan menopang sistem keuangan, maka pertumbuhan ekonomi 2021 akan berbalik positif ke arah 5,8 persen.

4.3.1.2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Paradigma pembangunan ini sebetulnya sudah didengungkan sejak lama dengan diakui pentingnya Pembangunan Berkelanjutan sejak KTT Bumi pertama tahun 1972. Selama 40 tahun, Pembangunan Berkelanjutan menjadi perdebatan karena dinilai abstrak (sulit dimengerti dengan indikator terukur), dinilai menghambat pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Perjalanan kesepakatan pembangunan lingkungan yang baik dan

keterkaitannya dengan pembangunan di berbagai aspek sudah dilakukan sejak lama. Isu lingkungan pertama kali menjadi agenda internasional dalam pertemuan internasional di Stockholm tahun 1972.

Pada tanggal 25 September, 2015, sejarah mencatat komitmen 193 negara di dunia, termasuk Indonesia terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Komitmen ini tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 yang menghasilkan Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1). Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2). Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4). Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5). Kesenjangan Gender (*Gender Equality*); 6). Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7). Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10). Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*sustainable Cities and Communities*); 12). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13). Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14). Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15). Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16). Institusi Keadilan yang Kuat dan

Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kota Binjai memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diurus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan di Kota Binjai.

Secara umum, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Binjai baru mencapai 78 dari 205 indikator atau sekitar 38,0%. Dari 17 tujuan yang tercantum dalam TPB, capaian tujuan No. 2 yaitu Menghilangkan Kelaparan telah melewati target sebanyak 8 dari 11 indikator atau sekitar 72,7% telah mencapai target. Tujuan TPB lain yang juga terbanyak dalam melewati target yang telah ditetapkan adalah Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan Tujuan 9 dengan baik sehingga 7 dari 10 target indikator (sekitar 70,0%) telah terlampaui. Mengingat target waktu untuk TPB berlangsung hingga tahun 2030, kedua tujuan pembangunan ini akan dapat mencapai targetnya lebih awal.

Percepatan pencapaian target TPB perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB lainnya. Bahkan beberapa capaian pada TPB masih belum memiliki indikator yang melewati target yaitu Tujuan No. 7, Akses Energi Terjangkau, Tujuan No. 14, Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, Tujuan No. 13, Perubahan Iklim dan Dampaknya, dan Tujuan No. 15, Melindungan, Merestorasi, dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan. Percepatan pencapaian

target TPB juga perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB yang masih dalam level rendah atau di bawah rata-rata capaian TPB Kota Binjai seperti Tujuan No. 3, Menjamin Kehidupan yang Sehat (capaian 35,3%), Tujuan No. 4, Menjamin Pendidikan yang Berkualitas (capaian 23,1%), Tujuan No. 10, Mengurangi Kesenjangan (capaian 33,3%), dan Tujuan No. 11, Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman dan Tangguh (capaian 30,8%).

Tabel 4.5 Jumlah TPB Kota Binjai

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator TPB	Persentase (%)
1	Mengentaskan Kemiskinan	25	12%
2	Menghilangkan Kelaparan	11	5%
3	Menjamin Kehidupan yang sehat	34	17%
4	Menjamin Pendidikan yang berkualitas	13	6%
5	Mencapai Kesenjangan Gender	14	7%
6	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi	15	7%
7	Akses energi terjangkau	1	0%
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	19	9%
9	Membangun infrastruktur yang tangguh	10	5%
10	Mengurangi Kesenjangan	6	3%
11	Kota dan Pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh	13	6%
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	2%
13	Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1%
15	Melindungi, merestorasi dan memanfaatkan ekosistem daratan	2	1%
16	Masyarakat yang inklusif, damai dan berkeadilan	21	10%
17	Kemitraan Global	15	7%
	Total	205	100%

Sumber: KLHS RPJMD

Pencapaian target indikator TPB di Kota Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan

pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota adalah 222 indikator. Namun karena kondisi geografis Kota Binjai tidak memiliki laut, maka dilakukan pengurangan indikator pada TPB Nomor 14 (Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim) sehingga total indikator TPB yang dievaluasi pada dokumen KLHS ini adalah 205 indikator seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.

TPB dengan indikator terbanyak adalah TPB No.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera yaitu total 34 indikator (17%) dan diikuti dengan TPB No.1 Mengentaskan Kemiskinan dengan jumlah indikator 25 (12%) dan TPB No.16 Masyarakat yang inklusif, damai dan berkeadilan dengan 21 indikator (10%).

Ketujuh belas TPB ini dapat dikelompokkan kedalam 4 pilar, yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi serta hukum dan tata kelola. Rincian TPB, jumlah indikator yang termasuk pada masing-masing pilar dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 4.6. Jumlah Indikator TPB Kota Binjai Berdasarkan Pilar

No	Nama Pilar	TPB yang Termasuk Pilar	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sosial	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4 dan TPB 5	97	47%
2	Ekonomi	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 dan TPB 17	51	25%
3	Lingkungan	TPB 11, TPB 12, TPB 13 TPB 14 dan TPB 15	36	18%
4	Hukum dan Tata Kelola	TPB 16	21	10%
	Jumlah		205	100%

Sumber: KLHS RPJMD

Kota Binjai telah melakukan banyak hal dalam pencapaian TPB, sebagian indikator sebagaimana terdapat dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sudah mencapai target, sebagian belum mencapai target dan sebagian lainnya belum dilakukan atau belum ada data.

Kategori capaian TPB Kota Binjai berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (B)
4. Indikator TPB yang tidak ada data (TD)

Tabel 4.7. Persentase Indikator TPB

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1	Indikator yang sudah Dilaksanakan dan sudah Mencapai Target Nasional	78	38
2	Indikator yang sudah Dilaksanakan dan belum Mencapai Target Nasional	58	28
3	Indikator yang belum Dilaksanakan dan belum Mencapai Target Nasional	20	10
4	Indikator yang tidak ada data	49	24

Sumber: KLHS RPJMD

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Binjai yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target mencapai 38 % (78 indikator), sementara capaian TPB yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum mencapai target sebesar 28%.

Capaian TPB yang belum dilaksanakan ada 10% dan indikator TPB yang tidak ada data sebanyak 24%.). Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian RPJMD Kota Binjai 2021-2025 untuk memperhatikan dan memprioritaskan program-program TPB yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan serta yang belum ada data.

Tabel 4.8. Jumlah dan Kondisi Indikator TPB Kota Binjai

No	TPB	Jumlah Indikator TPB	Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target (SS)	Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target (SB)	Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target (B)	Tidak Ada Data (TD)
1	Mengentaskan Kemiskinan	25	8	9	3	5
2	Menghilangkan Kelaparan	11	8	3	0	0
3	Menjamin Kehidupan yang sehat	34	12	10	0	12
4	Menjamin Pendidikan yang berkualitas	13	3	6	1	3
5	Mencapai Kesetaraan Gender	14	6	5	1	2
6	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi	15	5	5	3	2
7	Akses energi terjangkau	1	0	0	0	1
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	19	7	6	1	5
9	Membangun infrastruktur yang tangguh	10	7	1	1	2
10	Mengurangi Kesenjangan	6	2	1	0	3
11	Kota dan Pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh	13	4	4	3	2
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	0	1	2	1
13	Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	1	1	0
15	Melindungi, merestorasi dan memanfaatkan ekosistem daratan	2	0	0	2	0
16	Masyarakat yang inklusif, damai dan	21	8	3	1	9

No	TPB	Jumlah Indikator TPB	Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target (SS)	Sudah Terlaksana dan Belum Mencapai Target (SB)	Belum Terlaksana dan Belum Mencapai Target (B)	Tidak Ada Data (TD)
	berkeadilan					
17	Kemitraan Global	15	8	3	1	3
	Total	205	78	58	20	49

Sumber: KLHS RPJMD

4.3.1.3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan e-commerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia.

Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi

di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.3.2. Isu Nasional

Isu-isu Nasional menjadi perhatian dalam setiap proses perencanaan pembangunan di daerah maupun nasional. Bagaimanapun isu-isu yang dirumuskan kedepannya berusaha untuk menjawab serta mengantisipasi tantangan serta ancaman dalam jangka panjang. Terkait dengan sinkronisasi dokumen perencanaan nasional, dan provinsi, berikut ini adalah isu-isu nasional yang menjadi perhatian dalam perumusan RPJMD Kota Binjai, yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; dan (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi

potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.

Kondisi transformasi struktural yang berjalan lambat ini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri yang cenderung stagnan di kisaran 20 persen. Di sisi lain, kontribusi PDB sektor primer sebesar 21,4 persen dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 58,5 persen pada TW III 2018. Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.

Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sementara sektor industri yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan, masih menghadapi tantangan kenaikan tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara. Lambatnya transformasi struktural di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen, atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam (93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen).

Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekspor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan. Rasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor komoditas menggambarkan tiga isu dalam struktur industri nasional yang perlu ditangani ke depan. Pertama, adanya disharmoni antara sektor hulu dan hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/nilai industri nasional sehingga daya saing industri nasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkecukupan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara. Ketiga, kualitas investasi rendah dimana impor bahan baku tidak sepenuhnya digunakan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi di pasar ekspor, namun lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri. Harapan adanya transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya investasi asing yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor juga belum sepenuhnya terwujud.

Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar, dan belum banyak yang berorientasi ekspor.

2. Tenaga Kerja

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih rendah. Berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI), daya saing Indonesia tahun 2018 berada di peringkat 36 dari 137 negara, meningkat dari peringkat 41 dari 138 negara tahun 2017. Dari pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,2 persen, hanya 0,9 persen bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 3,5 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 0,8 persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kualitas layanan pendidikan yang belum optimal, memberikan dampak terhadap tingkat kebekerjaan. Pada tahun 2018, taraf pendidikan pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (58,77 persen atau 72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia, dan keterlibatan industry yang rendah, menyebabkan masih terjadinya mismatch antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga mengalami kejenuhan sehingga menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur Pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills yang mendukung kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

3. Investasi

Investasi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya didukung oleh perbaikan iklim investasi, infrastruktur dan layanan investasi. Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 7,45 – 8,27 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB (Ease of Doing Business) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 47,7 persen PDB dan belanja modal menjadi 1,9 – 2,2 persen pada tahun 2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp37.795,6 - 38.421,1 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,2 – 13,6 persen dan 7,0 – 6,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Untuk membiayai kebutuhan investasi tahun 2020 – 2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar keuangan, terutama non perbankan, peningkatan akses jasa keuangan (inklusi keuangan), dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

4. Perdagangan

Secara keseluruhan, perdagangan internasional Indonesia yang tercatat dalam ekspor barang dan jasa tumbuh rata-rata 7,36 – 8,30 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor nonkomoditas, dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Sementara impor barang dan jasa tumbuh rata 7,99 – 8,53 persen tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama

investasi. Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,5 - 1,7 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD147,8 – 171,7 miliar pada tahun 2024.

Salah satu isu strategis dalam perdagangan internasional adalah ketersediaan pelabuhan laut yang mendukung. Isu strategis dalam pelayanan dan kapasitas pelabuhan di Indonesia, belum sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Perdagangan lintas laut global terus meningkat dengan hub ports standar internasional dan mother vessels peti kemas sebagai faktor pendukung utama dalam perdagangan global. Selama beberapa dekade berikutnya, kecenderungan global ini diperkirakan akan meningkat. Konsep poros maritim harus dapat mengkonfirmasi hal ini tetapi konsep tersebut nampaknya belum terintegrasi dengan ekonomi dan masih belum kohesif. Pelabuhan di Indonesia tidak memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan kinerjanya juga berada di bawah pelabuhan tetangga di Singapura, Malaysia, dan Cina. Menghadapi globalisasi ekonomi, sangat diperlukan mengubah arah transportasi di Indonesia.

Salah satu strategi jangka panjang dari konsep poros maritim dan tol laut dapat di mulai dengan reformasi pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia yang memiliki fungsi untuk melayani pergerakan nasional dan internasional, serta sebagai simpul untuk jaringan transportasi laut internasional dalam waktu tunggu kapal, efisiensi bongkar muat, administrasi dokumen, dan perubahan fundamental lainnya dalam kapasitas dan kualitas Pelabuhan belum sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Pada tahun 2013, biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari PDB. Dampak rendahnya aksesibilitas infrastruktur pelabuhan adalah salah satu penyebab meningkatnya biaya logistik.

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, meskipun telah membuat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, masih dianggap tidak efisien dan tidak cukup kompetitif dalam perdagangan lintas laut global. Upaya untuk membangun Pelabuhan utama (hub ports) untuk panggilan langsung internasional kapal-kapal peti kemas generasi ketiga sejauh ini tidak berhasil karena banyak alasan teknis dan politis. Selama beberapa dekade terakhir investasi dan pengembangan infrastruktur transportasi mengalami penurunan termasuk infrastruktur transportasi laut dan pelabuhan. Sejak dulu pelabuhan dikelola secara monopolistik dan

pengelolaanya di delegasikan secara eksklusif kepada BUMN yaitu PT. Pelindo. Untuk jangka waktu yang lama pelabuhan di Indonesia beroperasi tidak efisien karena peralatan yang tidak lengkap, waktu tunggu kapal yang lama, dan banyak instansi yang terlibat yang menyebabkan timbulnya pungutan liar. Semua kendala tersebut menyebabkan sistem pelabuhan yang tidak kompetitif yang menghasilkan biaya tinggi untuk pelayaran internasional dan antarpulau.

5. Institusi

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), skor B atas SAKIP, dan persentase penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari semakin membaiknya nilai Indeks RB yang didukung dengan penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu dari sisi penataan kelembagaan, birokrasi yang efektif dan efisien ditandai dengan 21 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan, 2 diintegrasikan, serta 1 disempurnakan. Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (ASN) telah dikembangkan Talent Management sebagai bagian dari penguatan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing nasional. Perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services), peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), pembentukan Mall Pelayanan Publik

6. Pendidikan

Kebijakan afirmatif pendidikan yang diterapkan diharapkan dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan anak tidak sekolah (ATS) sehingga dapat menyelesaikan pendidikan, minimal sampai jenjang pendidikan menengah. Selain itu, upaya penguatan kualitas pembelajaran dan pengajaran diharapkan dapat menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) peserta didik, yang akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing dan berperan penting sebagai pelaku utama pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan dapat memastikan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan antar wilayah dan antarsatuan pendidikan. Pendidikan vokasi yang diperkuat dengan peningkatan kerjasama swasta/industri, sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, penguatan *teaching factory/teaching industry*, peningkatan kualitas pendidik/instruktur vokasi, serta penguatan sertifikasi kompetensi, diharapkan dapat meningkatkan serapan lulusan pendidikan di pasar kerja. Dalam struktur pasar kerja, proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi juga akan meningkat dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kecakapan hidup yang memadai. Pengembangan metode penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis teknologi informasi dan pengembangan pendidikan tinggi melalui program diploma (tidak harus S1) berdasarkan keahlian yang dibutuhkan pasar kerja akan mampu meningkatkan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi. Selain itu, pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat unggulan melalui riset-riset ilmiah bersifat *thematic-based* yang berorientasi pada pemecahan masalah dengan pendekatan lintas disiplin ilmu dan SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Di bidang pendidikan, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 34,36 persen, dan 29,93 persen (2017).

Kesenjangan Pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2017, masing-masing sebesar 0,7 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Hasil PISA (Program for International Student Assessment) 2015, menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar kompetensi masih rendah dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

7. Kesehatan

Sistem kesehatan akan tertata dengan baik yang dicerminkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas, merata, dan responsif yang didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan merata. Angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit diharapkan menurun secara signifikan termasuk penyakit tropis terabaikan. Ke depan, upaya promotif dan preventif serta upaya penyelesaian permasalahan gizi masyarakat mengalami peningkatan secara progresif. Taraf pendidikan penduduk diharapkan mengalami perbaikan, dengan layanan pendidikan yang semakin merata antar wilayah, serta menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Derajat kesehatan telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, Kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah B3 yang belum terkelola dengan baik.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan akses terhadap air minum dan sanitasi masing-masing sebesar 61,29 persen dan 74,58 persen (BPS, 2018). Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga Kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

8. Karakter Bangsa

Pembangunan karakter memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat, serta perlindungan perempuan dan anak, dan 5) Meningkatkan budaya literasi.

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter

dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Namun pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (SNKBS, 2015).

9. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. The Global Competitiveness Report tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71 dari 140 negara, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur 2020-2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal sosial dan budaya.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun sementara kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai alternatif sumber pendanaan terakhir.

10. Kewilayahan

Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketimpangan antar provinsi di dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Ketimpangan antar desa-kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antar wilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, seperti halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku.

Capaian pembangunan berbasis kewilayahan pada tahun 2015-2019 disusun berdasarkan hasil evaluasi empat tahun kabinet dengan mengacu pada target dan sasaran yang tertuang di RPJMN 2015-2019. Untuk pembangunan wilayah, penanganan permukiman kumuh serta penyediaan dan peningkatan hunian layak belum dapat memenuhi target jangka menengah karena terhambat antara lain oleh koordinasi antarsektor dan antartingkatan pemerintahan yang belum berjalan dengan baik, manajemen lahan perkotaan dan penegakan tata ruang yang belum efektif, kapasitas pemerintah daerah yang belum memadai; dan upaya pencegahan munculnya permukiman kumuh baru, khususnya pada wilayah cepat tumbuh di periurban, belum sepenuhnya dilakukan. Sementara itu, upaya untuk mengurangi 80

kabupaten daerah tertinggal sepertinya sulit dipenuhi hingga tahun 2019. Kendala utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal sehingga mengakibatkan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan juga rendahnya pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, terutama yang berada di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Sementara itu untuk angka kemiskinan dan IPM di daerah tertinggal telah menunjukkan perbaikan.

Untuk pemertaan wilayah dan kontribusi antar pulau, Sumbangan Pulau Jawa masih cukup dominan dan tidak mengindikasikan adanya pergeseran. Hanya Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara yang sejauh ini masih mengikuti pola yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, ke depannya kita harus memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan ekonomi di tiga pulau lainnya, terutama Kalimantan dan Papua-Maluku yang menunjukkan gejala pelemahan. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah dengan terus mendorong pembangunan dan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau jawa.

11. Lingkungan Hidup dan Bencana

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan dapat didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan mengingat sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu

prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

12. Politik, Hukum, Pertahanan dan keamanan

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan menegakan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan dan kapasitas ASN, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

4.3.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Adapun isu-isu strategis Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, yang menjadi landasan dalam perumusan isu-isu strategis dan visi misi pembangunan Kota Binjai ke depan adalah:

1. Ketenagakerjaan

Sumatera Utara mengalami peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sebesar 171 ribu orang dari 10,53 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 10,70 juta orang pada Agustus 2020 dan terdapat sekitar 1,23 juta orang penduduk usia kerja di Sumatera Utara yang terdampak Covid-19 atau sebesar 11,51 persen dari total penduduk usia kerja di Sumut. Semakin terbatasnya lapangan kerja formal dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara tentunya memerlukan penanganan yang lebih serius. Untuk itu, Pengelolaan Balai Latihan Kerja, Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry, Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi melalui model e-commerce serta pembangunan aplikasi bursa lowongan kerja online yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan

2. Pendidikan

Rendahnya kualitas guru yang mencakup tenaga kependidikan, distribusi guru, masih minimnya siswa berprestasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi permasalahan pembangunan yang perlu mendapat fokus penyelesaian sehingga akses pendidikan dapat terpenuhi dan kualitas Pendidikan semakin baik.

3. Infrastruktur

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara sepanjang ± 3.000 km tentunya memerlukan penentuan prioritas penanganan ruas jalan yang menjadi jalan strategis Provinsi yang mendukung Fungsi Daya Dukung Lingkungan, Susur Pantai Timur, Kawasan Strategis Prioritas Nasional Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Nasional Mebidangro, Kawasan Daerah Tertinggal dengan tentunya tetap memperhatikan peningkatan kemandirian

jalan secara keseluruhan. Selanjutnya kebutuhan pembangunan TPA Regional dan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Pengurangan Luas Kawasan Kumuh menjadi sesuatu yang urgensi dalam upaya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan

4. Kesehatan

Peningkatan capaian Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,10 tentunya memerlukan upaya peningkatan layanan Rumah Sakit dan jaminan kesehatan pada lansia dan masyarakat miskin merupakan prioritas dalam upaya peningkatan Usia Harapan Hidup. Selanjutnya, penurunan prevalensi stunting juga menjadi hal yang penting disebabkan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 13,2% dan merupakan salah satu Provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Selain itu, permasalahan narkoba di Sumatera Utara juga perlu diatasi melalui peningkatan layanan penanganan rehabilitasi pasien NAPZA dalam upaya penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas

5. Agraris

Terbatasnya Sarana dan Prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan populasi ternak sapi, pencapaian swasembada komoditas pangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris.

6. Pariwisata

Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthty, Safety, and Enviromental Sustainability) atau 4 K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi Wisata. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pembangunan desa – desa wisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Dukungan pembangunan dan renovasi rumah ibadah merupakan langkah yang diambil dalam peningkatan indeks kebebasan berkeyakinan pada aspek kebebasan sipil sebagai upaya peningkatan indeks demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, peningkatan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial pada panti sosial juga menjadi hal yang menegaskan posisi pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki kepedulian pada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk menghasilkan prestasi di bidang olahraga tentunya memerlukan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai pada atlet berprestasi termasuk atlet penyandang disabilitas.

8. Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas reformasi birokrasi merupakan upaya percepatan pencapaian target pembangunan melalui prioritas – prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah serta dukungan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan kinerja keuangan pemerintah kabupaten / kota se – Sumatera Utara menjadi hal yang paling substantif untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4.3.4. Isu Strategis Kota Binjai

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa depan. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Kota Binjai; (2) Isu-isu internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Binjai; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Binjai; (4) Kebijakan pembangunan Kota Binjai yang antarlain terdiri dari RPJPD dan RTRW; dan (5) KLHS RPJMD. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Binjai yaitu:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Jumlah penduduk miskin di Kota Binjai terus mengalami penurunan, namun jumlahnya masih cukup besar yaitu 15.610 jiwa atau 5,66 persen. Kemiskinan yang masih cukup tinggi ini disebabkan meningkatnya perhitungan garis kemiskinan di Kota Binjai sebagai konsekuensi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal, dan rumah tangga buruh; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Kota Binjai adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Secara jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Binjai mengalami tren penurunan, akan tetapi akibat covid-19 terjadi peningkatan. Masalah utama dalam pengentasan kemiskinan seperti yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Keberlanjutan di Kota Binjai masih mengalami sejumlah permasalahan mendasar. Faktor yang menyebabkan permasalahan kemiskinan tersebut diantaranya adalah 1) masih tingginya keluarga pra-sejahtera; 2) masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 3) belum optimalnya pelayanan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 4) penanganan masalah kemiskinan yang belum tepat sasaran dan 5) tingginya kerentanan penyandang masalah sosial.

Secara umum jumlah PMKS di Kota Binjai terus meningkat dari 18.957 kasus pada tahun 2017 menjadi 19.032 kasus pada tahun 2019, dimana PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Binjai juga meningkat dari 11.649 kasus pada tahun 2017 menjadi 12.285 kasus pada tahun 2019, sementara kondisi eksisting pada tahun 2020 belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan dan penanganan PMKS di Kota Binjai terus meningkat dari 61,45 % pada tahun 2017 menjadi 64,55 % pada tahun 2019.

2. Pengangguran

Kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kota Binjai tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kota Binjai sebagai sebuah wilayah yang menjadi sentra kegiatan ekonomi. Pada umumnya, penduduk yang memiliki permasalahan sosial tersebut datang ke Kota Binjai untuk mencari pekerjaan dan penghasilan. Tingkat pengangguran di Kota Binjai juga mengalami penurunan yang cukup baik dari 10,00% tahun 2016 menjadi 6,14% tahun 2019 namun kembali meningkat menjadi 8,67% tahun 2020. Namun capaian ini masih kurang baik (di bawah) capaian Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,91%. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran di Kota Binjai juga mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Binjai telah mengalami peningkatan 2,58% pada Agustus 2020. Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah program/kegiatan untuk menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 dalam pemulihan ekonomi Kota Binjai.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat Pendidikan menengah pertama. Kinerja kualitas Pendidikan Kota Binjai menunjukkan capaian Angka rata-rata lama sekolah di Kota Binjai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan dari 10,28 tahun menjadi 10,77 tahun. Pencapaian rata-rata lama sekolah Kota Binjai lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Sumatera Utara. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kota Medan dan Kota Pematang Siantar maka pencapaian Kota Binjai masih cukup tertinggal.

Kinerja APK SD/MI Kota Binjai menunjukkan kinerja yang stagnan. Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami tren naik pada tingkat SMP dan PT, dan tren turun pada tingkat SD dan SMA. Bila pada Tahun 2016 APK SD/MI sebesar 115,69, maka pada Tahun 2020 nilainya turun yakni 105,93. Tahun 2016 adalah titik tertinggi yaitu 115,69. Sedangkan APK SMP/MTs Kota Binjai masih perlu ditingkatkan lagi. Pada Tahun 2016 sebesar 81,99 mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 88,07. Tahun 2017 adalah titik terendah yaitu 77,64 bila dibandingkan tahun- tahun yang lainnya.

Selain itu kualitas tingkat Pendidikan, permasalahan yang masih ada dalam bidang Pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Secara rasio, jumlah kecukupan guru terhadap jumlah siswa sudah berada pada level yang baik. Namun, ketersediaan guru untuk mata pelajaran tertentu masih diperlukan karena ketersediannya masih belum merata.

Pembangunan Pendidikan di Kota Binjai perlu disertai dengan pembangunan karakter dalam kerangka pembangunan dalam untuk daerah yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan berdaya saing. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa; 2) Memajukan kebudayaan; 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan

penghayatan nilai agama; 4) Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat, serta perlindungan perempuan dan anak; dan 5) Meningkatkan budaya literasi.

Budaya memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama tatanan bernegara, berbangsa, maupun berkeluarga. Negara akan besar jika nilai-nilai budaya telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga dapat ditumbuhkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tolong menolong, ramah, dan santun. Keragaman budaya tidak hanya bahasa, melainkan juga tari, musik, adat. Munculnya gejala-gejala perilaku sosial baru sebagai proses penurunan nilai moral dan erosi kultural, merupakan bagian dari degradasi kultural.

4. Kesehatan

Pembangunan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan daerah. Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan indikator utama peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia. Selain itu, kualitas dan kuantitas tenaga medis baik itu dokter, perawat maupun tenaga medis lainnya juga harus memenuhi kriteria standar minimal sehingga pencapaian kehidupan yang layak bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Peningkatan modal manusia dimulai sejak dini dengan melakukan peningkatan pelayanan Kesehatan bagi bayi dan anak serta peningkatan pelayanan keluarga berencana. Pemerintah bersama dengan masyarakat perlu menyusun dan melaksanakan program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam menjamin kehidupan yang sehat masih mencapai 12 indikator dari 34 indikator yang telah ditetapkan 35,3% menunjukkan masalah kesehatan khususnya kesehatan bagi bayi dan anak perlu lebih ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Kesehatan bagi ibu dan balita, pengaktifan posyandu menjadi sangat urgen. Untuk fasilitas Posyandu yang berkaitan dengan kesehatan Balita di Kota Binjai menunjukkan trend pergerakan yang cukup baik, dimana jumlah fasilitas Posyandu mengalami peningkatan dari 238 unit pada tahun 2016 menjadi 240

unit pada tahun 2018. Pada tahun 2020, jumlah posyandu di Kota Binjai tidak mengalami penambahan. Jika dibandingkan dengan jumlah Balita yang terdata di Kota Binjai, maka diperoleh nilai rasio yang terus menurun dari 108 pada tahun 2016 menjadi 110 pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan tuntutan penyediaan posyandu menjadi perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendirikan fasilitas Kesehatan tersebut. Di samping itu, pemerintah Kota Binjai secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan dukungan terhadap aktivitas posyandu agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan dan menghilangkan *stunting* di Kota Binjai. Pada tahun 2020, angka prevalensi *stunting* di Kota Binjai sebesar 15,3%. Walaupun masih di bawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera Utara, sebesar 29,20%, namun perlu dilakukan penanganan khusus agar tidak dijumpai lagi kasus *stunting* di masa yang akan datang di Kota Binjai.

5. Infrastruktur

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting bagi masyarakat yang disediakan Pemerintah Kota Binjai, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Binjai sudah cukup memadai. Infrastruktur jalan dalam kondisi baik (bisa dipacu >40 Km/Jam) di Kota Binjai terus meningkat dari 316.752 Km pada tahun 2016 menjadi 326.057 Km pada tahun 2020, dimana proporsi panjang jalan dalam kondisi baik juga meningkat dari 87% pada tahun 2016 menjadi 90% pada tahun 2020. Kemudian untuk sistem drainase jalan dalam kondisi baik atau tidak tersumbat juga mengalami peningkatan dari 90% pada tahun 2016 menjadi 95 % pada tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh peningkatan rumah tangga yang memiliki sistem sanitasi yaitu dari 85,5 % pada tahun 2016 menjadi 95 % pada tahun 2020. Namun isu terhadap pengendalian kemacetan lalu lintas masih perlu diantisipasi khususnya pada wilayah tertentu yang menjadi pusat perekonomian. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang lebih baik bagi Kota Binjai agar lalu lintas lebih lancar tanpa mengganggu aktivitas ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

Dilihat dari sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat Kota Binjai didominasi penggunaan air isi ulang dan sumur bor/ pompa. Dimana masyarakat Kota Binjai mayoritas masih menggunakan air isi ulang sebagai sumber utama air minum mereka. Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Binjai, menggunakan air isi ulang dari 58,18% di tahun 2018 meningkat menjadi 59,65% di tahun 2020. Sumur bor/ pompa/ pumped water dari 9,23% di tahun 2018 meningkat menjadi 18,69% di tahun 2020, dan air kemasan dari 4,46 % di tahun 2018 meningkat menjadi 6,27 % di tahun 2020. Sementara persentase rumah tangga yang menggunakan leding/ plumber water terus menurun dari 4,73% di tahun 2018 menjadi 3,81% di tahun 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian terutama dalam peningkatan penggunaan leding sebagai sumber air bersih dan peningkatan sambungan rumah dalam menjamin penyediaan air minum yang bersih dan layak. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sudah menjadi target kerja Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, dalam tahun 2021-2020, yaitu melaksanakan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Medan, Binjai, Deli Serdang (MEBIDANG). Pembangunan SPAM Regional Mebidang tahap I dengan kapasitas produksi 1100 L/detik untuk tahun pekerjaan waktu konstruksi 2021-2022. Lingkup kegiatan Pembangunan SPAM Regional Mebidang tahap I tahun 2021-2022 meliputi pembangunan Intake (2400 L/detik), IPA (1100 L/detik), jaringan distribusi utama (JDU), Reservoir Oftaker Kota Binjai (2500 m3), Kabupaten Deliserdang (3000 m3), dan Kota Medan (6000 m3). Kondisi ini akan membawa konsekuensi kesiapan Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam hal menindaklanjuti hasil pembangunan SPAM Regional Mebidang untuk diintegrasikan dengan pembangunan SPAM Kota Binjai.

Dari sisi penataan ruang, luas lingkungan permukiman kumuh di Kota Binjai menunjukkan penurunan dari 2017 dengan luas daerah kumuh sebesar 604,89 Ha menjadi 386,55 Ha pada tahun 2019. Seiring dengan menurunnya daerah permukiman kumuh di Kota Binjai, terjadi peningkatan persentase rumah layak huni dari 80,89 % pada tahun 2016 menjadi 90,07 % pada tahun 2019. Peningkatan persentase rumah layak huni dan penurunan daerah permukiman kumuh tidak terlepas dari kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni yang dilakukan kepada 191 unit pada tahun 2017 dan 190 unit pada tahun 2018. Permukiman layak huni yang ada di Kota Binjai terus menunjukkan peningkatan persentase dari 90,45 %

pada tahun 2016 menjadi 97,09 % pada tahun 2019. Dalam upaya pemenuhan capaian dalam Standar Pelayanan Minimal diharapkan hingga akhir periode RPJMD Kota Binjai 2021 - 2026, persentase layak huni di Kota Binjai telah mencapai 100,0%.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tata kelola sumber daya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Walaupun telah disadari bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Binjai, namun masih dijumpai permasalahan dan hambatan. Permasalahan dimulai dari adanya penyalahgunaan wewenang, minimnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), struktur birokrasi yang tidak optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Binjai perlu didukung melalui ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku seperti, kredibilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan yang baik, dengan jumlah yang mencukupi.

Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk memiliki andil besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial.

Evaluasi tiap tahun perlu dilakukan untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di instansi pemerintah (pusat dan daerah) guna efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada instansi

pemerintah. Keberhasilan dalam implementasi SAKIP sangat berdampak pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata ternyata mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. Predikat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (evaluasi SAKIP) memiliki nilai predikat C untuk tahun 2018 dan predikat CC tahun 2019 dan 2020. Dari sisi penyelenggaraan keuangan negara, dari tahun 2016 sampai tahun 2020, pemerintah Kota Binjai berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walaupun Opini BPK yang diperoleh Kota Binjai telah membaik naik persentase tindak lanjut temuan juga cenderung meningkat dari 61,42 % pada tahun 2016 menjadi 82,95 % pada tahun 2020.

7. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kota Binjai perlu menjadi perhatian karena sangat terkait dengan kenyamanan kehidupan warga kota. Pemerintah Kota Binjai memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kualitas air, udara dan tanah pada taraf yang aman dan nyaman bagi kehidupan warga Kota Binjai. Dengan penduduk yang semakin padat, ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, dan pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Status pencemaran mutu air sungai Kota Binjai masih termasuk dalam kondisi cemar ringan namun akan semakin buruk seiring dengan meningkatnya penduduk dan pencemaran yang dilakukan oleh sejumlah aktivitas bisnis.

Di samping air sungai, masalah persampahan juga menjadi isu penting bagi perkotaan. Dengan luas wilayah yang terbatas, Kota Binjai sangat bergantung kepada Kabupaten Langkat dalam penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Binjai. Untuk penanganan sampah di Kota Binjai menunjukkan kondisi yang konstan jika dilihat dari rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 yaitu sebesar 323, dimana timbunan sampah yang terlayani mengalami peningkatan dari 2.904 m³ pada tahun 2016 menjadi 280.192,37 m³ pada Tahun 2020, sementara kondisi eksisting pada tahun 2020 tidak tersedia. Kemudian rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah kota Binjai juga menunjukkan peningkatan dari hanya 3 % pada tahun 2016 meningkat menjadi 10 % pada tahun 2020. Penanganan sampah yang

semakin besar volumenya perlu didukung dengan sarana pengangkut sampai yang memadai dan juga tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir bagi sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Binjai.

Kota Binjai termasuk wilayah administrasi yang memiliki potensi bencana alam seperti bahaya banjir dengan kelas bahaya sedang hingga tinggi. Kota Binjai yang dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Bingei dan Sungai Mencirim berpotensi untuk terpapar bencana banjir. Sejumlah 5 kecamatan berada pada potensi tersebut dengan luas sekitar 7.664 hektar. Sedangkan dilihat dari jumlah populasi terpapar, sekitar 235 ribu jiwa berada pada sejumlah kecamatan tersebut. Dalam pengendalian banjir di Kota Binjai perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti penghijauan di sekitar aliran sungai dan pembangunan pengedali banjir di bagian hulu DAS Sungai Bangkatan.

Penataan ruang yang optimal dilakukan untuk memitigasi bencana menjadi lebih baik. Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi bencana adalah penyiapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota berdimensi mitigasi bencana. UUPR juga telah mengatur bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus memuat unsur rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana.

Satu dari sekian hal yang tampak adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan tata ruang. Masih banyak penduduk yang memilih bermukim pada daerah bantaran sungai dan area berbukit kemiringan terjal yang sangat rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pengendalian tata ruang menjadi tantangan utama dalam mengurangi risiko bencana. Ketegasan sangat dibutuhkan untuk menegakkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) berbasis risiko bencana (rencana tata ruang tangguh bencana), termasuk keseriusan pemerintah merelokasi permukiman masyarakat dari zona rentan bencana. Penataan lingkungan kumuh terus berlanjut dilakukan sehingga luas Kawasan permukiman kumuh di Kota Binjai menurun dari 604,89 ha (2017) menjadi 386,55 ha (2019). Namun, luasan permukiman kumuh yang masih tinggi, khususnya yang berlokasi di pinggiran kawasan sungai memerlukan penanganan serius agar luasannya dapat ditekan. Selain itu, pengembalian kawasan pinggiran sungai menjadi daerah ruang terbuka berpotensi untuk

meningkatkan ruang terbuka hijau di Kota Binjai yang sampai saat ini masih belum mencapai standar yang telah ditetapkan.

Dari sisi penanganan bencana kebakaran, cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan trend peningkatan dari 0,0026 % pada tahun 2016 menjadi 0,10 % pada tahun 2019, tetapi untuk tingkat waktu tanggap di Kota Binjai belum menunjukkan hasil kinerja yang positif sesuai SPM dalam Permendagri No. 69/2012 disebutkan bahwa waktu tanggap sebesar 75 %, sementara itu waktu tanggap di Kota Binjai belum mencapai standar tersebut dan menunjukkan trend penurunan dari 36,58 % pada tahun 2016 menjadi 36.00 % pada tahun 2020.

Sinergitas dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan dalam menyelesaikan isu strategis yang saling terkait antara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Adapun matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS dan Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Binjai

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS Kota Binjai	Isu Strategis RPJMD Kota Binjai
1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi 2. Tenaga Kerja 3. Investasi 4. Perdagangan 5. Institusi 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Karakter Bangsa 9. Infrastruktur 10. Kewilayahan 11. Lingkungan Hidup dan Bencana 12. Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan	1. Ketenagakerjaan 2. Pendidikan 3. Infrastruktur 4. Kesehatan 5. Agraris 6. Pariwisata 7. Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga 8. Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan upaya kesehatan dan Keluarga Berencana; 2. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Binjai berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha, kesempatan lapangan kerja, kerjasama dengan	1. Pengurangan Kemiskinan 2. Pengurangan Pengangguran 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan Kelestarian Budaya 4. Peningkatan kualitas kesehatan 5. Optimalisasi layanan Infrastruktur 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan Hidup

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS Kota Binjai	Isu Strategis RPJMD Kota Binjai
		mitra kerja, dan pariwisata dari segi budaya; 4. Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan penyediaan sanitasi dan air minum layak, pengolahan limbah domestik, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi; 5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana; 6. Peningkatan mutu pendidikan; 7. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas; 8. Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemiskinan dan penyandang disabilitas, serta penyalahgunaan miras dan narkoba.	

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai. Adapun pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2021 – 2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU,
BERBUDAYA DAN RELIGIUS”**

Adapun maksud dari visi tersebut adalah:

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.

2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;

3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

5.3. TUJUAN

Adapun tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2021 – 2026, antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
4. Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar.

5.4. SASARAN

Adapun sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2021 – 2026, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
4. Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
5. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai.
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan.
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

5.5. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2026

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai tahun 2021 – 2026, adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.

4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
6. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
7. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
9. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
10. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
11. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.
12. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
13. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
14. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
15. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
16. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori	NA	CC	B	B	BB	BB
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65	68	71	75	81
					Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,22	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
2	Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berkas Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			nilai	NA	77 (B)	80 (B)	83 (B)	86 (B)	89 (A)
				Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	Persen	89,86	92	93	94	95	96
					Persentase akses air minum kota	Persen	28	35	40	50	55	60
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54,0	59,0	61,0	64,0	68,7

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,12	11,4	11,6	11,8	11,9	12,0
					Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	29,20	29,7	30,0	30,2	30,5	30,7
					Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,2	41,4	41,5	41,7	41,8	42,0
				Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,08	6,8	6,5	6,4	6,2	6,0

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
3	Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	75,89	76,80	77,35	77,90	78,50	79,10
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	poin	74,27	75,12	75,74	76,03	76,66	76,96
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indek Kesehatan	poin	80,58	81,35	81,62	82,02	82,28	82,68
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	poin	73,04	74,74	76,39	78,05	79,73	81,43

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Binjai dalam lima tahun kedepan, perlu disusun strategi yang akan menjamin bahwa Misi dapat dilaksanakan dan dapat pula mencapai tujuan dan sasarannya dengan baik. Selanjutnya strategi juga membutuhkan ketetapan arah kebijakan agar tujuan dan sasaran menjadi tepat dan tidak salah arah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan didalam RPJMD Kota Binjai 2021-2026 ini harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan kota untuk lima tahun ke depan.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Binjai tahun 2021-2026, maka Pemerintah Kota Binjai akan melaksanakannya melalui misi yang telah disusun serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional

Makna yang terkandung dalam misi pertama ini adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pada misi pertama ini, maka strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- a. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.
 - b. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai.
3. Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pemanfaatan *assessment center* sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur.
 - b. Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya.
 - c. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas.
4. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja.
 - b. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas.
 - c. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
 - d. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Adapun makna yang terkandung dalam misi kedua ini adalah adanya upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas

daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pada misi kedua ini, maka strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat.
 - b. Penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim.
2. Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih.
 - b. Penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, *Green Office*, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura.
4. Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
5. Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu.

- b. Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH.
 - c. Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH.
- 6. Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA.
 - b. Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 7. Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat.
- 8. Meningkatkan daya saing industri kreatif, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas.
 - b. Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Taman Teknologi Kota Binjai”.
 - c. Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM.
- 9. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif.
 - b. Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis.
- 10. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja.

- b. Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif.
 - c. Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja.
11. Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- a. Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal dan regional.
 - b. Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya Sentra Industri Binjai.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Untuk makna yang terdapat pada misi ketiga ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Binjai sesuai dengan kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pada misi ketiga ini, maka strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik.
 - c. Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya lokal.
3. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca.

4. Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan, dengan arah kebijakan yang akan dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama.
 - b. Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama.
 - c. Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan.
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk Kota Binjai dan kelompok tertentu.
 - b. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
6. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan.
 - b. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah.
7. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit serta pemantauan implementasinya secara berkala.
 - b. Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi.
8. Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan keterampilan dan inovasi pelaku UMKM.
 - b. Pengembangan produk unggulan UMKM dan kemitraan antar usaha.
9. Meningkatkan peranan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam perekonomian, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - a. Peningkatan keahlian pengelola koperasi dan lembaga pembiayaan mikro.

10. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dengan arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- a. Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
 - b. Peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK).
 - c. Penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar.
 - d. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat.
 - e. Peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan Perguruan Tinggi.

Tabel 6.1. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Pertama

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius					
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional					
Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)	1.	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional
		2.	Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1.	Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik
				2.	Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai
		3.	Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	1.	Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur
				2.	Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
				3.	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
		4.	Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja
				2.	Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas
				3.	Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
				4.	Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Tabel 6.2. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Kedua

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius					
Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan					
Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	1.	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
				2.	Penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
		2.	Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	1.	Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
				2.	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat
	Meningkatnya kualitas lingkungan	3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan	1.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
	hidup		lingkungan hidup		bank sampah, <i>Green Office</i> , Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
		4.	Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	1.	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
		5.	Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	1.	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu
				2.	Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH
				3.	Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
					dapat berfungsi sebagai RTH
		6.	Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup	1.	Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA
				2.	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
		7.	Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan	1.	Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	8.	Meningkatkan daya saing industri kreatif	1.	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas
				2.	Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan "Taman Teknologi Kota Binjai"

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
				3.	Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM
		9.	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri ekonomi kreatif	1.	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif
				2.	Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis
	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai	10.	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja	1.	Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja
				2.	Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif
				3.	Peningkatan jaminan perlindungan tenaga kerja
		11.	Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	1.	Membangun dan mengembangkan sentra industri dalam skala pelayanan lokal dan regional

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
				2.	Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya Sentra Industri Binjai

Tabel 6.3. Hubungan Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ketiga

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius					
Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas					
Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	1.	Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan
		2.	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1.	Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
				2.	Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik
				3.	Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya lokal
		3.	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	1.	Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca
		4.	Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan	1.	Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan		kebangsaan	2.	Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama
				3.	Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan
		5.	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk	1.	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk Kota Binjai
				2.	Mendorong pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
		6.	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	1.	Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
				2.	Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah
		7.	Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	1.	Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit serta pemantauan implementasinya secara berkala
				2.	Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas

Tujuan	Sasaran	No.	Strategi	No.	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	8.	Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM	1	Peningkatan keterampilan dan inovasi pelaku UMKM
				2	Pengembangan produk unggulan UMKM dan kemitraan antar usaha
		9.	Meningkatkan peranan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam perekonomian	1	Peningkatan keahlian pengelola koperasi dan lembaga pembiayaan mikro
		10.	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	1.	Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja
				2.	Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
				3.	Penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar
				4.	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan <i>job matching</i> yang tepat
				5.	Peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan Perguruan Tinggi

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat difokuskan arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Fokus arah kebijakan pembangunan pada setiap tahunnya akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Binjai dalam pencapaian target sasaran pembangunan yang ada di RPJMD. Adapun fokus arah kebijakan pembangunan Kota Binjai selama lima tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.1

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Binjai Tahun 2022-2026



Adapun rincian untuk fokus arah kebijakan pembangunan setiap tahun di Kota Binjai tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Binjai lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun

2022 adalah **“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing industri kreatif dengan pemanfaatan IPTEK”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Peningkatan daya saing industri kreatif.
- c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata lokal serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif.
- d. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha.
- e. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a. Penguatan daya saing ekonomi daerah.
- b. Pengurangan kesenjangan wilayah melalui ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata.
- c. Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.
- d. Peningkatan ruang terbuka hijau (RTH).
- e. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem layanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI)”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
- b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
- c. Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- d. Membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan berintegritas.
- e. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Perwujudan masyarakat Kota Binjai yang sejahtera, maju, berbudaya dan religius”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a. Terwujudnya pelayanan publik dengan pola pelayanan prima dan terintegrasi.
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Kota Binjai yang berdaya saing.
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari.
- d. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Penguatan terwujudnya masyarakat Kota Binjai yang sejahtera, maju, berbudaya dan religius”**, dengan fokus dan prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a. Penguatan pelayanan publik dengan pola pelayanan prima dan terintegrasi.
- b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Kota Binjai yang berdaya saing.
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari.
- d. Penguatan masyarakat yang religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan.

6.3. Program Pembangunan Kota Binjai

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan strategis di Kota Binjai, maka disusunlah program pembangunan daerah. Penyusunan program pembangunan juga dilaksanakan untuk menjawab program pembangunan kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program pembangunan kepala daerah Kota Binjai diantaranya:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang merata.
6. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
7. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
9. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
10. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.
11. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
12. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
13. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
14. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
15. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
16. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

6.4. Prioritas Pembangunan Kota Binjai

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Adapun prioritas pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 meliputi :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan kontribusi sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan terwujudnya sentra industri Binjai.

Secara ringkas, penyusunan program prioritas yang menjadi fokus pembangunan Kota Binjai dalam RPJMD Kota Binjai 2021 – 2026 berdasarkan keterkaitannya dengan Visi dan Misi Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
								2020	2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi						544.886.358.053		601.218.686.381		629.123.794.725		639.679.733.519		677.462.283.884	
1.1		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Berbasi Elektronik yang Dikelola	Unit			3.013.559.392		3.130.003.984		3.246.448.576		3.362.893.168		3.497.408.895	Dinas Kominfo	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen			200.000.000		454.000.000		622.000.000		650.000.000		675.280.000	Dinas Kominfo	

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
									2020	2022		2023		2024		2025		2026	
								Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan ASN	Persen		40	2.515.955.600	42	3.326.473.824	44	2.419.532.777	46	2.516.314.088	48	2.532.601.852	BKD
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												BKD		
				Nilai Evaluasi LPPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		100	539.156.843.061	100	594.308.208.573	100	622.835.813.372	100	633.150.526.263	100	670.756.993.138	Semua OPD
2	Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur					36.364.370.200		35.712.570.310		37.233.015.690		38.829.312.013		40.505.244.973		

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
									2020	2022		2023		2024		2025		2026	
								Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Persen		90	32.336.840.000	92	33.734.563.600	94	35.202.008.644	96	36.742.654.615	98	38.360.154.706	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase akses air minum kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persen		30	500.000.000	40	500.000.000	50	500.000.000	60	500.000.000	70	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
		2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	Rasio		84	1.009.530.200	84	1.060.006.710	84	1.113.007.046	85	1.168.657.398	84	1.227.090.268	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												Dinas Lingkungan Hidup		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kesesuaian Peruntukan Lahan/Ruang	Persen		100	2.518.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	100	418.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
								2020	2022		2023		2024		2025		2026	
							Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)						11.585.000.000		12.095.000.000		12.246.500.000		12.919.050.000		13.319.555.000	
		2.2.1 Meningkatkan peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit			2.410.000.000		2.651.000.000		2.916.100.000		3.207.710.000		3.528.481.000	Dins Koperasi dan UMKM
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit			1.140.000.000		1.254.000.000		1.379.400.000		1.517.340.000		1.669.074.000	Dins Koperasi dan UMKM
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	ROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang Dibangun dan Dipelihara	Persen		52	1.409.000.000	54	1.610.000.000	56	1.411.000.000	58	1.612.000.000	60	1.412.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
			Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kotribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen			530.000.000		730.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
									2020	2022		2023		2024		2025		2026	
								Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.2.2	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen		60	100.000.000	72	110.000.000	80	120.000.000	88	130.000.000	100	140.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		10	5.185.000.000	10	5.188.000.000	10	5.197.000.000	10	5.198.000.000	10	5.201.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang		250	811.000.000	250	552.000.000	260	543.000.000	260	574.000.000	270	689.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					277.223.988.829		301.140.973.931		296.902.719.167		303.011.374.574		308.142.088.341		
		3.1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/SMP	Angka			82.382.831.210		85.678.144.458		89.105.270.237		92.669.481.046		96.376.260.288	Dinas Pendidikan

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
									2020	2022		2023		2024		2025		2026	
								Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			pendidikan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV	Persen			66.572.515.564		69.235.416.187		72.004.832.834		74.885.026.147		77.880.427.193	Dinas Pendidikan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan		18	100.000.000	59	829.900.000	42	532.400.000	56	703.500.000	47	595.500.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan	Kegiatan		18	600.000.000	16	589.000.000	13	470.000.000	12	420.500.000	1	56.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit		3	125.000.000	1	100.000.000	1	286.000.000	1	199.000.000	1	159.500.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3.2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indek Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi	Angka		4	119.461.451.703	4	136.182.629.771	3	126.021.934.962	3	125.145.069.337	3	124.128.233.173	Dinas Kesehatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Rasio		1:772	999.040.772	1:772	1.039.002.403	1:770	1.080.562.499	1:770	1.123.784.999	1:770	1.168.736.399	Dinas Kesehatan

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Program										OPD Penanggung Jawab
								2020	2022		2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	Persen		100	6.752.169.580	100	7.245.381.113	100	7.139.438.636	100	7.586.603.044	100	7.502.231.288	Satpol PP
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pedsentase Penanganan Kejadian Terkait Konflik Sosial	Persen		100	230.980.000	100	241.500.000	100	262.280.000	100	278.410.000	100	275.200.000	Kesbangpol

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kota Binjai menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sesuai dengan amanat Perundang-undangan yang berlaku. Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Rencana program perangkat daerah Kota Binjai untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Binjai serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kota Binjai disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.2. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja daerah berupa operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021 – 2026

NO.	Uraian	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024	PROYEKSI 2025	PROYEKSI 2026
1	Belanja Operasi	860.152.836.977	890.258.186.271	921.417.222.791	953.666.825.588	987.045.164.484
1.1.	Pegawai	474.040.398.728,62	490.631.812.684,13	507.803.926.128,07	525.577.063.542,55	543.972.260.766,54
1.2	Barang dan Jasa	363.556.538.752,43	376.281.017.608,77	389.450.853.225,07	403.081.633.087,95	417.189.490.246,03
1.3.	Subsidi	274.283.568,00	283.883.492,88	293.819.415,13	304.103.094,66	314.746.702,97
1.4.	Hibah	22.281.615.928,00	23.061.472.485,48	23.868.624.022,47	24.704.025.863,26	25.568.666.768,47
1.5	Bantuan Sosial					
2	Belanja Modal	118.326.019.370,90	122.467.430.048,88	126.753.790.100,59	131.190.172.754,11	135.781.828.800,50
2.1.	Belanja Modal Tanah	1.938.514.606,02	2.006.362.617,23	2.076.585.308,83	2.149.265.794,64	2.224.490.097,46
2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.896.680.819,47	49.573.064.648,15	51.308.121.910,83	53.103.906.177,71	54.962.542.893,93
2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.358.140.517,66	23.140.675.435,77	23.950.599.076,03	24.788.870.043,69	25.656.480.495,21
2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.305.267.977,73	26.190.952.356,95	27.107.635.689,44	28.056.402.938,57	29.038.377.041,42
2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.827.415.450,03	21.556.374.990,78	22.310.848.115,45	23.091.727.799,49	23.899.938.272,48
3	Belanja Tidak Terduga	24.461.971.408,70	25.440.450.265,05	26.458.068.275,65	27.516.391.006,67	28.617.046.646,94

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Binjai Tahun 2021 – 2026

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Urusan Wajib Pelayanan Dasar PENDIDIKAN																		
101.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	217,286,346,134	100	219,317,092,419	100	228,089,776,116	100	237,213,367,160	100	246,701,901,847	100	256,569,977,921	100	1,187,892,115,463	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	20,415,400	100	25,980,750	100	27,019,980	100	28,100,779	100	29,224,810	100	30,393,803	100	140,720,122	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	215,991,964,892	100	216,437,976,900	100	225,095,495,976	100	234,099,315,815	100	243,463,288,448	100	253,201,819,986	100	1,172,297,897,124	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	195,144,110	100	331,649,627	100	344,915,612	100	358,712,237	100	373,060,726	100	387,983,155	100	1,796,321,357	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	50,176,940	100	946,660,000	100	984,526,400	100	1,023,907,456	100	1,064,863,754	100	1,107,458,304	100	5,127,415,915	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	859,444,792	100	1,015,800,740	100	1,056,432,770	100	1,098,690,080	100	1,142,637,684	100	1,188,343,191	100	5,501,904,465	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	169,200,000	100	559,024,402	100	581,385,378	100	604,640,793	100	628,826,425	100	653,979,482	100	3,027,856,480	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		%	100	92,224,332,905	100	82,382,831,210	100	85,678,144,458	100	89,105,270,237	100	92,669,481,046	100	96,376,260,288	100	446,211,987,239	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI/Paket A	%	101,88	55,973,305,000	99,13	45,347,483,970	99,15	47,161,383,329	99,20	49,047,838,662	99,22	51,009,752,208	99,25	53,050,142,297	99,25	245,616,600,466	Dinas Pendidikan Kota Binjai
		APK SD/MI/Paket A																
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A		99,58		99,60		99,62		99,62		99,64		99,66		99,66		
		Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A		0,0024		0,0023		0,0022		0,0021		0,0020		0,0019		0,0019		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99,80		99,82		99,84		99,86		99,88		99,20		99,20		
		APM SMP/MTs/Paket B	%	81,3		84,60		84,65		84,70		84,75		84,80		84,80		
101.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,44	31,425,422,090	99,45	31,134,547,240	99,47	32,379,929,130	99,49	33,675,126,295	99,50	35,022,131,347	99,55	36,423,016,600	99,55	168,634,750,611	Dinas Pendidikan Kota Binjai
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B		0,0004		0,100		0,050		0,0025		0,0015		0,0003		0,0003		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		99,64		99,66		99,68		99,70		99,72		99,74		99,74		
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		99,65		99,70		99,80		99,90		99,95		100		100		
101.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	11,76	3,075,157,170	28,55	3,676,000,000	31,41	3,823,040,000	34,55	3,975,961,600	38,00	4,135,000,064	41,80	4,300,400,067	41,80	19,910,401,731	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		%	100	1,750,448,645	100	2,224,800,000	100	2,313,792,000	100	2,406,343,680	100	2,502,597,427	100	2,602,701,324	100	12,050,234,431	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		%	0	-	100	515,000,000	100	535,600,000	100	557,024,000	100	579,304,960	100	602,477,158	100	2,789,406,118	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah muatan lokal dalam kurikulum (Seni Budaya) Pendidikan Dasar	Jumlah	NA	-	3	265,000,000	3	275,600,000	3	286,624,000	3	298,088,960	3	310,012,518	3	1,435,325,478	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah muatan lokal dalam kurikulum (Seni Budaya) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	0	-	100	250,000,000	100	260,000,000	100	270,400,000	100	281,216,000	100	292,464,640	100	1,354,080,640	Dinas Pendidikan Kota Binjai

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
101.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		%	100	1,568,909,200	100	66,572,515,564	100	69,235,416,187	100	72,004,832,834	100	74,885,026,147	100	77,880,427,193	100	360,578,217	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4	Jumlah	1.712	1,568,909,200	3.532	66,572,515,564	3.535	69,235,416,187	3.538	72,004,832,834	3.540	74,885,026,147	3.545	77,880,427,193	3.545	360,578,217,925	Dinas Pendidikan Kota Binjai
		Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Angka	88,27		84,27		85,50		86,60		84,70		88,07		88,07		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI)	Rasio	01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	Rasio	01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		01 : 20		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	Rasio	01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		01 : 28		
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)	Rasio	01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		01 : 32		
101.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		%	0	-	100	49,000,000	100	50,960,000	100	52,998,400	100	55,118,336	100	57,323,069	100	265,399,805	Dinas Pendidikan Kota Binjai
101.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	%	NA	-	99,4	24,000,000	99,5	24,960,000	99,6	25,958,400	99,8	26,996,736	100	28,076,605	100	129,991,741	Dinas Pendidikan Kota Binjai
		Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	%	NA	-	99,5		99,6		99,7		99,9		100		100		
101.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	%	NA	-	99,0	25,000,000	99,1	26,000,000	99,2	27,040,000	99,3	28,121,600	100	29,246,464	100	135,408,064	Dinas Pendidikan Kota Binjai
Kesehatan RS DR.R.M. Djoelham																		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas			66,782,287,627		68,846,498,637		71,860,858,582		74,625,292,926		77,454,304,643		80,860,562,639		440,429,805,054	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja			86,176,000		200,000,000		208,000,000		216,320,000		224,972,800		233,971,712		1,169,440,512	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target			38,749,819,690		38,749,819,690		40,299,812,478		41,911,804,977		43,588,277,176		45,331,808,263		248,631,342,273	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola barang milik OPD terlaksana dengan baik					100,000,000		104,000,000		108,160,000		112,486,400		116,985,856		541,632,256	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas			58,085,810		150,000,000		406,000,000		312,240,000		168,729,600		483,564,594		1,578,620,004	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Umum			1,312,160,780		1,766,707,500		1,837,375,800		1,910,870,832		1,987,305,665		2,066,797,892		10,881,218,469	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan OPD					2,200,000,000		2,288,000,000		2,379,520,000		2,474,700,800		2,573,688,832		11,915,909,632	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharnya kebutuhan jasa			3,157,834,847		1,479,971,447		1,539,170,305		1,600,737,117		1,664,766,602		1,731,357,266		11,173,837,584	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya			418,210,500		1,200,000,000		1,258,500,000		1,308,840,000		1,361,193,600		1,415,641,344		6,962,385,444	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Berkesinambungannya pelayanan rumah sakit			23,000,000,000		23,000,000,000		23,920,000,000		24,876,800,000		25,871,872,000		26,906,746,800		147,575,418,800	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	16,291,222,480	Paripurna	31,729,100,000	Paripurna	33,079,264,000	Paripurna	34,487,484,560	Paripurna	35,956,286,442	Paripurna	37,488,305,525	Paripurna	189,031,663,007	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
		Kelas RSUD	Tipe B	Tipe B		Tipe B		Tipe B		Tipe B		Tipe B		Tipe B		Tipe B		
		Indeks Kepuasan Pelayanan	%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		
		BOR	%	60%		60%		60%		70%		70%		70%		70%		
		AVLOSS	Hari	6 Hari		6 Hari		5 Hari		4 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		
		TOI	Hari	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari		
		BTO	Kali	40 Kali		40 Kali		40 Kali		40 Kali		40 Kali		40 Kali		40 Kali		
		NDR	%	< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		< 25 %		
		GDR	%	< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	BOR sesuai standar	%	60%	9,622,363,084	64%	24,150,000,000	68%	25,197,000,000	72%	26,289,930,000	76%	27,430,829,700	80%	28,621,830,513	80%	28,621,830,513	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi Rumah Sakit tercapai	Kegiatan	Paripurna	6,599,643,196	Paripurna	7,439,100,000	Paripurna	7,736,664,000	Paripurna	8,046,130,560	Paripurna	8,367,975,782		8,702,694,814		46,892,208,352	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Indeks Kepuasan Pelayanan	%	90%	12,664,200	90%	30,000,000	90%	31,200,000	92%	32,448,000	93%	33,745,920	95%	35,095,757	95%	35,095,757	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelas RSUD	Tahun	Tipe B	56,552,000	Tipe B	110,000,000	Tipe B	114,400,000	Tipe B	118,976,000	Tipe B	123,735,040	Tipe B	128,684,442	Tipe B	652,347,482	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan SDM yang berkualitas dan kompeten	Kegiatan		54,910,900		914,679,000		956,203,160		994,253,806		1,033,826,479		1,074,982,058		5,028,855,403	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pendayagunaan SDM yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi	Kegiatan		54,910,900		814,679,000		852,203,160		886,093,806		921,340,079		957,996,202		4,487,223,147	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SDM yang berkualitas dan kompeten	Kegiatan				100,000,000		104,000,000		108,160,000		112,486,400		116,985,856		541,632,256	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	NDR	%	< 25 %		< 25 %	40,000,000	< 25 %	41,600,000	< 25 %	43,264,000	< 25 %	44,994,560	< 25 %	46,794,342	< 25 %	216,652,902	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
		GDR	%	< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		< 45 %		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NDR dan GDR sesuai standar					40,000,000		41,600,000		43,264,000		44,994,560		46,794,342		216,652,902	RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI
Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah		100	71,405,626,099	100	74,538,522,397	100	77,050,063,293	100	80,132,065,825	100	83,337,348,458	100	86,614,599,196	100	473,078,225,267	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				270,650,000		198,309,000		206,241,360		214,491,014		223,070,655		231,993,481		1,344,755,511	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60,649,410,299		67,048,773,288		69,730,724,220		72,519,953,188		75,420,751,316		78,437,581,368		423,807,193,679	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				81,600,000		134,864,000		140,258,560		145,868,902		151,703,658		157,771,805		812,066,926	Dinas Kesehatan Kota Binjai

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300,000,000		450,000,000		518,000,000		538,720,000		560,268,800		526,436,352		2,893,425,152	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,724,075,800		1,304,873,380		1,357,068,315		1,411,351,048		1,467,805,090		1,526,517,293		8,791,690,926	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5,860,000,000		2,600,000,000		2,184,000,000		2,271,360,000		2,362,214,400		2,456,702,976		17,734,277,376	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,600,410,000		2,040,822,729		2,122,455,638		2,207,353,864		2,295,648,018		2,387,473,939		12,654,164,188	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				919,480,000		760,880,000		791,315,200		822,967,808		855,886,520		890,121,981		5,040,651,509	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angkat Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Stunting, Jumlah Masyarakat yang terlayani Unit Mobile Kesehatan		21 4 3,3 100	116,640,418,552	20 4 3,0 100	119,461,451,703	19 4 2,5 100	136,182,629,771	18 3 2,0 100	126,021,934,962	17 3 1,5 100	125,145,069,337	16 2 1,0 100	124,128,233,173	16 2 1,0 100	747,579,737,498	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				61,234,207,152		64,713,367,552		79,173,902,254		66,732,858,344		63,560,920,407		60,080,718,285		395,495,973,994	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota				54,501,281,400		53,993,039,151		56,152,760,717		58,398,871,146		60,734,825,992		63,164,219,031		346,944,997,437	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100	469,690,000	100	445,555,000	100	534,097,200	100	555,461,088	100	501,188,780	100	521,236,331	100	3,027,228,398	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	435,240,000	100	309,490,000	100	321,869,600	100	334,744,384	100	348,134,159	100	362,059,526	100	2,111,537,669	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter, Tenaga Medis, per Satuan Penduduk		1:772, 1:571	544,400,000	1:772, 1:571	847,576,000	1:770, 1:569	881,479,040	1:778, 1:567	916,738,202	1:768, 1:565	953,407,730	1:766, 1:563	991,544,039	1:766, 1:563	5,135,145,010	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								-		-		-		-		-	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				320,000,000		615,000,000		639,600,000		665,184,000		691,791,360		719,463,014	0	3,651,038,374	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi	Persen (%)	40	204,400,000	45	212,576,000	50	221,079,040	55	229,922,202	60	239,119,090	65	248,683,853	65	1,355,780,185	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memiliki izin dan memenuhi standar	Persen	90	175,000,000	92	328,543,363	93	340,885,098	94	353,720,501	95	367,069,321	96	380,952,094	97	1,946,170,378	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional				-		116,927,866		121,604,981		126,469,180		131,527,947		136,789,065		633,319,039	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga				-		31,500,000		32,760,000		34,070,400		35,433,216		36,850,545		170,614,161	Dinas Kesehatan Kota Binjai

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
		Persentase Sarana Produksi IRTP/PIRT yang memenuhi ketentuan dan memiliki Sertifikat	Persen (%)	80	40,000,000	85	41,600,000	90	43,264,000	95	44,994,560	100	46,794,342	100	48,666,116	100	265,319,018	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
		Persentase TPM yang dilakukan pemeriksaan Laik Higiene Sanitasi	Persen (%)	30	85,000,000	45	86,500,000	55	89,960,000	65	93,558,400	75	97,300,736	80	101,192,765	80	553,511,901	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
		Jumlah Pengawasan sentra Makanan Jajanan yang diperiksa memenuhi standar kesehatan	Tahun	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	6	120,000,000	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat		34	970,000,000	40	999,040,772	50	1,039,002,403	60	1,080,562,499	70	1,123,784,999	80	1,168,736,399	80	6,381,127,072	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
		Jumlah Advokasi yang dilaksanakan, Jumlah Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Lintas Sektor dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kegiatan	5	400,000,000	5	416,760,845	5	433,431,279	5	450,768,530	5	468,799,271	5	487,551,242	30	2,657,311,167	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen (%)	34	290,000,000	40	294,991,205	50	306,790,853	60	319,062,487	70	331,824,987	80	345,097,986	80	1,887,767,519	Dinas Kesehatan Kota Binjai
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Kesehatan Kota Binjai
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Kegiatan	5	280,000,000	5	287,288,722	5	298,780,271	5	310,731,482	5	323,160,741	5	336,087,171	30	1,836,048,386	Dinas Kesehatan Kota Binjai
Pekerjaan Umum 1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas			7,479,703,496		7,971,219,652		8,271,468,438		8,583,727,175		8,908,476,262		9,246,215,313		50,460,810,336	DPUPR
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja			14,300,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		89,300,000	DPUPR
1.03.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target			6,027,185,218		6,260,472,643		6,500,891,548		6,750,927,210		7,010,964,299		7,281,402,871		39,831,843,789	DPUPR
1.03.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas			59,940,000		62,337,600		64,831,104		67,424,348		70,121,322		72,926,175		397,580,549	DPUPR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Umum			701,267,300		729,317,992		758,490,712		788,830,340		820,383,554		853,198,896		4,651,488,793	DPUPR

Kode	Progaram Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola barang milik OPD terlaksana dengan baik					200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,000,000,000	DPUPR
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharnya kebutuhan jasa			182,070,978		189,353,817		196,927,970		204,805,089		212,997,292		221,517,184		1,207,672,329	DPUPR
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah			494,940,000		514,737,600		535,327,104		556,740,188		579,009,796		602,170,187		3,282,924,875	DPUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air	%	50	4,656,000,000	5	5,054,240,000	5	7,656,409,600	5	5,762,665,984	5	5,373,172,623	5	5,488,099,528	75	33,990,587,736	DPUPR
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4,656,000,000		5,054,240,000		7,656,409,600		5,762,665,984		5,373,172,623		5,488,099,528		33,990,587,736	DPUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Teredianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	%	30	0	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	5	500,000,000	5	500,000,000	70	2,500,000,000	DPUPR
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota			0		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		2,500,000,000	DPUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Terslaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terslaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%		0		-	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	4,000,000,000	DPUPR
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			0		-		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		4,000,000,000	DPUPR
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	%	10	1,650,995,200	10	2,417,035,008	10	2,485,716,408	10	3,057,145,065	10	2,381,430,867	10	2,458,688,102	60	14,451,010,650	DPUPR
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota			1,650,995,200		2,417,035,008		2,485,716,408		3,057,145,065		2,381,430,867		2,458,688,102		14,451,010,650	DPUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	50	4,100,000,000	10	6,125,000,000	10	5,856,250,000	10	6,399,062,500	10	6,354,015,625	10	6,621,716,406	100	35,456,044,531	DPUPR
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Tersedianya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,100,000,000		6,125,000,000		5,856,250,000		6,399,062,500		6,354,015,625		6,621,716,406	0	35,456,044,531	DPUPR
1.03.07	Program Pengembangan Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Terlaksananya Pengembangan Permukiman	%		0		-		-	100	1,000,000,000		-		-	100	1,000,000,000	DPUPR
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0		-		-		1,000,000,000		-		-		1,000,000,000	DPUPR
1.03.08	Program Penataan Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	%		24,784,000,000	100	25,800,360,000	100	27,358,624,400	100	27,960,531,876	100	29,107,893,776	100	30,302,597,183	100	165,314,007,235	DPUPR
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Tersedianya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah kabupaten / Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			24,784,000,000		25,800,360,000		27,358,624,400		27,960,531,876		29,107,893,776		30,302,597,183		165,314,007,235	DPUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	91	37,326,000,000	92	32,336,840,000	93	33,734,563,600	94	35,202,008,644	95	36,742,654,615	96	38,360,154,706	96	213,702,221,564	DPUPR
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Tersedianya drainase dalam kondisi baik	Tersedianya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota			37,326,000,000		32,336,840,000		33,734,563,600		35,202,008,644		36,742,654,615		38,360,154,706		213,702,221,564	DPUPR

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	%		0	100	350,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,350,000,000	DPUPR
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			0		350,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		1,350,000,000	DPUPR
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0		-		300,000,000		-		-		-		300,000,000	DPUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tercapainya kesesuaian peruntukan lahan/ruang	%	100	1,088,000,000	100	2,518,000,000	100	418,000,000	100	418,000,000	100	418,000,000	100	418,000,000	100	5,278,000,000	DPUPR
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Tersedianya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			70,000,000		850,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		1,120,000,000	DPUPR
1.03.12.2.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			650,000,000		1,000,000,000		-		-		-		-		1,650,000,000	DPUPR
1.03.12.2.03	Koordinasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			218,000,000		218,000,000		218,000,000		218,000,000		218,000,000		218,000,000		1,308,000,000	DPUPR
1.03.12.2.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota			150,000,000		450,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		1,200,000,000	DPUPR
Perumahan Rakyat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TerciptanyaPenyelenggaraan Pemerintah Yang efektif, Efesien, melayani dan professional			19,475,824,774	1 Tahun	27,371,500,000	1 Tahun	27,371,500,000	1 Tahun	27,634,360,000	1 Tahun	6,996,870,400	1 Tahun	30,513,323,776	1	119,887,554,176	Dinas PKP
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ASN dan Non ASN yang melakukan kegiatan administrasi keuangan,Jumlah kegiatan dan Dokumen			4,735,113,038	1 Tahun	4,754,000,000	1 Tahun	4,754,000,000	1 Tahun	4,944,160,000	1 Tahun	5,141,926,400	1 Tahun	5,347,603,456	1	24,941,689,856	Dinas PKP
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ASN yang Mendapatkan BIMTEK dan baju Dinas			3,600,000	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	208,000,000	1 Tahun	216,320,000	1 Tahun	224,972,800	1	1,449,292,800	Dinas PKP
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang-Barang Untuk Administrasi dan logistik kantor			337,706,100	1 Tahun	565,000,000	1 Tahun	565,000,000	1 Tahun	587,600,000	1 Tahun	611,104,000	1 Tahun	635,548,160	1	2,964,252,160	Dinas PKP
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Yang Diadakan				1 Tahun	600,000,000	1 Tahun	600,000,000	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	624,000,000	1	1,824,000,000	Dinas PKP
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tenaga Non ASN,pembayaran rekening air,listrik,internet dan materai			13,648,281,636	1 Tahun	20,102,500,000	1 Tahun	20,102,500,000	1 Tahun	20,906,600,000	1 Tahun	21,742,864,000	1 Tahun	22,612,578,560	1	105,467,042,560	Dinas PKP
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang dan Aset			718,724,000	1 Tahun	950,000,000	1 Tahun	950,000,000	1 Tahun	988,000,000	1 Tahun	1,027,520,000	1 Tahun	1,068,620,800	1	4,984,140,800	Dinas PKP
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rusunawa			615,288,684	1 Gedung 5 Kecamatan	700,000,000	1 Gedung dan 5 Kecamatan	700,000,000	1 Gedung dan 5 Kecamatan	520,000,000	1 Gedung dan 5 Kecamatan	540,800,000	1 Gedung dan 5 Kecamatan	562,432,000	1 Gedung	3,023,232,000	Dinas PKP
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Gedung Rusunawa Yang Dikelola	1 Gedung		464,613,484	1 Gedung	500,000,000	1 Gedung	500,000,000	1 Gedung	520,000,000	1 Gedung	540,800,000	1 Gedung	562,432,000	1 Gedung	2,623,232,000	Dinas PKP
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				150,675,200	5 Kecamatan	200,000,000	5 Kecamatan	200,000,000	5 Kecamatan	208,000,000	5 Kecamatan	216,320,000	5 Kecamatan	224,972,800	1	1,049,292,800	Dinas PKP
		Jumlah Kecamatan yang mendapatkan izin pembangunan			150,675,200	5 Kecamatan	200,000,000	5 Kecamatan	200,000,000	5 Kecamatan	208,000,000	5 Kecamatan	216,320,000	5 Kecamatan	224,972,800	1	1,049,292,800	Dinas PKP
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan Yang Terfasilitasi PSU			6,671,017,440	5 Kecamatan	30,000,000,000	5 Kecamatan	30,000,000,000	5 Kecamatan	31,200,000,000	5 Kecamatan	33,696,000,000	5 Kecamatan	36,391,680,000	1	161,287,680,000	Dinas PKP
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah panjang jalan lingkungan,drainase,lampu penerangan jalan umum serta taman			6,671,017,440	5 Kecamatan	30,000,000,000	5 Kecamatan	30,000,000,000	5 Kecamatan	31,200,000,000	5 Kecamatan	33,696,000,000	5 Kecamatan	36,391,680,000	1	161,287,680,000	Dinas PKP

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layah Huni dan kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani			Luas Wilayah Kumuh		300,000,000	1 Tahun	300,000,000	1 Tahun	2,000,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	2,000,000,000	1	4,700,000,000	Dinas PKP
1.04.03.2.02	Penataan Dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Luas Wilayah			-	5 kecamatan	300,000,000	1 Tahun	300,000,000	-	1 Tahun	100,000,000	-	1	700,000,000	Dinas PKP		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Cakupan Luas Wilayah			386.55Ha					150 Ha	2,000,000,000		236.55	2,000,000,000	-	4,000,000,000	Dinas PKP	
Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Administrasi dan tugas Satpol PP	Tahun	1	1,544,356,843	1	1,621,574,685	1	1,702,653,419	1	1,706,707,356	1	1,787,988,787	1	1,796,106,795	5	10,159,387,886	
1.05.01																	Satpol PP	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16,474,810		17,298,551		18,163,478		18,206,724		19,073,814		19,160,415		108,377,792	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				804,480,800		844,704,840		886,940,082		889,051,844		931,392,674		935,621,478			Satpol PP
1.05.01.2.08	Penyedlaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118,622,433		124,553,555		130,781,232		131,092,616		137,335,863		137,959,409		780,345,109	Satpol PP
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				604,778,800		635,017,740		666,768,627		668,356,171		700,186,436		703,365,493		3,978,473,267	
1 05 02 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan akibat penegakan perda dan perkara	Persen	100	5,135,399,600	100	6,752,169,580	100	7,245,381,113	100	7,139,438,636	100	7,586,603,044	100	7,502,231,288	100	41,361,223,260	Satpol PP
		Persentase Penegakan Perda	Persen	100														
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penegakan peraturan Daerah (Trantibum)	Persen	100	4,769,307,270	100	5,527,772,634	100	5,804,161,265	100	5,842,980,697	100	6,122,560,300	100	6,176,671,212	100	34,243,453,377	Satpol PP
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				366,092,330		1,024,396,947		1,231,219,847		1,085,957,939		1,253,517,744		1,115,033,826		6,076,218,633	Satpol PP
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0		200,000,000		210,000,000		210,500,000		210,525,000		210,526,250		1,041,551,250	Satpol PP
BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11326502700	1	7,322,022,709	0	8,522,022,709	0	8,522,022,709	0	8,522,022,709	0	8,522,022,709	%	52,736,616,245	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28000000	1	27,983,300	1	27,983,300	1	27,983,300	1	27,983,300	1	27,983,300	%	167,916,500	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1337363000		3,072,039,409		3,072,039,409		3,072,039,409		3,072,039,409		3,072,039,409	%	16,697,560,045	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				585000000		202,000,000		202,000,000		202,000,000		202,000,000		202,000,000	%	1,595,000,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	2099505200	%	860,000,000	%	860,000,000	%	860,000,000	%	860,000,000	%	860,000,000	%	6,399,505,200	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4607100000		660,000,000	1	1,160,000,000	1	660,000,000	1	1,160,000,000	1	660,000,000	%	8,907,100,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272734500		325,000,000		325,000,000		325,000,000		325,000,000		325,000,000	%	1,897,734,500	BPBD KOTA BINJAI
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2396800000		2,175,000,000		2,175,000,000		2,175,000,000		2,175,000,000		2,175,000,000	%	13,271,800,000	BPBD KOTA BINJAI

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persente Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	3762000000	100	4,664,000,000	100	4,464,000,000	100	4,464,000,000	100	4,464,000,000	100	4,464,000,000	%	26,282,000,000	BPBD KOTA BINJAI
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana																
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			0	0		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000	%	600,000,000	BPBD KOTA BINJAI
		Jumlah Sosialisasi Per Jenis Bencana	Kegiatan	1	0	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	%	600,000,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				3262000000	129	4,244,000,000	127	4,044,000,000	127	4,244,000,000	127	4,044,000,000	127	4,244,000,000	%	24,082,000,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500000000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	%	2,000,000,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			3470800000		3,238,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000	%	19,464,800,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			3370800000		3,188,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000		3,188,800,000	%	19,314,800,000	BPBD KOTA BINJAI
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran				100000000		50,000,000	%	50,000,000	%	50,000,000	%	50,000,000	%	50,000,000	%	350,000,000	BPBD KOTA BINJAI
Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,523,638,012		6,686,901,000		7,180,300,000		8,471,800,000		9,319,300,000		9,569,300,001		41,142,601,001	DINAS SOSIAL
1.06.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan dan Evaluasi Daerah			9,236,100		120,500,000		146,500,000		177,000,000		207,500,000		238,000,000		889,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah			5,006,747,072		5,236,000,000		5,525,000,000		6,080,000,000		6,665,000,000		7,250,000,000		30,756,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	-		70,000,000		70,000,000		70,000,000		105,000,000		105,000,000		420,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			-	-		70,000,000		70,000,000		105,000,000		140,000,000		140,000,000		525,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						270,000,000		345,500,000		383,000,000		407,500,000		458,000,000		1,779,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah				258,782,000		470,101,000		512,500,000		549,500,000		606,500,000		661,000,000		2,799,601,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	80,000,000		95,000,000		585,000,000		600,000,000		70,000,001		1,430,000,001	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148,830,840		198,300,000		213,300,000		238,800,000		259,300,000		279,800,000		1,189,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,042,000		172,000,000		202,500,000		283,500,000		328,500,000		367,500,000		1,354,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09																		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial			621,960,000		3,320,000,000		3,680,000,000		5,005,000,000		5,360,000,000		6,025,000,000		23,390,000,000	DINAS SOSIAL
		2. Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan																
		3. Jumlah Kelembagaan Sosial yang diberdayakan																
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL

Kode	Progaram Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				621,960,000		3,320,000,000		3,680,000,000		5,005,000,000		5,360,000,000		6,025,000,000		23,390,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Pekerja Migran yang Dipulangkan			60,000,000		80,000,000		100,000,000		120,000,000		140,000,000		160,000,000		600,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Orang	20	60,000,000	20	80,000,000	25	100,000,000	30	120,000,000	35	140,000,000	40	160,000,000	150	600,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang Tertangani			439,347,982		1,555,000,000		1,420,000,000		1,595,000,000		1,770,000,000		1,945,000,000		8,285,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				44,955,800		540,000,000		270,000,000		305,000,000		340,000,000		375,000,000		3,530,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Orang		394,392,182		1,015,000,000		1,150,000,000		1,290,000,000		1,430,000,000		1,570,000,000		6,455,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Jumlah kelompok Masyarakat Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2. Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental (disabilitas) yang Menerima Jaminan Sosial	jumlah		270,680,600		930,000,000		1,145,000,000		1,360,000,000		1,575,000,000		1,790,000,000		6,800,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						30,000,000		45,000,000		60,000,000		75,000,000		90,000,000	0	300,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				270,680,600		900,000,000		1,100,000,000		1,300,000,000		1,500,000,000		1,700,000,000		6,500,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGAN BENCANA	1. Jumlah Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang Menerima Jaminan Sosial		30.000	489,434,730	30020	2,817,000,000	30040	3,380,000,000	30060	3,920,000,000	30080	4,240,000,000	30100	4,692,000,000	30100	19,049,000,000	DINAS SOSIAL
		2. Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan pada Saat dan Setelah Bencana		1200		1.200		1.300		1.400		1.500		1.600		1.600		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				489,434,730		1,207,000,000		1,485,000,000		1,740,000,000		1,775,000,000		1,942,000,000		8,149,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Sosial yang Tersedia		-	-		1,610,000,000		1,895,000,000		2,180,000,000		2,465,000,000		2,750,000,000		10,900,000,000	DINAS SOSIAL
		Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Taruna Siaga Bencana																
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kapasitas Makam Pahlawan yang Tersedia dan Terpelihara dengan Baik			22,586,452		95,000,000		112,000,000		129,000,000		142,500,000		150,000,000		628,500,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Unit		22,586,452		55,000,000		66,000,000		77,000,000		85,500,000		90,000,000		373,500,000	DINAS SOSIAL

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Urusan Wajib bukan Pel ayanan Dasar TENAGA KERJA																		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	7,027,500,000	100	7,783,100,000	100	7,810,100,000	100	7,133,900,000	100	7,254,900,000	100	7,099,800,000	100	37,009,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
		Jumlah Perda Retribusi	Perda	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	dokumen	NA	-	60	100,000,000	72	110,000,000	80	120,000,000	88	130,000,000	100	140,000,000	300	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	20	-	30	5,185,000,000	40	5,188,000,000	50	5,197,000,000	60	5,198,000,000	70	5,201,000,000	70	5,959,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Produktivitas Tenaga Kerja	%	70.17		72.89	5,185,000,000	75.74	5,188,000,000	78.7	5,207,000,000	81.66	5,210,000,000			84.62	5,740,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.03.2.05.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				-		50,000,000		60,000,000		63,000,000		68,000,000	70	68,000,000		241,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	-20		30		40		50		60				270		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	orang	230	267,250,800	250	811,000,000	250	552,000,000	260	543,000,000	260	574,000,000	270	689,000,000	1250	3,151,250,800	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata																Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	-	-	20	274,000,000	20	277,000,000	20	270,000,000	20	267,000,000	20	300,000,000	100	1,388,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	1	3,587,471,167	1	4,208,691,051	1	1,672,511,000	1	4,295,189,800	1	4,259,203,000	1	4,290,845,000	1	18,726,439,851	Dinas P3AM
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	dokumen	1	0	1	15,000,000					1	10,000,000				25,000,000	Dinas P3AM
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah	%		2,923,868,751	1	3,010,411,051	1	513,000,000	1	3,135,000,000	1	3,190,000,000	1	3,200,000,000	1	13,048,411,051	Dinas P3AM
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		0	1	108,000,000	1	108,920,000	1	109,876,000	1	110,500,000	1	111,000,000	1	548,296,000	Dinas P3AM
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum kantor	%		354,196,100	1	495,000,000	1	514,700,000	1	534,600,000	1	553,900,000	1	570,000,000	1	2,668,200,000	Dinas P3AM
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Barang Milik Daerah	%		0	1	340,000,000	1	180,000,000	1	145,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	1	920,000,000	Dinas P3AM
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa kantor	%	1	68,855,200	1	70,280,000	1	73,091,000	1	75,874,000	1	78,689,000	1	81,656,000	1	379,590,000	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	1	240,551,116	1	170,000,000	1	282,800,000	1	294,839,800	1	191,114,000	1	198,189,000	1	1,136,942,800	Dinas P3AM
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG	Skor	90.57	10,525,800	90.57	30,000,000	90.58	32,000,000	90.59	35,000,000	90.59	40,000,000	90.60	45,000,000	90.60	182,000,000	Dinas P3AM
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	IPG	Skor	90.57	10,525,800	90.57	30,000,000	90.58	32,000,000	90.59	35,000,000	90.59	40,000,000	90.60	45,000,000	90.60	182,000,000	Dinas P3AM
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	Rasio	0.007	126,503,600	0.007	200,000,000	0.006	208,000,000	0.005	212,000,000	0.005	216,000,000	0.004	220,000,000	0.004	1,056,000,000	Dinas P3AM
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio KDRT	Rasio	0.007	126,503,600	0.007	200,000,000	0.006	208,000,000	0.005	212,000,000	0.005	216,000,000	0.004	220,000,000	0.004	1,056,000,000	Dinas P3AM

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	Lembaga	4	75,976,800	4	350,000,000	4	364,000,000	4	378,560,000	4	392,702,400	4	409,450,496	4	1,894,712,896	Dinas P3AM
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	Lembaga	4	75,976,800	4	350,000,000	4	364,000,000	4	378,560,000	4	392,702,400	4	409,450,496	4	1,894,712,896	Dinas P3AM
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak	tahun	1	0	1	22,000,000	1	22,880,000	1	23,795,200	1	24,747,000	1	25,736,000	5	119,158,200	Dinas P3AM
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak	tahun	1	0	1	22,000,000	1	22,880,000	1	23,795,200	1	24,747,000	1	25,736,000	5	119,158,200	Dinas P3AM
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Skor	316.5	32,864,500	320	360,000,000	322	371,800,000	324	377,672,000	326	386,000,000	328	396,500,000	328	1,891,972,000	Dinas P3AM
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi terhadap Pemenuhan Hak Anak	Lembaga	3	-	3	170,000,000	3	175,000,000	3	176,000,000	3	180,000,000	3	185,000,000	3	886,000,000	Dinas P3AM
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100%	32,864,500	100%	190,000,000	100%	196,800,000	100%	201,672,000	100%	206,000,000	100%	211,500,000	100%	1,005,972,000	Dinas P3AM
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak	%	100%	241,292,000	100%	340,000,000	100%	353,600,000	100%	360,000,000	100%	372,000,000	100%	383,000,000	100%	1,808,600,000	Dinas P3AM
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap Anak	%	0	100%	90,000,000	100%	93,600,000	100%	94,000,000	100%	95,000,000	100%	96,000,000	100%	468,600,000	Dinas P3AM	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	%	100%	241,292,000	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	266,000,000	100%	277,000,000	100%	287,000,000	100%	1,340,000,000	Dinas P3AM
Pangan 2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,738,198,367		12,575,000,000		12,545,000,000		12,792,500,000		12,812,500,000		13,313,000,000		74,776,198,367	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,072,900		14,000,000		14,000,000		16,000,000		16,000,000		16,000,000		93,072,900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,760,448,617		10,495,000,000		10,600,000,000		10,705,000,000		10,810,000,000		10,915,000,000		63,285,448,617	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		160,000,000		150,000,000		180,000,000		170,000,000		200,000,000		860,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				198,723,050		815,000,000		785,000,000		790,000,000		795,000,000		795,000,000		4,178,723,050	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250,000,000		100,000,000		-		100,000,000		-		350,000,000		800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				412,273,800		476,000,000		491,000,000		496,500,000		511,500,000		522,000,000		2,909,273,800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				99,680,000		515,000,000		505,000,000		505,000,000		510,000,000		515,000,000		2,649,680,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan utama			48,008,900		775,000,000		820,000,000		840,000,000		860,000,000		880,000,000		4,223,008,900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.																
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				48,008,900		775,000,000		820,000,000		840,000,000		860,000,000		880,000,000		4,223,008,900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan			718,191,000		1,645,000,000		1,810,000,000		1,855,000,000		1,900,000,000		1,965,000,000		9,893,191,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tersedianya informasi harga pangan neraca bahan makanan.	Dokumen															Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah kebutuhan pangan lokal	Ton	28286,01		29175,23		30064,44		30953,65		31842,86		32732,08		32732,08		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				61,358,000		535,000,000		545,000,000		555,000,000		565,000,000		575,000,000		2,836,358,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				62,991,200		595,000,000		710,000,000		720,000,000		730,000,000		740,000,000		3,557,991,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				593,841,800		515,000,000		555,000,000		580,000,000		605,000,000		650,000,000		3,498,841,800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan			0		135,000,000		155,000,000		165,000,000		175,000,000		185,000,000		815,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04.2.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		135,000,000		155,000,000		165,000,000		175,000,000		185,000,000		815,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terdapat kelembagaan keamanan pangan segar daerah			0		230,000,000		240,000,000		240,000,000		270,000,000		280,000,000		1,260,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				0		230,000,000		240,000,000		240,000,000		270,000,000		280,000,000		1,260,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastuktur publik			Rp 4,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,200,000,000	1 Tahun	Rp 5,408,000,000	1 Tahun	Rp 5,624,320,000	100%	Rp 26,232,320,000	Dinas PKP
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah yang mendapatkan ganti rugi			Rp 4,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,000,000,000	1 Tahun	Rp 5,200,000,000	1 Tahun	Rp 5,408,000,000	1 Tahun	Rp 5,624,320,000	100%	Rp 26,232,320,000	Dinas PKP

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	1	10,910,875,292	1 Tahun	12,091,928,169	1 Tahun	12,696,524,578	1 Tahun	13,331,350,807	1 Tahun	13,997,918,347	1 Tahun	14,697,814,265	5 Tahun	63,728,493,111	DLH
2.11.01																		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
2.11.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah																	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah																	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	1														
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH	Dokumen	-	-	1	1,150,000,000	1	3,563,674,800	1	3,597,799,800	1	3,633,631,050	1	3,815,312,603	5	15,760,418,253	DLH
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Out Put : 1 Dokumen RPPLH	Dokumen															
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota																	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks kualitas air	%	74	742,191,662	53.81	1,009,530,200	53.86	1,060,006,710	53,91	1,113,007,046	53.96	1,168,657,398	53,96	1,227,090,268	53,96	5,578,291,621	DLH
		2. Indeks kualitas udara		82,9		84,1		84,15		84,2		84,25		84,25		84,25		
		3. Indeks Tutupan Lahan		0		0		0		0		0		0		0		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		%	Air : 53.71, Udara: 84,05	399,999,762	53.81	540,750,000	53.86	567,787,500	53.91	596,176,875	53.96	625,985,719	53.96	657,285,005	5 Tahun	2,330,700,094	DLH
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota																	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	11	2,019,052,621	12	2,321,000,000	13	2,321,000,000	14	2,321,000,000	15	2,321,000,000	16	2,321,000,000	16	11,605,000,000	DLH
2.11.04.2.01	Penegelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Dokumen Amdal yang di terbitkan	Dokumen	1 Tahun	333,889,500	1 Tahun	700,000,000	1 Tahun	735,000,000	1 Tahun	771,750,000	1 Tahun	810,337,500	1 Tahun	850,854,375	5 Tahun	3,867,941,875	DLH
2.1.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan leh Pemerintah Dareah Kabupaten / Kota																	DLH

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan , Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Masyarakat	-	-	1 Tahun	280,000,000	1 Tahun	294,000,000	1 Tahun	308,700,000	1 Tahun	324,135,000	1 Tahun	340,341,750	5 Tahun	1,547,176,750	DLH
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkunga Hidup	%	51,0 %	29,980,200	54,0 %	50,000,000	59,0 %	50,000,000	61,0 %	50,000,000	64,0%	50,000,000	68,70 %	50,000,000	68,70 %	229,980,200	DLH
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang yang terkait zin lingkungan hidup	Dokumen	-	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	31,500,000	1 Tahun	33,075,000	1 Tahun	34,728,750	1 Tahun	36,465,188	5 Tahun	129,303,750	DLH
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota																	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Yang Tertangani	%	100	9,524,014,450	100	12,595,000,000	100	12595000000	100	11,595,000,000	100	11,675,000,000	100	12,258,750,000	100	60,718,750,000	DLH
		Rasio Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk	%	100		100		100		100		100		100		100		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah																	
Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil																		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	8,537,490,470	100	9,202,840,682	100	7,927,954,309	100	8,245,252,481	100	8,588,742,581	100	8,932,432,284	100	51,434,712,807	Disdukcapil
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2	20,500,000	2	13,855,000	3	14,609,200	2	15,373,568	3	29,668,511	3	30,995,251	15	125,001,530	Disdukcapil
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target		44	4,228,088,431	44	4,672,935,861	44	4,859,853,295	44	5,054,247,427	44	5,256,417,324	44	5,466,674,017	264	29,538,216,357	Disdukcapil
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas		60	61,000,000	61	98,440,000	69	102,377,600	70	106,472,704	71	110,731,612	72	115,160,877	403	594,182,793	Disdukcapil
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum		265	878,385,430	313	914,112,547	362	950,677,049	410	988,704,131	409	1,028,252,296	457	1,069,382,388	2156	5,829,513,843	Disdukcapil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan OPD		4	1,575,000,000	5	1,658,000,000	1	81,120,000	1	84,364,800	1	87,739,392	1	91,248,968	13	3,577,473,160	Disdukcapil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan jasa		14	936,055,600	14	973,497,824	14	1,012,437,737	14	1,052,935,246	14	1,095,052,656	14	1,138,854,763	84	6,208,833,826	Disdukcapil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya		5	838,461,009	6	871,999,449	6	906,879,427	6	943,154,604	6	980,880,789	6	1,020,116,020	35	5,561,491,299	Disdukcapil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	%	3	1,069,953,600	249	1,703,380,440	609	1,771,515,658	369	1,842,376,284	369	1,916,071,335	429	1,992,714,189	1,701	10,296,011,505	Disdukcapil
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	564,780,100	5	1,030,000,000	5	1,071,200,000	5	1,114,048,000	5	1,158,609,920	5	1,204,954,317	5	6,143,592,337	Disdukcapil
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk		2	505,173,500	243	613,380,440	603	637,915,658	363	663,432,284	363	689,969,575	423	717,568,358	1,691	3,827,439,815	Disdukcapil
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pendaftaran Penduduk		1	60,000,000	242	150,400,000	302	156,416,000	362	162,672,640	362	169,179,546	422	175,946,727	1690	874,614,913	Disdukcapil
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		0	-	1	60,000,000	1	62,400,000	1	64,896,000	1	67,491,840	1	70,191,514	5	324,979,354	Disdukcapil

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		%	100	445,173,500	30	782,980,440	42	814,299,658	54	846,871,644	66	880,746,510	90	915,976,370	1,031	4,090,252,640	Disdukcapi
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		1	445,173,500	4	592,980,440	4	616,699,658	4	641,367,644	4	667,022,350	4	693,703,244	21	3,656,946,835	Disdukcapi
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		0	-	26	190,000,000	38	197,600,000	50	205,504,000	62	213,724,160	86	222,273,126	1010	433,305,805	Disdukcapi
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		0	-	13	110,000,000	13	114,400,000	13	118,976,000	13	123,735,040	13	128,684,442	65	595,795,482	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	%	100	153,526,563	209	329,667,626	214	342,854,331	217	356,568,504	220	370,831,244	222	385,664,494	973	1,939,112,760	Disdukcapi
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		144	153,526,563	208	279,667,626	213	290,854,331	216	302,488,504	219	314,588,044	221	327,171,566	968	1,668,296,632	Disdukcapi
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0	-	1	50,000,000	1	52,000,000	1	54,080,000	1	56,243,200	1	58,492,928	5	270,816,128	Disdukcapi
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	%	100	-	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	Disdukcapi
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan		-	-	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	49	#REF!	#REF!	#REF!	Disdukcapi
Pemberdayaan Masyarakat Desa 2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Jumlah LPM Aktif	LPM	43	410,195,900	43	3,086,970,900	43	3,208,000,000	43	3,306,000,000	43	3,411,000,000	43	3,489,271,000	43	16,501,241,900	Dinas P3AM
		Jumlah PKK Aktif	PKK	43		43		43		43		43		43				
		Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	241		241		241		241		241		241				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1	410,195,900	1	3,086,970,900	1	3,208,000,000	1	3,306,000,000	1	3,411,000,000	1	3,489,271,000	5	16,501,241,900	Dinas P3AM
Pengendalian Penduduk dan KB 2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI	Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	6,423,867,947		8,062,000,000		8,384,448,000		8,719,737,600		9,068,954,000		9,465,408,000		43,700,547,600	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14,950,200		16,100,000		16,712,000		17,340,000		18,044,000		18,760,000		86,956,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,987,371,631		5,256,000,000		5,466,240,000		5,684,889,600		5,912,256,400		6,182,468,000		28,501,854,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%		7,130,000		295,000,000		306,800,000		319,072,000		332,000,000		345,280,000		1,598,152,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220,753,200		645,000,000		670,800,000		697,632,000		727,100,000		756,184,000		3,496,716,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				253,287,116		340,000,000		353,600,000		367,744,000		382,416,000		397,648,000		1,841,408,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				710,375,800		509,900,000		530,296,000		551,460,000		573,437,600		596,420,000		2,761,513,600	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk		1.07	208,297,900	1.06	755,000,000	1.06	785,200,000	1.06	816,608,000	1.05	848,600,000	1.05	882,544,000	1.05	4,087,952,000	
		Total Fertility Rate (TFR)		2.21		2.21		2.16		2.16		2.1		2.1		2.1		
		Rasio Ketergantungan Penduduk		47		47		47		45		45		45		45		
2.14.02.2.02	Pemetakan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				192,338,400		465,000,000		483,600,000		502,944,000		522,800,000		543,712,000		2,518,056,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1,574,295,450		2,267,000,000		2,357,680,000		2,452,372,000		2,547,981,600		2,632,392,800		12,257,426,400	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif	persen	68.15		68.3		69.51		70.1		70.64		71.82		71.82		
		Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	9.05		8.6		8.4		7.3		7.1		7		7		
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	ratio	23		20		18		16		16		15		15		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal				531,028,450		590,000,000		613,600,000		638,144,000		663,729,600		690,300,000		3,195,773,600	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				177,600,000		262,000,000		272,480,000		283,764,000		295,120,000		306,924,800		1,420,288,800	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				608,907,000		975,000,000		1,014,000,000		1,054,560,000		1,094,232,000		1,120,472,000		5,258,264,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB				256,760,000		440,000,000		457,600,000		475,904,000		494,900,000		514,696,000		2,383,100,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				493,627,800		1,930,000,000		2,007,200,000		2,087,488,000		2,171,648,000		2,258,620,000		10,454,956,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Rata - rata usia kawin pertama wanita		22		22		22.1		22.1		22.5		22.5		22.5		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		55,00		57,00		59,00		61,00		61,00		61,00		61,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				63,439,800		1,385,000,000		1,440,400,000		1,498,016,000		1,557,948,000		1,620,372,000		7,501,736,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				430,188,000		545,000,000		566,800,000		589,472,000		613,700,000		638,248,000		2,953,220,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA						25113562000		20510014900		22451016390		24696118029		27165729832		119936441151	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				93051500		141500000		155650000		171215000		188336500		207170150		863871650	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5986362468		6359003000		6994903300		7694393630		8463832993		9310216292		38822349215	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10000000		11000000		12100000		13310000		14641000		61051000	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						200000000		100000000								300000000	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96240000		1120000000		1232000000		1355200000		1490720000		1639792000		6837712000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				864702400		1796000000		1975600000		2173160000		2390476000		2629523600		10964759600	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				822152240		1350000000		1485000000		1633500000		1796850000		1976535000		8241885000	

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1520443635		2360000000		2596000000		2855600000		3141160000		3455276000		14408036000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3111764240		5428056000		5970861600		6567947760		7224742536		7947216790		33138824686	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Rambu Lalu Linta Terpasang, Panjang Marka jalan, Jumlah Kepemilikan KIR Angk.Umum, Jumlah Titik Kemacetan		0242, 0, 3110,5		293,0,3093,5		322,0,3163,5		354,1211237km,3268,4		389,0,3408,3		428,1211237,3511,2		2052,2422474,19446,2		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota																	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						1,150,000,000		1,265,000,000		1,391,500,000		1,530,650,000		1,683,715,000		7,020,865,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						1,515,000,000		1,666,500,000		1,833,150,000		2,016,465,000		2,218,111,500		9,249,226,500	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				97,730,200		1,119,500,000		1,231,450,000		1,454,595,000		1,600,054,500		1,760,059,950		7,165,659,450	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota				2,954,640,000		4,520,000,000		4,972,000,000		5,469,200,000		6,016,120,000		6,617,732,000		27,595,052,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						130,000,000		143,000,000		157,300,000		173,030,000		190,333,000		793,663,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				1,260,000,000		1,280,000,000		1,408,000,000		1,464,320,000		1,610,752,000		1,771,827,200		7,534,899,200	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota						450,000,000										450,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota						160,000,000		176,000,000		193,600,000		212,960,000		234,256,000		976,816,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota						160,000,000										160,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota						240,000,000		264,000,000		290,400,000		319,440,000		351,384,000		1,465,224,000	Dinas Perhubungan

Kode	Progaram Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.16.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA				3,920,369,568		4,677,184,351		4,240,271,725		4,509,882,594		4,836,277,897		4,869,729,013	23	21,795,517,930	DISKOMINFO
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99,357,800		103,332,112		107,465,396		111,764,012		116,234,573		120,883,956	18	120,883,956	DISKOMINFO
2.16.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Dokumen	2	93,783,000	2	97,534,320	2	101,435,693	2	105,493,121	2	109,712,845	2	114,101,359	12	512,347,492	DISKOMINFO
2.16.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Ki erja dan Ikhtisar Realisasi Kin erja SKPD	Dokumen	1	5,574,800	1	5,797,792	1	6,029,704	1	6,270,892	1	6,521,728	1	6,782,597	6	30,455,784	DISKOMINFO
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,282,411,963		2,373,708,442		2,468,656,779		2,567,403,050		2,670,099,172		2,776,903,139		12,469,083,373	DISKOMINFO
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152,556,000		158,658,240		165,004,570		171,604,752		178,468,942		185,607,700	0	833,431,262	DISKOMINFO
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				629,353,000		854,527,120		680,708,205		807,936,533		736,253,994		865,704,154	0	3,838,229,012	DISKOMINFO
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		2	400,000,000	0	-	0	-	2	250,000,000	1	-	5	400,000,000	DISKOMINFO
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260,166,805		270,573,477		281,396,416		292,652,273		304,358,364		316,532,698	0	1,421,321,670	DISKOMINFO
2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496,524,000		516,384,960		537,040,358		558,521,973		580,862,852		604,097,366	0	2,712,568,657	DISKOMINFO
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi publiK yang terpublikasi			838,968,350	-	1,097,651,692	-	1,203,387,760	-	1,303,423,270	-	1,367,370,201	-	1,446,691,009	-	5,890,122,081	DISKOMINFO
		Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai																
		Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai																
2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik yang terpublikasi			838,968,350		1,097,651,692		1,203,387,760		1,303,423,270		1,367,370,201		1,446,691,009	-	5,890,122,081	DISKOMINFO
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola			2,561,114,651		3,013,559,392		3,130,003,984		3,246,448,576		3,362,893,168	-	3,497,408,895	-	15,448,535,498	DISKOMINFO
		Jumlah titik hot spot di ruang publik																
2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,583,881,451		1,647,236,864		1,710,592,128		1,773,947,392	Rp	1,837,302,656	Rp	1,910,794,762	-	8,626,452,597	DISKOMINFO
2.16.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				977,233,200		1,366,322,528	-	1,419,411,856		1,472,501,184		1,525,590,512		1,586,614,132	-	6,822,082,900	
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi publik yang terpublikasi			838,968,350	-	1,097,651,692	-	1,203,387,760	-	1,303,423,270	-	1,367,370,201	0	1,446,691,009	0	5,890,122,081	DISKOMINFO
		Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	%	25		30		37,50		50		62,50		75		75		DISKOMINFO
		Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai	jumlah	14600		16425		18250		19345		20075		20805		20805		DISKOMINFO
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola	jumlah	9	2,561,114,651	10	3,013,559,392	11	3,130,003,984	12	3,246,448,576	13	3,362,893,168	14	3,497,408,895	14	15,448,535,498	DISKOMINFO
		Jumlah titik hot spot di ruang publik	jumlah	50		53		55		58		60		62		62		DISKOMINFO

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koperasi dan UKM 2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100	3,964,538,944	1	6,097,874,500	1	6,707,661,950	1	7,378,428,145	1	8,116,270,960	1	8,927,898,055	1	37,228,133,610	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23,999,700		45,600,000		50,160,000		55,176,000		60,693,600		66,762,960		278,392,560	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,195,824,984		3,309,800,000		3,640,780,000		4,004,858,000		4,405,343,800		4,845,878,180		20,206,659,980	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96,000,000		180,000,000		198,000,000		217,800,000		239,580,000		263,538,000		1,098,918,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				291,392,900		423,074,500		465,381,950		511,920,145		563,112,160		619,423,375		2,582,912,130	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,150,800		1,580,000,000		1,738,000,000		1,911,800,000		2,102,980,000		2,313,278,000		9,646,058,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185,673,560		263,400,000		289,740,000		318,714,000		350,585,400		385,643,940		1,608,083,340	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121,497,000		296,000,000		325,600,000		358,160,000		393,976,000		433,373,600	1,660,587,200		Dinas Koperasi & UMKM
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	JUMLAH KSP/USP BARU	pe-serta	100	44,999,000	100	240,000,000	100	264,000,000	100	290,400,000	100	319,440,000	100	351,384,000	500	1,465,224,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.02.2.01	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				44,999,000		120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000		732,612,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.02.2.02	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				0		120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000		732,612,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PERSENTASE KSP/USP AKTIF	thn	1	59,997,600	1 thn	895,000,000	1 thn	984,500,000	1 thn	5,384,500,000	1 thn	5,922,950,000	1 thn	6,515,245,000	5 thn	19,702,195,000	Dinas Koperasi & UMKM
02.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				59,997,600		895,000,000		984,500,000		5,384,500,000		5,922,950,000		6,515,245,000		19,702,195,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Koperasi	PERSENTASE KSP/USP AKTIF	thn	1	89,997,900	1 thn	865,000,000	1 thn	951,500,000	1 thn	1,046,650,000	1 thn	1,151,315,000	1 thn	1,266,446,500	5 thn	5,280,911,500	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.04.2.01	Kegiatan : Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				89,997,900		865,000,000		951,500,000		1,046,650,000		1,151,315,000		1,266,446,500		5,280,911,500	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	JUMLAH SDM KOPERASI YANG BERSERTIFIKAT	thn	1	169,999,600	1 thn	600,000,000	1 thn	660,000,000	1 thn	726,000,000	1 thn	798,600,000	1 thn	878,460,000	5 thn	3,663,060,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				169,999,600		600,000,000		660,000,000		726,000,000		798,600,000		878,460,000		3,663,060,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	thn	1	0	1 thn	170,000,000	1 thn	187,000,000	1 thn	205,700,000	1 thn	226,270,000	1 thn	248,897,000	5 thn	1,037,867,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				0		170,000,000		187,000,000		205,700,000		226,270,000		248,897,000		1,037,867,000	Dinas Koperasi & UMKM

Kode	Progrom Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2:17:07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL	thn	1	579,911,700	1 thn	2,410,000,000	1 thn	2,651,000,000	1 thn	2,916,100,000	1 thn	3,207,710,000	1 thn	3,528,481,000	5 thn	14,713,291,000	Dinas Koperasi & UMKM
02.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				579,911,700		2,410,000,000		2,651,000,000		2,916,100,000		3,207,710,000		3,528,481,000		14,713,291,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL	thn	1	170,000,000	1 thn	1,140,000,000	1 thn	1,254,000,000	1 thn	1,379,400,000	1 thn	1,517,340,000	1 thn	1,669,074,000	5 thn	6,959,814,000	Dinas Koperasi & UMKM
2.17.08.2.01	Kegiatan : Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil				170,000,000		1,140,000,000		1,254,000,000		1,379,400,000		1,517,340,000		1,669,074,000		6,959,814,000	Dinas Koperasi & UMKM
PENANAMAN MODAL 2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			4,664,831,689		5,918,025,000		6,043,140,000		6,294,950,000		6,536,050,000		6,795,770,000		31,587,935,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,586,900		15,900,000		16,520,000		17,150,000		17,800,000		18,350,000		85,720,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,945,085,851		4,259,500,000		4,429,320,000		4,618,500,000		4,793,700,000		4,979,800,000		23,080,820,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0		150,000,000		156,000,000		162,000,000		168,000,000		175,000,000		811,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				294,583,300		592,625,000		505,700,000		525,600,000		546,550,000		568,120,000		2,738,595,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		230,000,000		239,000,000		248,000,000		258,000,000		268,000,000		1,243,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				269,164,638		400,000,000		416,000,000		432,000,000		449,000,000		467,000,000		2,164,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148,411,000		270,000,000		280,600,000		291,700,000		303,000,000		319,500,000		1,464,800,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN, Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha			0		350,000,000		70,000,000		0		0		0		420,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		200,000,000		70,000,000		0		0		0		270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0		150,000,000		0		0		0		0		150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN, Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN			0		195,000,000		125,000,000		127,000,000		130,000,000		135,000,000		712,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		195,000,000		125,000,000		127,000,000		130,000,000		135,000,000		712,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lama waktu pengurusan perizinan melalui OSS dan E-Perizinan, Survey Kepuasan Masyarakat		7,21,(81,75)	0	7,21,(85)	860,000,000	7,21,(87)	686,000,000	6,20,(89)	713,000,000	6,20,(89)	862,000,000	5,19,(90)	772,000,000	5,19,(90)	3,893,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				0		860,000,000		686,000,000		713,000,000		862,000,000		772,000,000		3,893,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indikator rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN			326,122,000		360,000,000		374,300,000		381,700,000		395,700,000		412,000,000		1,923,700,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				326,122,000		360,000,000		374,300,000		381,700,000		395,700,000		412,000,000		1,923,700,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

	Kabupaten/Kota																
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Progrom Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan			0		200,000,000		0		0		208,000,000		0		408,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		200,000,000		0		0		208,000,000		0		408,000,000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan			5,249,403,600		5,993,890,747		6,036,045,854		6,372,675,962		6,544,306,069		6,236,041,177		31,182,959,810	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22,474,100	100	21,000,000	100	21,000,000	100	21,000,000	100	21,000,000	100	21,000,000	100	105,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,357,884,147		4,350,390,747		4,391,915,854		4,433,440,962		4,474,966,069		4,516,491,177		22,167,204,810	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		72,500,000		73,130,000		73,235,000		73,340,000		73,550,000		365,755,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Logistik Kantor	Tahun	1	59,990,800	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5	300,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	0		0	-	0	-	1	350,000,000	0	-	1	350,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.01.2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				354,995,256		410,000,000		410,000,000		410,000,000		410,000,000		410,000,000		2,050,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	Organisasi Kepemudaan	25		25		25		26		26		28		28		Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi	Orang	-		-		1		1		1		1		2		Dinas Pemuda dan Olah Raga
					1,564,989,500		3,299,433,000		3,299,433,000		3,299,433,000		3,299,433,000		3,299,433,000		16,497,165,000	Dinas Pemuda dan
2.19.02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				489,993,200		2,029,433,000		2,029,433,000		2,029,433,000		2,029,433,000		2,029,433,000		10,147,165,000	Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Orang	40	40,000,000	80	80,000,000	80	80,000,000	80	80,000,000	80	80,000,000	80	80,000,000	400	400,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha pemuda	Orang	80	449,993,200	100	640,000,000	100	640,000,000	100	640,000,000	100	640,000,000	100	640,000,000	500	3,200,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi	Orang	-	-	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	50	500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta dalam Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	-	-	470	295,000,000	470	295,000,000	470	295,000,000	470	295,000,000	470	295,000,000	2,350	1,475,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	-	-	400	914,433,000	400	914,433,000	400	914,433,000	400	914,433,000	400	914,433,000	2,000	4,572,165,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.19.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,074,996,300	1,045	1,270,000,000	1,045	1,270,000,000	1,045	1,270,000,000	1,045	1,270,000,000	1,045	1,270,000,000	5,225	6,350,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	-	-	15	370,000,000	15	370,000,000	15	370,000,000	15	370,000,000	15	370,000,000	75	1,850,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.02.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Orang	750	1,074,996,300	1,030	900,000,000	1,030	900,000,000	1,030	900,000,000	1,030	900,000,000	1,030	900,000,000	5,150	4,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif	Cabang Olahraga	30		30		30		30		30		30		30		Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Prestasi Cabang Olahraga	Cabang Olahraga	5		5		5		5		6		6		6		Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pelatih yang bersertifikat	Cabang Olahraga	28		28		30		32		34		34		34		Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	22		22		22		23		24		24		24		Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	Unit	3		3		3		3		3		3		3		Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
						880,000,000		949,549,567		987,531,550		1,027,032,812		1,068,114,124		1,110,838,689		5,143,066,742
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			699,951,200		1,040,000,000		1,040,000,000		1,040,000,000		1,040,000,000		1,040,000,000		5,200,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,847,860,700	100	3,350,000,000	100	3,350,000,000	100	3,350,000,000	100	3,350,000,000	100	3,350,000,000	100	16,750,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			206,845,000		3,520,000,000		3,520,000,000		3,520,000,000		3,520,000,000		3,520,000,000		17,600,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan					650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000		650,000,000		3,250,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				386,577,100	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	2,000,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Kwaran Yang Aktif	Kwaran	5		5		5		5		5		5		5		Dinas Pemuda dan Olah Raga
					949,998,800		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		12,190,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				949,998,800		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		2,438,000,000		12,190,000,000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
STATISTIK 2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	persen		174,998,900		965,248,867		1,002,056,333		1,040,282,023		1,079,981,044		1,118,004,795		4,300,590,918	DISKOMINFO
2.20.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				174,998,900		965,248,867		1,002,056,333		1,040,282,023		1,079,981,044		1,118,004,795		4,300,590,918	DISKOMINFO

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	persen		-		200,000,000		454,000,000		622,000,000		650,000,000		675,280,000		1,951,280,000	DISKOMINFO
2.21																		
2.21.2.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan keamanan informasi pemerintah daerah Kota Binjai Berbasis elektronik dan non elektronik			-		200,000,000		454,000,000		472,000,000		494,000,000		513,280,000		1,639,280,000	DISKOMINFO
2.21.2.2.02	Penetapan Pola Hubungan				-	-	-	-	-	-	150,000,000		156,000,000		162,000,000	-	312,000,000	DISKOMINFO
Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA	KEGIATAN	61	133,742,400	18	100,000,000	59	829,900,000	42	532,400,000	56	703,500,000	47	595,500,000	72	2,895,042,400	DINAS PARIWISATA
2.22.02																		
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan	Objek/Lembaga	12	133,742,400	2	15,000,000	12	140,500,000	2	16,000,000	12	143,800,000	2	17,500,000	12	466,542,400	DINAS PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Set	21	-	16	85,000,000	21	387,400,000	21	391,400,000	21	395,500,000	21	399,000,000	36	753,300,000	DINAS PARIWISATA
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat dalam Daerah	Set	28	-	-	-	26	302,000,000	19	125,000,000	23	164,200,000	24	179,000,000	24	694,000,000	DINAS PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	JUMLAH SENI BUDAYA DAN TRADISI YANG DILESTARIKAN	KEGIATAN	30	94,120,000	18	600,000,000	16	589,000,000	13	470,000,000	12	420,500,000	1	56,000,000	30	2,229,620,000	DINAS PARIWISATA
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian	Set	30	94,120,000	18	600,000,000	16	589,000,000	13	470,000,000	12	420,500,000	1	56,000,000	30	2,229,620,000	DINAS PARIWISATA
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	JUMLAH DOKUMENTASI SEJARAH	KEGIATAN	16	-	6	252,000,000	7	259,000,000	5	85,000,000	7	211,000,000	7	215,700,000	16	1,022,700,000	DINAS PARIWISATA
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	Set	16	-	6	252,000,000	7	259,000,000	5	85,000,000	7	211,000,000	7	215,700,000	16	1,022,700,000	DINAS PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH BENDA, SITUS,DAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	CAGAR BUDAYA	7	-	3	125,000,000	1	100,000,000	1	286,000,000	1	199,000,000	1	159,500,000	7	869,500,000	DINAS PARIWISATA
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	jek dan Cagar Bud	7	-	3	125,000,000	1	100,000,000	1	84,000,000	1	64,000,000	1	21,000,000	7	394,000,000	DINAS PARIWISATA
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya	7	-	-	-	-	-	3	202,000,000	2	135,000,000	2	138,500,000	7	475,500,000	DINAS PARIWISATA
ERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			3,085,497,757		3,715,981,587		3,358,000,000		3,543,000,000		5,343,000,000		3,343,000,000		19,302,981,587	Dinas Perpustakaan
2.23.01																		
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7,334,300		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		50,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,374,983,367		2,380,981,587		2,395,000,000		2,395,000,000		2,395,000,000		2,395,000,000		11,960,981,587	Dinas Perpustakaan
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75,031,910		190,000,000		135,000,000		95,000,000	20	75,000,000		75,000,000		570,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247,127,800		482,000,000		500,000,000		525,000,000		475,000,000		475,000,000		2,457,000,000	Dinas Perpustakaan

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				39,030,400		160,000,000		-		200,000,000		2,000,000,000		-		2,360,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,669,980		193,000,000		203,000,000		203,000,000		243,000,000		243,000,000		1,085,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161,320,000		300,000,000		115,000,000		115,000,000		145,000,000		145,000,000		820,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan daerah			346,839,000		1,005,000,000		1,032,000,000		987,000,000		1,062,000,000		1,027,000,000		5,113,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				189,027,800		655,000,000		617,000,000		602,000,000		617,000,000		607,000,000		3,098,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				157,811,200		350,000,000		415,000,000		385,000,000		445,000,000		420,000,000		2,015,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				0	0	0	0	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000		700,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					0	0		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		300,000,000	Dinas Perpustakaan
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0			100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		400,000,000	Dinas Perpustakaan
Kearsipan 2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				135,620,450		340,000,000		440,000,000		180,000,000		280,000,000	0	0		1,240,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				55,109,560		112,000,000		215,000,000		95,000,000		100,000,000	0	0		522,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				80,510,890		78,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000	0	0		333,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				0		150,000,000		145,000,000	0	0	45	90,000,000	0	0		385,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				0	0	0	0	165,000,000	0	175,000,000	0	185,000,000	0	185,000,000		710,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.03.2.01	Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (Sepuluh) tahun				0	0	0		80,000,000		90,000,000		100,000,000		100,000,000		370,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				0	0	0		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		140,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat				0	0	0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		200,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				0	0	0		175,000,000	0		0	175,000,000		0		350,000,000	Dinas Perpustakaan
2.24.04.2.01	Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota				0	0	0		175,000,000	0		0	175,000,000		0		350,000,000	Dinas Perpustakaan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan																		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				780,599,500		1,630,000,000		1,790,000,000		1,845,000,000		1,895,000,000		1,945,000,000		9,885,599,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi ikan budidaya			780,599,500		1,480,000,000		1,620,000,000		1,655,000,000		1,705,000,000		1,745,000,000		8,985,599,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0		705,000,000		775,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		3,730,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				780,599,500		775,000,000		845,000,000		905,000,000		955,000,000		995,000,000		5,255,599,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				0		150,000,000		170,000,000		190,000,000		190,000,000		200,000,000		900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				0		30,000,000		40,000,000		50,000,000		45,000,000		50,000,000		215,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0		120,000,000		130,000,000		140,000,000		145,000,000		150,000,000		685,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pariwisata 3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	%	1	4,988,387,315	1	7,646,118,015	1	8,483,800,000	1	7,955,200,000	1	8,199,500,000	1	8,764,200,000	1	46,037,205,330	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	4	26,999,900	4	65,000,000	3	68,500,000	3	73,000,000	3	79,000,000	3	85,200,000	4	397,699,900	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	1	4,637,118,015	1	4,690,398,015	1	5,343,600,000	1	5,849,950,000	1	6,053,250,000	1	6,356,950,000	1	32,642,566,031	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Dearah	Tahun	1	-	1	50,000,000	1	52,000,000	1	53,500,000	1	55,000,000	1	58,000,000	1	268,500,000	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1	-	22	45,000,000	22	50,000,000	24	55,000,000	24	55,000,000	24	55,000,000	24	260,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1	181,385,100	1	572,500,000	1	606,000,000	1	630,700,000	1	653,450,000	1	678,900,000	1	3,322,935,100	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	-	1	1,020,000,000	1	1,085,000,000	-	-	-	-	1	210,000,000	1	2,315,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	101,949,680	1	275,000,000	1	300,000,000	1	304,000,000	1	306,500,000	1	313,000,000	1	1,600,449,680	DINAS PARIWISATA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	142,884,300	1	650,000,000	1	675,000,000	1	766,000,000	1	778,500,000	1	790,000,000	1	3,802,384,300	DINAS PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIFASILITASI PENGEMBANGANNYA	USAHA PARIWISATA	7	-	30	160,000,000	7	480,000,000	7	694,000,000	7	951,000,000	7	975,000,000	7	3,260,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Kegiatan	7	-	-	-	7	205,000,000	-	120,000,000	7	240,000,000	7	245,000,000	7	810,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Set	97	-	-	-	-	-	90	150,000,000	97	280,000,000	97	290,000,000	97	720,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	TDU	57	-	30	160,000,000	10	275,000,000	7	424,000,000	5	431,000,000	5	440,000,000	57	1,730,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH PEMASARAN PARIWISATA	KEGIATAN	8	200,000,000	8	705,000,000	8	760,000,000	8	772,500,000	8	782,000,000	8	796,000,000	8	4,015,500,000	DINAS PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata	Kegiatan	8	200,000,000	8	705,000,000	8	760,000,000	8	772,500,000	8	782,000,000	8	796,000,000	8	4,015,500,000	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki Kreatif yang memiliki Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi, Jumlah Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI (IKU), Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	KEGIATAN	10	-	5	750,000,000	2	780,000,000	1	792,000,000	1	798,200,000	1	808,000,000	10	3,928,200,000	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif	Set	-	-	25	400,000,000	30	420,000,000	32	430,000,000	33	433,000,000	34	438,000,000	34	2,121,000,000	DINAS PARIWISATA
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kegiatan	10	-	5	175,000,000	2	180,000,000	1	181,000,000	1	182,600,000	1	185,000,000	10	903,600,000	DINAS PARIWISATA

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung jawab
PERTANIAN 3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				224,764,500		4,430,000,000		4,780,000,000		4,905,000,000		4,380,000,000		4,545,000,000		23,264,764,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB			46,235,500		1,800,000,000		1,925,000,000		2,000,000,000		2,100,000,000		2,250,000,000		10,121,235,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar Bibit Hortikultura																
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				0		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Kios	0		20		20		20		20		20		20		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				0		100,000,000		125,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		825,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				46,235,500		1,100,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		6,296,235,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan			98,493,500		1,630,000,000		1,585,000,000		1,630,000,000		965,000,000		1,000,000,000		6,908,493,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				0		100,000,000		300,000,000		300,000,000		100,000,000		100,000,000		900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				98,493,500		1,530,000,000		1,285,000,000		1,330,000,000		865,000,000		900,000,000		6,008,493,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			55,604,000		500,000,000		575,000,000		580,000,000		615,000,000		620,000,000		2,945,604,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				25,262,400		300,000,000		350,000,000		350,000,000		360,000,000		360,000,000		1,745,262,400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				30,341,600		110,000,000		130,000,000		130,000,000		150,000,000		150,000,000		700,341,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				0		90,000,000		95,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				0		150,000,000		170,000,000		170,000,000		175,000,000		200,000,000		865,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				0		150,000,000		170,000,000		170,000,000		175,000,000		200,000,000		865,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah tenaga penyuluh pertanian			24,431,500		350,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000		475,000,000		2,424,431,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase bina kelompok petani																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah tenaga penyuluh pertanian			24,431,500		350,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000		475,000,000		2,424,431,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																	Pertanian
		Persentase bina kelompok petani																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				24,431,500		350,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000		475,000,000		2,424,431,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PERDAGANGAN 3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	-	-	100	111,000,000	100	120,000,000	100	149,000,000	100	171,000,000	100	182,000,000	100	713,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lajutan dari Waralaba Luar Negeri																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang dibangun dan dipelihara	pasar	50	1,407,732,000	52	1,409,000,000	54	1,610,000,000	56	1,411,000,000	58	1,612,000,000	60	1,412,000,000	63	8,861,732,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi	%	-	-		415,000,000		430,000,000		448,000,000		459,000,000		468,000,000		2,220,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-													Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Perusahaan Eksportir	Perusahaan	-	-	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	5	400,000,000	25	1,600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti Daerah dan Nasional		0		4		4		4		4		4		4		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10	41,000,000	100	216,000,000	100	159,000,000	100	163,000,000	100	165,000,000	100	168,000,000	100	880,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	%	-	-		780,000,000		780,000,000		791,000,000		802,000,000		812,000,000		3,965,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
PERINDUSTRIAN																		Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	-	-		530,000,000		730,000,000		680,000,000		680,000,000		680,000,000		3,300,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri	industri	-	-		20,000,000		40,000,000		44,000,000		44,000,000		48,000,000		172,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi (SIINAS)																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SIINas	IKM	-	-	200	298,000,000	250	317,800,000	300	339,580,000	350	363,538,000	400	389,891,800	1,100	1,888,809,800	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																	Dinas Tenaga Kerja dan Perindag
Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Bagian Hukum																		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas		1	640,940,600	1	666,578,224	1	693,241,353	1	720,971,007	1	749,809,847	1	779,802,241	1	3,610,402,673	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dapat diselesaikan sesuai target			415,980,000		432,619,200		449,923,968		467,920,927		486,637,764		506,103,274		2,343,205,133	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum			164,258,600		170,828,944		177,662,102		184,768,586		192,159,329		199,845,702		925,264,663	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan jasa			14,802,000		15,394,080		16,009,843		16,650,237		17,316,246		18,008,896		83,379,303	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya			45,900,000		47,736,000		49,645,440		51,631,258		53,696,508		55,844,368		258,553,574	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				735,332,800		764,746,112		795,335,956		827,149,395		860,235,371		894,644,785.35		4,142,111,619	Bagian Hukum Setdako Binjai
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Produk Hukum Binjai sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku			735,332,800		764,746,112		795,335,956		827,149,395		860,235,371		894,644,785.35		4,142,111,619	Bagian Hukum Setdako Binjai

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Bagian Humas	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%		810,793,000	10000%	#VALUE!	10000%	#VALUE!	10000%	#VALUE!	10000%	#VALUE!	100	#VALUE!	100	14,881,515,666	Bagian Hubungan Masyarakat
4.01.01	Kegiatan Administrasi Keuangan				538,972,000		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		3,383,749,866	Bagian Hubungan Masyarakat
4.01.01.2.02	Kegiatan Administasi Umum				271,821,000		1,792,080,000		1,571,130,000		1,685,660,000		4,700,718,000		1,916,356,800		10,937,765,800	Bagian Hubungan Masyarakat
4.01.01.2.03	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur				0		112,000,000		112,000,000		112,000,000		112,000,000		112,000,000		560,000,000	Bagian Hubungan Masyarakat
4.01.04	Program Administrasi Umum		%		192,000,000	100	115,200,000	100	280,800,000	100	302,400,000	100	324,000,000	100	345,600,000	100	1,560,000,000	Bagian Hubungan Masyarakat
4.01.04.2.03	Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				192,000,000		115,200,000		280,800,000		302,400,000		324,000,000		345,600,000		1,560,000,000	Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Administrasi Pembangunan 4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran	persen	1	751,057,432	100%	1,034,597,646	100%	1,075,981,552	100%	1,119,020,814	100%	1,163,781,646	1	1,210,332,912	1	5,603,714,571	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				343,824,000		356,301,688		370,553,756		385,375,906		400,790,942		416,822,580		1,929,844,871	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		4,235,000		4,404,400		4,580,576		4,763,799		4,954,351		22,938,126	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				206,467,000		278,030,327		289,151,540		300,717,602		312,746,306		325,256,158		1,505,901,932	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		38,159,300		39,685,672		41,273,099		42,924,023		44,640,984		206,683,077	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				167,686,432		301,386,921		313,442,398		325,980,094		339,019,298		352,580,069		1,632,408,780	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33,080,000		56,484,410		58,743,786		61,093,538		63,537,279		66,078,771		305,937,784	Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Binjai
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD membentuk satuan pengendali Internal Pemerintah	Persen	100%	447,822,000	100%	1,189,573,223	100%	1,237,156,152	100%	1,286,642,398	100%	1,338,108,094	1	1,391,632,418	1	6,443,112,285	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				447,822,000		1,189,573,223		1,237,156,152		1,286,642,398		1,338,108,094		1,391,632,418		6,443,112,285	Bagian Adm. Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	Bagian Adm. Pembangunan
Bagian Perekonomian 4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran	persen	1	847,771,200	1	1,043,587,100	1	1,065,386,210	1	1,098,269,258	1	1,150,445,629	1	1,196,588,653	1	5,554,276,850	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		7,500,000	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				405,456,000		422,674,240		439,541,210		462,082,858		475,326,173		494,299,219		2,293,923,700	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		4,000,000		4,160,000		4,326,400		4,499,456		4,679,434		21,665,290	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		31,000,000		4,000,000		2,080,000		39,320,000		4,360,000		80,760,000	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				241,576,700		263,865,000		269,765,000		271,400,000		275,870,000		328,500,000		1,409,400,000	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		25,000,000		47,000,000		53,000,000		49,500,000		56,000,000		230,500,000	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169,538,500		190,148,500		190,400,000		192,250,000		194,350,000		194,500,000		961,648,500	Bagian Perekonomian
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31,200,000		105,399,360		109,020,000		111,630,000		110,080,000		112,750,000		548,879,360	Bagian Perekonomian

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Bagian Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	1	610,588,800	1	916,438,000	1	1,077,838,000	1	1,011,238,000	1	1,030,694,000	1	1,014,208,240	1	5,661,005,040	bagian organisasi
4.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen	0	-	1	65,000,000	3	118,000,000	2	101,400,000	3	120,856,000	2	104,370,240	11	509,626,240	bagian organisasi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	1	408,091,000	1	439,400,000	1	439,400,000	1	439,400,000	1	439,400,000	1	439,400,000	1	2,605,091,000	bagian organisasi
4.01.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		kegiatan	0	0	0	-	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	1	7,500,000	4	30,000,000	bagian organisasi
4.01.01.2.06	Aministrasi Umum Perangkat Daerah		tahun	1	116,227,800	1	262,038,000	1	262,038,000	1	262,038,000	1	262,038,000	1	262,038,000	1	1,426,417,800	bagian organisasi
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tahun	1	43,740,000	1	44,000,000	1	52,400,000	1	52,400,000	1	52,400,000	1	52,400,000	1	297,340,000	bagian organisasi
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		tahun	1	42,530,000	1	44,000,000	1	44,000,000	1	44,000,000	1	44,000,000	1	44,000,000	6	262,530,000	bagian organisasi
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		%	100%	242,469,600	100%	1,415,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	7,717,469,600	bagian organisasi
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi		%	100%	242,469,600	100%	1,415,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	1,515,000,000	100%	7,717,469,600	bagian organisasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				881,474,100		1,061,658,184		1,104,124,511		1,148,289,492		1,194,221,071		1,241,989,914		6,631,757,273	Bagian Kesra
4.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan			0		2,000,000		2,080,000		2,163,200		2,249,728		2,339,717		10,832,645	Bagian Kesra
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah			515,584,000		536,207,360		557,655,654		579,961,881		603,160,356		627,286,770		2,904,272,021	Bagian Kesra
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah					23,000,000		23,920,000		24,876,800		25,871,872		26,906,747		124,575,419	Bagian Kesra
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum kantor			238,538,400		335,005,056		348,405,258		362,341,469		376,835,127		391,908,532		2,053,033,843	Bagian Kesra
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Barang Milik Daerah					25,000,000		26,000,000		27,040,000		28,121,600		29,246,464		135,408,064	Bagian Kesra
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa kantor			121,991,700		134,871,368		140,266,223		145,876,872		151,711,946		157,780,424		852,498,533	Bagian Kesra
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah			5,360,000		5,574,400		5,797,376		6,029,271		6,270,442		6,521,260		35,552,748	Bagian Kesra
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100%	12,279,703,500.00	100%	12,770,891,640	100%	13,281,727,306	100%	13,812,996,398	100%	14,365,516,254	100%	14,940,136,904	100%	81,450,972,001	Bagian Kesra
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12,279,703,500.00		12,770,891,640		13,281,727,306		13,812,996,398		14,365,516,254		14,940,136,904		81,450,972,001	Bagian Kesra
Bagian Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	225,000,000	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1	10,418,726,529	1	10,938,730,855	1	11,485,667,398	1	12,059,950,768	1	12,662,948,307	1	13,296,095,722	1	60,443,393,050	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1	586,000,000	1	610,000,000	1	640,500,000	1	672,525,000	1	706,151,250	1	741,458,813	1	3,370,635,063	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1	14,401,893,500	1	15,075,000,000	1	15,828,750,000	1	16,620,187,500	1	17,451,196,875	1	18,323,756,719	1	83,298,891,094	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	2,978,598,000	1	5,127,527,900	1	5,383,904,295	1	5,653,099,510	1	5,935,754,485	1	6,232,542,209	1	28,332,828,399	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	5,968,737,149	1	6,267,174,006	1	6,580,532,707	1	6,909,559,342	1	7,255,037,309	1	7,617,789,175	1	34,630,092,539	BAGIAN UMUM

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	4,826,192,000	1	5,463,079,000	1	5,736,232,950	1	6,023,044,598	1	6,324,196,827	1	6,640,406,669	1	30,186,960,044	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,11	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			1	1,281,538,552	1	1,345,615,480	1	1,412,896,254	1	1,483,541,066	1	1,557,718,120	1	1,635,604,026	1	7,435,374,945	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,12	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH			1	744,955,600	1	770,000,000	1	808,500,000	1	848,925,000	1	891,371,250	1	935,939,813	1	4,254,736,063	BAGIAN UMUM
4 01 01 2,13	PENATAAN ORGANISASI			1	1,492,128,000	1	1,550,000,000	1	1,627,500,000	1	1,708,875,000	1	1,794,318,750	1	1,884,034,688	1	8,564,728,438	BAGIAN UMUM
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran			791,124,100		839,250,796		839,250,796		839,250,796		893,386,784		946,688,211		5,148,951,483	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		8,000,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000		10,000,000		42,000,000	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				374,444,500		414,571,196		414,571,196		414,571,196		414,571,196		420,571,196		2,453,300,480	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												24,000,000		24,000,000		48,000,000	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				250,227,600		250,227,600		250,227,600		250,227,600		250,227,600		287,529,027		1,538,667,027	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		-		-		-		30,135,988		30,135,988		60,271,976	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110,202,000		110,202,000		110,202,000		110,202,000		110,202,000		111,202,000		662,212,000	BAGIAN ADPEMJA
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56,250,000		56,250,000		56,250,000		56,250,000		56,250,000		63,250,000		344,500,000	BAGIAN ADPEMJA
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				412,043,300		412,043,300		462,095,064		514,148,898		514,148,898		517,148,898		2,831,628,358	BAGIAN ADPEMJA
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				332,866,500		332,866,500		382,918,264		382,918,264		382,918,264		385,918,264		2,200,406,056	BAGIAN ADPEMJA
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah				79,176,800		79,176,800		79,176,800		131,230,634		131,230,634		131,230,634		631,222,302	BAGIAN ADPEMJA
4.01..30	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Dalam Negeri	Tahun	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	79,176,800	1 Tahun	475,060,800	BAGIAN ADPEMJA
4.01..31	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama Luar Negeri	Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	60,000,000	BAGIAN ADPEMJA
4.01..32	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	Tahun	1 Tahun	0	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	32,053,834	1 Tahun	32,053,834	1 Tahun	32,053,834	1 Tahun	96,161,502	BAGIAN ADPEMJA
Sekretariat Dewan 4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	8,604,905,528	1	12,861,128,428	1	13,401,428,428	1	13,851,528,428	1	14,291,628,428	1	14,791,128,428	1	77,801,747,668	SETWAN
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			1	4,105,128,428	1	4,156,128,428	1	4,160,128,428	1	4,164,128,428	1	4,168,128,428	1	4,172,128,428	1	24,925,770,568	SETWAN
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			1	0	1	1,480,000,000	1	1,570,000,000	1	1,640,000,000	1	1,720,000,000	1	1,800,000,000	1	8,210,000,000	SETWAN

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			1	74,810,000	1	505,000,000	1	543,000,000	1	571,000,000	1	599,000,000	1	636,000,000	1	2,928,810,000	SETWAN
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			1	1,837,996,900	1	2,261,500,000	1	2,309,500,000	1	2,377,500,000	1	2,440,500,000	1	2,518,500,000	1	13,745,496,900	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	102,892,600	1	110,000,000	1	115,000,000	1	120,000,000	1	125,000,000	1	130,000,000	6	702,892,600	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	409,072,700	1	410,000,000	1	415,000,000	1	420,000,000	1	425,000,000	1	430,000,000	6	2,509,072,700	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Tahun	1	46,413,800	1	48,500,000	1	49,500,000	1	50,500,000	1	52,500,000	1	54,500,000	6	301,913,800	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Tahun	1	845,279,800	1	855,000,000	1	860,000,000	1	865,000,000	1	870,000,000	1	875,000,000	6	5,170,279,800	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	381,348,000	1	385,000,000	1	395,000,000	1	415,000,000	1	430,000,000	1	460,000,000	6	2,466,348,000	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tahun	1	52,990,000	1	53,000,000	1	55,000,000	1	57,000,000	1	58,000,000	1	59,000,000	6	334,990,000	SETWAN
4.02.01.2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	Tahun	1	0	1	150,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000	1	180,000,000	1	190,000,000	6	850,000,000	SETWAN
4.02.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	0	1	250,000,000	1	260,000,000	1	280,000,000	1	300,000,000	1	320,000,000	6	1,410,000,000	SETWAN
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1	741,600,000	1	2,130,000,000	1	2,380,000,000	1	2,540,000,000	1	2,715,000,000	1	2,875,000,000	1	13,381,600,000	SETWAN
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	867,669,400	1	883,500,000	1	913,800,000	1	978,900,000	1	1,014,000,000	1	1,094,500,000	1	5,752,369,400	SETWAN
4.02.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah			1	977,700,800	1	1,445,000,000	1	1,525,000,000	1	1,580,000,000	1	1,635,000,000	1	1,695,000,000	1	8,857,700,800	SETWAN
4.02.01.2.15	Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD			1	15,470,218,999	1	15,740,218,999	1	15,860,218,999	1	15,980,218,999	1	16,090,218,999	1	16,220,218,999	1	95,361,313,994	SETWAN
4.02.01.2.16	Layanan Administrasil DPRD			1	743,485,000	1	1,273,485,000	1	1,323,485,000	1	1,368,485,000	1	1,413,485,000	1	1,463,485,000	1	7,585,910,000	SETWAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusunnya Peraturan-peraturan Daerah		100%	20,286,374,700	100%	29,721,975,400	100%	32,099,475,400	100%	34,423,475,400	100%	36,702,475,400	100%	39,314,475,400	100%	192,548,251,700	SETWAN
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			100%	217,733,000	100%	1,610,000,000	100%	1,690,000,000	100%	1,765,000,000	100%	1,825,000,000	100%	1,870,000,000	100%	8,977,733,000	SETWAN
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			100%	-	100%	770,000,000	100%	815,000,000	100%	854,000,000	100%	883,000,000	100%	915,000,000	100%	4,237,000,000	SETWAN
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100%		100%	60,000,000	100%	62,000,000	100%	64,000,000	100%	66,000,000	100%	68,000,000	100%	320,000,000	SETWAN
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			100%	2,866,850,000	100%	3,817,500,000	100%	3,910,000,000	100%	4,060,000,000	100%	4,210,000,000	100%	4,305,000,000	100%	23,169,350,000	SETWAN
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100%	2,291,566,300	100%	4,400,000,000	100%	5,200,000,000	100%	5,950,000,000	100%	6,700,000,000	100%	7,550,000,000	100%	32,091,566,300	SETWAN
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			100%	-	100%	470,000,000	100%	500,000,000	100%	530,000,000	100%	545,000,000	100%	570,000,000	100%	2,615,000,000	SETWAN
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerjasama Daerah			100%	-	100%	400,000,000	100%	430,000,000	100%	460,000,000	100%	485,000,000	100%	500,000,000	100%	2,275,000,000	SETWAN
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			100%	14,910,225,400	100%	18,254,475,400	100%	19,554,475,400	100%	20,804,475,400	100%	22,054,475,400	100%	23,604,475,400	100%	119,182,602,400	SETWAN
Unsur Penunjang Urusa Bappeda	n Pemerintahan																	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5,817,960,441		6,598,253,563		7,102,683,705		6,679,291,053		7,376,214,055		7,076,382,618		40,650,785,435	Bappeda
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan jumlah dokumen dan laporan			16,422,900		14,654,520		15,240,701		15,850,329		17,235,702		17,925,130		97,329,282	Bappeda

Kode	Progrom Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ASN dan Non ASN yang melakukan kegiatan administrasi keuangan,Jumlah kegiatan dan dokumen			4,250,496,541		4,420,516,403		4,597,337,059		4,781,230,541		4,972,479,763		5,171,378,953		28,193,439,259	Bappeda
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan ASN yang Mendapatkan BIMTEK, Jumlah Dokumen dan Laporan, ASN yang mendapatkan pakaian dinas/olahraga			83,837,000		87,190,480		128,178,099		131,805,223		98,077,432		102,000,529		631,088,764	Bappeda
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan jumlah bahan, barang pendukung administrasi, surat kabar/bahan bacaan, rapat koordinasi dan logistik kantor			827,733,000		860,842,320		1,260,276,013		931,087,053		968,330,535		1,007,063,757		5,855,332,678	Bappeda
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jumlah kendaraan dinas dan mebel		0		550,000,000		410,000,000		100,000,000		572,000,000		-		1,632,000,000	Bappeda	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan gaji tenaga Non ASN, pembayaran rekening air, listrik, internet dan materai			345,449,000		359,266,960		373,637,638		388,583,144		404,126,470		420,291,528		2,291,354,741	Bappeda
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang dan aset			294,022,000		305,782,880		318,014,195		330,734,763		343,964,154		357,722,720		1,950,240,711	Bappeda
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperkadakan	1	0	3,659,417,200	0	3,348,750,816	0	3,482,700,849	0	3,935,576,163	1	3,823,288,279	0	3,920,355,387	2	22,170,088,693	Bappeda
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan jumlah dokumen, kegiatan dan laporan			2,534,339,900		2,178,670,424		2,265,817,241		2,670,017,211		2,507,106,969		2,551,526,824		14,707,478,569	Bappeda
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan update aplikasi dan website, jumlah bahan ekspose			475,998,100		495,038,024		514,839,545		535,433,127		556,850,452		579,124,470		3,157,283,717	Bappeda
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan jumlah dokumen dan laporan			649,079,200		675,042,368		702,044,063		730,125,825		759,330,858		789,704,093		4,305,326,407	Bappeda
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD			1,326,802,300		1,379,874,392		1,435,069,368		1,492,472,142		1,552,171,028		1,614,257,869		8,800,647,099	Bappeda
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan jumlah dokumen dan laporan			480,016,500		499,217,160		519,185,846		539,953,280		561,551,411		584,013,468		3,183,937,666	Bappeda
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan jumlah laporan			246,999,800		256,879,792		267,154,984		277,841,183		288,954,830		300,513,024		1,638,343,613	Bappeda
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan jumlah laporan			599,786,000		623,777,440		648,728,538		674,677,679		701,664,786		729,731,378		3,978,365,821	Bappeda
BPKAD 5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	%	100	18,610,134,070	100	21,710,988,897	100	22,749,163,946	100	24,190,085,307	100	25,378,649,054	100	27,030,121,935	100	121,159,009,139	BPKAD
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	6	67,500,000	6	70,875,000	6	74,418,750	6	78,139,688	6	82,046,672	30	372,980,109	BPKAD
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	16,526,438,998	100	18,204,300,818	100	19,117,265,859	100	20,076,154,152	100	21,083,289,359	100	22,141,114,077	100	100,622,124,264	BPKAD
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	0	0	2	20,000,000	2	21,000,000	2	22,050,000	2	23,152,500	2	24,310,125	10	110,512,625	BPKAD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	%	0	0	15	365,000,000	30	220,000,000	45	407,000,000	60	266,200,000	75	457,820,000	75	1,716,020,000	BPKAD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	905,682,200	100	1,079,929,020	100	1,187,921,922	100	1,306,714,114	100	1,437,385,526	100	1,581,124,078	100	6,593,074,660	BPKAD

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan	0	0	4	500,000,000	3	525,000,000	4	551,250,000	3	578,812,500	4	657,753,125	18	2,912,815,625	BPKAD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	742,005,872	100	964,280,159	100	1,046,124,375	100	1,135,423,823	100	1,232,887,565	100	1,339,293,750	100	5,718,009,673	BPKAD
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	%	100	436,007,000	100	509,978,900	100	560,976,790	100	617,074,469	100	678,781,916	100	746,660,107	100	3,113,472,182	BPKAD
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0.0196	16,310,896,700	0.0180	22,370,796,100	0.0170	23,512,303,802	0.0160	24,713,183,678	0.0150	25,976,634,016	0.0140	27,306,035,987	0.0140	123,878,953,583	BPKAD
		Opini BPK	Peringkat Penilaian Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Tahun	1	710,921,600	1	2,496,467,680	1	2,621,291,064	1	2,752,355,617	1	2,889,973,398	1	3,034,472,068	5	13,794,559,827	BPKAD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Tahun	1	149,998,300	1	1,594,997,790	1	1,674,747,680	1	1,758,485,063	1	1,846,409,317	1	1,938,729,782	5	8,813,369,632	BPKAD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	100	399,996,300	100	2,359,357,930	100	2,495,293,723	100	2,639,823,095	100	2,793,555,405	100	2,957,148,445	100	13,245,178,598	BPKAD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	%	100	15,000,000,000	100	15,850,000,000	100	16,647,500,000	100	17,485,375,000	100	18,365,693,750	100	19,290,633,438	100	87,639,202,188	BPKAD
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		%	100	49,980,500	100	69,972,700	100	73,471,335	100	77,144,902	100	81,002,147	100	85,052,254	100	386,643,338	BPKAD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD	%	3.30	640,000,000	3.50	1,320,000,000	3.75	1,386,000,000	4.00	1,455,300,000	4.25	1,528,065,000	4.50	1,604,468,250	4.50	7,293,833,250	BPKAD
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terkelolanya barang milik daerah	%	100	640,000,000	100	1,320,000,000	100	1,386,000,000	100	1,455,300,000	100	1,528,065,000	100	1,604,468,250	100	7,293,833,250	BPKAD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	%	12.90	2,497,912,600	13	5,825,167,650	13.50	6,162,565,443	13.70	6,521,447,066	14.00	6,903,348,106	14.40	7,309,927,066	14.40	32,722,455,331	BPKAD
		Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	2.00		3.00		4.00		5.00		6.00		7.00		7.00		BPKAD
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	%	100	2,497,912,600	100	5,825,167,650	100	6,162,565,443	100	6,521,447,066	100	6,903,348,106	100	7,309,927,066	100	32,722,455,331	BPKAD
Kepegawaian (BKD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	%	100	5,378,642,677	100	6,268,130,298	100	6,492,555,510	100	6,403,637,730	100	6,599,794,729	100	6,845,426,518	100	37,741,825,324	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evelauasi kinerja	%	0	0	100	13,855,000	100	14,609,200	100	15,373,568	100	9,000,000	100	9,500,000	100	94,869,830	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi keuangan	%	100	4,194,292,990	100	4,189,858,798	100	4,357,453,150	100	4,531,751,276	100	4,713,021,327	100	4,901,542,180	100	26,609,025,521	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi Kepegawaian	%	0	0	100	152,500,000	100	136,600,000	100	142,064,000	100	172,746,560	100	153,656,422	100	757,566,982	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	580,783,900	100	806,082,000	100	788,325,280	100	842,858,291	100	798,572,623	100	830,515,528	100	4,647,137,622	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang milik daerah	%	100	78,314,000	100	450,000,000	100	506,000,000	100	162,240,000	100	168,729,600	100	175,478,784	100	1,540,762,384	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang	%	100	269,941,787	100	311,093,500	100	323,537,240	100	336,478,730	100	349,937,879	100	363,935,394	100	1,954,924,529	Badan Kepegawaian Daerah
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah	set	100	255,310,000	100	344,741,000	100	366,030,640	100	372,871,866	100	387,786,740	100	410,798,210	100	2,137,538,456	Badan Kepegawaian Daerah
5.3.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan ASN	%	98.70	912,826,200	0.26	2,515,955,600	0.26	3,326,473,824	0.26	2,419,532,777	0.26	2,516,314,088	0.26	2,532,601,852	100	14,223,704,341	Badan Kepegawaian Daerah
5.3.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian Dan informasi kepegawaian ASN	Cakupan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN	%	100	684,669,300	100	1,479,649,200	100	1,275,315,168	100	1,326,327,775	100	1,379,380,886	100	1,350,191,321	100	7,495,533,650	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5.3.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan promosi ASN	%	100	95,426,400	100	126,426,400	100	131,483,456	100	136,742,794	100	142,212,506	100	147,901,006	100	780,192,562	Badan Kepegawaian Daerah
5.3.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan pengembangan Kompetensi ASN	%	100	105,638,200	100	600,000,000	100	1,613,000,000	100	637,520,000	100	663,020,800	100	689,541,632	100	4,308,720,632	Badan Kepegawaian Daerah
5.3.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Cakupan Penilaian dan evaluasi kinerja	%	100	27,092,300	100	309,880,000	100	306,675,200	100	318,942,208	100	331,699,896	100	344,967,892	100	1,639,257,496	Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	30.00	1,499,233,400	65,00	3,930,050,000	68.00	4,237,252,000	71,00	4,250,742,080	75,00	4,420,771,763	81,00	4,597,602,634	81,00	22,935,651,877	Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	%	-	-	360	1,370,000,000	400	1,424,800,000	440	1,481,792,000	480	1,541,063,680	520	1,602,706,227	2,200	7,420,361,907	Badan Kepegawaian Daerah
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional	%	375	1,499,233,400	365	2,560,050,000	406	2,812,452,000	445	2,768,950,080	485	2,879,708,083	525	2,994,896,407	2,601	15,515,289,970	Badan Kepegawaian Daerah
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)																		
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan			419,998,700		436,798,648		454,270,594		472,441,418		491,339,074		510,992,637		2,785,841,071	Bappeda
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan jumlah penelitian/kajian			419,998,700		436,798,648		454,270,594		472,441,418		491,339,074		510,992,637		2,785,841,071	Bappeda
Urusan Pengawasan Pemerintahan Inspektorat Daerah																		
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			9,236,278,507		12,071,125,147		11,834,179,473		12,296,770,876		12,777,865,935		13,278,204,797		62,258,146,228	Inspektorat
06.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	2	14,610,500	2	15,194,920	2	15,802,717	2	16,434,825	2	17,092,218	2	17,775,907	10	82,300,588	Inspektorat
06.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,254,924,639		8,595,121,625		8,938,926,490		9,296,483,549		9,668,342,891		10,055,076,607		46,553,951,161	Inspektorat
06.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				480,119,900		768,719,096		788,692,084		809,463,991		831,066,775		853,533,670		4,051,475,616	Inspektorat
06.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tahun	5	204,726,400	7	252,915,456	7	263,032,074	7	273,553,357	7	284,495,491	7	295,875,311	35	1,369,871,690	Inspektorat
06.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		1,716,001,100		1,075,626,240		1,118,651,290		1,163,397,341		1,209,933,235		6,283,609,206	Inspektorat
06.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tahun	2	120,065,068	4	304,867,671	4	317,062,378	4	329,744,873	4	342,934,668	4	356,652,054	20	1,651,261,643	Inspektorat
06.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tahun	4	161,832,000	7	418,305,280	7	435,037,491	7	452,438,991	7	470,536,550	7	489,358,013	35	2,265,676,325	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PRESENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN BPK	%	84	3,259,144,200	87	3,789,509,968	88	3,933,090,367	90	4,082,413,981	92	4,237,710,541	95	4,399,218,962	95	20,441,943,819	Inspektorat
		PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN APIP	%	87		90		91		93		95		98		98		Inspektorat
		PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA SANGAT BAIK	%	7		8		10		11		12		12		12		Inspektorat
		PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI LAPORAN KINERJA BAIK	%	60		61		62		64		65		68		68		Inspektorat
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		%	100	3,025,855,200	100	3,346,889,408	100	3,472,764,984	100	3,603,675,584	100	3,739,822,607	100	3,881,415,511	100	18,044,568,094	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		%	100	233,289,000	100	442,620,560	100	460,325,382	100	478,738,398	100	497,887,934	100	517,803,451	100	2,397,375,725	Inspektorat

Kode	Progaram Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	Level	3	446,636,500	3	664,501,960	3	691,082,038	3	718,725,320	3	747,474,333	3	777,373,306	3	3,599,156,957	Inspektorat
6.01.03.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				51,524,300		53,585,272		55,728,683		57,957,830		60,276,143		62,687,189		290,235,118	Inspektorat
6.01.03.02.02	Pendampingan dan Asistensi		%	100	395,112,200	100	610,916,688	100	635,353,356	100	660,767,490	100	687,198,189	100	714,686,117	100	3,308,921,839	Inspektorat
Unsur Wilayahahan Kecamatan Binjai Kota																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Kecamatan Binjai Kota
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Kota
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	Kecamatan Binjai Kota
7.01.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kepala lingkungan	orang	51	734,400,000	51	793,152,000	51	856,604,160	51	925,132,493	51	999,143,092	51	1,079,074,540	100%	4,653,106,285	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Kota
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum																	
7.01.04.2.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan	1	-	1	22,000,000	1	23,760,000	1	25,660,800	1	27,713,664	1	29,930,757	100%	129,065,221	Kecamatan Binjai Kota

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7,814,704,357	175	8,599,682,787	114	8,976,970,099	107	9,236,848,903	108	9,610,834,858	109	9,995,268,252	500	46,419,604,899	Kecamatan Binjai Timur
7 01 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2	3,040,900	7	9,080,000	7	9,443,200	7	9,820,928	7	10,213,765	7	10,622,316	35	49,180,209	Kecamatan Binjai Timur
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,021,658,065	77	7,305,524,387	77	7,597,845,363	77	7,901,759,177	77	8,217,829,544	77	8,546,542,726	385	39,569,501,197	Kecamatan Binjai Timur
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan SDM yang berkualitas			0	75	100,000,000	14	137,200,000	7	43,488,000	8	49,739,520	9	51,729,100		382,156,620	Kecamatan Binjai Timur
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum		6	227,035,200	7	373,000,000	7	387,920,000	7	403,436,800	7	419,574,272	7	436,357,243	35	2,020,288,315	Kecamatan Binjai Timur
7.01 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana penunjang urusan OPD			0	3	400,000,000	1	52,000,000	2	214,080,000	1	56,243,200	1	58,492,928	8	780,816,128	Kecamatan Binjai Timur
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	329,370,192	4	443,000,000	4	460,720,000	4	479,148,800	4	498,314,752	4	518,247,342	20	2,399,430,894	Kecamatan Binjai Timur
7.01 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset terpelihara dan terjamin kualitasnya			233,600,000	5	369,078,400	5	383,841,536	5	399,195,197	5	415,163,005	5	431,769,526	25	1,999,047,664	Kecamatan Binjai Timur
7 .01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			1,269,317,750	66	1,320,090,460	66	1,372,894,078	66	1,427,809,842	66	1,484,922,235	66	1,544,319,125	100%	7,150,035,740	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				947,700,000	65	985,608,000	65	1,025,032,320	65	1,066,033,613	65	1,108,674,957	65	1,153,021,956	325	5,338,370,846	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				321,617,750	1	334,482,460	1	347,861,758	1	361,776,229	1	376,247,278	1	391,297,169	5	1,811,664,894	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			73,710,500	136	170,000,000	136	176,800,000	136	183,872,000	136	191,226,880	136	198,875,955	680	920,774,835	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				73,710,500	136	170,000,000	136	176,800,000	136	183,872,000	136	191,226,880	136	198,875,955	680	920,774,835	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN		-	261,078,600	1	50,000,000	1	52,000,000	1	54,080,000	1	56,243,200	1	58,492,928	5	270,816,128	Kecamatan Binjai Timur
7. 01. 04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	261,078,600	1	50,000,000	1	52,000,000	1	54,080,000	1	56,243,200	1	58,492,928	5	270,816,128	Kecamatan Binjai Timur
Kecamatan Binjai Barat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			6,746,406,220		7,613,868,718		8,297,178,215		8,723,352,472		9,421,220,670		10,174,918,324		50,976,944,619	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				494,200		11,283,736		12,186,435		13,161,350		14,214,258		15,351,398		66,691,376	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,059,526,590		6,776,288,717		7,226,591,815		7,804,719,160		8,429,096,693		9,103,424,428		45,399,647,402	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				310,395,300		360,226,924		389,045,078		420,168,684		453,782,179		490,084,753		2,423,702,918	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		50,000,000		220,000,000		-		-		-		270,000,000	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				245,038,130		264,641,180		285,812,475		308,677,473		333,371,671		360,041,404		1,797,582,333	Kecamatan Binjai Barat
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,952,000		151,428,160		163,542,413		176,625,806		190,755,870		206,016,340		1,019,320,589	Kecamatan Binjai Barat

Kode	Progrom Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			954,074,200		1,030,400,136		1,112,832,147		1,201,858,719		1,298,007,416		1,401,848,009		6,999,020,627	Kecamatan Binjai Barat
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				619,200,000	-	668,736,000	-	722,234,880		780,013,670	-	842,414,764	-	909,807,945	100%	4,542,407,260	Kecamatan Binjai Barat
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				334,874,200	-	361,664,136	-	390,597,267	1 kegiatan	421,845,048	-	455,592,652	-	492,040,064	100%	2,456,613,367	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			94,563,200		102,128,256		110,298,516		119,122,398		128,652,190		138,944,365		693,708,925	Kecamatan Binjai Barat
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				94,563,200		102,128,256		110,298,516		119,122,398		128,652,190		138,944,365		693,708,925	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN			-		30,000,000		32,400,000		34,992,000		37,791,360		40,814,669		175,998,029	Kecamatan Binjai Barat
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum				-		30,000,000		32,400,000		34,992,000		37,791,360		40,814,669		175,998,029	
Kecamatan Binjai Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Utara
7.01.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	
7.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Utara
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				-	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	100%	-	Kecamatan Binjai Utara
7.01.02.2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				-	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	100%	-	Kecamatan Binjai Utara
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																Kecamatan Binjai Utara
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	Kecamatan Binjai Utara
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan																Kecamatan Binjai Utara
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum																	Kecamatan Binjai Utara

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Kecamatan Selatan 7.01.01	Binjai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	I Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan		54	8,576,517,001	77	9,700,507,721	76	10,384,748,339	76	11,215,528,206	76	12,112,770,462	76	13,081,792,099	381	56,495,346,827	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.01.2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	22,988,370	12	24,827,440	12	26,813,635	12	28,958,726	12	31,275,424	12	33,777,457	60	145,652,681	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27	7,640,094,791	27	8,236,889,574	27	8,895,840,740	27	9,607,507,999	27	10,376,108,639	27	11,206,197,331	135	48,322,544,284	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	12	38,400,000	12	41,472,000	12	44,789,760	12	48,372,941	12	52,242,776	60	225,277,477	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.06		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Paket	0	0	1	85,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	85,000,000	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tahun	1	10,260,000	1	11,080,800	1	11,967,264	1	12,924,645	1	13,958,617	1	15,075,306	5	65,006,632	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.08		Pengadaan Mebel	Tahun	0	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.01.2.09		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	120,050,640	1	129,654,691	1	140,027,066	1	151,229,232	1	163,327,570	1	176,393,776	5	760,632,336	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	13	1,156,742,400	13	1,249,281,792	13	1,349,224,335	13	1,457,162,282	13	1,573,735,265	13	1,699,634,086	65	7,329,037,760	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	882,300,000	12	952,884,000	12	1,029,114,720	12	1,111,443,898	12	1,200,359,409	12	1,296,388,162	60	5,590,190,189	KECAMATAN BINJAI SELATAN
7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tahun	1	274,442,400	1	296,397,792	1	320,109,615	1	345,718,385	1	373,375,855	1	403,245,924	5	1,738,847,571	KECAMATAN BINJAI SELATAN
07:01:03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	131	70,484,400	131	76,123,152	131	82,213,004	131	88,790,044	131	95,893,248	131	103,564,708	655	446,584,157	KECAMATAN BINJAI SELATAN
07.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Usulan	131	70,484,400	131	76,123,152	131	82,213,004	131	88,790,044	131	95,893,248	131	103,564,708	655	446,584,157	KECAMATAN BINJAI SELATAN
07:01:04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	2	259,178,800	2	279,913,104	2	302,306,152	2	326,490,645	2	352,609,896	2	380,818,688	10	1,642,138,485	KECAMATAN BINJAI SELATAN
07.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2	259,178,800	2	279,913,104	2	302,306,152	2	326,490,645	2	352,609,896	2	380,818,688	10	1,642,138,485	KECAMATAN BINJAI SELATAN
Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 01	Bangsa dan Politik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat layanan administrasi perkantoran	Persen	1	5,532,471,337	1	5,953,997,741	1	6,077,302,848	1	6,308,268,559	1	6,269,987,877	1	6,663,408,406	1	31,272,965,431	Bakesbang Pol Binjai
8 01 01.01		Persentase tingkat kondisi sarana dan prasarana aparatur	Persen	1		1		1		1		1		1		1		Bakesbang Pol Binjai
8 01 01.01		Persentase tingkat kehadiran aparatur	Persen	1		1		1		1		1		1		1		Bakesbang Pol Binjai
8 01 01.01		Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Persen	1		1		1		1		1		1		1		Bakesbang Pol Binjai
8 01 01.01		Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	Persen	1		1		1		1		1		1		1		Bakesbang Pol Binjai
8 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,749,800		23,379,792		24,314,982		25,287,580		25,525,262		27,000,090		125,507,706	Bakesbang Pol Binjai
8 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,829,895,205		5,039,091,013		5,240,654,653		5,151,280,839		5,369,290,991		5,584,062,630		26,384,380,126	Bakesbang Pol Binjai
8 01 01 2 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0		4,000,000		4,160,000		4,326,400		4,499,456		4,679,434		21,665,290	Bakesbang Pol Binjai
8 01 01 2 04		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,000,000		88,500,000		91,520,000		95,180,800		98,988,032		102,947,552		477,136,384	Bakesbang Pol Binjai
8 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			330,722,200		370,406,936		396,383,213		418,444,940		431,219,136		441,162,300		2,057,616,525	Bakesbang Pol Binjai

Kode	Progam Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (outcome) Dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kodisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Target	Rp	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	189,000,000	57,000,000	223,278,000	67,000,000	224,074,000	760,352,000	Bakesbang Pol Binjai							
8 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129,750,132	137,250,000	142,650,000	145,970,000	148,620,000	150,482,400	724,972,400	Bakesbang Pol Binjai							
8 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,354,000	102,370,000	120,620,000	244,500,000	124,845,000	129,000,000	721,335,000	Bakesbang Pol Binjai							
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100	148,968,600	100	230,980,000	100	241,500,000	100	262,280,000	100	278,410,000	100	275,200,000	500	1,288,370,000	Bakesbang Pol Binjai
8 01 02 1 01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				148,968,600		230,980,000		241,500,000		262,280,000		278,410,000		275,200,000		1,288,370,000	Bakesbang Pol Binjai
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Binjai dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	persen	100	711,230,500	100	658,000,000	100	686,800,000	100	510,375,338	100	750,903,358	100	749,391,064	500	3,355,469,760	Bakesbang Pol Binjai
8 01 03 1 01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik				711,230,500		658,000,000		686,800,000		510,375,338		750,903,358		749,391,064		3,355,469,760	Bakesbang Pol Binjai
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Binjai	persen	100	125,785,417	100	180,649,900	100	170,000,000	100	189,665,000	100	190,000,000	100	187,000,000	500	917,314,900	Bakesbang Pol Binjai
8 01 04 1 01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				125,785,417		180,649,900		170,000,000		189,665,000		190,000,000		187,000,000		917,314,900	Bakesbang Pol Binjai
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penanganan konflik berbasis sosial dan budaya	persen	100	200,000,000	100	170,439,146	100	178,719,170	100	159,900,000	100	168,850,000	100	198,500,000	500	876,408,316	Bakesbang Pol Binjai
8 01 05 1 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				200,000,000		170,439,146		178,719,170		159,900,000		168,850,000		198,500,000		876,408,316	Bakesbang Pol Binjai
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi	persen	100	210,112,500	100	213,530,427	100	222,001,122	100	277,361,006	100	256,350,000	100	274,604,468	500	1,243,847,023	Bakesbang Pol Binjai
8 01 06 1 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				210,112,500		213,530,427		222,001,122		277,361,006		256,350,000		274,604,468		1,243,847,023	Bakesbang Pol Binjai

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan pemerintah daerah dan program-program pembangunan secara nyata harus dapat terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian

atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai indikator untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 8.1. Indikator Makro Kota Binjai Tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,89	76,80	77,35	77,90	78,50	79,10	79,10
2	Persentase penduduk miskin	%	5,71	5,20	5,10	5,00	4,90	4,80	4,80
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,08	6,80	6,50	6,40	6,20	6,00	6,00
4	Inflasi	%	1,76	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89	1,89
5	Indeks Gini	Poin	0,324	0,314	0,313	0,313	0,312	0,312	0,312
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,83	5,50	5,54	5,60	5,64	5,70	5,70

**Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Binjai
Tahun 2021-2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	OPD	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Seluruh OPD	C	CC	B	B	BB	BB	BB
2	Opini BPK	Opini	BPKPAD Inspektorat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	BKD	29,98	65,00	68,00	71,00	75,00	81,00	81,00
4	Nilai Evaluasi LPPD	Poin	Bag. Pemerintahan Setdako	3,22	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40	3,40
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Dinas PUPR Dinas PKP	NA	77 (B)	80	83	86	89	89 (A)
6	Persentase kondisi jalan baik	Persen	Dinas PUPR	89,86	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
7	Persentase akses air minum kota	Persen	Dinas PUPR	28	35	40	50	55	60	60
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Dinas LH	47,1	54,00	59,00	61,00	64,00	68,70	68,70
9	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	Dinas Tenaker & Perindag Dinas Koperasi & UMKM Dinas Pariwisata	11,12	11,40	11,60	11,80	11,90	12,00	12,00
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen		29,20	29,70	30,00	30,20	30,50	30,70	30,70
11	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen		41,20	41,40	41,50	41,70	41,80	42,00	42,00
12	Indeks Pendidikan	Poin	Dinas Pendidikan	74.27	75.12	75.74	76.03	76.66	76,96	76,96

No	Indikator Sasaran	Satuan	OPD	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
			Dinas Perpustakaan							
13	Indeks Kesehatan	Poin	Dinas Kesehatan Dinas PP dan KB	80,58	81,35	81,62	82,02	82,28	82,68	82,68
14	Indeks Pengeluaran	Poin	Seluruh OPD	74.03	74.04	76.39	78.05	79.73	81.43	81.43

8.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Indikator kinerja perangkat daerah Pemerintah Kota Binjai tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut

**Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Binjai Tahun 2021-2026**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Jumlah Penduduk	Dalam Ribu.	291.852	300.656	303.699	306.699	309.766	312.863	312.863
2	PDRB Konstan 2010	Miliar Rp.	7.984,46	8.802,66	9.291,20	9.811,51	10.365,86	10.956,71	10.956,71
3	PDRB Konstan 2020	Miliar Rp.	0	12.239,83	12.974,22	13.687,80	14.454,32	15.270,98	16.141,43
4	PDRB Harga Berlaku	Miliar Rp.	11.759,07	12.975,09	13.695,21	14.462,14	15.279,25	16.150,16	16.150,16
5	Inflasi	%	1,76	1,14	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5
6	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,34	11,41	11,59	11,67	11,67
7	Harapan lama sekolah	Tahun	13,62	13,68	13,96	14,03	14,21	14,29	14,29
8	Umur harapan hidup	Tahun	72,38	72,88	73,05	73,31	73,48	73,74	73,74
9	Jumlah PMKS yang tertangani	%	20085	20300	20450	20600	20750	20900	20900
10	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Nilai skor Kabupaten Layak Anak	Skor	NA	320	322	324	326	328	328
12	Jumlah peningkatan koperasi sehat	Unit	NA	91,6	91,7	91,8	91,9	92	92
13	Jumlah usaha mikro naik kelas	Unit Usaha	NA	18220	18240	18260	18280	18300	18300
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan terhadap PDRB	%	3,02	3,07	3,09	3,11	3,13	3,15	3,15
15	Penguatan cadangan pangan	%	35,02	39	41,5	43	45	46,5	46,5
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54,00	59,00	61,00	64,00	68,70	68,70
17	Persentase Sampah Terkelola 3R	%	58	60	60	62	62	62	62

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
18	Persentase konflik keagamaan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	68	68
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B
Aspek Daya Saing Daerah									
1	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp. Juta	942	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
2	Jumlah Nilai Investasi PMA	US\$	0	20	30	40	50	60	60
3	Persentase pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita	%	50,81	50,91	50,95	50,98	51,05	51,11	51,11
Aspek Pelayanan Umum									
Layanan Umum Wajib Dasar									
1.	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar								
	1.01 Pendidikan								
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	11,16	11,34	11,41	11,59	11,67	11,67
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,62	13,68	13,96	14,03	14,21	14,29	14,29
3	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25,96	28,55	31,411	34,55	38,00	41,80	41,80
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,11	99,13	99,15	99,20	99,22	99,25	99,25
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,57	84,60	84,65	84,70	84,75	84,80	84,80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,37	99,60	99,62	99,62	99,64	99,66	99,66
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,43	99,45	99,47	99,49	99,50	99,55	99,55
8	Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	%	0,0025	0,0023	0,0022	0,0021	0,0020	0,0019	0,0019
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	0,0212	0,100	0,050	0,0025	0,0015	0,0003	0,0003
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	NA	99,82	99,84	99,86	99,88	99,90	99,90
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	99,66	99,68	99,70	99,72	99,74	99,74
12	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,61	99,70	99,80	99,90	99,95	100	100
13	Jumlah Muatan Lokal dalam Kurikulum (Seni Budaya)	Angka	0	3	3	3	3	3	3
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	3.530	3.532	3.535	3.538	3.540	3.545	3.545
15	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	83,27	84,27	85,50	86,60	87,70	88,07	88,07
16	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI)	%	01:16	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah (SMP/MTs)	%	01:15	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI)	%	01:16	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28	01:28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah (SMP/MTs)	%	01:16	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32
20	Persentase sekolah PAUD yang memiliki izin	%	NA	99,0	99,1	99,2	99,3	100	100
21	Persentase sekolah SD/MI yang memiliki izin	%	NA	99,4	99,5	99,6	99,8	100	100
22	Persentase sekolah SMP/MTs yang memiliki izin	%	NA	99,5	99,6	99,7	99,9	100	100
1.02 Kesehatan									
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,38	72,88	73,05	73,31	73,48	73,74	73,74
2	Persentase Masyarakat yang terlayani Unit Mobile Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	11/jlh pddk	11/jml penduduk	12/jml penduduk	12/jml penduduk	12/jml penduduk	12/jml penduduk	12/jml penduduk
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	8, 18, 42/jlh pddk	8, 18, 42/jml pddk	9, 17, 42/jml pddk	9, 17, 42/jml pddk	10, 16, 42/jml pddk	10, 16, 42/jml pddk	10, 16, 42/jml pddk
5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita	241/ jlh balita
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	4	3	3	2	2
7	Angka kelangsungan hidup bayi Per 1.000 kelahiran Hidup	Angka	996	996	996	997	997	998	998

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	4	4	4	3	2	1	1
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	1	1	1	1	1	0	0
10	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	21	20	19	18	17	16	16
11	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan Balita mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Barat sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada OrangTerduga TB sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS sesuai Standar	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan Balita Stunting/Gizi Buruk mendapat pelayanan kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
25	Prevalensi Balita Stunting/Gizi Buruk/gizi kurang	Persen (%)	3,3	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
26	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
27	Cakupan Bayi Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	Persen (%)	50	55	60	65	70	75	75
28	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	7	14	21	28	37	37	37

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
29	Persentase Keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	83	84	85	86	88	90	90
30	Persentase Keluarga menggunakan Air Bersih	Persen (%)	75	77	79	81	83	85	85
31	Persentase Keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	75	77	79	81	83	85	85
32	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	60	65	70	75	80	85	85
33	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
34	Cakupan Imunisasi Dasar Bayi 0-11 Bulan	Persen (%)	90	92	94	96	98	100	100
35	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Persen (%)	55	60	65	70	75	80	80
36	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	Angka	75	72	70	65	60	55	55
37	Cakupan penemuan dan tatalaksana kasus diare	Persen (%)	10	15	20	25	30	35	35
38	Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus Pneumonia Balita	Persen (%)	10	15	20	25	30	35	35
39	Persentase Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang diperiksa dan diobati	Persen (%)	20	25	30	35	40	45	45
40	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia < 15 tahun per 100.000	Angka	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
41	Cakupan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persen (%)	30	40	50	60	70	80	80
42	Persentase Kematian Jemaah Haji	Persen (%)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
43	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	Persen (%)	83	90	95	100	100	100	100
46	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
47	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
48	Cakupan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Persen (%)	25	45	65	85	95	100	100
49	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Puskesmas	8	8	8	8	8	8	8
50	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Terintegrasi	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
51	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	772	770	768	766	764	762	762
52	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	571	569	567	565	563	560	560

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
54	Persentase Tenaga Kesehatan memiliki Izin (SIP)	Persen (%)	90	92	94	96	98	100	100
55	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persen (%)	40	50	60	70	80	90	90
56	Persentase pengawasan peredaran obat dan makanan serta bahan berbahaya (%)	Persen (%)	95	96	97	98	99	100	100
57	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan memenuhi izin	Persen (%)	80	85	90	95	100	100	100
58	Persentase sarana produksi IRTP/PIRT yang memenuhi ketentuan dan memiliki sertifikat	Persen (%)	80	85	90	95	100	100	100
59	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Persen (%)	35	45	55	65	75	85	85
60	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen (%)	34	40	50	60	70	80	80
61	Persentase UKBM Aktif	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
62	Akreditasi Rumah Sakit	Skala	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
63	Kelas Rumah Sakit Daerah	Tipe	B	B	B	B	B	B	B
64	Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD	%	90	90	90	92	93	95	95
65	<i>Bed Occupancy Ratio</i> (BOR)	%	60	60	60	70	70	70	70
66	Rata-Rata lama pasien dirawat (AVLOS = <i>Average Lenght of Stay</i>)	Hari	6	6	6	5	4	3	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
67	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	Hari	1	1	1	1	1	1	1
68	Angka perputaran tempat tidur (BTO = <i>Bed Turn Over</i>)	Kali	40	40	40	40	40	40	40
69	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	%	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
70	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	%	<45	<45	<45	<45	<45	<45	<45
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	30	38	46	54	62	70	70
2	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestic	%	0	10	20	30	40	50	50
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	50	60	70	80	90	100	100
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	89,90	92	93	94	95	96	96
5	Persentase kesesuaian ruang	%	3	20	40	60	80	100	100
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Ketersediaan Rusunawa	Gedung	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	200	160	130	100	95	90	90
3	Cakupan perumahan yang terfasilitasi PSU (Prasarana, Saranan dan Utilitas Umum)	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	5
1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	Angka	2,11	2	2	2	2	2	2
2	Persentase penegakan Perda	%	3,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase gangguan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah pembinaan terhadap kelompok masyarakat (etnis) dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Jiwa	20	20	20	20	20	20	20
5	Jumlah pembinaan terhadap partai politik	Parpol	9	9	9	9	9	9	9
6	Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Angka	0	1	2	2	3	3	3
7	Jumlah ormas bidang ekonomi, sosial budaya yang mendapat pembinaan	Angka	0	1	2	2	3	3	3
8	Jumlah konflik sosial berlatarbelakang SARA yang tertangani	Angka	0	1	2	2	3	3	3
9	Persentase potensi Konflik yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah relawan peduli bencana alam	Angka	286	300	350	400	450	500	500
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (SPM)	%	64,96	68,50	70,50	72,50	74,50	75,50	75,50
12	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	00.25.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00	00.15.00
13	Pemetaan daerah rawan bencana terkini		1	1	2	2	2	2	2
14	Tersedianya peraturan daerah/perwal tentang penyelenggaraan penanganan bencana	Angka	0	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	poin	75	77	79	80	81	82	82
	1.06 Sosial								
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Angka	12425	12750	12900	13000	13150	13300	13300
2	Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan	Angka	5	5	5	5	6	6	6
3	Jumlah PMKS yang tertangani	Angka	20085	20300	20450	20600	20750	20900	20900
4	Jumlah kelompok masyarakat miskin yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	Angka	31	32	32	33	33	34	34
5	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang menerima jaminan sosial	Angka	29089	30020	30040	30060	30080	30100	30100
6	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan pada saat dan setelah bencana	Angka	1163	1200	1300	1400	1500	1600	1600
7	Kapasitas makam pahlawan yang tersedia dan terpelihara dengan baik	Angka	1	1	1	1	1	1	1
2.	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar								
	2.01 Tenaga Kerja								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,08	6,8	6,5	6,4	6,2	6	6
2	Ketersediaan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	NA	0	60	72	80	88	100	100
3	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Angka	20	30	40	50	60	70	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Produktivitas tenaga kerja	Angka	67,6	72,89	75,74	78,7	82,96	85,92	85,92
5	Tersedianya BLK		0	0	1	1	1	1	1
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	361	250	280	300	320	350	1730
7	Jumlah kasus perselisihan industrial yang diselesaikan	Angka	12	10	9	8	7	6	6
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	10	20	20	20	20	20	20
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,57	90,6	90,7	90,7	90,8	90,8	90,8
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	70,4	70,6	70,7	70,8	70,9	71	71
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	5	5	5
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	43	43	43	43	43	43	43
5	Rasio KDRT	%	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
6	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah lembaga layanan anak yang terfasilitasi	Angka	4	4	4	5	5	5	5
8	Up dating data terpilah gender dan anak (SIGA)	%	85	86	86	87	87	87	87
9	Indeks Kota Layak Anak	Poin	NA	320	322	324	326	328	328

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
2.03 Pangan									
1	Persentase ketersediaan pangan utama	%	35,02	39	41,5	43	45	46,5	46,5
2	Tersedianya peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	dokumen	0	1	1	1	1	1	1
3	Persentase cadangan pangan	%	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersedianya informasi harga pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	1
5	neraca bahan makanan	buku	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah kebutuhan pangan local	Ton	26463,86	29175,23	30064,44	30953,65	31842,86	32732,08	32732,08
7	Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan	laporan	1	1	1	1	1	1	1
2.04 Pertanahan									
2.05 Lingkungan Hidup									
1	Tersedia dokumen RPPLH			Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Indeks Kualitas Air	Poin	74	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
3	Indeks Kualitas Udara	Poin	82,9	85	85,5	86	86,5	87	87
4	Indeks Tutupan Lahan	Poin	0	0	0	0	0	0	0
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5
6	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	%	10	12	13	14	15	16	16
7	Persentase pengawasan dokumen AMDAL yang diterbitkan	%	50	55	60	60	65	65	65

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Angka	n.a.	2	3	3	3	3	3
9	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Angka	n.a.	1	1	1	2	2	2
10	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan	Angka	1	1	1	1	1	1	1
11	Persentase sampah yang tertangani	%	58%	60	60	62	62	62	62
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1.000 penduduk	%	NA	100	100	100	100	100	100
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik/nasional	%	98,97	99,15	99,25	99,35	99,45	99,55	99,55
2	Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)	%	97,75	97,99	98,05	98,15	98,25	98,35	98,35
3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	39,22	43,55	45,75	47,85	49,95	51,15	51,15
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	18,36	22,45	24,65	26,75	28,85	30,05	30,05
5	Persentase pasangan berakte nikah	%	73,175	77,55	80,65	82,75	85,85	87,95	87,95
6	Jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Angka	0	2	3	4	5	6	7
7	Tersedianya profil kependudukan terkini		NA	49	49	49	49	49	49

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	Poin	75	77	79	80	81	82	82
	2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,21	2,16	2,16	2,1	2,1	2,1
3	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	47	47	47	45	45	45	45
4	Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MCPR)	%	68,2	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82	71,82
5	Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,05	8,6	8,4	7,3	7,1	7	7
6	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	Tahun	23	20	18	16	16	15	15
7	Rata - rata usia kawin pertama wanita	Tahun	22	22	22,1	22,1	22,5	22,5	22,5
8	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Tahun	55,00	57,00	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	2.09 Perhubungan								
1	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	Unit	242	293	322	354	389	428	2052
2	Panjang marka jalan	m	0	0	0	1.211.237	0	1.211.237	2.422.474
3	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	Angka	3110	3093	3163	3268	3408	3511	19446
4	Jumlah titik kemacetan	Angka	5	5	5	4	3	2	2
	2.10 Komunikasi dan Informatika								
1	Jumlah titik hot spot di ruang publik	Angka	50	53	55	58	60	62	62
2	Jumlah informasi publik yang terpublikasi	Angka	633	873	1000	1135	1285	1285	1285

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	%	20	30	37,5	50	62,5	75	75
4	Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai	Angka	12775	16425	18250	19345	20075	20805	20805
5	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola	Angka	8	10	11	12	13	14	14
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Jumlah usaha mikro dan kecil (IKK OPD)	Unit	18.181	18220	18240	18260	18280	18300	18300
2	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat	Jiwa	60	62	63	64	65	66	66
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	91,46	91,6	91,7	91,8	91,9	92	92
4	Jumlah KSP/USP baru	Unit	2	2	3	3	4	4	4
5	Persentase KSP/USP aktif	%	36,77	44	48	52	56	60	60
2.12 Penanaman Modal									
1	Nilai investasi PMA	PMA (milyar RP)	941,74	1000	1050	1100	1150	1150	1150
2	Nilai investasi PMDN	PMDN (milyar Rp)	0	20	30	40	50	60	60
3	Jumlah perizinan	Unit	3275	3500	3640	3780	3930	4085	22320
4	Lama waktu pengurusan perizinan melalui OSS	Hari	7	7	7	6	6	5	5
5	Lama waktu pengurusan perizinan melalui e-perizinan	Hari	21	21	21	20	20	19	19
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Poin	81,75	85	87	88	89	90	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan	Angka	80	82	85	87	88	90	90
8	Rasio daya serap tenaga kerja PMA/PMDN	%	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	4	4
9	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Angka	-	1	1	1	1	1	1
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Unit	25	25	25	26	26	28	28
2	Jumlah pemuda berprestasi Internasional/Nasional/Provinsi	Jiwa	-	-	1	1	1	1	1
3	Jumlah cabang olah raga yang aktif	Angka	30	30	30	30	30	30	30
4	Jumlah prestasi cabang olah raga	Angka	5	5	5	5	6	6	6
5	Jumlah pelatih yang bersertifikat	Jiwa	28	28	30	32	34	34	34
6	Jumlah atlet berprestasi	Jiwa	22	22	22	23	24	24	24
7	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dikelola	Unit	3	3	3	3	3	3	3
8	Jumlah kwaran yang aktif	Unit	5	5	5	5	5	5	5
2.14 Statistik									
2.15 Persandian									
2.16 Kebudayaan									
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Angka	0	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	1	2	2
3	Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan	Objek	67	67	67	67	67	68	68

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Jumlah dokumentasi sejarah	Angka	0	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	55	55	55	55	55	56	56
2.17 Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	2601	4000	5000	6000	7000	8000	8000
2	Jumlah perpustakaan daerah	Unit	20	30	30	30	40	50	50
3	<i>Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan</i>	<i>orang</i>	0	0	45	45	45	45	45
4	Jumlah koleksi/naskah kuno yang terdigitalisasi	Unit	0	0	1	1	1	1	1
2.18 Kearsipan									
1	Jumlah arsip yang terdigitalisasi	Unit	0	10000	5000	0	0	0	15000
2	Tersedia SOP penggunaan arsip		0	0	5	0	5	0	5
3. Urusan Pilihan									
3.01 Kelautan dan Perikanan									
1	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	4573	4750	4900	5050	5200	5300	5300
3.02 Pariwisata									
1	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi pengembangannya (IKK)	Unit	-	7	7	7	7	7	7
2	Rata-rata lama tamu menginap	Malam	1-2	1-2	1-2	1-2	2-3	2-3	2-3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB (IKU)	%	5,57	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,1
4	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	Unit	8	8	10	11	12	13	13
5	Jumlah Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Unit	2	2	4	5	6	7	7
3.03 Pertanian									
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	3,02	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,35
2	Bibit Hortikultura	Ha		839	955	1072	1183	1290	5340
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2,8	2,3	2,15	2	1,85	1,7	1,7
4	Tingkat Produktivitas Rumah Potong Hewan	%	100	100	100	100	100	100	100
3.04 Kehutanan									
3.05 Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.06 Perdagangan									
1	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	Unit	-	1	1	1	1	1	1
2	Tingkat Inflasi	%	1,76	1,81	1,83	1,85	1,87	1,89	1,89
3	Jumlah perusahaan pengekspor	Usaha	-	52	54	56	58	60	60
4	Persentase UTP yang ditera ulang	%	-	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah pameran yang diikuti <i>Nasional dan</i>	Unit	0	4	4	4	4	4	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	<i>Lokal</i>								
6	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	%	-1,02	3,55	3,75	4,05	4,35	4,55	4,55
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	29,17	30,01	30,03	30,05	30,7	30,9	30,9
3.07 Perindustrian									
1	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SIINas	Unit		200	250	300	350	400	400
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB	%	11,12	11,15	11,16	11,17	11,18	11,19	11,19
3	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi (sertifikat halal, ISO, SPP-IRT, SNI, HACCP, pengemasan)	Unit	0	3	3	3	3	3	15
4	Tersedianya RIPIK	<i>Dokumen</i>	0	0	1	0	0	0	1
5	Tersedianya Sentra Industri Potensial/Unggulan		0	1	1	1	1	1	5
3.08 Transmigrasi									
4. Penunjang Urusan									
4.01 Pembinaan dan Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,95	86	88	90	92	94	94
2	Persentase tindak lanjut temuan APIP	%							
3	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Nilai Evaluasi AKIP	Skala	CC	CC	CC	B	B	B	B

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja sangat baik	%	6,06	8	9	10	11	12	12
6	Persentase OPD yang memiliki laporan kinerja baik	%	57,57	61	62	64	65	68	68
4.02 Perencanaan									
1	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan	Unit	2	2	2	2	3	2	11
2	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	0	100	100	100	100	100	100
4.03 Keuangan									
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,161	0,0180	0,0170	0,0160	0,0150	0,0140	0,0140
2	Opini BPK	Skala	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase PAD terhadap APBD	%	12,73	13	13,50	13,70	14,00	14,40	14,40
4	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah	%	3,05	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
4.04 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65,00	68,00	71,00	75,00	81,00	81,00
2	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jiwa	55	60	62	65	67	70	70
3	Tersedianya sistem manajemen kinerja ASN (SKP)	Angka	0	0	0	1	1	1	1
4	Rasio ketersediaan dan kebutuhan ASN	%	9,77	11	11,5	12	12,5	13	13

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	53,78	57	60	63	65	67	67
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	%	0	3	4	5	6	7	7
7	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	%	0	3	4	5	6	7	7
8	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	0,05	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,35
9	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi	%	53,78	60,34	66,93	72,20	77,47	82,74	82,74
10	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
11	jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
4.05 Penelitian dan Pengembangan									
1	Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan	Angka	-	2	2	2	2	2	2
4.06 Pendukung DPRD									
1	Tersedianya Rencana Kerja DPRD	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perda inisiatif DPRD	Perda	-	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah pokok pikiran DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah laporan kinerja DPRD	Angka	-	1	1	1	1	1	1

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam Pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Binjai tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2019 - 2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023. RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggarannya.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, top-down bottom-up, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan di Kota Binjai, untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Untuk terciptanya koordinasi, keberlanjutan program, efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Binjai agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021 - 2026, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

9.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kota Binjai ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum serta prioritas program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
3. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Binjai akan menjadi kota yang lebih maju, berbudaya dan religius.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021 - 2026 ini disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BINJAI,

AMIR HAMZAH

Tabel 1.1 Keselarasan antara Tujuan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan Tujuan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025		RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026
No	Tujuan	Tujuan
1	Keunggulan daya saing Kota Binjai khususnya sektor jasa, perdagangan, industri untuk mencapai Kota Binjai yang lebih makmur dan sejahtera	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
2	Terwujudnya predikat Kota Binjai sebagai Kota Pendidikan,	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
3	Terwujudnya Kota Binjai yang memiliki <i>good governance</i> yang berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum,	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat
4	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, tertib, bersatu dan damai	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
5	Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
6	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, nyaman dan ramah lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
7	Terwujudnya masyarakat Kota Binjai yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
8	Terwujudnya Kota Binjai yang sehat	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
9	Terwujudnya tata ruang wilayah Kota Binjai yang serasi baik dengan RTRW maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Kota Binjai,	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

4	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, tertib, bersatu dan damai	1	Rendahnya tingkat kriminalitas.	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan
		2	Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.						Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	2	Indek Kesehatan
		3	Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram, dan damai.						Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3	Indeks Pengeluaran
		4	Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.								
		5	Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.								
		6	Kota yang ramah anak								
5	Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum yang berkualitas dan berkeadilan	1	Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terwujudnya transportasi massal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik, air bersih, drainase terpadu, IPLT yang handal dan efisien sesuai kebutuhan.	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	Persentase kondisi jalan baik
		2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.							2	Persentase akses air minum kota
		3	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh.					2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		4	Tersedianya ruang publik (Ruang Terbuka Hijau) yang nyaman dan indah sebagai hutan kota, taman kota, olah raga, tempat bermain dan rekreasi keluarga.								
6	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, nyaman dan ramah lingkungan	1	Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	Persentase kondisi jalan baik
		2	Rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara.							2	Persentase akses air minum kota
		3	Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.					2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		4	Terlindunginya kawasan DAS dari kegiatan budidaya								
7	Terwujudnya masyarakat Kota Binjai yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1	Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1	Indeks Pendidikan
		2	Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.								
		3	Penanaman budaya mutu (<i>quality conciousness</i>) pada masyarakat baik diperkotaan maupun di pedesaan serta nilai-nilai yang menghargai prestasi kerja dan kegiatan produktif, efisien, serta memiliki kemampuan jauh kedepan.								

8	Terwujudnya Kota Binjai yang sehat	1	Pembangunan kesehatan mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan termasuk dorongan bagi investasi swasta untuk membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang semakin memadai kebutuhan.	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	1	Indek Kesehatan
		2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup.								
		3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan terhadap kesehatan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan menerapkan JAMKESMAS dan JAMPERSAL, .								
		4	Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera (Program KB) hingga 100 %.								
9	Terwujudnya tata ruang wilayah Kota Binjai yang serasi baik dengan RTRW maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Kota Binjai,	1	Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama erat antara wilayah-wilayah terkait baik dilingkungan Kota Binjai maupun dengan wilayah-wilayah berbatasan, sehingga diperoleh tata ruang wilayah yang harmonis baik antar wilayah kabupaten/ kota maupun antar sektor-sektor	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	Persentase kondisi jalan baik
		2	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang yang telah disusun meliputi pengendalian perijinan secara akurat dan taat azas.							2	Persentase akses air minum kota
		3	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta sosialisasi kepada semua pihak terkait untuk memudahkan implementasi dan pengendaliannya dan terhindarnya pemerintah daerah yang berbatasan dari konflik-konflik yang mengganggu kerjasama.					2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 1.3 Keselarasan antara RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Binjai Tahun 2005-2025				RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026			
No	Tujuan	No	Sasaran	No	Arah Kebijakan	No	Tujuan
1	Keunggulan daya saing Kota Binjai khususnya sektor jasa, perdagangan, industri untuk mencapai Kota Binjai yang lebih makmur dan sejahtera	1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkesinambungan (berkisar 7,0-8,2 % pertahun), menguatnya struktur ekonomi serta semakin meningkatnya daya saing global produk-produk daerah Kota Binjai. Pendapatan per kapita masyarakat pada akhir tahun 2025 akan mencapai US \$ 7.000, tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin kurang dari 5 %.	1	Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar	1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
		2	Dalam sisi kualitas SDM Masyarakat Kota Binjai meningkat secara berkesinambungan sehingga pada akhir tahun 2025, sebanyak 30 % penduduk berada pada kelompok IPM tinggi (>80,0), sebanyak 65 % berada pada kelompok IPM moderat atas (66<IPM ≤80), kelompok IPM moderat bawah (50<IPM≤66) tidak lebih dari 5 %. Secara agregat, seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara yang mempunyai IPM > 75	2	Penguasaan dan pengelolaan obyek wisata oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD Kota Binjai serta memberikan jaminan keamanan bagi dunia kepariwisataan Kota Binjai.	1	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
		3	Terbangunnya struktur perekonomian kota yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat dalam aktivitas perekonomian sehingga menjadi awal pondasi keunggulan kompetitif. Sektor jasa dan perdagangan, industri, hotel dan restoran diharapkan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menjadi keunggulan kompetitif kota Binjai.	3	Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.	2	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai
						1	Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM
						2	Meningkatkan peranan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam perekonomian
						3	Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
2	Terwujudnya predikat Kota Binjai sebagai Kota Pendidikan.	1	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan mewujudkan Pendidikan Tinggi negeri di Kota Binjai.	1	Mewujudkan predikat sebagai Kota Pelajar yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kemajuan dan perkembangan kota ke depan	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar
						1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
						1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
						1	Peningkatan keterampilan dan inovasi pelaku UMKM
						2	Peningkatan keahlian pengelola koperasi dan lembaga pembiayaan mikro
						3	Penguatan budaya produktif dan etos kerja dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja
							Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
							Penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar
							Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan job matching yang tepat
							Peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan Perguruan Tinggi
							Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan

4	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, tertib, bersatu dan damai	1	Rendahnya tingkat kriminalitas.	1	Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti, pembinaan SDM, pemenuhan kebutuhan sarana utama, serta membangun pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme jaring pengaman masyarakat yang berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1	Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan	1	Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan
		2	Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.	2	Pembangunan yang merata dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat akan mendukung meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan juga akan mengurangi gangguan keamanan serta menghapuskan potensi konflik sosial.	1							
		3	Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram, dan damai.	1	Gangguan keamanan dalam bentuk berbagai variasi kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang								
		4	Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.	2	Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mendeteksi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap								
		5	Pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan termasuk hak-hak demokratis yang melekat pada perempuan.	4	Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum beserta institusi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat								
		6	Kota yang ramah anak										
5	Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum yang berkualitas dan berkeadilan	1	Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terwujudnya transportasi massal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik, air bersih, drainase terpadu, IPLT yang handal dan efisien sesuai kebutuhan.	1	Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan (Growth Centre) baru yang menyebar di pinggiran kota dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di pinggiran kota sehingga perkembangan kota tidak terkonsentrasi di pinggiran kota	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	1	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat Penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
				2	Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana, seperti IPAL, IPLT, Perluasan pelayanan air bersih, sistem persampahan yang dapat meningkatkan pelayanan publik					2	Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	2	Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
				3	Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan; menciptakan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; menyelaraskan semua peraturan daerah baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkenan; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya;			1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
		2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.	1	Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.					2	Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	2	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan

		3 Terpenuhihnya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh. 4 Tersedianya ruang publik (Ruang Terbuka Hijau) yang nyaman dan indah sebagai hutan kota, taman kota, olah raga, tempat bermain dan rekreasi keluarga.	1 Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien; 1 Pembangunan taman-taman kota dan Ruang Terbuka Hijau baik yang dikelola publik maupun yang dikelola oleh swasta.				3 Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) 4 Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup 5 Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan	3 Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH 4 Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana 5 Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
6	Terwujudnya Kota Binjai yang aman, nyaman dan ramah lingkungan	1 Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat. 2 Rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara. 3 Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 4 Terlindunginya kawasan DAS dari kegiatan budidaya	1 Mitigasi bencana banjir sesuai dengan kondisi geografis Kota Binjai. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda dengan perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam 1 Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang 1 Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Karena itu untuk mewujudkan Kota Binjai yang nyaman dan ramah lingkungan maka lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kota. 1 Menjaga dan melestarikan sumber daya air (kawasan DAS). Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; 2 Menjadikan kawasan sepadan sungai (wilayah DAS) menjadi kawasan lindung	1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 2 Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup 3 Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) 4 Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup	1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura 2 Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 3 Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH 4 Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana	
7	Terwujudnya masyarakat Kota Binjai yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1 Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek. 2 Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari. 3 Penanaman budaya mutu (quality conciousness) pada masyarakat baik diperkotaan maupun di pedesaan serta nilai-nilai yang menghargai prestasi kerja dan kegiatan produktif, efisien, serta memiliki kemampuan jauh kedepan	1 Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. 1 Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa	1 Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1 Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan	1 Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan	

8	Terwujudnya Kota Binjai yang sehat	1	Pembangunan kesehatan mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya peningkatan sumberdaya manusia kesehatan, pengadaan peralatan kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan termasuk dorongan bagi investasi swasta untuk membangun pusat-pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan jumlah yang semakin memadai kebutuhan.	2	Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk	1	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk Kota Binjai Mendorong pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
		2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup.							2	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	2	Peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah
		3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan terhadap kesehatan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan menerapkan JAMKESMAS dan JAMPERSAL, .	3	Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, dan pada upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit. Pendidikan masyarakat untuk menjalankan hidup sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen terkait dengan masalah kesehatan					3	Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	3	Pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit serta pemantauan implementasinya secara berkala Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi
		4	Meningkatnya jumlah keluarga sejahtera (Program KB) hingga 100 %.										
9	Terwujudnya tata ruang wilayah Kota Binjai yang serasi baik dengan RTRW maupun dengan kepentingan pembangunan sektoral Kota Binjai.	1	Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama erat antara wilayah-wilayah terkait baik dilingkungan Kota Binjai maupun dengan wilayah-wilayah berbatasan, sehingga diperoleh tata ruang wilayah yang harmonis baik antar wilayah kabupaten/ kota maupun antar sektor-sektor	1	Pembinaan penataan ruang melalui kerjasama internal dan dengan wilayah-wilayah berbatasan, sehingga diperoleh tata ruang wilayah yang harmonis	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura
		2	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang yang telah disusun meliputi pengendalian perijinan secara akurat dan taat azas.	1	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang yang telah disusun meliputi pengendalian perijinan secara akurat dan taat azas.					2	Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	2	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
				2	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam.					3	Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	3	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH
		3	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta sosialisasi kepada semua pihak terkait untuk memudahkan implementasi dan pengendaliannya dan terhindarnya pemerintah daerah yang berbatasan dari konflik-konflik yang mengganggu kerjasama.	1	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual serta sosialisasi kepada semua pihak terkait					4	Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup	4	Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
										5	Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan	5	Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat

Tabel 1.4 Keselarasan antara tujuan pembangunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan tujuan penataan ruang RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

	RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026	RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040
	Tujuan pembangunan	Tujuan Penataan Ruang
1	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan Kota Binjai sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri yang berkelanjutan.
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	
4	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	

Tabel 1.5 Keselarasan antara program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan indikasi program utama RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

No	Indikasi Program utama Perwujudan Struktur Ruang RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040	No	Program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2040
A.1	Perwujudan pusat-pusat kegiatan		
A.1.1	Pengembangan dan penataan pusat pelayanan Kota/PPK		
1	Pengembangan kawasan TOD stasiun kereta api	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	Pentaaan Pusat Pasar regional (Pasar Taviv)	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3	Penataan kawasan pertokoan pusat kota	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
4	Penataan kawasan perdagangan jasa	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
5	Peremajaan dan revitalisasi kawasan pusat kota	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
A.1.2	Pengembangan dan penataan sub pusat pelayanan kota/SPPK		
1	Penataan SPPK kebun lada	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	Penataan SPPK tungguro	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3	Penataan SPPK suka ramai	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
4	Penataan SPPK pujidadi	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
A.1.3	Pengembangan dan penataan pusat lingkungan/PL	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
A.2	Perwujudan sistem prasarana		
A.2.1	Pengembangan sistem jaringan transportasi darat		
1	Peningkatan kapasitas jalan gatot subroto (JKP2) menjadi koneksi KPPN Bukit Lawang dan KPPN Tangkahan		
2	pembangunan jaringan jalan arteri sekunder menuju rencana kawasan industri dan jalan danau makalona	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3	penataan persimpangan jalan lingkak luar binjai dan jalan soekarno Hatta	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
4	Pembangunan fly over jalan lingkak luar binjai-jalan arteri sekunder menuju rencana kawasan industri	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
5	peningkatan jalan arteri sekunder meliputi : a. jalan sei bingai	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	b. jalan sei bahorok	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	c. jalan gunung bendahara	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
6	Peningkatan jalan arteri sekunder meliputi jalan waru-jalan amir hamzah	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
7	pembangunan jalan arteri sekunder meliputi pembangunan ruas jalan yang menghubungkan jalan mt haryono-simpang jalan gumba-jalan waru	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

8	peningkatan ruas jalan bejo muna-jalan resmi	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
9	peningkatan dan pembangunan ruas jalan kolektor sekunder meiputi jalan gunung galunggung-jalan gunung singgalang, yang merupakan akses ke kawasan pariwisata sungai bingai dan kawasan pariwisata pertanian	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
10	peningkatan dan pembangunan jalan inspeksi sungi bingai, sungai mencirim dan sungai bangkatan	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
11	pembangunan terminal penumpang tipe B terpadu	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
12	pembangunan terminal barang kawasan peruntukan industri	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
13	pembangunan terminal penumpang tipe C	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
14	pemeliharaan dan peningkatan jalur rel kereta api elevated dan trek ganda lintas medan-binjai	1	Kewenangan Pusat dan Provinsi
15	reaktivasi jalur kerete api binjai -besitang	1	Kewenangan Pusat dan Provinsi
16	pembangunan jalur light rail transit mebidang rute medan-binjai	1	Kewenangan Pusat dan Provinsi
17	penataan bangunan kawasan stasiun kereta api	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
A.2.2	Pengembangan sistem jaringan energi		
1	pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	1	Kementerian ESDM/PT. Pertamina (persero)/PT. Perusahaan Gas Negara (Tbk)
2	pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	1	PT. PLN (Persero)
A.2.3	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi		
1	pengembangan jaringan kabel tembaga	1	PT.Telkom Indonesia, Provider Telekomunikasi
2	pengembangan jaringan optik	1	PT.Telkom Indonesia, Provider Telekomunikasi
3	pengembangan jaringan bergerak seluler	1	Provider Telekomunikasi
A.2.4	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air		
1	Program perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan dan jaringan irigasi pada DI namu sira-sira	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2	Program perwujudan sietm pengendalian daya rusak, meliputi pembangunan sistem jaringan drainase dan pembangunan kolam retensi	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

3	Program perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan intake dan jaringan air baku untuk air bersih pada sungai bingai	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
A.2.5	Pengembangan Infrastruktur perkotaan		
1	Pengembangan SPAM Kota	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2	Peningkatan Pelayanan SPAM Kota	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3	Pengembangan SPAM Regional	1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
4	pengembangan IPAL	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5	Pembangunan IPAL kawasan industri	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
6	pengembangan sistem air limbah komunal dan kawasan	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7	peningkatan pelayanan sistem jaringan persampahan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
8	peningkatan dan pengelolaan tempat penampungan sementara/TPS	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
9	peningkatan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir/TPA metode sanitary landfill	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
10	pengelolaan kawasan TPA	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
11	Peningkatan dan pengelolaan sistem jaringan drainase primer dan sekunder	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
12	peningkatan dan pengelolaan sistem jaringan drainase tersier	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
13	Penyusunan rencana induk drainase	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
14	pengembangan dan penataan sistem jaringan pejalan kaki	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Tabel 1.6 Keselarasan antara program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan indikasi program utama RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040

No	Indikasi Program utama Perwujudan Pola Ruang RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040	No	Program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2040
B	Perwujudan Pola Ruang		
B.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan lindung		
B.1.1	Pengelolaan kawasan perlindungan setempat		
1	pengendalian sempadan sungai bingai, sungai mencirim, sungai bangkatan, sungai diski dan sungai kerupuk	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan rung terbuka hijau		
1	Pengembangan RTH taman lingkungan (taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan)	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	Pengembangan RTH taman kota	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
3	Pengembangan RTH pemakaman	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
4	Pengembangan RTH jalur hijau jalan	1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
5	Pengembangan RTH sempadan jalur kereta api	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
6	Pengembangan RTH jaringan transmisi tenaga listrik	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
7	Pengembangan RTH hutan kota	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
8	Pengembangan RTH sempadan sungai	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.1.3	Pengelolaan kawasan cagar budaya	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
B.2	Perwujudan kawasan peruntukan budidaya		
B.2.1	Pengelolaan kawasan pertanian		
1	pengembangan pertanian tanaman pangan	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	Penetapan KP2B	1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
B.2.2	Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri		
1	Pembangunan kawasan peruntukan industri	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		13	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		14	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

		15	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		16	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
		17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)
		18	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
		19	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		20	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		21	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3	Penetapan Kawasan industri	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		5	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
B.2.3	Pengembangan kawasan pariwisata		
1	Pengembangan wisata alam	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2	Pengembangan wisata budaya	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
B.2.4	Pengembangan kawasan permukiman		
1	Pengembangan kawasan perumahan	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
		3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		4	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
		10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		11	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
3	Pengembangan kawasan perkantoran	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		9	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

4	Pengembangan kawasan transportasi	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
5	Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
6	Penetapan tempat evakuasi bencana	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
7	Pengembangan kawasan sektor informal	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
8	Pengelolaan kawasan pertahanan keamanan	1	Kementerian pertahanan/TNI/POLRI
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		8	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		9	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
9	Program Penyusunan/penetapan perda tentang rencana Detail Tata ruang dan peraturan zonasi	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

TABEL 1.7 MATRIK PENELAAHAN INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD

RPJMD										
BAB II	BAB IV		BAB V			BAB VI				
			Visi : “MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”							
KONDISI UMUM DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS	Misi	Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan	Indikator Program Pembangunan	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Kota Binjai adalah salah satu Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±28 meter diatas permukaan laut, terletak sekitar 20 km dari ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Luas wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,23 km ² .	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat Indikator tujuan 1 : Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Indikator sasaran 1.1 : (1)Opini BPK (2) Indeks Profesionalitas ASN (3) Nilai Evaluasi LPPD	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan profesional	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik yang Dikelola Cakupan Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	
						Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik	Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik			Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan ASN
							Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai			
						Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan ASN	
										Meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

						Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan berintegritas		
					Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan
						Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan		
						Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien		
						Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien		
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan infrastruktur	Infrastruktur	Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat : Indikator tujuan : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik indikator sasarn 1 : (1) Persentase kondisi jalan baik (2) Persentase akses air minum kota	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih		
						Penyediaan sistem pengelolaan air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat		

Belum optimalnya kualitas lingkungan	Lingkungan hidup	
--------------------------------------	------------------	--

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sasaran 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui bank sampah, <i>Green Office</i> , Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kualitas Udara
	Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan		
	Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu		Kesesuaian Peruntukan Lahan/ Ruang
		Perwujudan optimalisasi area sempadan jalan dan sungai serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dalam rangka peningkatan RTH		
		Penyediaan pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH		
	Meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup	Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA		
		Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana		

					Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan	Perwujudan pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat		
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatkan daya saing industri kreatif	Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
			Indikator tujuan : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB	Indikator Sasaran 2 : (1)Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) (2)Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) (3)Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)		Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “ Taman Teknologi Kota Binjai”	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
						Peningkatan sarana pembiayaan pengembangan UMKM	ROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang Dibangun dan Dipelihara
						Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kotribusi Sektor Industri terhadap PDRB
						Peningkatan wirausaha baru melalui kerjasama pengembangan inkubator bisnis		
Pengangguran yang masih cukup tinggi	Pengangguran		Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja	Penguatan kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja (RTK)
			Indikator sasaran 3 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
					Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian	Membangun dan mengembangkan sentra industri dalam skala pelayanan lokal dan regional	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri)

						Mempercepat dan memfasilitasi terwujudnya Sentra Industri Binjai		
Masih belum optimalnya daya saing pendidikan	Pendidikan dan kebudayaan	Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Indikator sasan 1 : Indeks Pendidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar	Pemantapan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/SMP
					Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV
						Peningkatan jumlah sertifikasi bagi pendidik	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
						Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya sebagai upaya menumbuhkan budaya lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Seni Budaya dan Tradisi yang Dilestarikan
					Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Penambahan koleksi buku dan peningkatan kualitas di layanan baca	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestariakn
					Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan	Peningkatan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) melalui pengadaan fasilitas peningkatan kerukunan umat beragama		
						Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan umat beragama		
						Peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan		

Belum optimalnya derajat Kesehatan masyarakat	Kesehatan
Jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi	Kemiskinan

Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan Indikator sasan 2 : Indek Kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk Kota Binjai Mendorong pola hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Bayi
---	--	--	---	---

							Penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja berbasis teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pasar Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan <i>job matching</i> yang tepat Peningkatan keahlian/kompetensi masyarakat melalui penyediaan Perguruan Tinggi		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

LAMPIRAN

Tabel 7.3 Dukungan Anggaran Dalam Rangka Sinergitas Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

[illegible]

P-8	Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2,515,955,600	3,326,473,824	2,419,532,777	2,516,314,088	2,532,601,852	Badan Kepegawaian Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	539,156,843,061	594,308,208,573	622,835,813,372	633,150,526,263	670,756,993,138	Semua OPD

Tabel 8. 4
Penyelarasan Target Indikator Makro Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

No	Indikator Pembangunan	RPJMD Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Sumatera Utara					Indikator Pembangunan	RPJMD Kota Binjai				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	5,50	5,60	5,70	-	Pertumbuhan Ekonomi	-	-	5,50	5,54	5,60
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	7,95	7,25	6,80	6,00	Persentase Kemiskinan	8,43	8,04	7,70	7,39	-	Persentase Penduduk Miskin	-	-	5,20	5,10	5,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50	5,30	5,20	4,70	4,40	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,45	5,40	5,35	5,30	-	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	6,80	6,50	6,40
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	-	74,60-84,23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,67	72,22	72,77	73,32	-	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	76,80	77,35	77,90
5	Rasio Gini	-	-	-	-	0,360-0,474	Indeks Gini	0,32	0,315	0,31	0,30	-	Indeks Gini	-	-	0,314	0,313	0,313
6	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-	-	27,30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,70	70,70	71,70	72,70	-	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	54,00	59,00	61,00

Tabel 8. 5
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai terhadap Program Prioritas Nasional

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024									RPJMD Kota Binjai											
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024								Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	2020	2021	2022	2023	2024
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)							(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)	(xxi)	(xxii)	(xxiii)	
I.	PN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas																				
1.	PP	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan	Proporsi EBT dalam Bauran Energi Nasional * (Persen)	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5							-							
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68.8	69.2	70.3														
2.	PP	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water prod.) (USS/m3)	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4							-							
3.	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90.4	91.6	92.8	94	95.2														
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100														
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57							PERTANIAN							
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under-nourishment/PoU)	6.2	5.8	5.5	5.2	5							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan utama (persen)						
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5.2	4.8	4.5	4.2	4							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan (persen)						
4.	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23.4	24.2	25.1	26	26.9							-							
																	KELAUTAN PERIKANAN					
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	64	67	72	76	80							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi ikan di kota Binjai (kelompok)	NA	20	20	20	20	
5.	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3.6	3.7	3.8	3.9	4							PEMUDA DAN OLAAHRAGA							
														PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha pemula	NA	80	100	100	100		

			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65							-						
															KOPERASI DAN UMKM						
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5							Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	JUMLAH KSP/USP BARU	NA	100	100	100	100
														PERTANIAN							
6.	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3.7	3.7	3.9	4	4.1							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	NA				
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8							-						
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5	5.5	6.5	7.5	8.1							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	NA				
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4.8	5	5.2	5.3	5.5							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	JUMLAH DESTINASI PARIWISATA YANG DIFASILITASI PENGEMBANGANNYA	NA	7	7	7	7
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1189-1214	1314-1333	1439-1452	1564-1570	1689							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (kegiatan)	NA	10	10	10	10
															PENANAMAN MODAL						
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5.6	6.2	6.9	7.8	8.4							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	NA	960	1020	1080	1140
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0	2.7-3.0							-						
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3.0-3.3	3.1-3.5	3.2-3.7	3.2-4.0	3.5-4.5							-						
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14.2	14.6	15	15.3	15.7							-						
Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19.7	20.3	20.9	21.4	22							-									
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13	13.5	14	14.5	15							-									
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21							-									
														PERDAGANGAN							
7.	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3.9	4.2	4.8	5.5	6.2						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	NA					
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0.3	1	3	7.5	15													
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27.5	30													

8.	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4																
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23.2	22.2	21.1	20.1	18																
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	NA	34-39	NA	29-34	NA																
II.	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																						
1.	PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78.7	-	-	-	98								SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	NA					
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2.26	2.24	2.21	2.19	2.1								PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	NA	2.21	2.21	2.16	2.16		
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65.2	-	-	-	80								SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang Menerima Jaminan Sosial	NA					
2.	PP	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7	-	-	-	98								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Kelompok Masyarakat Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	NA						
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65.2	-	-	-	80																
3.	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183								KESEHATAN								
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20.6	19.5	18.6	17.6	16								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angkat Kematian Ibu (AKI)	NA	74	74	73	73		
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11	10									Angka Kematian Bayi (AKB)	NA	4	4	4	3		
																	Cakupan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (persen)	NA	100	100	100	100		
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4								KELUARGA BERENCANA								
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.6	8.3	8	7.7	7.4								PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif	NA	68.15	68.3	69.51	70.1		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18									Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	NA	9.05	8.6	8.4	7.3		
																	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR) (rasio)	NA	23	20	18	16		
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24.1	21.1	18.4	16	14								KESEHATAN								
																PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Stunting	NA	3.3	3.3	3.2	3.2		

			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8.1	7.8	7.5	7.3	7								UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18									Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV/AIDS sesuai Standar (persen)	NA	100	100	100	100	
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190									Cakupan Pelayanan Kesehatan pada OrangTerduga TB sesuai Standar	NA	100	100	100	100	
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405															
			Insidensi hepatitis B (persen)	1.68	1.54	1.39	1.24	1.09															
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9.1	9	8.9	8.8	8.7															
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8															
			Persentase tekanan darah tinggi	34.14	34.14	34.14	34.14	34.14															
																	KESEHATAN						
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna (Jlh)	NA	1	1	2	2
																	RS UMUM DAERAH						
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit	NA	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
4.	PP	PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA ; NA ; NA	399.1 ; 388.7 ; 400.4	NA ; NA ; NA	NA ; NA ; NA	399.7 ; 392.3 ; 406.2															
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA ; NA ; NA	34.4 ; 46.6 ; 49	NA ; NA ; NA	NA ; NA ; NA	35.6 ; 47.4 ; 51															
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Lama Sekolah	NA	11.08	11.16	11.34	11.41
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13.41	13.6	13.79	13.97	14.16										Harapan Lama Sekolah	NA	13.64	13.65	13.66	13.68
																PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
5.	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak (persen	NA	100	100	100	100

			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki: 61.7 Per: 62	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun								-						
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.211	91.277	91.278	91.334	91.386								PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IPG (skor)	NA	90.57	90.57	90.58	90.59
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.244	73.5	73.74	73.965	74.177														
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.512	53.134	53.756	54.378	55														
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9.4	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun														
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67														
6.	PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9				40								SOSIAL						
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25.6				50								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penduduk miskin (persen)	NA	5.4	5.2	5.1	5
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630,000	1,600,000	1,850,000	1,350,000	1,100,000								-						
			Bidang tanah yang didistribusi	750,000				7,750,000								-						
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6,286,087				56,286,087								-						
7.	PP	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1								TENAGA KERJA						
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University													PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	NA	7	6.8	6.5	6.4
			a. Top 200	0	0	0	0	1														
			b. Top 300	1	1	1	1	2														
			c. Top 500	2	2	2	2	3														
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50									Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	10	10	10	10
III.	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																				
																KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						

1.	PP	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER														Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	NA	100	100	100	100						
																	KEBUDAYAAN											
2.	PP	MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA														PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA (kegiatan)	NA	61	18	59	42						
																	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
3.	PP	MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA UNTUK MENGUKUHKAN TOLERANSI, KERUKUNAN DAN HARMONI SOSIAL	Indeks Kerukunan Umat Beragama													Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penanganan konflik berbasis sosial dan budaya	NA	100	100	100	100						
																	PERPUSTAKAAN											
4.	PP	PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER														PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan daerah	NA	1	1	1	1						
IV.	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR																										
																						PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1.	PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92.84	93.44	94	94.63	95								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layah Huni dan kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani (thn)	NA	NA	1	1	1						

Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82.35	83.5	84.8	86	87										-							
Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55.46	56.85	58.32	59.62	60																	
Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3.05	3.1	3.3	3.6	4																	
															PEKERJAAN UMUM							
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78.1	79.43	82.07	86.03	90										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	NA	10	10	10	10	
Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5.95	4.46	2.98	1.49	0										-							
															PEKERJAAN UMUM							
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92	73.7	75.28	77.64	80										Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	NA	100	100	100	100	
															LINGKUNGAN HIDUP							
															PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Yang Tertangani	NA	100	100	100	100	
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8	93.8	95.9	97.9	100										-							
															PEKERJAAN UMUM							
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7.3	8.4	10	12.2	15										Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	NA	30	10	10	10	
Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.501	55.181	57.059	58.104	58.498										-							
															PERTANIAN							
Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (meter)	NA	0	0	50	50	
Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45,229.16	115,942.70	116,142.70	116,342.70	116,342.70										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (dokumen)	NA	1	1	1	1	
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20										-							
Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4.27	11.43	11.43	11.43	11.43																	

			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65								PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat untuk parkir serta menyebrang jalan (persen)	NA	100	100	100	100
2.	PP	INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)					2500														
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)					7							-							
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)					90														
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)					7635														
3.	PP	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)					7								PERHUBUNGAN						
																PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Memudahkan Masyarakat yang Menggunakan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota (persen)	NA	100	100	100	100
																	Mengetahui perkembangan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota (persen)	NA	100	100	100	100
4.	PP	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100														
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408							-							
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4.71	4.92	5.36	5.91	6.07														
5.	PP	TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8								KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72.6	74.2	79.2	80.7	82.3								PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah informasi publik yang terpublikasi					
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97.5	98	98.5	99	100								PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola					
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75.7								-						
V.	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM																				
1.	PP	PENINGKATAN KUALITAS	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5								LINGKUNGAN HIDUP						

		LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA)	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	NA	74	53.81	53.86	53.91
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58.5	59	59.5	60	60.5							-	Indeks kualitas udara	NA	82.9	84.1	84.15	84.2
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5							-	Indeks Tutupan Lahan	NA				
2.	PP	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0.34	0.59	0.81	1	1.15							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persente Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (persen)	NA	100	100	100	100
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4.5	4	3.5	3							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (persen)	NA	100	100	100	100
															SOSIAL						
															PROGRAM PENANGAN BENCANA	Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan pada Saat dan Setelah Bencana	NA	NA	NA	NA	NA
															PERTANIAN						
															PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tertanggulangnya Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	NA				
															KESEHATAN						
															PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan akibat bencana/atau potensi bencana (persen)	NA	100	100	100	100
3.	PP	PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11	12.5	12.8	12.8	13.2													
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45.8	50.7	53.1	57.2	58.3													
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8.5	9	9.3	9.4	9.4							-						

[illegible]